



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam melakukan tata kelola yang baik (*good governance*) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah diberikan hak dan wewenang di dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya dan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui peraturan bupati. Kemudian setelah APBD ini dilaksanakan maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, atas kegiatan keuangan dan kekayaan atau sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dan/atau standar akuntansi keuangan pemerintah. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, perubahan-perubahan pada anggaran dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 untuk menampung dana insentif yang masuk setelah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 telah disahkan.



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan sistem penginputan data diinput oleh masing-masing Perangkat Daerah, dimulai dari penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan sampai dengan penginputan pertanggungjawaban. Data yang dihimpun untuk penyusunan laporan keuangan adalah data yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, dengan asumsi didukung oleh dokumen dan lampiran yang lengkap yang ada pada Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab VII tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Pada akhirnya, informasi pada neraca tentunya belum sempurna atau lengkap sesuai dengan acuan yang ada. Tetapi tujuan utama adalah untuk melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat dari peraturan yang berlaku. Dalam perjalanannya, apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui "*adjustment*" atau jurnal koreksi dan pada akhirnya semua pencatatan ada "*audit trail*". Sehingga, dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I (Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
22. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023; dan
23. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.
24. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Berbasis AkruaI Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah
 - 4.5. Asumsi Dasar Akuntansi
 - 4.6. Pengguna Laporan Keuangan
- Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 - 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Arus Kas
 - 5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
Pengungkapan Informasi yang Tidak Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
 - 6.1. Gambaran Umum Kabupaten Parigi Moutong
 - 6.2. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca (*subsequent events*)
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong, yaitu (minimal) :

1. Tingkat kemiskinan Tahun 2023 sebesar 14,91%;
2. Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2023 sebesar 2,11%;
3. *Gini Ratio* sebesar 0,279%;
4. Indeks pembangunan manusia Tahun 2023 sebesar 67,11%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,71%;
6. Tingkat inflasi sebesar 0,90%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp21.652.130,00.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Parigi Moutong

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan/Penur unan
1.	Kab/Kota (%)	15,28*	14,63* 8	14,91**	1,91
2.	Kab/Kota (Ribuan Orang)	76.790*	74.600*	77.180*	3,46
3.	Provinsi (%)	13,00**	12,33**	12,41**	0,65
4.	Nasional (%)	10,19***	9,57***	9,36***	(2,19)
5.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-
6.	Peringkat Nasional	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-

Sumber Dokumen: *BPS Kab.Parigi Moutong, **BPS Prov.Sulteng dan ***BPS RI

Persentase penduduk miskin Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2021 sebesar 15,28% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 14,63% namun pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 14,91%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Parigi Moutong masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin Provinsi Tahun 2022 sebesar 12,33% dan Tahun 2023 sebesar 12,41% atau naik sebesar 0,08%. Persentase penduduk miskin secara nasional terjadi penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 9,57% dan Tahun 2023 sebesar 9,36% atau turun sebesar 0,21%.

Tabel 2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan/Penurunan
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	3,26**	3,84**	2,61**	(32,03)
2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,43**	2,41**	2,12**	(12,03)
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67***	1,56***	1,53***	(1,92)
4.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-
5.	Peringkat Nasional	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-

Sumber Dokumen: **BPS Prov.Sulteng dan ***BPS RI

Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata warga miskinnya hanya mampu belanja Rp10.000,00 sehari, misalnya, lebih dalam kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja Rp30.000,00 sehari. Kabupaten Parigi Moutong dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,61% pada Tahun 2023 turun sebesar 1,23% dari Tahun 2022 menjadi sebesar 3,84%. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam hal pengeluaran masyarakat miskin terhadap Garis Kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp495.623,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Tabel 2.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan/Penurunan
1.	Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,95**	1,37**	0,64**	(53,28)
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,64**	0,68**	0,54**	(20,59)
3.	Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42***	0,38***	0,38***	0,00
4.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	
5.	Peringkat Nasional	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	

Sumber Dokumen: **BPS Prov.Sulteng dan ***BPS RI

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kabupaten Parigi Moutong berada pada angka 0,64 poin pada Tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin tidak terlalu jauh secara signifikan.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong TPT Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 adalah sebesar 2,11%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Parigi Moutong

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan/Penurunan
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,97*	1,71*	2,11**	23,39
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,75**	3,00**	2,95**	(1,67)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49***	5,45***	5,32***	(2,39)
4.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-
5.	Peringkat Nasional	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-

Sumber Dokumen: *BPS Kab.Parigi Moutong, **BPS Prov.Sulteng dan ***BPS RI

TPT di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 menurut data BPS Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan angka sebesar 2,11%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,71% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023.



Namun TPT Kabupaten Parigi Moutong masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%. Untuk rata-rata pertumbuhan TPT sejak Tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan dan pada Tahun 2023 naik sebesar 0,4%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 adalah sebesar 0,298 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. *Gini Ratio* Kabupaten Parigi Moutong

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan/Penurunan
1.	Tingkat Kab/Kota	0,287**	0,279**	0,298**	7,17
2.	Tingkat Provinsi	0,316**	0,308**	0,304**	0,00
3.	Tingkat Nasional	0,409***	0,313***	0,388***	25,56
4.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-
5.	Peringkat Nasional	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-

Sumber Dokumen: **BPS Prov.Sulteng dan ***BPS RI

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Parigi Moutong yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,298 angka ini meningkat jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yang sebesar 0,279 poin dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi dan Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan United Nations Development Programme (UNDP) indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Indonesia realisasi pencapaian IPM Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 adalah sebesar 69,06 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan/Penurunan
1.	Kabupaten/Kota	67,84*	68,29*	69,06*	1,13
2.	Provinsi	70,54**	71,01**	71,66**	0,92
3.	Indonesia/Nasional	73,16***	73,77***	74,39***	0,84
4.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-
5.	Peringkat Nasional	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-

Sumber Dokumen: *BPS Kab. Parigi Moutong, **BPS Prov.Sulteng dan ***BPS RI

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Parigi Moutong adalah sebesar 69,06 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 68,29 poin mengalami kenaikan sebesar 0,77 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, dan/atau Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota

No	Uraian	*Kabupaten/Kota (Juta)			**Provinsi (Miliar)	Nasional (Miliar)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	11.616.816,30	12.047.381,60	Belum Publikasi	193.181,36	12.301.394,00
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,67*	3,71*	3,50*	11,91**	5,05***
3.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi
4.	Peringkat Nasional (Indonesia)	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi

Sumber Dokumen: *BPS Kab. Parigi Moutong, **BPS Prov.Sulteng dan ***BPS RI



Selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan sebesar 0,96%. Sedangkan Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong sebesar 3,71%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi :

1. **Inflasi ringan** (*Creeping inflation*), yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. **Inflasi Sedang** (*Galloping inflation*), yaitu inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, laju inflasi berkisar antara 10-30% setahun;
3. **Inflasi Berat** (*High inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
4. **Hiperinflasi** (*Hyper inflation*), yaitu inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023 bahwa tingkat inflasi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023 diperkirakan 0,63%-1,62% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

Tabel 2.8. Tingkat Inflasi Kabupaten Parigi Moutong

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-rata
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	N/A	4,89*	4,52*	(0,36)
2.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,20**	5,96**	2,04**	0,46
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87***	5,51***	2,61***	0,51
4.	Peringkat Provinsi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-
5.	Peringkat Nasional	Belum Publikasi	Belum Publikasi	Belum Publikasi	-

Sumber Dokumen: *BPS Kab. Parigi Moutong, **BPS Prov. Sulteng dan ***BPS RI

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menggunakan inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu dan Luwuk/Banggai. Tingkat inflasi di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 4,52%, sedangkan tingkat inflasi Tahun 2022 adalah sebesar 4,89% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Selama Tahun 2023, inflasi Kabupaten Parigi Moutong berhasil dikendalikan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai kebijakan antara lain operasi pasar, pasar murah dan lain-lain di tengah kenaikan BBM.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

2.1.7

Struktur Perekonomian Kabupaten Parigi Moutong

Struktur perekonomian Kabupaten Parigi Moutong dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	7.833,53	8.497,94	9.178,14
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.027,26	1.130,00	1.230,58
3.	Industri Pengolahan	456,64	482,71	498,20
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,08	2,28	2,48
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	12,34	13,14	13,86
6.	Konstruksi	2.372,44	2.560,57	2.750,27
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	2.793,04	3.045,00	3.324,08
8.	Transportasi & Pergudangan	818,06	1.010,00	1.102,76
9.	Penyediaan Akomodasi	126,70	140,01	153,52
10.	Informasi dan Komunikasi	502,77	549,17	586,97
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	176,78	190,28	196,02
12.	Real Estate	185,68	202,64	230,53
13.	Jasa Perusahaan	33,64	36,92	40,40
14.	Administrasi Pemerintahan	1.002,29	1.041,66	1.102,42
15.	Jasa Pendidikan	622,39	650,53	688,50
16.	Jasa Kesehatan dan Sosial	275,38	297,74	324,44
17.	Jasa Lainnya	197,95	210,90	228,70
	Jumlah	18.438,97	20.061,49	21.651,87

Sumber: BPS Kab. Parigi Moutong

2.2.

KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Parigi Moutong mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
14. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023; dan
15. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Bab III dan Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong meliputi kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Azas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Kas Umum Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus



rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di Kabupaten Parigi Moutong. Melalui arah kebijakan ini diharapkan:

1. Keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi daerah;
2. Diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat; dan
3. Diharapkan pula bahwa keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Parigi Moutong adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dikendalikan sendiri oleh daerah. Hal ini mengingat bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat bergantung pada kebijakan pusat maupun kebijakan provinsi. Pemerintah daerah akhir-akhir ini dituntut untuk meningkatkan PAD-nya seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, kebijakan tersebut haruslah tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelancaran perekonomian jangka pendek maupun jangka panjang.

Pendapatan asli daerah, bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya. Yang termasuk dalam PAD antara lain:

- a. Pajak daerah, jenis pajak daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi;

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai target PAD yang berasal dari hasil pajak daerah adalah:

- 1) Melakukan evaluasi sistem pemungutan pajak daerah dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan. Upaya ini dimaksudkan agar terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak tersebut;
- 2) Mengevaluasi peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan menyempurnakannya bilamana diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengintensifkan perolehan pajak;
- 3) Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dalam pemungutan pajak daerah. SDM yang memiliki kemampuan yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan; dan



- 4) Menciptakan sistem penatausahaan penerimaan pajak daerah termasuk pengawasan tunggakan pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar tercipta dokumentasi yang memadai tentang besarnya penerimaan pajak daerah, termasuk informasi tentang tunggakan pajak daerah yang terjadi pada periode tertentu. Dokumentasi yang memadai juga akan memudahkan pengawasan atas penerimaan pajak daerah tersebut.
- b. Retribusi daerah, jenis retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai target PAD yang berasal dari hasil retribusi daerah adalah:
 - 1) Perbaiki fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi dasar penetapan besarnya tarif retribusi, terutama retribusi pelayanan kesehatan. Upaya ini harus dilakukan secara bersamaan, artinya di satu sisi dilakukan perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan di sisi lain harus segera dilakukan peninjauan ulang dasar dan perhitungan *unit cost* setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan dapat ditetapkan besarnya tarif retribusi yang sesuai antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat;
 - 2) Mengoptimalkan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai perizinan. Pemahaman yang memadai pada akhirnya akan menumbuhkan motivasi untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini sangat penting karena kemudahan pelayanan tercipta tidak hanya dapat dilakukan dengan sekedar memperbaiki sistem dan kebijakan tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan SDM pelaksananya;
 - 4) Mengevaluasi mekanisme pengurusan izin. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki mekanisme pengurusan izin apabila diperlukan. Kejelasan dan kemudahan mekanisme akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin tersebut; dan
 - 5) Mengoptimalkan pengawasan pengelolaan penerimaan dari hasil retribusi daerah. Pengawasan yang optimal akan meminimalkan penyimpangan atas hasil penerimaan retribusi tersebut. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan yang relevan, sistem pengawasan, dan SDM terkait.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah, mencakup hasil penjualan dan sewa kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari BLUD, dll.
2. Dana perimbangan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan diperoleh sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. *Revenue sharing policy*



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

adalah konsep yang berlandaskan pemikiran untuk memberdayakan daerah dan prinsip keadilan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya. Adapun realisasi selama dua tahun pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.10. Realisasi Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2022-2023**

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	151.417.604.707,12	134.453.729.396,85	16.963.875.310,27	12,62
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	23.803.599.245,46	21.836.945.893,41	1.966.653.352,05	9,01
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	14.626.496.079,00	8.554.953.079,00	6.071.543.000,00	70,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.308.124.029,00	5.259.068.360,70	2.049.055.668,30	38,96
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	105.679.385.353,66	98.802.762.063,74	6.876.623.289,92	6,96
Pendapatan Transfer	1.592.295.209.339,00	1.399.175.563.984,00	193.119.645.355,00	13,80
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.519.743.272.120,00	1.342.698.896.105,00	177.044.376.015,00	13,19
Dana Perimbangan	1.269.189.959.620,00	1.112.514.280.305,00	156.675.679.315,00	14,08
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	51.937.536.032,00	79.367.347.334,00	(27.429.811.302,00)	(34,56)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	777.097.127.251,00	720.038.970.000,00	57.058.157.251,00	7,92
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	210.878.154.045,00	184.496.372.332,00	26.381.781.713,00	14,30
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	229.277.142.292,00	128.611.590.639,00	100.665.551.653,00	78,27
Dana Desa	241.123.454.500,00	230.184.615.800,00	10.938.838.700,00	4,75
Insentif Fiskal	9.429.858.000,00	0,00	9.429.858.000,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.551.937.219,00	56.476.667.879,00	16.075.269.340,00	28,46
Pendapatan Bagi Hasil	64.241.937.219,00	56.476.667.879,00	7.765.269.340,00	13,75
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.241.937.219,00	56.476.667.879,00	7.765.269.340,00	13,75



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bantuan Keuangan	8.310.000.000,00	0,00	8.310.000.000,00	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.310.000.000,00	0,00	8.310.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.784.127.007,00	67.739.287.141,00	(64.955.160.134,00)	(95,89)
Pendapatan Hibah	2.784.127.007,00	5.188.307.081,00	(2.404.180.074,00)	(46,34)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.756.127.007,00	3.344.612.081,00	(588.485.074,00)	(17,60)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	100,00
Pendapatan Hibah Uang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	28.000.000,00	343.695.000,00	(315.695.000,00)	(91,85)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	62.550.980.060,00	(62.550.980.060,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan	0,00	62.550.980.060,00	(62.550.980.060,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	62.550.980.060,00	(62.550.980.060,00)	(100,00)
PENDAPATAN DAERAH	1.746.496.941.053,12	1.601.368.580.521,85	145.128.360.531,27	9,06

Sumber: BPKAD

Dengan memperhatikan tabel di atas, pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 sebesar Rp1.746.496.941.053,12 mengalami peningkatan sebesar Rp145.128.360.531,27 atau 9,06%, dimana pendapatan daerah tahun sebelumnya sebesar Rp1.601.368.580.521,85. Hal ini menunjukkan tren yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk bangkit setelah pandemi *covid-19* yang menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga pendapatan negara juga mengalami penurunan.

Untuk itu pemerintah pusat melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocussing*) dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*, dan perlindungan sosial untuk mencegah inflasi. Walau demikian proporsi dana perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian PAD Kabupaten Parigi Moutong harus diupayakan menjadi sumber pembiayaan utama bagi belanja daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Mulai tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi pajak daerah, diharapkan dapat memperkuat posisi PAD dan pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan PAD di Kabupaten Parigi Moutong, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan



- peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau;
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
 3. Pendayagunaan aset daerah;
 4. Mengadakan peninjauan kembali (*annual review*) atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
 5. Sosialisasi dan penegakan peraturan daerah bidang pendapatan (*Law Enforcement*); dan
 6. Melakukan peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data baik dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan bagi hasil pajak dan non pajak serta dana transfer lainnya.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode satu tahun anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan belanja daerah disusun berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Klasifikasi menurut fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan belanja daerah dapat dilakukan perubahan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2023 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.327.291.766.375,00 terealisasi sebesar Rp1.265.386.396.984,80 atau hanya 95,34%, belanja modal dianggarkan sebesar Rp240.905.282.296,00 terealisasi sebesar Rp Rp221.206.397.626,00 atau 91,82%, Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan sebesar Rp6.277.131.000,00 terealisasi sebesar Rp3.051.237.500,00 atau hanya 48,61% dan belanja transfer dianggarkan sebesar Rp334.921.423.431,00 terealisasi sebesar Rp333.868.094.007,00 atau hanya 99,69%.

Melihat total realisasi belanja daerah yang hanya mencapai jumlah Rp1.823.512.126.117,80 dari Rp1.909.395.603.102,00 yang ditargetkan maka terdapat besaran jumlah anggaran yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.883.476.984,20 atau secara keseluruhan realisasi belanja daerah mencapai 95,50%.



Tidak tercapainya realisasi belanja sebagaimana diuraikan di atas disebabkan antara lain:

1. Dari sisi belanja operasi khususnya belanja pegawai diantaranya disebabkan banyak pegawai telah memasuki masa purna bakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan;
2. Adanya pemotongan tambahan penghasilan atas hak pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan tersebut;
3. Dari sisi belanja barang dan jasa disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya mencapai 100%;
4. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Perangkat Daerah;
5. Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK terlambat dilaksanakan karena keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian terkait;
6. Ada beberapa paket proyek paket pekerjaan yang diputus kontraknya di tengah jalan dikarenakan sangat lamban dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan; dan
7. Ada beberapa paket proyek yang bersifat tender dan swakelola pekerjaannya hingga melewati tahun 2023.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam tahun yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan melalui kebijakan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11. APBD Kabupaten Parigi Moutong TA. 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
<u>Pendapatan Daerah</u>				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	142.315.008.285,00	140.921.563.929,00	(1.393.444.356,00)	(0,98)
Pendapatan Transfer	1.558.728.894.447,00	1.674.437.577.029,00	115.708.682.582,00	7,42
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.019.900.000,00	3.047.900.000,00	28.000.000,00	0,93
Jumlah Pendapatan Daerah	1.704.063.802.732,00	1.818.407.040.958,00	114.343.238.226,00	6,71
<u>Belanja Daerah</u>				
Belanja Operasi	1.201.780.034.868,00	1.327.291.766.375,00	125.511.731.507,00	10,44



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
Belanja Modal	217.922.429.553,00	240.905.282.296,00	22.982.852.743,00	10,55
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.277.131.000,00	(3.722.869.000,00)	(37,23)
Belanja Transfer	302.634.949.767,00	334.921.423.431,00	32.286.473.664,00	10,67
Jumlah Belanja Daerah	1.732.337.414.188,00	1.909.395.603.102,00	177.058.188.914,00	10,22
Surplus / (Defisit)	(28.273.611.456,00)	(90.988.562.144,00)	(62.714.950.688,00)	211,81
<u>Pembiayaan Daerah</u>				
Penerimaan Pembiayaan	34.273.611.456,00	92.688.562.144,00	58.414.950.688,00	170,44
Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	1.700.000.000,00	(4.300.000.000,00)	(71,67)
Pembiayaan Netto	28.273.611.456,00	90.988.562.144,00	62.714.950.688,00	221,81
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pembiayaan yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dengan melakukan rasionalisasi belanja daerah dan pembayaran pokok utang luar negeri *Loan Agreement* Nomor 4786-IND tanggal 20 Oktober 2005 dengan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-5979/MK.5/2010 Tanggal 10 Agustus 2010. Penjelasan atas realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong akan dijelaskan pada Bab V pada Laporan Keuangan ini.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Selama tahun 2023 program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup berarti. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

Pencapaian target dan realisasi APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel berikut dengan format laporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Tabel 2.12. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
<u>Pendapatan</u>				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	140.921.563.929,00	151.417.604.707,12	(10.496.040.778,12)	107,45
Pendapatan Transfer	1.674.437.577.029,00	1.592.295.209.339,00	82.142.367.690,00	95,09
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	263.772.993,00	91,35
Jumlah Pendapatan	1.818.407.040.958,00	1.746.496.941.053,12	71.910.099.904,88	96,05
<u>Belanja</u>				
Belanja Operasi	1.327.291.766.375,00	1.265.386.396.984,80	61.905.369.390,20	95,34
Belanja Modal	240.905.282.296,00	221.206.397.626,00	19.698.884.670,00	91,82
Belanja Tidak Terduga	6.277.131.000,00	3.051.237.500,00	3.225.893.500,00	48,61
Belanja Transfer	334.921.423.431,00	333.868.094.007,00	1.053.329.424,00	99,69
Jumlah Belanja	1.909.395.603.102,00	1.823.512.126.117,80	85.883.476.984,20	95,50
Surplus/(Defisit)	(90.988.562.144,00)	(77.015.185.064,68)	(13.973.377.079,32)	84,64
<u>Pembiayaan</u>				
Penerimaan Pembiayaan	92.688.562.144,00	92.675.844.451,33	12.717.692,67	99,99
Pengeluaran Pembiayaan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Netto	90.988.562.144,00	90.975.844.451,33	12.717.692,67	99,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	13.960.659.386,65	(13.960.659.386,65)	

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Parigi Moutong menurut urusan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.746.496.941.053,12 dengan anggaran perubahan sebesar Rp1.818.407.040.958,00 maka persentase realisasi terhadap anggaran adalah sebesar 96,05%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Hal ini disebabkan karena mulai meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak dan adaptasi terhadap kebiasaan baru serta dampak dari perubahan kegiatan ekonomi secara bertahap pasca pandemi. Adapun realisasi pencapaian pendapatan selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Pencapaian Pendapatan TA 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	140.921.563.929,00	151.417.604.707,12	107,45	134.453.729.396,85
Pajak Daerah	21.159.994.128,00	23.803.599.245,46	112,48	21.836.945.893,41
Retribusi Daerah	15.802.391.813,00	14.626.496.079,00	92,56	8.554.953.079,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.308.124.019,00	7.308.124.029,00	100,00	5.259.068.360,70
Lain-lain PAD yang Sah	96.651.053.969,00	105.679.385.353,66	109,34	98.802.762.063,74
Pendapatan Transfer	1.674.437.577.029,00	1.592.295.209.339,00	95,09	1.399.175.563.984,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.599.813.116.806,00	1.519.743.272.120,00	95,00	1.342.698.896.105,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.624.460.223,00	72.551.937.219,00	97,22	56.476.667.879,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	91,35	67.739.287.141,00
Pendapatan Hibah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	91,35	5.188.307.081,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	62.550.980.060,00
Jumlah	1.818.407.040.958,00	1.746.496.941.053,12	96,05	1.601.368.580.521,85

3.1.2 Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp1.823.512.126.117,80 dengan persentase sebesar 95,50% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.909.395.603.102,00. Realisasi belanja secara keseluruhan dapat diuraikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Tabel 3.2. Realisasi Belanja TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.327.291.766.375,00	1.265.386.396.984,80	95,34	1.140.101.932.342,41
Belanja Pegawai	651.385.612.213,00	630.041.917.271,00	96,72	606.804.834.573,00
Belanja Barang dan Jasa	556.640.447.166,00	528.001.154.156,80	94,85	463.930.556.559,87
Belanja Bunga	158.500.000,00	158.373.089,00	99,92	168.181.692,54
Belanja Hibah	116.189.125.746,00	104.420.301.218,00	89,87	67.528.737.267,00
Belanja Bantuan Sosial	2.918.081.250,00	2.764.651.250,00	94,74	1.669.622.250,00
Belanja Modal	240.905.282.296,00	221.206.397.626,00	91,82	175.499.998.170,66
Belanja Modal Tanah	698.230.000,00	698.220.000,00	100,00	149.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.698.097.860,00	87.126.556.041,00	100,49	59.378.243.109,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.851.757.534,00	48.904.164.451,00	96,17	58.628.339.943,66
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.989.732.602,00	77.201.512.634,00	80,43	54.814.456.891,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.667.464.300,00	7.275.944.500,00	109,13	2.529.458.227,00
Belanja Tidak Terduga	6.277.131.000,00	3.051.237.500,00	48,61	4.708.172.100,00
Belanja Tidak Terduga	6.277.131.000,00	3.051.237.500,00	48,61	4.708.172.100,00
Belanja Transfer	334.921.423.431,00	333.868.094.007,00	99,69	309.503.655.476,00
Belanja Bagi Hasil	2.652.997.431,00	2.575.077.892,00	97,06	2.708.757.744,00
Belanja Bantuan Keuangan	332.268.426.000,00	331.293.016.115,00	99,71	306.794.897.732,00
Jumlah	1.909.395.603.102,00	1.823.512.126.117,80	95,50	1.629.813.758.089,07

Adapun ikhtisar realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Capaian urusan wajib terkait pelayanan dasar tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Pendidikan	80,05	100,00
Kesehatan	91,10	90,95
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,02	91,60
Perumahan dan Kawasan Permukiman	95,27	91,76



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	95,98	86,33
Sosial	99,28	96,24
Total	91,12	92,81

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian urusan wajib terkait pelayanan dasar tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun capaian urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Tenaga Kerja	80,37	94,93
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98,34	99,33
Pangan	75,59	102,63
Pertanahan	99,96	100,00
Lingkungan Hidup	99,47	109,79
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,65	97,92
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99,34	97,14
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98,47	100,00
Perhubungan	96,81	84,33
Komunikasi dan Informatika	98,57	93,84
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	98,39	96,00
Penanaman Modal	97,22	108,89
Kepemudaan dan Olahraga	98,60	100,00
Kebudayaan	96,59	100,00
Perpustakaan	97,67	100,00
Kearsipan	97,72	100,00
Total	94,42	99,05

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 2*.



3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Adapun capaian urusan pilihan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5. Urusan Pemerintah Pilihan

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Kelautan dan Perikanan	97,93	97,14
Pariwisata	99,84	88,89
Pertanian	96,42	97,88
Perdagangan	86,74	119,21
Perindustrian	98,81	100,00
Transmigrasi	83,55	100,00
Total	93,88	100,52

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian urusan pilihan tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

4. Unsur Pendukung Bidang Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kepala daerah. Unsur ini diwadahi oleh Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD.

Tabel 3.6. Unsur Pendukung Bidang Urusan Pemerintah

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Sekretariat Daerah	25,42	70,43
Sekretariat DPRD	97,19	95,45
Total	61,31	82,94

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian unsur pendukung bidang urusan pemerintahan tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.7. Unsur Pendukung Bidang Urusan Pemerintah

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	PD Pengampu	Capaian Urusan Pemerintahan	
		Keuangan	Kinerja
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	25,42	72,62
Rata-rata Sekretariat Daerah		25,42	72,62
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	97,19	100,00
Rata-rata Sekretariat DPRD		97,19	100
Total Rata-Rata PD		61,30	86,31
Total Rata-Rata Urusan		61,30	82,94

5. Unsur Penunjang Bidang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.8. Unsur Penunjang Bidang Urusan Pemerintahan

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Perencanaan	97,89	100,00
Keuangan	96,28	92,47
Kepegawaian	96,28	100,00
Pendidikan dan Pelatihan	99,87	100,00
Penelitian dan Pengembangan	99,75	100,00
Total	98,34	98,49

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian unsur penunjang bidang urusan pemerintahan tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur pengawasan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten adalah unsur yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Unsur ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah.

**Tabel 3.9. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan***(dalam persen)*

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Inspektorat Daerah	99,79	100,00
Total	99,79	100,00

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian unsur pengawasan urusan pemerintahan tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan*(dalam persen)*

Bidang Urusan Pemerintahan	PD Pengampu	Capaian Urusan Pemerintahan	
		Keuangan	Kinerja
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	99,79	100,00
Rata-rata Inspektorat Daerah		99,79	100,00

7. Urusan Kewilayahan

Urusan kewilayahan adalah urusan kecamatan dan kelurahan. Sebagai sebuah perangkat daerah organisasi ini memiliki kewenangan berkenaan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Tabel 3.11. Unsur Kewilayahan*(dalam persen)*

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Kecamatan	82,64	63,33
Total	82,64	63,33

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian unsur kewilayahan tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

8. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Tabel 3.12. Urusan Pemerintahan Umum

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Kesatuan Bangsa Dan Politik	61,26	88,89
Total	61,26	88,89

*) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.

Rincian capaian urusan pemerintahan umum tahun 2023 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13. Urusan Pemerintahan Umum

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	PD Pengampu	Capaian Urusan Pemerintahan	
		Keuangan	Kinerja
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	61,26	88,89
Rata-rata Kesatuan Bangsa dan Politik		61,26	88,89

3.1.3 Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.14. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

(dalam persen)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	92.688.562.144,00	92.675.844.451,33	99,99	122.067.073.043,71
Pengeluaran Pembiayaan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00	933.333.333,00
Jumlah	90.988.562.144,00	90.975.844.451,33	99,99	121.133.739.710,71

3.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target

- Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah; dan
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;



- b. Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak serta retribusi daerah; dan
 - c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penggunaan transaksi non-tunai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pencapaian target belanja antara lain:
- a. Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana dan pencairan menumpuk di akhir tahun atau setelah perubahan;
 - b. Perangkat Daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibatkan tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun; dan
 - c. Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah.
- Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:
- a. Meningkatkan pemahaman aparatur perencana dan penganggaran dalam merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;
 - b. Memberikan pengakuan atas capaian prestasi bagi perangkat daerah yang telah disiplin dalam pelaksanaan anggaran; dan
 - c. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi sebanyak 58 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 36 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Selanjutnya sejumlah 94 Laporan Keuangan SKPD/UKPD digabung menjadi 58 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Parigi merupakan gabungan dari Kecamatan Parigi dan lima Kelurahan, Dinas Kesehatan menggabungkan laporan keuangan unit kerja dibawahnya 23 Puskesmas dan Laporan Keuangan Bagian-bagian menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan, oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan



keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara *intern* dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong:

1. Basis akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong adalah basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- c. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.



3. Prinsip realisasi
Ketersediaan pendapatan daerah berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja daerah dalam periode tersebut.
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
6. Prinsip konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip pengungkapan lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Prinsip penyajian wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh setiap entitas sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan



yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi dan kelompok. Pendapatan daerah menurut kelompok terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1) Pajak daerah dan retribusi daerah

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;

3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, Hasil Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Kekayaan Daerah, Pendapatan Zakat, Pendapatan BLUD, Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dan dan lain-lain pendapatan.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dan perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten.

Kelompok pendapatan transfer terdiri atas:



- 1) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 2) Transfer pemerintah pusat lainnya
Kelompok transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari atas objek pendapatan dana penyesuaian, dana otonomi khusus tunjangan profesi guru PNSD, dana insentif daerah, dan bantuan operasional sekolah;
- 3) Transfer pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan
Kelompok transfer Pemerintah Daerah merupakan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan bagi hasil lainnya dari Pemerintah Daerah lainnya. Kelompok bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - 1) Hibah
Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - 2) Dana darurat
Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; dan
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah lainnya.
Kelompok lain-lain pendapatan daerah lainnya merupakan kelompok pendapatan selain Pendapatan Hibah dan Dana Darurat.
2. Pengakuan Pendapatan
 - a. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di kas umum daerah, pada saat diterima bendahara, pada saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima pendapatan jasa giro/tabungan atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
 - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - c. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - d. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 - e. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - f. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.



- g. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan – LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan – LRA.
 - h. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 - i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - j. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional.
 - k. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan dilaporkan dalam laporan operasional.
 - l. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap di kapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.
3. Pengukuran Pendapatan
 - a. Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
 - c. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - d. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.
4. Penyajian Pendapatan

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Pengungkapan Pendapatan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1. Klasifikasi belanja

- a. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- c. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan.
- d. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- e. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tidak berwujud.
- f. Belanja Bunga adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principle outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- g. Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- h. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus – menerus.
- i. Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat



langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan ke agamaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

- j. Belanja keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong lainnya dalam rangka pemerataan dan /atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup.
2. Perlakuan akuntansi belanja pemeliharaan
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
 - b. Bertambah ekonomis/efisien;
 - c. Bertambah umur ekonomis;
 - d. Bertambah volume;
 - e. Bertambah kapasitas produksi; dan
 - f. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. Pengakuan
Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - c. Untuk belanja yang dilaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
4. Pengukuran
Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
5. Penyajian
Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Pengungkapan
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:



- a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

1. Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4. Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5. Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.



- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terkait jenis beban terdiri dari:

1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dapat berupa beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode perhitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- b. Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

3. Beban Bunga

Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.

Beban bunga utang diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan

4. Beban Subsidi

Beban subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/ lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.



Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memberikan subsidi telah timbul.

5. **Beban Hibah**

Beban hibah adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah diakui pada saat timbulnya kewajiban.

6. **Beban Bantuan Sosial,**

Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban bantuan sosial diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

7. **Beban Penyusutan Aset Tetap/ Amortisasi**

Beban Penyusutan/amortisasi dihitung dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*);
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); dan
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*).

8. **Beban Transfer**

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

9. **Beban Tidak Terduga**

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran aset adalah kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, piutang dicatat sebesar nilai nominal dan persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Aset Lancar**

Aset lancar terdiri dari:



a. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 2) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 3) Setara kas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 4) Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas Dana BOS, Kas BLUD, Kas FKTP, Kas BOK dan Kas Lainnya).
- 5) Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, kas di bendahara penerimaan, kas yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran, dan setara kas merupakan bagian dari SiLPA/SiKPA.
- 6) Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

b. Piutang

- 1) Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Piutang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- 3) Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Piutang jangka panjang dapat berupa piutang yang terjadi karena kurang bayar dan jatuh tempo pembayarannya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.
- 5) Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
- 6) Uang Muka Beban/Beban Dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka beban/Beban Dibayar dimuka.



- 7) Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang mendasarinya.
- 8) Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan.
- 9) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
- 10) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 11) Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.
- 12) Untuk piutang yang dalam keadaan tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada Aset Lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya.
- 13) Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada Aset lain-lain.
- 14) Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- 15) Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 16) Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
- 17) Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 18) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- 19) Penggolongan kualitas piutang dikelompokkan menjadi Kualitas Piutang Lancar, Kualitas Piutang Kurang Lancar, Kualitas Piutang Diragukan dan Kualitas Piutang Macet.
- 20) Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.
- 21) Penghapusan piutang oleh pemerintah daerah terdiri atas penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dan penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.



- 22) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.
 - 23) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 24) Penghapustagihan atau penghapusan piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 25) Suatu piutang yang telah dihapuskan dan dikemudian hari diterima pembayaran pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapuskan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah lainnya.
- c. Persediaan
- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai komponen bekas.
 - 3) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - 5) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
 - 6) Persediaan dicatat secara perpetual yang merupakan metode pencatatan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 - 7) Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - 8) Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode *first in first out* (FIFO) dan Nilai wajar.
 - 9) Pengakuan beban dengan pendekatan aset, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian.
 - 10) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit.



- 11) Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*, disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
 - 12) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Akan tetapi, Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
2. Aset Tetap
- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, seperti koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.



- c. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - 7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
 - 8) Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban Operasional pada Laporan Operasional sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang *extracomptable*;
 - 9) Batas minimum kapitalisasi diatas diberlakukan untuk aset tetap yang diperoleh sebelum kebijakan ini ditetapkan; dan
 - 10) Jika perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lebih kecil dari kebijakan sebelumnya maka aset tersebut diakui sebagai penambah aset tetap dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- e. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain:
 - 1) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut;
 - 2) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian; dan
 - 3) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tetap tersebut.
- f. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- g. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- h. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk



biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- i. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- j. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- k. Biaya perolehan aset terdiri dari:
 - 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; dan
 - 2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- l. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap. Hal ini meliputi biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, harus ditambah pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.
- m. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- n. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- o. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - 2) Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - 3) Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- p. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- q. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- r. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.



- s. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
- t. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- u. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- v. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.
- w. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima.
- x. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- y. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- z. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
 - 1) Aset tetap diperoleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. Aset tetap bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
 - 2) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Perbaikan terhadap aset tetap berupa *overhaul* dan renovasi dapat menambah masa manfaat aset tetap tersebut. Akan tetapi penambahan masa manfaat akibat perbaikan tidak dapat melebihi masa manfaat yang ditetapkan sebelumnya. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya



- perbaikan berupa *overhaul* dan renovasi mulai diberlakukan pada tahun buku 2015 setelah dilakukan penyusutan pertama kali tahun 2014.
- 3) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - 5) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - 6) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
 - 7) Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan tahun penggunaan. Dengan pendekatan tahun penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tahun saat aset tersebut digunakan.
 - 8) Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.
 - 9) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
 - 10) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
 - 11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - 12) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
 - 13) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - 14) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
 - 15) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



- 16) Aset Tetap yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai barang *ekstracomptable* dihapus pengungkapannya setelah proses penghapusan barang milik daerah.
- 17) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; dan
 - c) Informasi penyusutan.
3. Aset Tidak Berwujud
 - a. Aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - b. Aset tidak berwujud meliputi:
 - 1) Piranti lunak (*software*) komputer
 - 2) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu panen yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - 3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.
 - c. Aset tidak berwujud diakui jika:
 - 1) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.
 - e. Pengakuan aset tidak berwujud akan sangat andal bila aset tidak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tidak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola



maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

- f. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.
- g. Aset tidak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tidak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tidak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- h. Biaya perolehan suatu aset tidak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.
- i. Suatu aset tidak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tidak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tidak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.
- j. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
 - 1) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
 - 2) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
 - 3) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
- k. Pengeluaran setelah aset tidak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tidak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut.
- l. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.
- m. Berdasarkan masa manfaat, aset tidak berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (*finite life*)
Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
 - 2) Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas (*indefinite life*)
Aset Tidak Berwujud tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas Aset Tidak Berwujud yang mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas, harus



dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

- n. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tidak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas.
- o. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
- p. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun aset tidak berwujud. Beban amortisasi aset tidak berwujud disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun aset tidak berwujud dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi aset tidak berwujud atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
- q. Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tidak berwujud, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah.
- r. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (paten, hak cipta, waralaba, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
- s. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (misalnya *Goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tidak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tidak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tidak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tidak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
- t. Suatu aset tidak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.
- u. Aset tidak berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



- v. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya berdasarkan:
 - 1) Masa manfaat aset tidak berwujud; dan
 - 2) Informasi amortisasi.
- w. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan.
 - 2) Keberadaan dan nilai aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi.
 - 3) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.
- x. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran mengenai setiap aset tidak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

1. Pengakuan Dana Bergulir

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong; dan/atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2. Pengukuran Dana Bergulir

- a. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.
- b. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya atau *aging schedule*. Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
- c. Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan tertagih (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan kerugian pada laporan operasional.



- d. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan penyisihan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
 - e. Penyisihan dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan direalisasi. Penyisihan dana bergulir terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisa terhadap saldo dana bergulir yang masih *outstanding* berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.
3. Metode Penilaian Dana Bergulir
Penilaian dana bergulir Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
 4. Pengakuan Hasil Dari Dana Bergulir
Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah.
Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagaiandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.
 5. Penghapusan Dana Bergulir
 - a. Penghapusan dana bergulir Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dan penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir;
 - b. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih;
 - d. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah



- dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstrakomtabel* dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- e. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomtabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
6. Pengungkapan
- Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a. Dasar penilaian dana bergulir;
 - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
 - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

1. Klasifikasi Kewajiban
 - a. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai *likuiditas* dan *solvabilitas* suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang;
 - b. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
 - c. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali atau digulirkan berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali);
 - d. Pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban tanggal pelaporan adalah jangka panjang;
 - e. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek jika



persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
 - 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Pengakuan Kewajiban
 - a. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - b. Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran;
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
 - 4) Kejadian yang diakui pemerintah.
 3. Pengukuran Kewajiban
 - a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 4. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
 - a. Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
 - b. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
 - c. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 5. Tunggakan Kewajiban
 - a. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
 - b. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak mampu untuk membayar jumlah



pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

- c. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari informasi terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.
 - d. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.
6. Restrukturisasi Utang
- a. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
 - b. Restrukturisasi utang dapat berupa:
 - 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; dan/ atau
 - 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran atau penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/ atau tertunggak.
 - c. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjensi) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
 - d. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
 - e. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
 - f. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan restrukturisasi utang, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.



semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

4.5. Asumsi Dasar Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 telah disusun berdasarkan asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi yaitu:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.6. Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatidakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Walaupun kebutuhan pengguna laporan keuangan masing-masing berbeda, diharapkan seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah serta masyarakat.

**BAB V****PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****5.1. PENJELASAN ATAS LRA**

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang, Pembiayaan. diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah Ekuitas periode TA 2023 dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan kewenangannya, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.818.407.040.958,00 dan terealisasi sebesar Rp1.746.496.941.053,12 atau 96,05%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rincian Pendapatan Daerah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	140.921.563.929,00	151.417.604.707,12	107,45	134.453.729.396,85
2	Pendapatan Transfer	1.674.437.577.029,00	1.592.295.209.339,00	95,09	1.399.175.563.984,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	91,35	67.739.287.141,00
	Jumlah	1.818.407.040.958,00	1.746.496.941.053,12	96,05	1.601.368.580.521,85

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2023 PAD dianggarkan sebesar Rp140.921.563.929,00 dan terealisasi sebesar Rp151.417.604.707,12 atau 107,45%. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Daerah	21.159.994.128,00	23.803.599.245,46	112,49	21.836.945.893,41
2	Retribusi Daerah	15.802.391.813,00	14.626.496.079,00	92,56	8.554.953.079,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.308.124.019,00	7.308.124.029,00	100,00	5.259.068.360,70
4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.651.053.969,00	105.679.385.353,66	109,34	98.802.762.063,74
	Jumlah	140.921.563.929,00	151.417.604.707,12	107,45	134.453.729.396,85

**5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak daerah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp21.159.994.128,00 dan terealisasi sebesar Rp23.803.599.245,46 atau sebesar 112,49%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Hotel/Penginapan	200.000.000,00	363.462.880,00	181,73	298.257.155,00
2	Pajak Restoran/Rumah makan	1.500.000.000,00	2.085.441.275,00	139,03	1.948.826.396,20
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	38.667.900,00	193,34	17.535.000,00
4	Pajak Reklame	693.078.128,00	769.658.587,29	111,05	649.984.708,05
5	Pajak Penerangan Jalan	11.661.916.000,00	12.193.761.157,00	104,56	10.955.174.494,00
6	Pajak Parkir	30.000.000,00	24.566.100,00	81,89	10.929.900,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	46.318.712,00	115,80	41.457.368,00
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	515.000.000,00	434.107.767,80	84,29	518.873.178,30
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	6.114.635.907,37	122,29	5.761.618.427,86
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.732.978.959,00	115,53	1.634.289.266,00
	Jumlah	21.159.994.128,00	23.803.599.245,46	112,49	21.836.945.893,41

1. Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp23.803.599.245,46 dari anggaran Rp21.159.994.128,00 atau melebihi target 112,49%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp21.836.945.893,41 mengalami kenaikan sebesar Rp1.966.653.352,05. Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pajak Hotel/Penginapan terealisasi melampaui target dipengaruhi oleh aktifnya kegiatan penagihan dan sosialisasi terhadap wajib pajak, dan mengoptimalkan penerbitan rekomendasi atau penelitian nota/*bill* hotel yang digunakan pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah di Perangkat Daerah masing-masing;
- Pajak Rumah Makan dan sejenisnya terealisasi melampaui target dipengaruhi aktifnya kegiatan penagihan dan sosialisasi terhadap wajib pajak, mengoptimalkan penerbitan rekomendasi penelitian nota/*bill* atas belanja makan minum yang ada pada perangkat daerah;
- Pajak Hiburan juga menjadi salah satu jenis pajak yang mengalami kenaikan realisasi bila dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh intensitas pelaksanaan turnamen olahraga pasca pandemi *Covid-19*, dan terbukanya



- beberapa tempat hiburan dan pemandian serta wahana bermain hoya-hoya selama tahun 2023;
- d. Pajak Reklame melampaui target, dikarenakan peran aktif Bapenda dalam melakukan pendataan, penagihan dan melakukan pemeriksaan atas beberapa wajib pajak yang menunggak dengan melibatkan pihak kejaksaan;
 - e. Pajak Penerangan Jalan terealisasi melampaui target, PPJ merupakan pajak yang di setor oleh PT PLN Persero wilayah Kota Palu dan wilayah Kabupaten Tolitoli;
 - f. Pajak Parkir terealisasi tidak mencapai target, dikarenakan satu objek pajak atau area parkir Bumi Nyiur Swalayan belum membayar pajak parkir dan sudah dilakukan teguran berupa surat teguran kepada pihak swalayan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet terealisasi melampaui target yang ditetapkan, dipengaruhi oleh aktifnya kegiatan penagihan dan sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau lebih dikenal dengan Pajak Galian Jenis C tidak mencapai target dikarenakan banyak pekerjaan fisik yang menggunakan material galian jenis C yang anggaran bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN tidak melapor atau membayar pajak Minerba. Dan pengambilan material di sungai-sungai banyak yang ditertibkan aparat keamanan karena tidak memiliki izin, adanya praktik pengambilan material galian ilegal dilokasi-lokasi pengambilan yang tidak membayar pajak daerah;
 - i. Besarnya persentase penerimaan PBB-P2 ini, dipengaruhi oleh kegiatan penagihan yang terus digenjot serta diberlakukan kembali rekomendasi atau surat keterangan realisasi capaian PBB-P2 sebagai persyaratannya pencairan ADD dan bagi hasil PDRD. Selain itu kegiatan pemeriksaan yang melibatkan pihak Kejaksaan kepada yang menunggak PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melampaui target dikarenakan banyaknya transaksi jual beli tanah diwilayah Parigi Moutong utamanya lahan untuk tambak dan pabrik durian, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan dan transaksi jual beli lainnya;
2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pajak Daerah.
 - b. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pajak Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Pendapatan retribusi daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp15.802.391.813,00 dan terealisasi sebesar Rp14.626.496.079,00 atau 92,56% dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.324.856.800,00	12.368.699.273,00	92,82	7.494.797.008,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	191.250.000,00	231.037.500,00	120,80	197.544.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000,00	88.426.000,00	110,53	51.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	191.250.000,00	205.939.800,00	107,68	204.649.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	142.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	16.635.013,00	21.785.000,00	130,96	10.946.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	672.259.320,00	67,23	0,00
Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.000.000,00	220.621.950,00	126,07	179.765.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	41.400.000,00	36.500.000,00	88	41.500.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	40.000.000,00	57.260.000,00	143,15	37.620.000,00
4	Retribusi Terminal	75.000.000,00	53.400.000,00	71,20	54.000.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.000.000,00	36.160.000,00	80,36	41.420.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00	433.893.650,00	216,95	149.264.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	275.000.000,00	200.513.586,00	72,9	92.247.471,00
2	Retribusi Izin Trayek	2.000.000,00		0,00	0,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.000.000,00		0,00	0,00
	Jumlah	15.802.391.813,00	14.626.496.079,00	92,56	8.554.953.079,00

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp14.626.496.079,00 dari anggaran Rp15.802.391.813,00 atau hanya 92,56%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.554.953.079,00 mengalami kenaikan Rp6.071.543.000,00. Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

1) Retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari,

- Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp11.461.516.790,00 dari anggaran Rp11.824.856.800,00;
- Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum pada RSUD BULUYE, terealisasi sebesar Rp907.182.483,00 dari anggaran Rp1.500.000.000,00.



- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelola oleh 3 (Tiga) Perangkat Daerah yaitu:
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianggarkan Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp177.520.000,00;
 - b) Dinas Lingkungan Hidup, dianggarkan Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp42.265.000,00; dan
 - c) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah, dianggarkan Rp11.250.000,00 dan terealisasi Rp11.252.500,00.
 - 3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2023 dianggarkan Rp80.000.000,00 dan terealisasi melampaui target sebesar Rp88.426.000,00;
 - 4) Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah, yaitu:
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianggarkan Rp180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp194.687.300,00; dan
 - b) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dianggarkan sebesar Rp11.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.252.500,00.
 - 5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp142.000.000,00 dan terealisasi Rp0,00, dikarenakan balai tempat pengujian kendaraan belum terakreditasi, fasilitas pendukung belum terpenuhi, dan belum dilakukan uji fungsi alat (Kalibrasi);
 - 6) Retribusi pelayanan tera/tera ulang terealisasi melampaui target, dianggarkan Rp16.635.013,00 dan terealisasi sebesar Rp21.785.000,00;
 - 7) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mencapai target, dari anggaran Rp1.000.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp672.259.320,00.
- b. Retribusi Jasa Usaha
- 1) Tahun 2023 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 dan terealisasi Rp220.621.950,00 terdapat peningkatan realisasi yang cukup besar, dikarenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri:
 - a) Pemakaian alat berat dan uji laboratorium dianggarkan Rp175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp190.621.950,00 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan.
 - b) Pemakaian alat sewa Bandogate terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang merupakan reklasifikasi dari akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mencapai target, dianggarkan Rp41.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.500.000,00;
 - 3) Retribusi tempat pelelangan di kelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp57.260.000,00;
 - 4) Retribusi terminal di kelola oleh Dinas Perhubungan dianggarkan Rp75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.400.000,00;
 - 5) Retribusi rumah potong hewan yang di kelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggarkan Rp45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.160.000,00;



- 6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, pada Tahun 2023 dianggarkan Rp200.000.00,00 dan terealisasi sebesar Rp433.893.650,00. Terdapat peningkatan realisasi dikarenakan retribusi PPUD dikelola oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah, yaitu:
- a) Dinas Kelautan dan Perikanan yang retribusinya bersumber dari pengelolaan *cold storage* berupa benih ikan dan udang dianggarkan Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp173.224.500,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan yang bersumber dari pendapatan UPTD air minum Spam yang merupakan reklasifikasi dari akun Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp260.669.150,00.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Tahun 2023 retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu persetujuan bangunan gedung yang di kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan Rp275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp200.513.586,00;
- 2) Retribusi izin trayek pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan terealisasi Rp0,00; dan
- 3) Retribusi izin perikanan pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:

- 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah
- 2 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pembagian laba atas penyertaan modal pemerintah kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng). Pada Tahun 2023, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp7.308.124.019,00 dan terealisasi sebesar Rp7.308.124.029,00 atau 100,00%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Deviden BPD Sulteng Cabang Parigi	7.308.124.019,00	7.308.124.029,00	100,00	5.067.381.985,70
2	Deviden BUMD Bidang Air Minum	0,00	0,00	-	191.686.375,00
	Jumlah	7.308.124.019,00	7.308.124.029,00	100,00	5.259.068.360,70

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 dianggarkan Rp7.308.124.019,00 dan terealisasi sebesar Rp7.308.124.029,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terealisasi Rp5.259.068.360,70 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.049.055.668,30. Pendapatan Bagian Laba yang di bagikan kepada Pemerintah Daerah merupakan Deviden atas penyertaan modal kepada BPD Sulteng, yang sudah sesuai dengan berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 6 pada Tanggal 2 Maret 2023, dan di dukung dengan surat penyetoran



Deviden Nomor 2972/BPD-ST/DIR/OPR/VIII/2023 tentang Penyetoran Deviden Tahun Buku 2022 sebesar Rp7.308.124.029,00 pada Tanggal 14 Agustus 2023.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp96.651.053.969,00 dan terealisasi sebesar Rp105.679.385.353,66 atau 109,34%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	27.500.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.536.586.505,41	84,55	3.434.602.308,01
4	Pendapatan Bunga	81.956.839,00	112.878.961,00	137,73	225.000.000,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	210.914.931,00	709.476.493,71	336,38	1.290.833.432,07
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.266.788.953,00	575.101.413,11	45,40	1.117.612.008,17
7	Pendapatan denda Pajak Daerah	63.981.798,00	205.079.278,11	320,53	186.743.571,20
8	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00	2.501.136.967,17	1.250,57	951.191.773,59
9	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	67.651.339.741,00	79.427.331.037,15	117,41	77.741.572.461,70
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.119.071.707,00	19.584.794.698,00	81,20	13.827.706.509,00
	Jumlah	96.651.053.969,00	105.679.385.353,66	109,34	98.802.762.063,74

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, tahun 2023 terealisasi sebesar Rp105.679.385.353,66 dari anggaran Rp96.651.053.969,00 atau hanya 109,34%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp98.802.762.063,74 mengalami kenaikan Rp6.876.623.289,92 dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah Hasil penjualan Aset lainnya merupakan hasil penjualan kebun kelapa pada Daerah Ogobayas yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan. Tahun 2023 dianggarkan Rp27.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.000.000,00 atau 100,00%;
- Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, di anggarakan sebesar Rp30.000.000,00 dan untuk pencatatan realisasinya di reklas ke Pendapatan Retribusi berdasarkan
- Penerimaan jasa giro tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.536.586.505,41 atau 84,55%. Penerimaan jasa giro terdiri dari :
 - Jasa giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp2.428.072.911,41;
 - Jasa giro pada Kas di Bendahara terealisasi sebesar Rp84.759.485,00;
 - Jasa giro pada rekening Dana Bos terealisasi sebesar Rp22.702.274,00;



- d. Jasa giro Dana Kapitasi pada Rekening FKTP terealisasi sebesar Rp1.051.835,00.
4. Pendapatan bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah yang merupakan remunerasi atas penempatan uang *Treasury Deposit Facility* di Bank Indonesia dianggarkan Rp81.956.839,00 dan terealisasi sebesar Rp112.878.961,00;
5. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, dianggarkan Rp210.914.931,00 dan terealisasi sebesar Rp709.476.493,71 atau 336,38%. Terdapat peningkatan realisasi yang cukup besar karena penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah terdiri dari setoran tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebesar Rp9.323.000,00 dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp700.153.493,71;
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan Rp1.266.788.953,00 dan terealisasi sebesar Rp575.101.413,11. Merupakan pengembalian denda atas keterlambatan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Set. CV. Kitapura Membangun, atas Denda Keterlambatan Proyek Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) *Type B* Parigi Moutong, DISPAR sebesar Rp242.651.816,75;
 - b. Set. CV. Primatama Construction, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Rumput Laut, DISLUTKAN sebesar Rp1.116.150,00;
 - c. Set. CV. Nur Rahma, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Timbunan Halaman SD Inpres 1 Tada dan SD Inpres 3 Tada TA. 2023, DISDIKBUD Rp998.540,00
 - d. Set. CV. Kaili Membangun, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Desa Buranga TA. 2023, DISPUPRP sebesar Rp458.038,80;
 - e. Set. PT. Anugrah Argon Medica, atas Denda Keterlambatan Penyerahan Alat Kesehatan, DINKES sebesar Rp 80.939.520,00;
 - f. Set. CV. Maritim Fiberglass, atas Pengembalian Denda Keterlambatan Pekerjaan Penangkapan Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil, DISLUTKAN Rp 9.295.000,00
 - g. Set. CV. Colour's, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Pos Kejaksaaan Parigi, DISPUPRP sebesar Rp6.467.027,03;
 - h. Set. CV. Krisna Mandiri, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran KB, DP3AKB sebesar Rp2.465.190,00;
 - i. Set. CV. Abun Jaya, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tada-Irigasi, DISPUPRP sebesar Rp126.981.150,00;
 - j. Set. CV. Tunas Karya, atas Pengembalian Denda Lambat Pekerjaan Air Bersih Perumahan Nelayan, DISPUPRP sebesar Rp568.002,00;
 - k. Set. CV. Yoyo Abadi, atas Pengembalian Denda Lambat Pekerjaan Air Bersih Perumahan Nelayan, DISPUPRP sebesar Rp568.024,00;
 - l. Set. CV. Yoyo Abadi, atas Pengembalian Denda Lambat Pekerjaan Air Bersih Perumahan Nelayan, DISPUPRP sebesar Rp568.202,00;
 - m. Set. CV. Colours, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan, DISPUPRP sebesar Rp7.081.233,80;
 - n. Set. CV. Wasis Karya, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Al-Khaidayah Desa Donggulu TA. 2023, DISPUPRP sebesar Rp1.707.445,70;
 - o. Set. CV. Habibi Tunas Putra, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab Dinas Kajari Kejaksaaan TA. 2023, DISPUPRP sebesar Rp4.019.714,28;



- p. Set. CV. Fite Menui Lemboana Reangku, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Trans Bimoli Pantai TA. 2023, DISPUPRP sebesar Rp2.889.743,75;
- q. Set. CV. Bolle Cipta Sejahtera, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan, DISPUPRP sebesar Rp16.981.782,00;
- r. Set. CV. Annur Perkasa, atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, DISPUPRP sebesar Rp13.226.335,00;
- s. Set. PT. Duta Wijaya Teknik, atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, DISPUPRP sebesar Rp20.297.424,00;
- t. Set. CV. Wahyu Utama Jaya, atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, DISPUPRP sebesar Rp9.958.963,00;
- u. Set. CV. Eureka Alam Perkasa, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan di Desa Lado, DISPUPRP sebesar Rp25.862.111,00;
- 7. Pendapatan denda pajak daerah Tahun 2023 dianggarkan Rp63.981.798,00 dan terealisasi sebesar Rp205.079.278,11 atau 320,53%. Pendapatan denda pajak daerah terdiri dari pendapatan denda pajak reklame terealisasi sebesar Rp3.354.229,20 dan pendapatan denda pajak PBBP2 terealisasi sebesar Rp201.725.048,91.
- 8. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi Rp2.501.136.967,17 merupakan penerimaan dari setoran yang berasal dari temuan hasil pemeriksaan BPK maupun dari pemeriksaan Inspektorat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp489.491.482,00;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1.682.745.902,40;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp24.903.370,00;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp5.722.200,00;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp99.720.000,00;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp354.012,77;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp193.200.000,00;
 - h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan – bangunan Gedung sebesar Rp5.000.000,00;
- 9. Pendapatan BLUD dianggarkan Rp67.651.339.741,00 dan terealisasi sebesar Rp79.427.331.037,15 pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan langsung instalasi, pendapatan langsung non instalasi, pendapatan dari pemakaian kekayaan daerah, pendapatan pelayanan penjamin dan pendapatan lain-lain. Pendapatan BLUD terdiri dari Pendapatan BLUD RSUD – Anuntaloko terealisasi sebesar Rp69.660.692.488,15 dan pendapatan BLUD RSUD Tombolotutu terealisasi sebesar Rp9.766.638.549,00;
- 10. Pendapatan Dana kapitasi JKN pada FKTP adalah dana untuk 23 Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp24.119.071.707,00 dan terealisasi sebesar Rp19.584.794.698,00



atau tidak mencapai target hanya 81,20%, dikarenakan adanya penurunan jumlah peserta BPJS, rasio rujukan yang tidak memenuhi target dan kurangnya tenaga dokter, khususnya dokter gigi di Puskesmas.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom Lain dalam rangka perimbangan keuangan. Tahun 2023 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.674.437.577.029,00 dan terealisasi sebesar Rp1.592.295.209.339,00 atau 95,09%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.599.813.116.806,00	1.519.743.272.120,00	95,00	1.342.698.896.105,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.624.460.223,00	72.551.937.219,00	97,22	56.476.667.879,00
	Jumlah	1.674.437.577.029,00	1.592.295.209.339,00	95,09	1.399.175.563.984,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.599.813.116.806,00 dan terealisasi sebesar Rp1.519.743.272.120,00 atau 95,00%.

Tabel 5.8. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Perimbangan	1.349.008.361.806,00	1.269.189.959.620,00	94,08	1.112.514.280.305,00
2	Dana Desa	241.374.897.000,00	241.123.454.500,00	99,90	230.184.615.800,00
3	Insentif Fiskal	9.429.858.000,00	9.429.858.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.599.813.116.806,00	1.519.743.272.120,00	95,00	1.342.698.896.105,00

- 1 Dana Perimbangan, Tahun 2023 dianggarkan Rp1.349.008.361.806,00 dan terealisasi sebesar Rp1.269.189.959.620,00 atau 94,08% dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.9. Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Transfer Umum - DBH	130.637.553.829,00	51.937.536.032,00	39,76	79.367.347.334,00
2	Dana Alokasi Umum	769.366.039.000,00	777.097.127.251,00	101,00	720.038.970.000,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	211.987.267.000,00	210.878.154.045,00	99,48	184.496.372.332,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	237.017.501.977,00	229.277.142.292,00	96,73	128.611.590.639,00
	Jumlah	1.349.008.361.806,00	1.269.189.959.620,00	94,08	1.112.514.280.305,00

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Dana Perimbangan di TA 2023 bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2022 terdapat Dana Bagi Hasil pada *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Bank Indonesia sebesar Rp4.582.836.057,00 yang telah di transfer ke kas daerah pada bulan April dan Oktober 2023 sehingga menambah pendapatan Dana Bagi Hasil pada Dana Perimbangan;
- 2) Terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp7.782.125.000,00 yang merupakan THR guru pada bulan Desember 2023;
- 3) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana Bos di catat pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- 4) Pada tahun 2023 terdapat TDF sebesar Rp66.419.388.000,00 pada rekening Bank Indonesia Nomor 51900049480, dan pada bulan Maret tahun 2024 sudah dicairkan ke Kas Daerah sebesar Rp40.243.516.247,00.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Tahun 2023 Dana Bagi Hasil yang dianggarkan Rp130.637.553.829,00 dan terealisasi sebesar Rp51.937.536.032,00 atau 39,76% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.228.774.000,00	3.919.184.802,00	121,38	7.040.883.659,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	5.623.169.368,00	0,00	0,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.101.707.742,00	271.990.439,00	3,83	4.334.876.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	174.455.544,00	176.688.851,00	101,28	133.085.940,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	11.382.239.901,00	2.415.893.676,00	21,23	4.726.154.769,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	49.741.404.078,00	8.663.990.292,00	17,42	24.665.229.536,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.419.091.806,00	0,00	22.240.425,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	50.297.779.564,00	20.504.806.000,00	40,77	36.303.689.005,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	381.987.000,00	401.761.587,00	105,18	182.877.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	4.225.732.000,00	4.225.732.000,00	100,00	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.103.474.000,00	4.315.227.211,00	105,16	1.958.311.000,00
	Jumlah	130.637.553.829,00	51.937.536.032,00	39,76	79.367.347.334,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp51.937.536.032,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA. 2023 pada Lampiran V;

- b. Dana Alokasi Umum dianggarkan Rp769.366.039.000,00 dan terealisasi sebesar Rp777.097.127.251,00 atau 101,00%. Nilai anggaran sebesar Rp769.366.039.000,00 *telah* sesuai dengan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023, realisasi sebesar Rp777.097.125.251,00 lebih besar dibandingkan anggaran, karena:
 - 1) Dana Alokasi Umum di tetapkan dalam Pepres Nomor 130 tahun 2022 sebesar Rp769.366.039.000,00;
 - 2) Terdapat penyaluran Tambahan DAU sebesar Rp7.782.125.000,00 yang merupakan THR Guru dan
 - 3) Terdapat potongan penyaluran DAU bulan Oktober sebesar Rp51.036.749,00 yang merupakan sisa DAK Non Fisik tahun 2022, untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp50.036.749,00 dan dana pelayanan Adminduk sebesar Rp970.219,00;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dianggarkan Rp211.987.267.000,00 dan terealisasi sebesar Rp210.878.154.045,00 atau 99,48% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Rincian DAK Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.243.646.000,00	1.217.984.000,00	97,94	1.256.760.598,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	40.640.686.000,00	40.635.892.700,00	99,99	24.394.815.550,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	29.062.522.000,00	29.057.443.700,00	99,98	34.951.802.507,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	495.851.220,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.045.492.000,00	246.150.000,00	3,49	39.819.402.594,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	246.157.000,00	0,00	0,00	5.919.479.750,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	36.696.213.000,00	0,00	0,00	4.388.880.139,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	38.715.938.154,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.544.856.810,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.138.763.000,00	6.792.529.862,00	317,59	802.817.500,00
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	15.566.452.000,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	34.229.289.000,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	30.655.347.000,00	30.373.809.753,00	99,08	14.567.369.350,00
14	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	12.136.953.000,00	11.971.276.763,00	98,63	5.203.848.004,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	49.569.549.113,00	0,00	32.356.252.950,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.002.791.360,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.831.989.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.325.747.000,00	2.297.580.000,00	98,79	3.959.455.000,00
	Jumlah	211.987.267.000,00	210.878.154.045,00	99,48	184.496.372.332,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp210.878.154.045,00 *tidak* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Karena berdasarkan PMK 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus, bahwa penyaluran DAK Fisik berdasarkan jumlah kontrak yang diterbitkan.

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 dianggarkan Rp237.017.501.977,00 dan terealisasi sebesar Rp229.277.142.292,00 atau 96,73%. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.12. Rincian DAK Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	63.474.360.000,00	63.960.310.680,00	100,77	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	95.921.345.000,00	94.218.645.852,00	98,22	83.505.926.405,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.638.000.000,00	1.895.999.999,00	71,87	1.717.249.358,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.519.793.977,00	1.519.793.000,00	100,00	1.289.702.058,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	14.593.200.000,00	14.251.776.000,00	97,66	12.474.352.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.974.600.000,00	5.827.600.000,00	97,54	3.534.700.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	41.002.638.000,00	40.273.369.819,00	98,22	18.513.172.386,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.761.051.000,00	2.537.956.842,00	37,54	6.358.489.532,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	457.770.000,00	452.208.960,00	98,79	399.472.000,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	459.100.000,00	458.920.520,00	99,96	316.149.500,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	940.650.000,00	940.560.620,00	99,99	502.377.400,00
	Jumlah	237.017.501.977,00	229.277.142.292,00	96,73	128.611.590.639,00

- Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp229.277.142.292,00 *tidak* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Dikarenakan penyaluran DAK Non Fisik, disalurkan dengan memperhitungkan Silpa tahun sebelumnya sesuai PMK 119 Tahun 2021. Untuk Dak Non Fisik Tunjangan profesi guru, Tambahan penghasilan Guru dan Tunjangan khusus guru, penyalurannya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas pendidikan dan Kebudayaan dengan KEMENDIKBUD dan KEMENKEU;
- 2 Dana Desa yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp241.123.454.500,00 *tidak* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V sebesar Rp233.938.471.000,00 dikarenakan ada penambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan Penghargaan dari Kementerian/lembaga sebesar Rp7.436.026.000,00 sesuai Surat Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana Desa Nomor S-129/PK/2023 pada tanggal 25 September 2023; dan
 - 3 Insentif Fiskal yang diterima pada TA sebesar Rp9.429.858.000 *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada lampiran halaman 3;

**5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah**

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan dari Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Tahun 2023 dianggarkan Rp74.624.460.223,00 dan terealisasi sebesar Rp72.551.937.219,00 atau 97,22% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil	65.964.460.223,00	64.241.937.219,00	97,39	56.476.667.879,00
2	Bantuan Keuangan	8.660.000.000,00	8.310.000.000,00	95,96	0,00
	Jumlah	74.624.460.223,00	72.551.937.219,00	97,22	56.476.667.879,00

- 1 Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan Rp65.964.460.223,00 dan terealisasi sebesar Rp64.241.937.219,00 atau 97,39% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.437.937.745,00	8.839.095.634,00	93,65	8.280.235.691,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.736.194.252,00	9.202.244.126,00	94,52	10.548.258.751,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.932.560.228,00	25.140.737.249,00	105,05	23.502.589.376,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air permukaan	480.927.916,00	509.834.022,00	106,01	53.685.875,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.376.840.082,00	20.550.026.188,00	91,84	14.091.898.186,00
	Jumlah	65.964.460.223,00	64.241.937.219,00	97,39	56.476.667.879,00

Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, disebabkan adanya penerimaan piutang DBH Tahun 2022 sebesar Rp8.554.832.430,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/81/BAPENDA-G.ST/2023, yang diterima di kas daerah pada bulan Desember 2023.

- 2 Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp8.660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.310.000.000,00 atau 95,96% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Rincian Bantuan Keuangan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.660.000.000,00	8.310.000.000,00	95,96	0,00
	Jumlah	8.660.000.000,00	8.310.000.000,00	95,96	0,00

**5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Hibah tahun 2023 dianggarkan Rp3.047.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.784.127.007,00 atau 91,35% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Hibah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	91,35	5.188.307.081,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0.00	62.550.980.060,00
	Jumlah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	91,35	67.739.287.141,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.17. Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.019.900.000,00	2.756.127.007,00	91.27	3.344.612.081,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0.00	1.500.000.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	343.695.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00	0,00	0.00	0,00
	Jumlah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	91,35	5.188.307.081,00

- 1 Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Pendapatan Hibah di TA 2023 bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Tidak terdapat hibah dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan Dalam Negeri hanya di pungut bulan Januari, dikarenakan hasil konsultasi dengan KEMENDAGRI bahwa pos-pos penjagaan di perbatasan wilayah hanya boleh ada pengawasan, tidak boleh ada pungutan.



- 2 Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk Hibah Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI)* Nomor : PHD-40/MK.7/2018, Tanggal 12 Desember 2018.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat (1) bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan, oleh karena itu Tahun 2023 tidak ada realisasi pada Pendapatan Hibah Dana Bos pada akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Parundang-undangan, sedangkan Tahun 2022 pendapatan Dana Bos sebesar Rp62.550.980.060,00 termasuk pendapatan hibah Dana Bos disajikan pada akun lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Daerah TA 2023 yang dianggarkan sebesar Rp1.909.395.603.102,00 dan terealisasi sebesar Rp1.823.512.126.117,80 atau 95,50%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.629.813.758.089,07 mengalami kenaikan sebesar Rp193.698.368.028,73 atau 11,88%. Rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.18. Realisasi Belanja Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	1.327.291.766.375,00	1.265.386.396.984,80	95,34	1.140.101.932.342,41
Belanja Modal	240.905.282.296,00	221.206.397.626,00	91,82	175.499.998.170,66
Belanja Tak Terduga	6.277.131.000,00	3.051.237.500,00	48,61	4.708.172.100,00
Belanja Transfer	334.921.423.431,00	333.868.094.007,00	99,69	309.503.655.476,00
JUMLAH	1.909.395.603.102,00	1.823.512.126.117,80	95,50	1.629.813.758.089,07

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.327.291.766.375,00 dan terealisasi sebesar Rp1.265.386.396.984,80 atau 95,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.140.101.932.342,41 mengalami kenaikan sebesar Rp125.284.464.642,39 atau 10,99%. Rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5.19. Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	651.385.612.213,00	630.041.917.271,00	96,72	606.804.834.573,00
Belanja Barang dan Jasa	556.640.447.166,00	528.001.154.156,80	94,85	463.930.556.559,87
Belanja Bunga	158.500.000,00	158.373.089,00	99,92	168.181.692,54
Belanja Hibah	116.189.125.746,00	104.420.301.218,00	89,87	67.528.737.267,00
Belanja Bantuan Sosial	2.918.081.250,00	2.764.651.250,00	94,74	1.669.622.250,00
Jumlah	1.327.291.766.375,00	1.265.386.396.984,80	95,34	1.140.101.932.342,41

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Belanja Pegawai TA 2023. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp651.385.612.213,00 dan terealisasi sebesar Rp630.041.917.271,00 atau 96,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp606.804.834.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.237.082.698,00 atau 3,83%. Rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.20. Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	444.393.583.934,00	436.939.182.909,00	98,32	421.712.886.878,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	83.135.300.184,00	76.273.754.936,00	91,75	75.877.280.250,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.442.375.005,00	98.591.827.227,00	93,50	93.523.964.752,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.571.764.650,00	17.466.409.466,00	99,40	14.786.139.343,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	188.188.440,00	152.072.733,00	80,81	168.603.350,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH	601.600.000,00	565.870.000,00	94,06	601.560.000,00
Belanja Pegawai BLUD	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00	134.400.000,00
Jumlah	651.385.612.213,00	630.041.917.271,00	96,72	606.804.834.573,00

- Penyebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 diantaranya sebagai berikut:
 - Belanja Pegawai pada RSUD Raja Tombolotutu dianggarkan sebesar Rp6.399.650.138,00 dan terealisasi sebesar Rp4.393.927.576,00 atau 68,66% disebabkan oleh 3 dari 5 orang dokter berstatus ASN yang bertugas pada RSUD Raja Tombolotutu sedang melaksanakan tugas belajar sehingga tunjangannya tidak dapat direalisasikan; dan
 - Belanja Honorarium pada RSUD Raja Tombolotutu dianggarkan sebesar Rp74.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp38.400.000,00 atau 51,53% disebabkan beberapa honorarium sudah termasuk di dalam tambahan penghasilan (TP) sehingga pegawai tersebut tidak berhak lagi untuk menerima honorarium tersebut.
- Rincian Belanja Pegawai TA 2023 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2023 yang dianggarkan sebesar Rp556.640.447.166,00 dan terealisasi sebesar Rp528.001.154.156,80 atau 94,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp463.930.556.559,87 mengalami kenaikan sebesar Rp64.070.597.596,93 atau 13,81%. Rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.21. Realisasi Belanja Barang dan Jasa*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Barang	98.766.269.254,00	89.041.942.824,00	90,15	59.628.050.015,87
Belanja Jasa	181.177.125.971,00	172.567.709.145,00	95,25	139.408.494.398,00
Belanja Pemeliharaan	37.016.808.474,00	35.704.731.924,00	96,46	37.796.206.063,00
Belanja Perjalanan Dinas	102.143.891.536,00	97.571.949.697,00	95,52	78.798.987.134,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.427.954.192,00	2.310.415.268,00	95,16	1.272.635.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	60.152.656.896,00	53.063.052.950,00	88,21	55.095.108.275,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.955.740.843,00	77.741.352.348,80	103,72	91.931.075.674,00
Jumlah	556.640.447.166,00	528.001.154.156,80	94,85	463.930.556.559,87

1. Penyebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dipengaruhi oleh belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Anuntaloko yang melebihi dari pagu anggaran atau sebesar 106,81% karena di akhir tahun 2023 BLUD RSUD Anuntaloko menggunakan nilai ambang batas yang menambah pagu anggaran belanja sebesar Rp12.000.000.000,00. Sehingga pagu anggaran belanja yang sebelumnya sebesar Rp99.922.587.944,00 menjadi Rp111.922.587.944,00. Penggunaan ambang batas pada sumber Dana BLUD TA 2023 dengan telah mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (*trend*) naik/turun selisih batas antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan sehingga persentase ambang batas yang digunakan sesuai dengan perhitungan dan ketentuan yang berlaku yakni sebesar 19,5% atau sebesar Rp12.000.000.000,00. Penggunaan ambang batas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 secara umum belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 15,24 %.
2. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2023 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

**5.1.2.1.3 Belanja Bunga**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bunga TA 2023 yang dianggarkan sebesar Rp158.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp158.373.089,00 atau 99,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp168.181.692,54 mengalami penurunan sebesar Rp9.808.603,54 atau 5,83%.

1. Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bunga di TA 2023 yaitu perhitungan nilai bunga berasal dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya membayarkan sesuai tagihan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,83% karena dipengaruhi oleh nilai pokok pinjaman yang menurun.
2. Belanja bunga tersebut di atas merupakan pembayaran atas bunga Pinjaman Luar Negeri *Loan* IBRD SLA dengan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-91/MK.5/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mengatur atas pinjaman sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan masa pinjaman 15 tahun dan dikenakan bunga pinjaman sebesar tingkat bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 5,02% (lima koma nol dua persen). Tetapi jatuh tempo atas perubahan tersebut baru akan berlaku pada tanggal 15 April 2024.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Hibah TA 2023 yang dianggarkan sebesar Rp116.189.125.746,00 dan terealisasi sebesar Rp104.420.301.218,00 atau 89,87%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp67.528.737.267,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.891.563.951,00 atau 54,63 %. Rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.22. Realisasi Belanja Hibah*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	29.000.000.000,00	15.336.237.300,00	52,88	200.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	364.000.000,00	364.000.000,00	100,00	0,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.306.621.600,00	15.170.921.500,00	99,11	7.660.136.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.273.183.518,00	38.447.998.100,00	112,18	23.381.513.381,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.866.415.128,00	33.837.238.818,00	94,34	35.243.181.786,00
- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	335.000.000,00	220.000.000,00	65,67	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.043.905.500,00	1.043.905.500,00	100,00	1.043.905.500,00
Jumlah	116.189.125.746,00	104.420.301.218,00	89,87	67.528.737.267,00

- Sebab-sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di anggarakan Rp29.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.336.237.300,00 atau 52,88% disebabkan penerima hibah tidak memenuhi persyaratan peraturan yang ada. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.136.237.300 atau 7.568,12 %; dan
 - Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar salah satunya hibah dana BOS sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di anggarakan sebesar Rp31.553.183.460,00 dan terealisasi sebesar Rp35.727.998.100,00 atau 113,23% pelampauan anggaran tersebut disebabkan penganggaran belanja dana BOS sekolah swasta yang seharusnya dianggarkan pada belanja hibah akan tetapi dianggarkan pada belanja barang jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS dan belanja modal aset tetap lainnya BOS. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.141.654.719,00 atau 82,41%.
- Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik berupa uang sebesar Rp1.043.905.500,00 yang didasarkan pada Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 200.45/691/KESBANGPOL Tahun 2021 tentang Besaran Bantuan Kepada Partai Politik Tahun 2019-2024 yang memperoleh suara di DPRD Kabupaten Parigi Moutong TA 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.23. Bantuan Partai Politik

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Bantuan Keuangan kepada Partai NASDEM Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	136.723.500,00	136.723.500,00	100,00	136.723.500,00
2	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	133.609.500,00	133.609.500,00	100,00	133.609.500,00
3	Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	111.879.000,00	111.879.000,00	100,00	111.879.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
4	Bantuan Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	98.001.000,00	98.001.000,00	100,00	98.001.000,00
5	Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	83.133.000,00	83.133.000,00	100,00	83.133.000,00
6	Bantuan Keuangan kepada Partai HANURA Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	76.783.500,00	76.783.500,00	100,00	76.783.500,00
7	Bantuan Keuangan kepada Partai PERINDO Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	72.936.000,00	72.936.000,00	100,00	72.936.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	68.503.500,00	68.503.500,00	100,00	68.503.500,00
9	Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	67.531.500,00	67.531.500,00	100,00	67.531.500,00
10	Bantuan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	62.464.500,00	62.464.500,00	100,00	62.464.500,00
11	Bantuan Keuangan Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	55.773.000,00	55.773.000,00	100,00	55.773.000,00
12	Bantuan Keuangan kepada Partai BERKARYA Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	39.046.500,00	39.046.500,00	100,00	39.046.500,00
13	Bantuan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	37.521.000,00	37.521.000,00	100,00	37.521.000,00
	Jumlah	1.043.905.500,00	1.043.905.500,00	100,00	1.043.905.500,00

3. Rincian Belanja Hibah TA 2023 di masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada pada *Lampiran 8*.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.918.081.250,00 dan terealisasi sebesar Rp2.764.651.250,00 atau 94,74%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.669.622.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.095.029.000,00 atau 65,59%. Rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.24. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.893.081.250,00	2.739.651.250,00	94,70	1.669.622.250,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	2.918.081.250,00	2.764.651.250,00	94,74	1.669.622.250,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023 di masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

**5.1.2.2 Belanja Modal**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp240.905.282.296,00 dan terealisasi sebesar Rp221.206.397.626,00 atau 91,82%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp175.499.998.170,66 mengalami kenaikan sebesar Rp45.706.399.455,34 atau 26,04%. Rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.25. Realisasi Belanja Modal*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	698.230.000,00	698.220.000,00	100,00	149.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.698.097.860,00	87.126.556.041,00	100,49	59.378.243.109,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.851.757.534,00	48.904.164.451,00	96,17	58.628.339.943,66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.989.732.602,00	77.201.512.634,00	80,43	54.814.456.891,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.667.464.300,00	7.275.944.500,00	109,13	2.529.458.227,00
Jumlah	240.905.282.296,00	221.206.397.626,00	91,82	175.499.998.170,66

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Tanah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp698.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp698.220.000,00 atau 99,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp149.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp548.720.000,00 atau 367,04%. Rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Modal Tanah*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Belanja Modal Lapangan	698.230.000,00	698.220.000,00	99,99	59.500.000,00
Jumlah	698.230.000,00	698.220.000,00	99,99	149.500.000,00

Rincian Belanja Modal Tanah yang terealisasi pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Tanah lokasi *Motocross* di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo sebesar Rp287.025.000,00;
2. Tanah lokasi *Motocross* di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo sebesar Rp212.975.000,00; dan
3. Tanah lokasi Lahan Sepak Bola di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat sebesar Rp198.220.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar



Rp86.698.097.860,00 dan terealisasi sebesar Rp87.126.556.041,00 atau 100,49 %. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp59.378.243.109,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.748.312.932,00 atau 46,73 %. Rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Alat Besar	322.142.510,00	315.795.636,00	98,03	578.721.710,00
Belanja Modal Alat Angkutan	1.110.854.610,00	1.104.867.000,00	99,46	2.676.487.620,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	41.496.000,00	23.386.000,00	56,36	234.225.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	5.936.200,00	5.936.200,00	100,00	38.062.500,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.192.008.191,00	14.867.819.249,00	97,87	9.088.571.878,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	257.378.737,00	239.511.250,00	93,06	923.346.750,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	51.015.892.692,00	50.469.998.053,00	98,93	20.851.741.517,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	7.722.957.500,00	7.709.393.719,00	99,82	18.468.691.250,00
Belanja Modal Komputer	5.982.250.700,00	5.803.247.870,00	97,01	6.239.183.084,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	231.808.920,00	231.808.920,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	33.645.000,00	33.645.000,00	100,00	29.962.500,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00	4.499.000,00	99,98	188.249.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.777.226.800,00	6.316.648.144,00	132,22	0,00
Jumlah	86.698.097.860,00	87.126.556.041,00	100,49	59.378.243.109,00

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Belanja modal peralatan dan mesin BOS pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan dianggarkan sebesar Rp4.777.226.800,00 dan terealisasi sebesar Rp6.316.648.144,00 atau 132,22 disebabkan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada akhir tahun yang tidak disesuaikan atau di *input* pada aplikasi SIPD. sedangkan pada tahun 2022 belanja modal peralatan dan mesin BOS tidak dianggarkan; dan
 - Belanja modal komputer unit pada RSUD Raja Tombolotutu dianggarkan sebesar Rp64.320.000,00 dan tidak terealisasi.
- Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp50.851.757.534,00 dan terealisasi sebesar Rp48.904.164.451,00 atau 96,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp58.628.339.943,66 mengalami



penurunan sebesar Rp9.724.175.492,66 atau 16,59%. Rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.28. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bangunan Gedung	50.359.013.034,00	48.412.358.907,00	96,13	57.494.488.943,66
Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	492.744.500,00	491.805.544,00	99,81	1.083.851.000,00
Jumlah	50.851.757.534,00	48.904.164.451,00	96,17	58.628.339.943,66

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023, di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp95.989.732.602,00 dan terealisasi sebesar Rp77.201.512.634,00 atau 80,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp54.814.456.891,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.387.055.743,00 atau 40,84%. Rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.29. Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	83.299.368.520,00	64.806.529.502,00	77,80	34.547.462.791,00
Belanja Modal Bangunan Air	11.563.237.282,00	11.453.619.632,00	99,05	10.424.044.500,00
Belanja Modal Instalasi	1.127.126.800,00	941.363.500,00	83,52	9.663.251.700,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	179.697.900,00
Jumlah	95.989.732.602,00	77.201.512.634,00	80,43	54.814.456.891,00

1. Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Jalan Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp6.393.755.161,00 dan terealisasi sebesar Rp4.174.271.164,00 atau 65,29% disebabkan terdapat pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa Lembah Bomban dan Pembangunan Rabat Beton Desa Taopa Utara tidak terealisasi disebabkan oleh sumber dana paket ini merupakan Sisa DAK Tahun 2022, setelah dikonsultasikan dana tersebut tidak dapat digeser ke kegiatan lain karena output awal dari kegiatan belum tercapai. Jika dibandingkan



dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.904.908.164,00 atau 1449.68%; dan

- b. Belanja Modal Jalan Desa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp8.256.425.325,00 dan terealisasi sebesar Rp6.385.508.404,00 atau 77,34% disebabkan terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak terealisasi yang disebabkan karena paket - paket tersebut dianggarkan pada saat anggaran biaya tambahan (ABT) sehingga waktu yang terbatas atau singkat, sehingga tidak memungkinkan dilakukan untuk proses lelang. Paket yang tidak terealisasi diantaranya:
 - 1) Peningkatan Jalan Kayuboko – Baliara
 - 2) Peningkatan Jalan Pelawa – Binangga
 - 3) Peningkatan Jalan Santibaru – Lebaksuren
 - 4) Peningkatan Jalan Sidole – Tanampedagi
 - 5) Peningkatan Jalan Suli – Anggungan
 - 6) Peningkatan Jalan Toboli Pemancar
 - 7) Peningkatan Jalan Torue – Astina
 - 8) Peningkatan Jalan Ulatan PKMT
 - c. Terdapat pekerjaan peningkatan jalan desa buranga, dimana pekerjaannya telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023 dan telah dilakukan PHO pekerjaan 100% tanggal 29 Agustus 2023, namun realisasi pembayaran tidak dibayarkan 100% dikarenakan tidak tercapainya faktor kepadatan dan ketebalan aspal sesuai dengan spesifikasi Bina Marga revisi 2 Tahun 2018.
2. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023, di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.667.464.300,00 dan terealisasi sebesar Rp7.275.944.500,00 atau 109,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.529.458.227,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.746.486.273,00 atau 187,65%. Rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.30. Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.830.000.000,00	4.827.211.950,00	99,94	1.609.060.427,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	256.930.000,00	256.885.000,00	99,98	26.559.800,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	0,00	893.838.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.530.534.300,00	2.191.847.550,00	143,21	0,00
Jumlah	6.667.464.300,00	7.275.944.500,00	109,13	2.529.458.227,00



1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 namun tidak terealisasi disebabkan kode dan nama rekening tidak sesuai pada saat penganggaran dengan nama paket belanja; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp 1.530.534.300,00 dan terealisasi sebesar Rp2.191.847.550,00 atau 143,21% realisasi tersebut melebihi anggaran disebabkan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada akhir tahun yang tidak disesuaikan atau di input pada aplikasi SIPD.
2. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023, di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Tak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.277.131.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.051.237.500,00 atau 48,61 %. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.708.172.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.656.934.600,00 atau 35,19%. Rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.31. Realisasi Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tak Terduga	6.277.131.000,00	3.051.237.500,00	48,61	4.708.172.100,00
Jumlah	6.277.131.000,00	3.051.237.500,00	48,61	4.708.172.100,00

1. Belanja Tak Terduga yang dikeluarkan dalam rangka bencana sebesar Rp3.036.267.500,00 belanja tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong
 - a. Nomor : 367.45/568/BPBD tentang Belanja Kebutuhan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik Bencana Banjir Kecamatan Torue dan Kecamatan Balinggi; dan
 - b. Nomor : 300.2.1/1168/BPBD tentang Belanja Kebutuhan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik Bencana Banjir Kecamatan Taopa dan Kecamatan Balinggi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Pengeluaran pengembalian atas kelebihan pembayaran BOS akibat kekeliruan penyetoran yang seharusnya ke Kas Sekolah tetapi disetor ke Kas Daerah sebesar Rp14.970.000,00 terdiri dari :
 - a. SMP Negeri 6 Bolano Lambunu sebesar Rp1.224.000,00;
 - b. SMP Negeri 2 Ampibabo sebesar Rp5.237.000,00;
 - c. SD Inpres Sumbersari sebesar Rp1.524.000,00;
 - d. SMP Negeri 3 Tinombo sebesar Rp224.000,00;
 - e. SMP Negeri 1 Mepanga sebesar Rp5.237.000,00; dan
 - f. SMP Satu Atap 2 Tinombo sebesar Rp1.524.000,00.

**5.1.2.4 Belanja Transfer Daerah**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Transfer Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp334.921.423.431,00 dan terealisasi sebesar Rp333.868.094.007,00 atau 99,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp309.503.655.476,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.364.438.531,00 atau 7,87%. Rincian atas saldo Transfer Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.32. Realisasi Belanja Transfer Daerah*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bagi Hasil	2.652.997.431,00	2.575.077.892,00	97,06	2.708.757.744,00
Belanja Bantuan Keuangan	332.268.426.000,00	331.293.016.115,00	99,71	306.794.897.732,00
Jumlah	334.921.423.431,00	333.868.094.007,00	99,69	309.503.655.476,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Transfer Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.652.997.431,00 dan terealisasi sebesar Rp2.575.077.892,00 atau 97,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.708.757.744,00 mengalami penurunan sebesar Rp133.679.852,00 atau 4,94%. Rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.33. Realisasi Belanja Bagi Hasil*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.610.200.000,00	1.557.394.200,00	96,72	1.716.484.241,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	1.042.797.431,00	1.017.683.692,00	97,59	992.273.503,00
Jumlah	2.652.997.431,00	2.575.077.892,00	97,06	2.708.757.744,00

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.557.394.200,00 disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; dan
2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.017.683.692,00 disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp332.268.426.000,00 dan terealisasi sebesar Rp331.293.016.115,00 atau 99,71%. Jika



dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp306.794.897.732,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.473.528.268,00 atau 8,30%. Rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.34. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan*(dalam rupiah)*

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	8.660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	323.608.426.000,00	331.293.016.115,00	102,37	306.794.897.732,00
Jumlah	332.268.426.000,00	331.293.016.115,00	99,71	306.794.897.732,00

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 dianggarkan sebesar Rp8.660.000.000,00 namun tidak terealisasi pada rekening belanja ini, disebabkan kesalahan pada saat penganggaran. Karena rekening belanja tersebut seharusnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga belanja tersebut tidak dapat terealisasi pada Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi. Namun, belanja tersebut terealisasi di Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp8.310.000.000,00. pada Dinas Sosial; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 terealisasi sebesar Rp331.293.016.115,00 dari anggaran sebesar Rp323.608.426.000,00 atau 102,37% yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa sebesar Rp241.123.454.500,00 didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-129/PK/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Pengelolaan Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp81.854.398.363,00 Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada Kabupaten Parigi Moutong dan disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp8.310.000.000,00 berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 900.1.3/276/BPKAD-G.ST Tahun 2023 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Realisasi tersebut melebihi anggaran, disebabkan ada beberapa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi yang kesalahan kode rekening dan masuk ke Belanja Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada saat penginputan sehingga realisasinya masuk ke belanja bantuan keuangan sebesar Rp5.163.252,00.



5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pembiayaan Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp90.988.562.144,00 dan terealisasi sebesar Rp90.988.562.143,49 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp121.133.739.710,71 mengalami penurunan sebesar Rp30.145.177.567,22 atau 24,89%. Rincian atas saldo Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.35. Pembiayaan Daerah

(dalam rupiah)

Pembiayaan Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan Pembiayaan	92.688.562.144,00	92.688.562.143,49	100,00	122.067.073.043,71
Pengeluaran Pembiayaan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00	933.333.333,00
Jumlah	90.988.562.144,00	90.988.562.143,49	100,00	121.133.739.710,71

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp92.688.562.144,00 dan terealisasi sebesar Rp92.688.562.143,49 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp121.067.073.043,71 mengalami penurunan sebesar Rp28.378.510.900,22 atau 23,44%. Rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.36. Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

Pembiayaan Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.688.562.144,00	92.688.562.143,49	100,00	122.067.073.043,71
Jumlah	92.688.562.144,00	92.688.562.143,49	100,00	122.067.073.043,71

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	3.139.789.952,16
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	930.199.007,00



(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	142.071.604,27
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	59.756.954.938,00	59.756.954.938,00	100,00	83.102.796.253,00
Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	7.245.631.865,96
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	32.931.607.206,00	32.931.607.205,49	100,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	(13.930.315,82)	0,00	27.506.584.361,32
Sisa Dana Kapitasi	0,00	1.212.623,66	0,00	0,00
Jumlah	92.688.562.144,00	92.675.844.451,33	99,99	122.067.073.043,71

Berikut adalah rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD, yaitu :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp(13.930.315,82) terdiri dari:
 - a. Rp63.994.934,00 yaitu koreksi tambah yang merupakan kurang saji atas Kas BLUD tahun 2021 s.d 2022
 - b. Rp77.925.249,82 yaitu koreksi kurang yang merupakan kurang saji atas Kas BLUD akibat tidak dicatatnya PPh Jasa Giro Bank BNI pada Tahun 2022
2. Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp1.212.623,66 yaitu Kurang catat Kas di Bendahara FKTP di Puskesmas yang merupakan pendapatan di tahun 2020 s.d 2022

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.700.000.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp933.333.333,00 mengalami kenaikan sebesar Rp766.666.667,00 atau 82,14%. Rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.38. Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	933.333.333,00
Jumlah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00	933.333.333,00

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00%. yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5.39. Penyertaan Modal Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)					
1	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2023 telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebanyak 6.311 lembar saham dengan harga per lembar Rp158.459,00 terdiri dari nominal perlembar sahamnya Rp100.000,00 nominal per agio saham sebesar Rp58.459,00 sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 4,54% dari sebelumnya 3,92%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp217.397,46. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023-2030.

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.40. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	933.333.333,00
	Jumlah	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	933.333.333,00

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2023 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat yaitu Loan IBRD SLA sebesar Rp700.000.000,00 dari total nilai pinjaman sebesar Rp28.000.000.000,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp227.562.334,00.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari.



Tabel 5.41. SiLPA/(SiKPA)

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	140.921.563.929,00	151.417.604.707,12	107,45	134.453.729.396,85
Pendapatan Transfer	1.674.437.577.029,00	1.592.295.209.339,00	95,09	1.399.175.563.984,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	3.047.900.000,00	2.784.127.007,00	91,35	67.739.287.141,00
Jumlah Pendapatan	1.818.407.040.958,00	1.746.496.941.053,12	96,05	1.601.368.580.521,85
Belanja Operasi	1.327.291.766.375,00	1.265.386.396.984,80	95,34	1.140.101.932.342,41
Belanja Modal	240.905.282.296,00	221.206.397.626,00	91,82	175.499.998.170,66
Belanja Tidak Terduga	6.277.131.000,00	3.051.237.500,00	48,61	4.708.172.100,00
Belanja Transfer	334.921.423.431,00	333.868.094.007,00	99,69	309.503.655.476,00
Jumlah Belanja	1.909.395.603.102,00	1.823.512.126.117,80	95,50	1.629.813.758.089,07
Surplus/Defisit	(90.988.562.144,00)	(77.015.185.064,68)	84,64	(28.445.177.567,22)
Penerimaan Pembiayaan	92.688.562.144,00	92.675.844.451,33	99,99	122.067.073.043,71
Pengeluaran Pembiayaan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00	933.333.333,00
Jumlah Pembiayaan Netto	90.988.562.144,00	90.975.844.451,33	99,99	121.133.739.710,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	13.960.659.386,65	0,00	92.688.562.143,49

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp13.960.659.386.65

5.2. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari.

Tabel 5.42. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	92.688.562.143,49	122.067.073.043,71

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

**5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.43 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	92.675.844.451,33	122.067.073.043,71

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama TA 2023 dan 2022.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.44. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	13.960.659.386,65	92.688.562.143,49

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA .

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari.

Tabel 5.45. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi kesalahan pengakuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	(13.930.315,82)	-
Koreksi kesalahan pengakuan Sisa Dana Kapitasi	1.212.623,66	-
Jumlah	(12.717.692,16)	-



5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari.

Tabel 5.46. Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun Tahun 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Kas di Kasda	2.509.551.842,90	82.432.831.215,03
Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.834.758.700,00	363.261.121,57
Kas di BLUD	9.308.670.323,55	9.700.682.284,02
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.128.000,00	121.962.131,67
Kas di Bendahara Penerimaan	6.852.300,20	2.097.772,20
Kas Dana BOS	383.441.343,00	112.514.619,00
Kas Lainnya	2.880.900.318,00	473.491,00
Pajak menyebang yang masih ada di kas daerah dan bendahara pengeluaran OPD	(4.119.814.457,00)	(45.260.491,00)
Uang yang masih terdapat pada akhir tahun dibendahara Pengeluaran yang belum sempat diberikan kepada yang berhak sehingga terutang	(2.849.828.984,00)	-

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA.

5.3. PENJELASAN ATAS NERACA

Secara umum pos-pos neraca dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar perkiraan, yakni aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut ini penjelasan atas saldo-saldo dan perkiraan (akun) yang tercantum dalam neraca posisi 31 Desember 2023.

5.3.1 Aset

Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.750.626.313.782,97 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.47. Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Aset Lancar	77.682.547.582,33	150.175.605.674,91
2	Investasi Jangka Panjang	31.196.947.650,67	30.196.947.650,67
3	Aset Tetap	2.491.203.084.090,59	2.435.523.782.190,02
4	Aset Lainnya	150.543.734.459,38	86.968.813.140,15
	Total Aset	2.750.626.313.782,97	2.702.865.148.655,75



Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.750.626.313.782,97 dibandingkan dengan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp2.702.865.148.655,75 terdapat kenaikan sebesar Rp47.761.165.127,22.

5.3.1.1 Aset Lancar

Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp77.682.547.582,33 dibandingkan dengan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp150.175.605.674,91 terdapat penurunan sebesar Rp72.493.058.092,58. Rincian aset lancar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.48. Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	2.509.551.842,90	82.388.044.215,03
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.128.000,00	121.962.131,67
Kas di Bendahara Penerimaan	6.852.300,20	2.097.772,20
Kas di Kas Badan Layanan Umum Daerah	9.308.670.323,55	9.700.682.284,02
Kas Dana BOS	383.441.343,00	112.514.619,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	313.984.557,00	363.261.121,57
Kas Dana BOK Puskesmas	5.520.774.143,00	0,00
Kas Lainnya	2.880.900.318,00	45.260.491,00
Piutang Pajak Daerah	10.854.258.182,72	9.586.191.223,24
Piutang Retribusi	9.434.897.616,00	1.391.500.600,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	7.301.863.966,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.534.950.849,07	16.887.539.168,52
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	4.546.807.236,00
Piutang Transfer Antar Daerah	8.358.403.228,00	8.554.832.430,00
Penyisihan Piutang	(15.924.195.349,61)	(13.259.306.853,25)
Beban Dibayar Di Muka	2.134.215.921,41	709.473.143,80
Persediaan	28.359.714.307,09	21.722.882.126,11
Jumlah	77.682.547.582,33	150.175.605.674,91

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas merupakan aset lancar pada laporan neraca yang paling likuid. Saldo kas di kasda per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.509.551.842,90 menurun sebesar Rp79.878.492.372,13 dibandingkan saldo kas di kasda per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.388.044.215,03.

Tabel 5.49. Saldo Kas di Kasda

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
Kas di Kasda	2.509.551.842,90	82.388.044.215,03



Berikut adalah rincian kas di kas daerah berdasarkan rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.464.813.240,90 yang merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak Bank.

Tabel 5.50. Rincian Rekening Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Bank Sulteng Parigi		
	01.02.00499.4 (RKUD)	2.460.047.751,62	81.015.410.345,16
2	BNi'46 Parigi		
	0199423654	1.452.932,00	118.024.281,00
	0042002108	1.216.067,00	731.666.007,00
3	Bank Mandiri Parigi		
	151-00-0602149-4	547.254,28	240.714.106,87
4	Bank Rakyat Indonesia Parigi		
	00363-01-000251-30-0	546.445,00	276.836.732,00
5	Bank Mega Parigi		
	2244-0011-000019	1.002.791,00	67.844.625,00
6	BI SBN Konversi Pemkab Parigi Moutong		
	GOV320015		
	Jumlah Kas di Bank	2.464.813.240,90	82.450.496.097,03

Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 terdapat pada enam Rekening Giro di enam Bank (satu RKUD dan lima rekening giro lainnya), satu rekening Sub Registry di Bank Indonesia. Rekening Sub-Registry merupakan rekening Surat Berharga Negara yang dibuka berdasarkan PMK Nomor 235/PMK.07/2015 Pasal 15 Ayat (1), surat Bupati Parigi Moutong Nomor 583/1418/BPKAD tanggal 20 April 2016 perihal Permohonan Menjadi Nasabah Sub-Registry dan surat dari Bank Indonesia Nomor 18/24/DPTP-GPB-RKI/Srt/B tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening SBN Konversi. Rekening tersebut dibuka untuk penyimpanan SBN hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU.

Berdasarkan rekonsiliasi antara saldo Buku Kas Umum BUD dengan saldo rekening koran Bank terdapat selisih sebesar Rp44.738.602,00 yang diakibatkan adanya lebih dan kurang bayar SP2D serta BPJS dan pajak jasa giro yang dicatat oleh Bank tetapi oleh Buku Kas Umum BUD tidak di catat.

Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.51. Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo BKU	Saldo Rekening Koran
1	Bank Sulteng Parigi Nomor Rekening 01.02.00499.4 (RKUD)	2.504.786.353,62	2.460.047.751,62
2	BNi'46 Parigi Nomor Rekening 0199423654	1.452.932,00	1.452.932,00
3	BNi'46 Parigi Nomor Rekening 0042002108	1.216.067,00	1.216.067,00
4	Bank Mandiri Parigi Nomor Rekening 151-00-0602149-4	547.254,28	547.254,28
5	Bank Rakyat Indonesia Parigi Nomor Rekening 00363-01-000251-30-0	546.445,00	546.445,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo BKU	Saldo Rekening Koran
6	Bank Mega Parigi Nomor Rekening 2244-0011-000019	1.002.791,00	1.002.791,00
	Jumlah	2.509.551.842,90	2.464.813.240,90
	Selisih Saldo Menurut Buku dan Saldo Bank		44.738.602,00

Selisih sebesar Rp44.738.602,00 antara BKU BUD dan rekening Koran Bank yaitu :

1. Kurang bayar SP2D Nomor 18.09/04.0/001029/LS/1.03.2.10.0.00.01.0000/P.07/12/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Sebesar Rp180.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan CV. Wasis Karya dan telah di pindah buku Tanggal 22 Januari 2024;
2. Kurang bayar SP2D Nomor 18.09/04.0/000663/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2023 Tanggal 12 April 2023 Sebesar Rp10,00 pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo;
3. Lebih bayar SP2D Nomor 18.09/04.0/005822/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp16.856.059,00 Pada Desa Tada Selatan Kecamatan Tinombo Selatan dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 04 Januari 2024;
4. Lebih bayar SP2D Nomor 18.09/04.0/002280/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp6.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 08 Januari 2024;
5. Lebih bayar SP2D Nomor 18.09/04.0/005811/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp40,00 Desa Tumpapa Indah dan telah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 15 Januari 2024;
6. Lebih bayar SP2D Nomor 18.09/04.0/001289/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Sebesar Rp13.860.000,00 Pada Dinas Kesehatan dan telah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 15 Januari 2024;
7. Lebih bayar iuran BPJS TPP sebesar Rp7.775.088,00; dan
8. Pajak jasa giro sebesar Rp427.425,00.

Dalam kas daerah sebesar Rp2.509.551.842,90 masih terdapat utang PFK sebesar Rp4.088.743.123,00 yang terdiri dari :

1. Utang Iuran Tabungan Perumahan PNS Bulan September dan Oktober tahun 2020 sebesar Rp44.673.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara
2. Utang PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh Pusat sebesar Rp4.044.070.123,00 Tahun 2023 yang belum disetor ke Kas Negara

Terdapat dana earmarking atau dana yang ditentukan penggunaannya dari pemerintah pusat yang masih tercatat dan merupakan kewajiban untuk dibayarkan sebesar Rp41.037.653.549,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.52. Dana Earmarking

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	DAU ditentukan untuk THR Guru Tahun 2023	7.782.125.000,00
2	DBH Fiskal Tahun 2023	4.225.732.000,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
3	DID Fiskal Tahun 2023	6.074.979.300,00
4	DAK Non Fisik Tahun 2023	
	- Tunjangan Profesi Guru	4.096.939.410,00
	- Tambahan Penghasilan Guru	31.212.499,00
	- Tunjangan Khusus Guru	40.511.423,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	2.138.308.226,00
	- Bantuan Operasional Keluarga Berencana	168.713.008,00
	- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	16.400.200,00
	- Dana Fasilitas Penanaman Modal	680.876,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.191.600,00
5	Sisa DAK Fisik Tahun 2019-2022	12.161.080.504,00
6	DAK Fisik Penugasan Tahun 2023	4.298.779.503,00
	Jumlah	41.037.653.549,00

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.128.000,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp121.962.131,67 mengalami penurunan sebesar Rp115.834.131,67. Rekening Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan oleh Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 995.45/13/BPKAD tentang Rekening Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 02 Januari 2023. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.53.Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.128.000,00	67.715.354,67
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	53.287.377,00
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	959.400,00
Total		6.128.000,00	121.962.131,67

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Dinas Pendidikan yang tidak dapat dibayarkan karena pegawai tersebut tidak lagi bekerja sebesar Rp1.128.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 03 Januari 2024; dan
2. Belanja Beasiswa yang tidak dibayarkan karena penerima tidak memenuhi syarat untuk menerima beasiswa sebesar Rp5.000.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 22 Januari 2024.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.852.300,20 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.54. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan**

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Kesehatan	0,20	0,20
2	RSUD Buluye Napoae	0.00	397.772,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.852.300,00	500.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	1.200.000,00
Total		6.852.300,20	2.097.772,20

Kas di bendahara penerimaan tahun 2023 sebesar Rp6.852.300,20 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.097.772,20 mengalami kenaikan sebesar Rp4.754.528,00. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Giro pada Dinas Kesehatan sebesar Rp0,20 tidak dapat di tarik karena merupakan angka decimal;
2. Retribusi Pelataran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp250.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 29 Januari 2024;
3. Retribusi Kios pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp4.500.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 07 Mei 2024; dan
4. Retribusi Los pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp2.102.300,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 07 Mei 2024.

Bendahara penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan oleh Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 957.45/47/BAPENDA tentang Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. Bendahara Penerimaan tersebut berada di perangkat daerah pengelola PAD yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Kesehatan;
6. BLUD RSUD Anuntaloko;
7. RSUD Raja Tombolotutu;
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. RSUD Buluye Napoae;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
15. Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dari 15 Perangkat Daerah tersebut hanya 4 Perangkat Daerah yang memiliki rekening penampung dirinci sebagai berikut:



1. Dinas Kesehatan memiliki rekening penampung di BRI Cabang Parigi Nomor 0363-01-000892-300 untuk menampung penerimaan dari Puskesmas kemudian disetorkan ke RKUD;
2. Badan Pendapatan Daerah terdapat rekening penampung yang diperuntukkan penertiban setoran penerimaan pendapatan daerah serta mempermudah proses penyeteroran penagihan baik yang bersumber dari pajak daerah, PBB, retribusi daerah maupun sumbangan pihak ketiga yang berada di kecamatan, rekening tersebut dibuka di Bank BRI Cabang Parigi dengan Nomor Rekening 0363-01-000773-30-2;
3. Dinas Lingkungan Hidup terdapat rekening penampung di Bank Sulteng Cabang Parigi Nomor 1022-22-201020-06560 yang diperuntukkan menampung setoran retribusi sampah sebelum di setor ke rekening kas umum daerah; dan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat rekening penampung yang diperuntukkan menampung penerimaan PAD PPUd dan TPI sebelum di setor ke RKUD rekening tersebut di buka di BNI Cabang Parigi Nomor 0813-22-8069.

Rekening-rekening tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 995.45/299/BPKAD tentang Rekening Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Tanggal 09 Januari 2023.

Pada saat penerimaan PAD, Perangkat Daerah pengelola mencatat dan menyetorkan ke RKUD.

5.3.1.1.4 Kas Di Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas BLUD pada RSUD Anuntaloko dan pada RSUD Raja Tombolotutu tahun 2023 sebesar Rp9.308.670.323,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55. Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Kas di BLUD RSUD Anuntaloko	4.789.265.126,35	9.526.865.851,02
2	Kas di BLUD RSUD Raja Tombolotutu	4.519.405.197,20	173.816.433,00
	Total	9.308.670.323,55	9.700.682.284,02

1. Kas BLUD RSUD Anuntaloko

Kas BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.789.265.126,35, terdapat penurunan sebesar Rp4.737.600.724,67 atau sebesar 49,73% jika dibandingkan dengan kas BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2022 sebesar Rp9.526.865.851,02. Penambahan dan pengurangan Kas BLUD RSUD Anuntaloko pada tahun 2022 dan tahun 2023, dapat lihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.56. Saldo Kas Di BLUD RSUD Anuntaloko***(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
Kas BLUD RSUD Anuntaloko	9.512.935.535,20	75.748.911.309,15	80.472.581.718,00	4.789.265.126,35
Jumlah	9.512.935.535,20	75.748.911.309,15	80.472.581.718,00	4.789.265.126,35

Mutasi penambahan dan pengurangan saldo kas BLUD RSUD Anuntaloko dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo Kas BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.526.865.851,02, terdapat koreksi tambah sebesar Rp63.994.934,00 yang merupakan kurang saji atas Kas BLUD tahun 2021 s.d 2022 dan koreksi kurang sebesar Rp77.925.249,82 yang merupakan kurang saji atas kas BLUD akibat tidak dicatatnya PPh jasa Giro Bank BNI pada Tahun 2022, Atas koreksi tersebut saldo Awal Kas BLUD RSUD Anuntaloko per 1 Januari 2023 menjadi sebesar Rp9.512.935.535,20;
- b. Mutasi tambah sebesar Rp75.748.911.309,15 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan jasa layanan dari masyarakat sebesar Rp75.035.996.971,00;
 - 2) Pendapatan hasil kerjasama sebesar Rp67.228.510,00;
 - 3) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp185.306.240,15;
 - 4) Kurang catat atas sisa Kas di rekening BSI dengan Nomor Rekening 7166655441 dengan nilai sebesar Rp14.991.887,00;
 - 5) Kurang catat atas sisa Kas di rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1062657 dengan nilai sebesar Rp8.032.901,00; dan
 - 6) Pendapatan Bansosda BLUD RSUD Anuntaloko bulan Maret dan April tahun 2023 yang dicairkan melalui bank BPD pada tanggal 27 Desember 2023 melalui SP2D No. 1209 sebesar Rp437.354.800,00.
- c. Mutasi kurang sebesar Rp80.472.581.718,00 merupakan realisasi belanja BLUD RSUD Anuntaloko TA 2023. Realisasi belanja terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp52.800.000,00;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp78.662.819.746,00; dan
 - 3) Belanja Modal sebesar Rp1.756.961.972,00.

Berikut adalah rincian kas BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp4.789.265.126,35, antara saldo rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2023 dan saldo Buku Kas Umum BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2023.



Tabel 5.57. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Rekening Koran	Saldo BKU
1	Rekening BLUD Parigi Moutong di BNI 46 Nomor Rekening 0327230966	4.116.417.752,72	4.739.267.009,72
2	Rekening BRI a.n Bendahara Pengelola Non BPJS BLUD Nomor 0363-01-000425-30-7	10.784.697,00	10.784.697,00
3	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0695879-4 Rekening BPJS Kesehatan	929.913,06	929.913,06
4	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0736135-2 Rekening BPJS Ketenagakerjaan	2.718,57	2.718,57
5	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan BLUD RSU Anuntaloko	15.256.000,00	15.256.000,00
6	Rekening Bank BSI Nomor Rekening 7166655441	14.991.887,00	14.991.887,00
7	Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 151-00-1062657	8.032.901,00	8.032.901,00
	Saldo Kas di Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	4.166.415.869,35	4.789.265.126,35
	Selisih Saldo Menurut Buku dan Saldo Bank		-622.849.257,00

Terdapat selisih antara saldo kas di bank dengan nilai Surat Permintaan Pengesahan Belanja BLUD sebesar Rp622.849.257,00 yang terdiri dari:

- Dobel bayar belanja bahan baku unit transfusi darah SP2D nomor 1276 tahun 2023 sebesar Rp182.674.849,00 telah disetorkan kembali pada 10 Januari 2024;
- Kelebihan bayar PPh 21 2023 belanja jasa medik Defina unit transfusi darah sebesar Rp2.716.167,00;
- Kelebihan pembayaran PPN tahun 2022 sebesar Rp126.582,00;
- Pendapatan Bansosda BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp437.354.800,00 yang di cairkan melalui bank BPD pada tanggal 27 Desember 2023 melalui SP2D No 1209 namun baru diterima di Rekening BLUD 8 Januari 2024.
- PPh 21 tahun 2023 yang menyeberang tahun a.n PT. Kimia Farma sebesar Rp23.141,00 yang di akui sebagai kas lainnya, dan telah di bayar pada tanggal 01 Maret 2024 dapat dilihat pada penjelasan Kas Lainnya.

Tabel 5.58. Rincian Rekening Kas Di BLUD RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Rekening BLUD Parigi Moutong di BNI 46 Nomor Rekening 0327230966	4.116.417.752,72	9.419.471.284,00
2	Rekening BRI a.n Bendahara Pengelola Non BPJS BLUD Nomor 0363-01-000425-30-7	10.784.697,00	85.571.126,00
3	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0695879-4 Rekening BPJS Kesehatan	929.913,06	7.757.212,66
4	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0736135-2 Rekening BPJS Ketenagakerjaan	2.718,57	9.331,36



(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Anuntaloko	15.256.000,00	0,00
6	Rekening Bank BSI Nomor 7166655441 Rekening Giro Pemerintah Wadiah	14.991.887,00	0,00
7	Rekening Mandiri Nomor 151-00-1062657 Rekening Penampung RSUD Anuntaloko	8.032.901,00	0,00
	Total	4.166.415.869,35	9.512.808.954,02

Kas BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2023 dibandingkan dengan kas BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp5.346.393.084,67 atau 56,20%. Penurunan nilai kas tersebut disebabkan oleh:

- Pada akhir periode RSUD Anuntaloko menggunakan nilai ambang batas untuk sumber dana BLUD yang menyebabkan penganggaran pendapatan dan belanja dalam DPA BLUD RSUD Anuntaloko bertambah sehingga nilai kas bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran belanja;
- Kurang catat atas sisa Kas di rekening BSI; dan
- Kurang catat atas sisa Kas di rekening Mandiri.

Saldo kas di BLUD RSUD Anuntaloko dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kas sebesar Rp4.116.417.752,72 merupakan saldo akhir kas di rekening BLUD RSUD Anuntaloko di bank BNI Nomor 0327230966 yang merupakan rekening penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Anuntaloko;
- Kas sebesar Rp10.784.697,00 merupakan saldo di rekening bank BRI Nomor 0363-01-000425-30-7 a.n Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Anuntaloko yang merupakan rekening penerimaan pendapatan dari klaim asuransi jasa raharja dan asuransi *inhealth*, klaim dari jasa raharja dan asuransi *inhealth* tersebut kemudian ditransfer lagi ke rekening bank BNI;
- Kas sebesar Rp929.913,06 pada rekening bank Mandiri Nomor 151-00-0695879-4, merupakan rekening untuk menampung penerimaan klaim dari BPJS Kesehatan, klaim dari BPJS tersebut di transfer lagi ke rekening bank BNI;
- Kas sebesar Rp2.718,57 pada rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0736135-2, merupakan rekening untuk menampung penerimaan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan. Klaim dari BPJS tersebut di transfer lagi ke rekening bank BNI;
- Kas tunai di bendahara penerimaan BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp15.256.000,00 merupakan penerimaan dari pasien tunai pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 yang belum disetorkan ke bank BNI, dan kas tunai tersebut telah disetor ke bank BNI pada tanggal 04 Januari 2024;
- Kas Sebesar Rp14.991.887,00 pada rekening bank BSI Nomor 7166655441 merupakan dana yang terdapat di rekening penyaluran untuk jasa pelayanan *covid* dan jasa *cleaning service* RSUD anuntaloko yang sudah tidak bisa di salurkan kepada siapapun; dan
- Kas Sebesar Rp8.032.901,00 pada rekening bank Mandiri Nomor 151-00-1062657 merupakan rekening penampung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan honorarium pegawai.

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko telah selesai di Audited oleh Kantor Akuntan Publik dengan Nomor



00129/2.0604/AU.5/11/0430-4/I/IV/2024. Opini yang diberikan adalah bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Anuntaloko. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

2. Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu

Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.519.405.197,20, terdapat kenaikan sebesar Rp4.345.588.764,20 atau sebesar 2.500,10% jika dibandingkan kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu tahun 2022 sebesar Rp173.816.433,00. Peningkatan antara lain terjadi pada Pendapatan BPJS Kesehatan yaitu meningkat sebesar 206,28% sebagai akibat diadakannya RSUD Raja Tombolotutu sebagai rumah sakit rujukan pasien BPJS di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.

Penambahan dan pengurangan kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu pada selama tahun 2023, dapat lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.59. Saldo Kas Di BLUD RSUD Raja Tombolotutu

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu	173.816.433,00	10.311.364.660,00	5.965.775.895,80	4.519.405.197,20
Jumlah	173.816.433,00	10.311.364.660,00	5.965.775.895,80	4.519.405.197,20

Mutasi penambahan dan pengurangan saldo kas di BLUD RSUD Raja Tombolotutu tahun 2023 sebagai berikut:

- Mutasi penambahan Tahun 2023 sebesar Rp10.311.364.660,00 terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp823.124.300,00, Pendapatan BPJS Kesehatan sebesar Rp9.472.994.211,00 dan Pendapatan Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah Lainnya sebesar Rp15.246.149,00; dan
- Mutasi pengurangan sebesar Rp5.965.775.895,80 merupakan realisasi belanja BLUD RSUD Raja tombolotutu Tahun Anggaran 2023. Realisasi belanja terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp5.711.477.534,80 dan belanja modal sebesar Rp254.298.361,00.

Tabel 5.60. Rincian Saldo Kas Di BLUD RSUD Raja Tombolotutu

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Rekening RSUD Raja Tombolotutu di BRI Nomor Rekening 107601000653568	170.806,00	50,00
2	Rekening RSUD Raja Tombolotutu di BRI Nomor Rekening 107601000523307	4.519.234.391,20	174.155.883,00
3	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Raja Tombolotutu	0,00	123.000,00
	Total	4.519.405.197,20	174.278.933,00



Berdasarkan hasil Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad dengan nomor 00106/2.0604/AU.5/11/0430-3/I/III/2024 terhadap hasil audit Laporan Keuangan BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, KAP Tarmizi Achmad memberikan opini wajar dengan pengecualian dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan pelaksanaan program pendukung pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan yang bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana BOSP.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terdiri dari dana Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah, Penganggaran pendapatan dana BOS terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan DAK Non Fisik - BOS Reguler dan Pendapatan DAK Non Fisik - BOS Kinerja. Penganggaran Belanja dana BOS terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Peralatan dan Mesin BOS dan Belanja Aset Tetap Lainnya BOS.

Penyaluran dana BOS reguler dilakukan dalam dua tahap dengan mekanisme transfer dari Kas Umum Negara ke masing-masing satuan pendidikan di rekening Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng).

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp383.441.343,00, jika dibandingkan dengan Kas Dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp112.514.619,00 terjadi kenaikan sebesar Rp270.926.724,00 atau naik sebesar 240,79%. Kas dana BOS Tahun Anggaran 2023 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.61. Kas Dana BOS TA 2023

<i>(dalam rupiah)</i>				
Uraian	Saldo awal 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
Kas Dana BOS SD	28.398.678,00	44.408.935.237,00	44.301.048.916,00	136.284.999,00
Kas Dana BOS SMP	84.115.941,00	17.434.406.948,00	17.271.366.545,00	247.156.344,00
Jumlah	112.514.619,00	61.843.342.185,00	61.572.415.461,00	383.441.343,00

Rincian Kas Dana BOS dapat dilihat pada *Lampiran 16*, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Kas Dana BOS SD

Saldo akhir Kas Dana BOS SD per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.284.999,00. Mutasi penambahan dan pengurangan kas dana BOS SD negeri tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal Kas Dana BOS pada 395 SD berjumlah Rp28.398.678,00.
- b. Mutasi penambahan sebesar Rp44.408.935.237,00 terdiri dari:
 - 1) Realisasi pendapatan dana BOS reguler SD negeri tahun 2023 berjumlah Rp42.707.322.237,00;
 - 2) Realisasi pendapatan dana BOS kinerja SD negeri tahun 2023 berjumlah Rp1.695.000.000,00; dan
 - 3) Pendapatan dana BOS dari pengembalian hasil pengembalian temuan inspektorat pada SD Negeri Mepanga sebesar Rp6.613.000,00.
- c. Mutasi pengurangan sebesar Rp44.301.048.916,00 terdiri dari:
 - 1) Realisasi belanja dana BOS reguler SD negeri tahun 2023 berjumlah Rp42.654.011.978,00;
 - 2) Realisasi belanja dana BOS kinerja SD negeri tahun 2023 berjumlah Rp1.646.235.500,00;
 - 3) Pendapatan jasa giro tahun 2022 yang telah di setor ke Kasda berjumlah Rp240,00; dan
 - 4) Kas dana BOS yang di setor ke Kasda karena tidak tercatat dalam Silpa tahun 2022 di ARKAS dan tidak di SPJ kan sekolah sebesar Rp801.198,00.

2. Kas Dana BOS SMP

Saldo akhir Kas Dana BOS SMP per 31 Desember 2023 sebesar Rp247.156.344,00, mutasi penambahan dan pengurangan kas dana BOS SMP tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal Kas Dana BOS pada 90 SMP negeri berjumlah Rp84.115.941,00.
- b. Mutasi penambahan sebesar Rp17.434.406.948,00 terdiri dari:
 - 1) Realisasi pendapatan dana BOS reguler SMP negeri tahun 2023 berjumlah Rp16.514.406.948,00; dan
 - 2) Realisasi Pendapatan dana BOS kinerja SMP negeri tahun 2023 berjumlah Rp920.000.000,00.
- c. Mutasi pengurangan sebesar Rp17.271.366.545,00 terdiri dari:
 - 1) Realisasi belanja dana BOS regular SMP negeri tahun 2023 berjumlah Rp16.473.712.666,00;
 - 2) Realisasi belanja dana BOS kinerja SMP negeri tahun 2023 berjumlah Rp797.588.500,00; dan
 - 3) Kas Dana BOS yang di setor ke Kasda karena tidak tercatat dalam Silpa tahun 2022 di ARKAS dan tidak di SPJ kan sekolah sebesar Rp65.379,00.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pungutan PFK bendahara dana BOS SD dan SMP yang baru disetorkan di tahun 2024 sebesar Rp31.048.193,00 dengan rincian utang PFK dana BOS SD sebesar Rp21.618.716,00 dan utang PFK dana BOS SMP sebesar Rp9.429.477,00.



Saldo kas dana BOS di neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp383.441.343,00 sedangkan saldo dana BOS per 31 Desember 2023 berdasarkan saldo tunai dan saldo rekening koran sebesar Rp385.061.343,00. terdapat selisih lebih sebesar Rp1.620.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62. Kas Dana BOS TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Bank	Saldo Tunai	Total Saldo
1	Kas Dana BOS SD	22.925.149,00	114.979.850,00	137.904.999,00
2	Kas Dana BOS SMP	51.079.499,00	196.076.845,00	247.156.344,00
	Jumlah	74.004.648,00	311.056.695,00	385.061.343,00

Saldo Akhir Kas Dana BOS berdasarkan kas di bendahara dana BOS sebesar Rp385.061.343,00 jika dibandingkan saldo akhir Kas Dana BOS berdasarkan SP2B sebesar Rp383.441.343,00, terdapat selisih lebih sebesar Rp1.620.000,00. Selisih lebih tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat saldo sebesar Rp1.320.000,00 di rekening BOS SD Negeri Tibu yang merupakan salah setor sisa dana BOSDA yang tidak di SPJ kan, yang seharusnya disetor ke Kasda tapi disetor ke rekening sekolah. Sisa dana BOSDA tersebut telah di tarik dari rekening sekolah dan disetor ke Kasda tanggal 25 Januari 2024;
2. Terdapat setoran tunai bendahara di rekening BOS SD Inpres 1 Siney sebesar Rp150.000,00 yang merupakan uang belanja cek yang belum di debet oleh pihak bank; dan
3. Terdapat setoran tunai bendahara di rekening BOS SD Negeri Toribulu sebesar Rp150.000,00 yang merupakan uang belanja cek yang belum di debet oleh pihak bank.

5.3.1.1.6 Kas Di Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Dana kapitasi adalah dana yang dibayarkan dimuka oleh BPJS tanpa memperhitungkan berapa banyak pasien yang berobat dan jenis pelayanan yang diberikan. Dana Kapitasi yang ditransfer oleh BPJS ini dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2).

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah melaksanakan peraturan tersebut di 23 Puskesmas dan telah menetapkan bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP melalui Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 954.45/115/Dinas Kesehatan tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah Kabupaten Parigi Moutong TA 2023 dan menetapkan rekening dana kapitasi JKN pada FKTP melalui Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 994.45/105/BPKAD tentang Pembukaan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023.



Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat (4), rekening dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari rekening BUD.

Selain rekening dana kapitasi JKN FKTP, Puskesmas memiliki rekening lain yaitu 23 rekening non kapitasi yang diperuntukkan untuk menampung dana non kapitasi di 23 Puskesmas. Dana non kapitasi adalah besaran klaim oleh BPJS Kesehatan pada FKTP Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, tarif yang diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran kapitasi yang diantaranya:

1. Pelayanan *ambulance*;
2. Pelayanan obat program rujuk balik;
3. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
4. Pelayanan penapisan (*screening*) kesehatan tertentu;
5. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
6. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter sesuai kompetensi dan kewenangannya; dan
7. Pelayanan keluarga berencana di FKTP.

Saldo Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 sebesar Rp313.984.557,00, terdapat penurunan sebesar Rp49.276.564,57 atau 13,57% jika dibandingkan dengan Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2022 sebesar Rp363.261.121,57, dapat lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.63. Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Kas di Kas Dana Kapitasi pada 23 Puskesmas	313.984.557,00	310.381.085,57
2	Kas di Kas Dana Kapitasi pada Rumah Sakit Buluye Napoa'e Moutong	0,00	52.880.036,00
	Total	313.984.557,00	363.261.121,57

Penambahan dan pengurangan Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP di 23 Puskesmas selama periode tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64. Saldo Kas Di Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
1	Kas di Kas Dana Kapitasi pada 23 Puskesmas	311.593.709,23	19.585.961.807,77	19.583.570.960,00	313.984.557,00

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
2	Kas di Kas Dana Kapitasi pada Rumah Sakit Buluye Napoa'e Moutong	52.880.036,00	0,00	52.880.036,00	0,00
	Jumlah	364.473.745,23	19.585.961.807,77	19.636.450.996,00	313.984.557,00

Rincian Kas Di Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas Di Kas Dana Kapitasi pada 23 Puskesmas

Saldo akhir kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp313.984.557,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp310.381.085,57, terdapat koreksi tambah sebesar Rp1.212.623,66 yang merupakan kurang catat atas Kas di Bendahara FKTP di beberapa puskesmas atas pendapatan di tahun 2020 s.d. 2022 sehingga saldo awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 1 Januari 2023 menjadi sebesar Rp311.593.709,23;
- b. Mutasi tambah sebesar Rp19.585.961.807,77 terdiri dari:
 - 1) Realisasi Pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2023 sebesar Rp19.584.794.698,00;
 - 2) Nilai kas bertambah sebesar Rp1.051.835,00 merupakan pendapatan jasa giro FKTP bulan Desember tahun 2023, yang belum disetor ke Kas Daerah; dan
 - 3) Nilai kas bertambah sebesar Rp115.274,77 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat tahun 2023.
- c. Mutasi kurang sebesar Rp19.583.570.960,00 terdiri dari:
 - 1) Realisasi belanja dana kapitasi pada 23 puskesmas tahun 2023 sebesar Rp19.582.668.668,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.105.348.583,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.477.320.085,00; dan
 - 2) Pendapatan jasa giro FKTP bulan Desember tahun 2022 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp902.292,00.

Berikut adalah rincian kas di kas dana kapitasi pada FKTP di 23 Puskesmas sebesar Rp313.984.557,00, antara saldo rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2023 dan saldo Buku Kas Umum FKTP per 31 Desember 2023. Nilai Kas di FKTP pada rekening koran telah sama dengan nilai pada BKU.



**Tabel 5.65. Rincian Saldo Kas Di Kas Dana Kapitasi pada FKTP
per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Rekening Koran	Saldo BKU
1	SAUSU	8.728.136,00	8.728.136,00
2	BALINGGI	67.929.735,00	67.929.735,00
3	TORUE	27.194.018,00	27.194.018,00
4	SUMBERSARI	4.565.846,00	4.565.846,00
5	PARIGI	838.578,00	838.578,00
6	LOMPE NTODEA	32.600.844,00	32.600.844,00
7	PANGI	147.254,00	147.254,00
8	SINIU	2.498.566,00	2.498.566,00
9	AMPIBABO	498.509,00	498.509,00
10	SIENJO	1.551.768,00	1.551.768,00
11	KASIMBAR	1.868.599,00	1.868.599,00
12	TADA	2.157.974,00	2.157.974,00
13	TINOMBO	2.016.480,00	2.016.480,00
14	PALASA	94.591.125,00	94.591.125,00
15	TOMINI	7.149.842,00	7.149.842,00
16	MEPANGA	13.897.256,00	13.897.256,00
17	ONGKA	3.213.457,00	3.213.457,00
18	LAMBUNU I	2.913.603,00	2.913.603,00
19	LAMBUNU II	36.723.386,00	36.723.386,00
20	TAOPA	1.760.333,00	1.760.333,00
21	MOUTONG	119.178,00	119.178,00
22	SIGENTI	394.343,00	394.343,00
23	SIDOAN	625.727,00	625.727,00
	Saldo Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP	313.984.557,00	313.984.557,00

2. Kas di Kas Dana Kapitasi pada Rumah Sakit Buluye Napoa'e Moutong
Saldo akhir Kas di Kas Dana Kapitasi pada Rumah Sakit Buluye Napoa'e Moutong per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Kas di Kas Dana Kapitasi pada Rumah Sakit Buluye Napoa'e Moutong Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Saldo awal Kas di Kas Dana Kapitasi pada Rumah Sakit Buluye Napoa'e Moutong sebesar Rp52.880.036,00;
 - b. Mutasi penambahan sebesar Rp0,00;
 - c. Mutasi pengurangan sebesar Rp52.880.036,00 yang merupakan Kas dana kapitasi pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong di rekening BRI yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2023 karena tidak adanya kerjasama dengan pihak BJS.

**5.3.1.1.7 Kas Di Kas Dana BOK Puskesmas**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.520.774.143,00, sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat saldo Kas Dana BOK Puskesmas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.66. Kas Dana BOK Puskesmas*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022
1	Kas Di Kas Dana BOK Puskesmas	5.520.774.143,00	0,00
	Total	5.520.774.143,00	0,00

Penambahan dan pengurangan Kas Dana BOK Puskesmas pada tahun 2022 dan tahun 2023, dapat lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.67. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	26.126.250.000,00	20.605.475.857,00	5.520.774.143,00
Jumlah	0,00	26.126.250.000,00	20.605.475.857,00	5.520.774.143,00

Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan Kas Dana BOK Puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp26.126.250.000,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOK Puskesmas Tahap I sebesar Rp7.837.875.000,00;
 - b. Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOK Puskesmas Tahap II sebesar Rp10.450.500.000,00; dan
 - c. Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOK Puskesmas Tahap III sebesar Rp7.837.875.000,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp20.605.475.857,00 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOK Puskesmas TA 2023. Realisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp11.243.450,00;
 - b. Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp16.032.000,00;
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp698.988.614,00;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp3.948.041.679,00;
 - e. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp7.800.000,00;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp2.756.687.644,00;
 - g. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp21.525.000,00;
 - h. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp495.750.000,00; dan
 - i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp12.649.407.470,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Berikut adalah rincian Kas Dana BOK puskesmas sebesar Rp5.520.774.143,00, antara saldo menurut rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2023 dan saldo menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2023. Nilai Puskesmas pada rekening koran sama dengan nilai pada BKU

Tabel 5.68. Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Rekening Koran	Saldo BKU
1	Puskesmas Sigenti	169.765.489,00	169.765.489,00
2	Puskesmas Tinombo	177.709.964,00	177.709.964,00
3	Puskesmas Tomini	407.337.667,00	407.337.667,00
4	Puskesmas Summersari	285.060.039,00	285.060.039,00
5	Puskesmas Pangi	137.651.337,00	137.651.337,00
6	Puskesmas Mepanga	327.363.722,00	327.363.722,00
7	Puskemsas Palasa	462.693.506,00	462.693.506,00
8	Puskesmas Parigi	341.024.924,00	341.024.924,00
9	Puskesmas Lambunu I	139.898.722,00	139.898.722,00
10	Puskesmas Torue	472.132.950,00	472.132.950,00
11	Puskesmas Tada	169.863.081,00	169.863.081,00
12	Puskesmas Sausu	255.783.927,00	255.783.927,00
13	Puskesmas Taopa	138.032.611,00	138.032.611,00
14	Puskesmas Sienjo	374.422.502,00	374.422.502,00
15	Puskesmas Siniu	63.897.597,00	63.897.597,00
16	Puskesmas Ampibabo	33.975.427,00	33.975.427,00
17	Puskesmas Balinggi	362.291.492,00	362.291.492,00
18	Puskesmas Lambunu II	199.865.572,00	199.865.572,00
19	Puskesmas Lompe Ntodea	97.948.500,00	97.948.500,00
20	Puskesmas Moutong	430.499.699,00	430.499.699,00
21	Puskesmas Sidoan	195.377.047,00	195.377.047,00
22	Puskesmas Ongka	130.035.635,00	130.035.635,00
23	Puskesmas Kasimbar	148.142.733,00	148.142.733,00
	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	5.520.774.143,00	5.520.774.143,00
	Selisih Saldo Menurut R/C dan BKU		0,00

Sisa Saldo kas dana BOK puskesmas sebesar Rp5.520.774.143,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Juknis BOK Permendagri 12 tahun 2023 baru di terbitkan bulan September sehingga untuk realisasi dana PMT untuk kegiatan sosialisasi PMT dan pemanfaatan PMT 90 hari baru direalisasikan bulan Oktober;
- Untuk menu insentif UKM terserap hanya 34,61% dikarenakan dari awal tahun hanya bisa diterima oleh ASN, ketika juknis diterbitkan baru bisa direalisasikan untuk Non ASN; dan
- Besaran insentif juga dipengaruhi oleh capaian indikator SPM makin rendah capaian, makin sedikit dana yang bisa diserap.

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.880.900.318,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.835.639.827,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp45.260.491,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa saldo di bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang belum dipindahbukukan ke rekening pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.705.629.400,00 yang disebabkan data penerima perlu di verifikasi pihak Bank dan adanya pembatasan jam operasional Bank untuk menghadapi pembukuan tutup tahun, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.69. Sisa Saldo di Bendahara

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Jumlah	Tanggal pemindahbukuan
1	Badan Kesatuan Bangsa	Honorarium pengadaan barang/jasa	646.000,00	02 Januari 2024
		Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	7.135.000,00	02 Januari 2024
2	Dinas Kesehatan	Belanja jasa tenaga laboratorium	32.500.000,00	02 Januari 2024
		Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	88.065.000,00	02 Januari 2024
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja jasa tenaga administrasi	83.616.000,00	02 Januari 2024
		Belanja jasa tenaga pendidikan	2.479.200.000,00	02 Januari 2024
4	Sekretariat Daerah	Belanja tunjangan jabatan KDH	7.182.000,00	02 Januari 2024
		Belanja iuran jaminan kesehatan KDH	302.400,00	02 Januari 2024
		Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan	180.000,00	02 Januari 2024
5	Bagian Pemerintahan Umum	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	6.800.000,00	05 Januari 2024
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja jasa tenaga operator komputer	3.000,00	05 Januari 2024
		Total	2.705.629.400,00	

- Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD Anuntaloko sebesar Rp78.360.320,00 terdiri dari:
 - Utang Belanja Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Bulan Oktober 2023 sebesar Rp73.580.250 dan telah di bayarkan Tanggal 2 Januari 2024;
 - Utang Belanja Jasa Pelayanan *ambulance* bansos sebesar Rp105.070,00 dan telah dibayarkan Tanggal 3 Januari 2024; dan



- c. Utang Belanja Honorarium tim APIP sebesar Rp4.675.000,00 dan telah dibayarkan Tanggal 4 Januari 2024.
3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada RSUD Anuntaloko yaitu PPh 21 atas Belanja Obat sebesar Rp23.141,00 dan telah disetor ke Kas Negara Tanggal 1 Maret 2024;
4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp31.048.193,00 atas Belanja Barang Dan Jasa BOS telah disetor ke Kas Negara di Tahun 2024 terdiri dari :
 - a. PPh 21 sebesar Rp5.436.900,00;
 - b. PPh 23 sebesar Rp4.890.246,00; dan
 - c. PPN Pusat Sebesar Rp20.721.047,00.
 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 17*.
5. Utang Puskesmas Moutong atas biaya *ambulance* yang sebelumnya ditanggung terlebih dahulu oleh pasien rujukan sebesar Rp65.839.264,00.

5.3.1.2 Piutang

Piutang adalah uang yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong terbagi dalam enam jenis Piutang, adapun saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.70. Rincian Piutang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Daerah	10.854.258.182,72	9.586.191.223,24	1.268.066.959,48	13,23
2	Piutang Retribusi	9.434.897.616,00	1.391.500.600,00	8.043.397.016,00	578,04
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	7.301.863.966,00	(7.301.863.966,00)	(100,00)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.534.950.849,07	16.887.539.168,52	(3.352.588.319,45)	(19,85)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	4.546.807.236,00	(4.546.807.236,00)	(100,00)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	8.358.403.228,00	8.554.832.430,00	(196.429.202,00)	(2,30)
	Jumlah	42.182.509.875,79	48.268.734.623,76	(6.086.224.747,97)	(12,61)

Saldo Piutang tahun 2023 sebesar Rp42.182.509.875,79 mengalami penurunan sebesar Rp6.086.224.747,97 atau (12,61%) dibandingkan dengan Piutang tahun 2022 sebesar Rp48.268.734.623,76.

5.3.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.854.258.182,72 terjadi kenaikan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.268.066.959,48 atau 13,23% dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.586.191.223,24 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.71. Rincian Mutasi Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	8.811.651,00	0,00	8.811.651,00
2	Piutang Pajak Reklame	134.925.636,50	103.366.400,85	43.703.472,00	194.588.565,35
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri	1.018.628.469,00	1.149.509.583,00	1.018.628.469,00	1.149.509.583,00
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.368.802,52	0,00	0,00	60.368.802,52
5	Piutang PBB-P2	8.369.168.815,22	1.663.414.872,63	594.703.607,00	9.437.880.080,85
6	Piutang BPHTB	3.099.500,00	0,00	0,00	3.099.500,00
	Total	9.586.191.223,24	2.925.102.507,48	1.657.035.548,00	10.854.258.182,72

Rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.811.651,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.811.651,00 dari jumlah Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Rincian Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya dapat dilihat pada *Lampiran 18*.

2. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp194.588.565,35 mengalami kenaikan sebesar Rp59.662.928,85 atau 44,22% dari jumlah Piutang Pajak Reklame tahun 2022 sebesar Rp134.925.636,50. Penambahan dan pengurangan atas Piutang Pajak Reklame pada Badan Pendapatan selama tahun 2023 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	Rp	134.925.636,50
Mutasi Tambah	Rp	103.366.400,85
Piutang Pajak reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron 2023	Rp	89.453.000,85
Piutang Pajak Reklame Kain 2023	Rp	413.400,00
Piutang Pajak Reklame Berjalan 2023	Rp	13.500.000,00
Mutasi Kurang	Rp	43.703.472,00
Penerimaan Piutang Pajak Reklame tahun 2022 ke bawah	Rp	43.703.472,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2023 (Saldo awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	194.588.565,35

Sehingga saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp194.588.565,35, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 5.72. Rincian Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	171.071.502,85	119.921.974,00	51.149.528,85	42,65
2	Piutang Pajak Reklame Kain	1.317.062,50	903.662,50	413.400,00	45,75
3	Piutang Pajak Reklame Berjalan	22.200.000,00	14.100.000,00	8.100.000,00	57,45
	Jumlah	194.588.565,35	134.925.636,50	59.662.928,85	44,22

Rincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

3. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.149.509.583,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73. Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Piutang PPJ PT PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Palu	720.096.601,00	635.307.371,00
2	Piutang PPJ PT PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Toli-Toli	429.412.982,00	383.321.098,00
	Total	1.149.509.583,00	1.018.628.469,00

Saldo Piutang PPJ per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.018.628.469,00 merupakan penerimaan atas PPJ yang belum dibayarkan oleh PT PLN di tahun 2022. PT PLN melakukan pelunasan atas Piutang tersebut pada tanggal 16 Januari 2023 dengan melakukan transfer langsung ke rekening Kas Daerah. Pada tahun 2023, terdapat penambahan Piutang PPJ dikarenakan penerimaan PPJ bulan Desember 2023 belum sempat disetorkan ke Kas Daerah oleh PT PLN sebesar Rp1.149.509.583,00 sehingga dicatatkan sebagai Piutang PPJ per 31 Desember 2023. Nilai Piutang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp130.881.114,00 atau 12,85% dibandingkan dengan Piutang tahun 2022 sebesar Rp1.018.628.469,00. PT PLN sudah melunasi Piutang tersebut dengan menyetorkan PPJ tahun 2023 ke Kas Daerah pada 15 Januari 2024.

Pencatatan Piutang ini juga diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Palu dan Area Toli-Toli tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Pemerintah Daerah dengan Nomor 973/4660/DISPENDA, Nomor 0045.PJ/KEU.03.01/PLU/2015 Tahun 2015 untuk PT PLN Wilayah Area Palu dan Nomor 970/4661/DISPENDA, Nomor 0002.MOU/STH.00.01/TLI/2015 Tahun 2015 untuk PT PLN Wilayah Area Toli-Toli.



4. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (galian C) merupakan jenis pajak yang pemungutannya secara *self assessment* atau wajib pajak sendiri yang melakukan perhitungan besaran pajaknya, melaporkan dan menyetorkan pada Rekening Kas Umum Daerah. Saldo awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp60.368.802,5, merupakan saldo per 31 Desember 2022. Pada tahun 2023, tidak terdapat pembayaran Piutang dan penambahan Piutang, sehingga saldo Piutang Pajak mineral bukan logam dan batuan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp60.368.802,52 dengan rincian sebagai berikut.

- Sisa Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pasir/kerikil tahun 2016 sebesar Rp58.434.857,00; dan
- Sisa Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2017 yaitu batu sebesar Rp530.764,42 dan pasir sebesar Rp1.403.181,10.

Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada *Lampiran 20*.

5. Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.437.880.080,85, dibandingkan dengan piutang PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp8.369.168.815,22 terdapat kenaikan sebesar Rp1.068.711.265,63 atau 12,77%. Penambahan dan pengurangan atas Piutang Pajak PBB-P2 pada Badan Pendapatan selama tahun 2023 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	Rp	8.369.168.815,22
Mutasi Tambah	Rp	1.663.414.872,63
Piutang tahun 2023	Rp	1.663.414.872,63
Mutasi Kurang	Rp	594.703.607,00
Penerimaan Piutang PBB tahun 2022 ke bawah	Rp	505.117.248,00
Koreksi karena penghapusan tidak ada objek pajak	Rp	83.204.731,00
Koreksi karena ditemukan bukti bayar	Rp	6.381.628,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2023 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	9.437.880.080,85

Rincian Piutang PBB-P2 per tahun dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

6. Piutang Bea Pungutan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.099.500,00. Piutang tersebut merupakan Piutang BPHTB yang timbul sejak tahun 2017 dan tidak pernah mengalami perubahan. Selama tahun 2023 juga tidak terdapat pembayaran maupun penambahan atas Piutang tersebut. Rincian Piutang BPHTB dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

5.3.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.434.897.616,00 terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.272.755.000,00 dan Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.162.142.616,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.74. Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang Retribusi Jasa Umum		1.272.755.000,00	1.391.500.600,00
1	Piutang Retribusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan (di PKM)	811.219.000,00	1.234.867.000,00
2	Piutang Retribusi Kesehatan pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong	48.550.000,00	156.633.600,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	412.986.000,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa usaha		8.162.142.616,00	0,00
1	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	8.162.142.616,00	0,00
Jumlah		9.434.897.616,00	1.391.500.600,00

Piutang Retribusi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.043.397.016,00 atau 578,04% dibandingkan dengan Piutang Retribusi tahun 2022 sebesar Rp1.391.500.600,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya reklasifikasi Piutang SPAM yang awalnya dicatat pada Piutang Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp811.219.000,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan atas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 23 Puskesmas di Kabupaten Parigi Moutong. Piutang ini bersumber dari dana non kapitasi yang dibayarkan ke Puskesmas atas pelayanan persalinan, rawat inap dan rujukan yang hingga akhir tahun belum dibayarkan. Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp811.219.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp423.648.000,00 atau 34,31%. Penambahan dan pengurangan atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan selama tahun 2023 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	Rp	1.234.867.000,00
Mutasi Tambah	Rp	811.219.000,00
Piutang Non kapitasi JKN Persalinan puskesmas Bulan Desember Tahun 2023	Rp	194.445.000,00
Piutang Non kapitasi JKN Rujukan puskesmas Bulan Desember Tahun 2023	Rp	207.554.000,00
Piutang Non kapitasi JKN RITP puskesmas Bulan Desember Tahun 2023	Rp	409.220.000,00
Mutasi Kurang	Rp	1.234.867.000,00
Penerimaan Piutang Non Kapitasi JKN tahun 2022	Rp	1.234.867.000,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2023 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	811.219.000,00

2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Daerah pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong tahun 2023 sebesar Rp48.550.000,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Buluye Napoa'e tahun 2023 sebesar Rp48.550.000,00, dibandingkan dengan piutang tahun 2022 Rp156.633.600,00 terjadi penurunan Rp108.083.600,00 atau 69,00%, Penambahan dan pengurangan atas Piutang Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoa'e selama tahun 2023 dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Saldo awal Piutang	Rp	156.633.600,00
Mutasi Tambah	Rp	48.550.000,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Bulan November 2023 (Rujukan)	Rp	7.998.100,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Bulan Oktober 2022 (Rujukan)	Rp	13.820.400,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Bulan November 2022 (Rujukan)	Rp	4.757.100,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Bulan November 2022 (RI / RJ)	Rp	16.208.100,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Bulan Desember 2023 Pending	Rp	5.766.300,00
Mutasi Kurang	Rp	156.633.600,00
Penerimaan Piutang Non Kapitasi JKN tahun 2022	Rp	156.616.200,00
Koreksi biaya administrasi bank atas transfer penerimaan piutang tahun 2022	Rp	17.400,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2023 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	48.550.000,00

3. Piutang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp412.986.000,00

Piutang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 merupakan retribusi yang dikenakan kepada *provider* penyedia jaringan *Base Transceiver Station* (BTS). Saldo Piutang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi tahun 2023 sebesar Rp412.986.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp412.986.000,00 atau 100,00%, dibandingkan tahun 2022.

Rincian Piutang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi berdasarkan *provider* disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.75. Rincian Perusahaan *Provider* yang menunggak retribusi

(dalam rupiah)

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH MENARA	TOTAL TAGIHAN	TOTAL PEMBAYARAN	PIUTANG
1	PT. EPID MENARA ASSET	17	122.522.000,00	122.431.000,00	91.000,00
2	PT. EDOTCO	1	3.978.000,00	0,00	3.978.000,00
3	PT. TELKOMSEL	17	122.522.000,00	43.559.000,00	78.963.000,00
4	PT. PROTELINDO DAN STH	21	165.882.000,00	0,00	165.882.000,00
5	PT. TOWER BERSAMA GROUP	19	164.066.200,00	0,00	164.066.200,00
6	PT. ERA BANGUN JAYA	13	76.190.920,00	76.185.120,00	5.800,00
	JUMLAH		655.161.120,00	242.175.120,00	412.986.000,00

4. Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2023 sebesar Rp8.162.142.616,00

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.162.142.616,00 merupakan Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah Air Minum (SPAM) yang di reklasifikasi/ pindahkan dari Piutang Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) dikelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang



Retribusi Daerah. Penambahan dan pengurangan Piutang SPAM selama tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	Rp	7.301.863.966,00
Mutasi Tambah	Rp	942.749.775,00
Piutang tahun 2023	Rp	792.691.825,00
Koreksi piutang tahun 2020 kurang catat	Rp	732.800,00
Koreksi piutang tahun 2022 kurang catat	Rp	149.325.150,00
Mutasi Kurang	Rp	82.471.125,00
Penerimaan Piutang SPAM tahun 2022 ke bawah	Rp	81.401.800,00
Koreksi piutang tahun 2019, 2021 dan 2022 lebih catat	Rp	1.069.325,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2023 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	8.162.142.616,00

Rincian Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah Air Minum dilihat pada *Lampiran 23*.

Sebelum penyerahan ke Perusahaan Daerah pada tahun 2016, SPAM dikelola oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, dalam pengelolaannya SPAM memiliki landasan hukum diantaranya:

1. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/0751/Dis. PU tahun 2010 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagai Pengelola Air Minum di Kabupaten Parigi Moutong;
2. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/0750/Dis. PU tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) Kabupaten Parigi Moutong;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/0187/Dis. PU tahun 2010 tentang Tarif Air minum Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) Kabupaten Parigi Moutong; dan
4. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/2219.a/Dis. PU tahun 2010 tentang Pembebasan Tarif Pemasangan Meteran air oleh UPTD-AM Kabupaten Parigi Moutong tahun 2011.

Jumlah pelanggan SPAM yang terdaftar dari tahun 2011 sejumlah 2.349, pelanggan sampai dengan tahun 2015 sejumlah 2.916, pelanggan sampai dengan tahun 2020 sejumlah 3.576 dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, diantaranya:

1. Desa Baliara, sejumlah 254 Pelanggan dengan kode wilayah B ;
2. Kelurahan Masigi, sejumlah 332 pelanggan dengan kode wilayah C ;
3. Kelurahan Kampal,sejumlah 283 pelanggan dengan kode wilayah D ;
4. Kelurahan Bantaya,sejumlah 131 pelanggan dengan kode wilayah E ;
5. Kelurahan loji, sejumlah 72 pelanggan dengan kode wilayah F ;
6. Kelurahan Maesa, sejumlah 109 pelanggan dengan kode wilayah G ;
7. Desa Mertasari,sejumlah 85 pelanggan dengan kode wilayah H ;
8. Desa Pombolowo, sejumlah 137 pelanggan dengan kode wilayah I ;
9. Desa Olaya, sejumlah 174 pelanggan dengan kode wilayah J ;
10. Desa Bambalemo , sejumlah 116 pelanggan dengan kode wilayah K



11. Kecamatan Torue , sejumlah 794 pelanggan dengan kode wilayah L ;
12. Desa Jono kalora, sejumlah 222 pelaggan dengan kode wilayah M;
13. Desa lebo , sejumlah 68 pelanggan dengan kode wilayah N ;
14. Desa lobu , sejumlah 199 pelanggan dengan kode wilayah P ;
15. Desa pangi, sejumlah 9 pelanggan dengan kode wilayah Q ;
16. Desa Tolai, sejumlah 303 pelanggan dengan kode wilayah R ; dan
17. Desa Ampibabo, sejumlah 288 pelanggan dengan kode wilayah L .

Sejak penyerahan SPAM ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2016 tagihan yang terealisasi tahun 2016 sebesar Rp342.970.035,00 belum dapat ditelusuri ke bukti pelunasan, karena seluruh dokumen SPAM telah diserahkan ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengalihan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan dari Dinas Pekerjaan Umum ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 644-4/0466/SEK-PU tanggal 10 Agustus 2016. Pengelolaan SPAM-IKK yang diserahkan adalah SPAM-IKK Parigi dan SPAM-IKK Torue serta uang tunai hasil penerimaan rekening air pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp23.575.145,00. Uang tunai tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 29 Desember 2017. Disetor sebesar Rp25.083.020,00 selisihnya sebesar Rp1.507.875,00 merupakan setoran tunggakan pelanggan air minum yang pelanggan serahkan langsung ke Perusda sebelum penyerahan SPAM ke Perusda. Begitu pula dengan tagihan ke pelanggan sejak dikelola oleh Perusahaan Daerah belum dapat ditelusuri bukti pelunasannya untuk Piutangnya.

Pada tahun 2017 sesuai Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan dari Perusahaan Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, SPAM-IKK diserahkan kembali ke Dinas PUPRP pada tanggal 4 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima.

5.3.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan Piutang SPAM Parigi yang di reklasifikasi/pindahkan ke akun Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

5.3.1.2.4 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp13.534.950.849,07 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp16.887.539.168,52 mengalami penurunan sebesar Rp3.352.588.319,45 atau 19,85%. Rincian saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.76. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	852.588.500,00	0,00	0,00	852.588.500,00
	• Sewa Kios Pasar Tolai	852.588.500,00	0,00	0,00	852.588.500,00
2	Piutang Kerjasama Daerah	14.351.775,00	0,00	0,00	14.351.775,00
3	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.111.477,12	0,00	1.111.477,12	0,00
4	Piutang Jasa Pinjaman Dana Bergulir	26.938.200,00	0,00	0,00	26.938.200,00
5	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.736.378.526,07	0,00	3.800.000,00	2.732.578.526,07
6	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji	288.727.010,00	49.628.580,00	73.332.492,00	265.023.098,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	7.775.088,00	0,00	7.775.088,00
8	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	2.951.468.730,33	0,00	11.997.792,33	2.939.470.938,00
	• Dinas Sosial	16.997.792,23	0,00	6.997.792,23	10.000.000,00
	• Dinas Peindustrian dan Perdagangan	25.012.751,42	0,00	5.000.000,00	20.012.751,42
	• Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	67.492.679,68	0,00	0,00	67.492.679,68
	• Dinas Pekerjaan Umum	2.841.965.507,00	0,00	0,10	2.841.965.506,90
9	Piutang BLUD RSUD Anuntaloko	8.630.334.311,00	5.349.093.238,00	8.168.760.525,00	5.810.667.024,00
10	Piutang BLUD RSUD Raja Tombolotutu	1.385.640.639,00	1.285.899.050,00	1.785.981.989,00	885.557.700,00
	Total	16.887.539.168,52	6.692.395.956,00	10.044.984.275,45	13.534.950.849,07

Penjelasan dari masing-masing rincian adalah sebagai berikut:

1. Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah

Saldo Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp852.588.500,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022, Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan tagihan angsuran sewa kios Pasar Tolai sejak tahun 2012 adalah sebesar Rp916.145.500,00 yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp63.557.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- Piutang sebesar Rp390.950.000,00 (Rp347.204.000,00 + Rp43.746.000,00) merupakan tagihan kepada pemilik/penyewa dari 16 kios yang tidak dapat lagi tertagih karena sudah tidak ada pemiliknya dan ada juga yang sudah tidak sanggup untuk membayar sewa, kios-kios yang sudah kosong tersebut rencana akan dialihfungsikan dari petak kios menjadi los ikan agar dapat bermanfaat.
- Piutang sebesar Rp525.195.500,00 merupakan tagihan kepada penyewa kios yang bersedia untuk membayar. Pada tahun 2013 tertagih sebesar Rp17.800.000,00, tahun 2014 sebesar Rp15.845.000,00, tahun 2015 tidak tertagih, tahun 2016 tertagih sebesar Rp18.312.000,00, dan setoran tahun 2017 tertagih sebesar Rp11.600.000,00. Total setoran sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp63.557.000,00 dengan jumlah setoran yang bervariasi, karena belum ada ketetapan besaran tagihan sewa kios per bulan, sehingga penyewa menyeter besaran angsuran per bulannya berdasarkan kemampuan, dengan demikian sisa Piutang dari daftar penyewa yang bersedia untuk membayar adalah sebesar



Rp461.638.500,00 (Rp916.145.500,00 - Rp390.950.000,00 - Rp63.557.000,00), keseluruhan Piutang tagihan kios Pasar Tolai s.d tahun 2020 adalah sebesar Rp852.588.500,00 (Rp916.145.500,00 - Rp63.557.000,00), tidak terdapat penyeteroran sewa kios Pasar Tolai pada tahun 2023.

Sehingga saldo Piutang sewa per 31 Desember 2023 sebesar Rp852.588.500,00 tidak mengalami perubahan sejak tahun 2013.

Rincian Piutang hasil sewa barang milik daerah atas tagihan angsuran sewa kios Pasar Tolai tersebut disajikan dalam *Lampiran 24*.

2. Piutang Kerjasama Daerah sebesar Rp14.351.775,00,-

Saldo Piutang Kerjasama Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.351.775,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022. Piutang Kerjasama Daerah merupakan Piutang pada Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi hak Pemerintah Daerah dengan rincian hak Pemerintah Daerah tahun 2008 sebesar Rp8.813.797,50 dan tahun 2009 sebesar Rp5.537.977,50.

3. Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Piutang Remunerasi dana TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. dikarenakan sisa dana bagi hasil 2023 disalurkan pada 2 Januari 2024 ke rekening TDF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non tunai melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility* (TDF) sehingga tidak terdapat piutang pada tahun 2023. Saldo Piutang Remunerasi dana TDF mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp1.111.477,12 yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat, yang telah disalurkan ke Kas Daerah tanggal 14 dan 28 April 2023 dari rekening *Treasury Deposit* Nomor 519000494980 pada Bank Indonesia (BI), hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

4. Piutang Jasa Pinjaman Dana Bergulir

Saldo Piutang Jasa Pinjaman Dana Bergulir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.938.200,00 dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2007. Piutang Jasa Pinjaman Dana Bergulir adalah Piutang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang menyalurkan pinjaman lunak berupa Dana Bergulir yang dikucurkan kepada tujuh koperasi dan 20 UMKM pada tahun 2007. Dana Bergulir yang dikucurkan sebesar Rp215.000.000,00 dan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dengan Koperasi/UKM. Dalam surat perjanjian pinjaman tersebut diatur bahwa pengembalian dana bergulir jatuh tempo pada bulan Agustus 2010. Dari jumlah penyaluran dana bergulir sebesar Rp215.000.000,00 dan nilai jasa pinjaman sebesar Rp38.763.200,00 telah dikembalikan pinjaman pokok dana bergulir sebesar Rp48.502.067,00, dan jasa pinjaman sebesar Rp11.825.000,00. Sejak bulan Agustus 2010 pengembalian pokok dana bergulir dan jasa pinjaman telah macet sampai dengan sekarang. Berdasarkan perhitungan atas pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman diketahui bahwa jumlah pokok dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan sebesar Rp166.497.933,00 (Rp215.000.000,00-Rp48.502.067,00) dan jasa pinjaman yang belum disetor koperasi dan KUMK



sebesar Rp26.938.200,00 (Rp38.763.200,00- Rp11.825.000,00). Rincian jasa pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada *Lampiran 25*.

5. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.732.578.526,07 mengalami penurunan sebesar Rp3.800.000,00 atau 0,14%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembayaran dari PNS atas temuan perjalanan dinas sebesar Rp2.800.000,00 dan ketekoran kas sebesar Rp1.000.000,00. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara merupakan Piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lain, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang terkait atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dapat dilihat pada *Lampiran 26*.

6. Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji

Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp265.023.098,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.703.912 atau 8,21% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp288.727.010,00.

Piutang pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran gaji merupakan Piutang yang bersumber dari kelebihan pembayaran gaji kepada PNS, sehingga hak pemerintah daerah untuk menerima pengembalian atas kelebihan bayar tersebut dari semua PNS yang telah lebih diterima.

Rincian Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji PNS yang pensiun dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

7. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS

Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.775.088,00 , mengalami kenaikan sebesar Rp7.775.088,00 atau 100,00% dibandingkan saldo tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS merupakan Piutang yang bersumber dari kelebihan pembayaran tunjangan iuran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp7.775.088,00, di bulan Desember 2023, sehingga hak pemerintah daerah untuk menerima pengembalian atas kelebihan bayar tersebut dari BPJS Kesehatan.

8. Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal

Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal merupakan piutang yang disebabkan Organisasi Perangkat Daerah membayar belanja modal melebihi dari kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga., Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp2.939.470.938,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.997.792,33 atau 0,41% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp2.951.468.730,33 dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal bangunan gedung kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.505.431,10 mengalami penurunan sebesar Rp11.997.792,23 atau (10,96%) dari saldo tahun 2022 sebesar Rp109.503.223,33 adapun rinciannya sebagai berikut:
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebesar Rp67.492.679,68, tidak mengalami perubahan dari saldo tahun 2022
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan saldo 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp20.012.751,42 mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000,00 karena adanya pembayaran oleh pihak ketiga CV. Rahmat Jaya dari Saldo tahun 2022 sebesar Rp25.012.751,42; dan
 - Dinas Sosial saldo per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp10.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.997.792,23 karena adanya koreksi lebih catat akibat bukti pembayarannya di tahun 2022 ditemukan dari saldo tahun 2022 sebesar Rp16.997.792,23.
- b. Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal jalan kabupaten merupakan lebih bayar disebabkan pemutusan kontrak ditengah jalan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pencairan uang muka dilakukan, dikarenakan kemajuan pekerjaannya yang tidak sesuai jadwal kemajuan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Adapun saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.841.965.506,90 mengalami penurunan sebesar Rp0,10 karena adanya pembayaran oleh pihak ketiga CV. Tiga Enam Sembilan dari saldo Piutang tahun 2022 sebesar Rp2.841.965.507,00.
9. **Piutang BLUD RSUD Anuntaloko**
- Piutang BLUD pada RSUD Anuntaloko merupakan Piutang yang timbul akibat pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jampersal dan Jamkesda dari Pemerintah Daerah, Jasa Raharja, Mandiri Inhealth, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta hasil usaha lainnya, tetapi belum mendapatkan pembayaran sesuai klaim yang diajukan oleh BLUD RSUD Anuntaloko sampai dengan 31 Desember 2023.
- Piutang BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.810.667.024,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.819.667.287,00 atau 32,67% dibandingkan dengan Piutang BLUD tahun 2022 sebesar Rp8.630.334.311,00. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.77. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah BLUD RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	BPJS Kesehatan	6.895.906.200,00	5.197.695.400,00	6.895.996.200,00	5.197.605.400,00
	• Saldo awal	6.895.906.200,00	0,00	0,00	6.895.906.200,00
	• Piutang tahun berjalan	0,00	5.197.605.400,00	0,00	5.197.605.400,00
	• Penerimaan Piutang	0,00	0,00	6.874.602.600,00	(6.874.602.600,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	• Koreksi Tambah/(Kurang)	0,00	90.000,00	21.393.600,00	(21.303.600,00)
2	Piutang Pasien COVID 19	1.095.394.500,00	54.000.000,00	1.095.394.500,00	54.000.000,00
	• Saldo awal	1.095.394.500,00	0,00	0,00	1.095.394.500,00
	• Piutang tahun berjalan	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
	• Penerimaan Piutang	0,00	0,00	1.095.394.500,00	(1.095.394.500,00)
3	BPJS Ketenagakerjaan	37.577.900,00	16.228.130,00	37.513.800,00	16.292.230,00
	• Saldo awal	37.577.900,00	0	0	37.577.900,00
	• Piutang tahun berjalan	0,00	16.228.130,00	0	16.228.130,00
	• Penerimaan Piutang	0,00	0	19.841.100,00	(19.841.100,00)
	• Koreksi Tambah	0,00	0,00	17.672.700,00	(17.672.700,00)
4	Piutang Klaim TCM	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00
	• Saldo awal	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00
	• Penerimaan Piutang	0,00	0	7.425.000,00	(7.425.000,00)
	• Koreksi Tambah/ Kurang	0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
5	Parkir	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
	• Saldo awal	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
6	Piutang Pasien Jasa Raharja	106.415.561,00	57.669.708,00	119.956.025,00	44.129.244,00
	• Saldo awal	106.415.561,00	0,00	0,00	106.415.561,00
	• Piutang tahun berjalan	0,00	57.669.708,00	0,00	57.669.708,00
	• Penerimaan Piutang	0,00	0	96.171.574,00	(96.171.574,00)
	• Koreksi Tambah/ Kurang	0,00	0,00	23.784.451,00	(23.784.451,00)
7	Pasien Tunai	361.390.150,00	0,00	0,00	361.390.150,00
	• Saldo awal	361.390.150,00	0,00	0,00	361.390.150,00
8	Piutang Klaim Visum	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
	• Saldo awal	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Piutang tahun berjalan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
9	Piutang Sewa Lahan ATM	0,00	15.000.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00
	• Saldo awal	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Piutang tahun berjalan	0,00	15.000.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00
Total		8.630.334.311,00	5.349.093.238,00	8.168.760.525,00	5.810.667.024,00

Rincian penambahan dan pengurangan Piutang BLUD RSUD Anuntaloko adalah sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	Rp	8.630.334.311,00
Mutasi Tambah	Rp	5.336.843.238,00
Piutang Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan Bln Oktober s/d Desember 2023	Rp	5.197.605.400,00
Piutang Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023	Rp	16.228.130,00
Piutang Pelayanan Pasien Jasa Raharja 2023	Rp	57.669.708,00
Piutang Pasien COVID 19 Dispute April-Mei 2020	Rp	54.000.000,00
Piutang Sewa Lahan ATM	Rp	11.250.000,00



Koreksi Piutang Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan tahun 2022 kurang catat	Rp	90.000,00
Mutasi Kurang	Rp	8.156.510.525,00
Penerimaan Piutang BLUD tahun 2022 ke bawah	Rp	8.093.434.774,00
Koreksi Piutang Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan 2020-2021 lebih catat	Rp	17.672.700,00
Koreksi Piutang Pelayanan Pasien Jasa Raharja lebih catat	Rp	23.784.451,00
Koreksi Piutang Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan lebih catat	Rp	21.393.600,00
Koreksi Piutang Klaim TCM Tahun 2021 lebih catat	Rp	225.000,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2023	Rp	5.810.667.024,00

Pada BLUD RSUD Anuntaloko masih terdapat Piutang kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.157.776.517,00 yang terdiri dari:

- a. Piutang Jampersal sebesar Rp1.433.590.300,00, yaitu :
Piutang Jampersal bulan Juni-Desember 2019 sebesar Rp1.433.590.300,00.
Merupakan Piutang pelayanan persalinan yang klaimnya bersumber dari DAK Non Fisik berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BLUD RSUD Anuntaloko tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Persalinan Tahun 2018 Nomor 440/02.08/Diskes dan Nomor 90.60/005/RSUD.
- b. Piutang pasien bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tahun Per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.724.186.217,00, merupakan Piutang atas pelayanan kepada warga miskin Kabupaten Parigi Moutong yang tidak mendapatkan layanan BPJS di Semua PKM dan Rumah Sakit di wilayah Sulawesi Tengah dikarenakan berakhirnya kerjasama BPJS Kesehatan dengan pemda karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas sehingga sejak bulan Agustus hingga Desember tahun 2020 Pemda memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan BPJS kesehatan dan melakukan Program Bansosda sebagai antisipatif akibat penghentian kerjasama dengan BPJS. Tanggal 27 Juli 2022 Pemda melakukan kerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama nomor 441-6/2004/Dinsos dan 56/KTR/X.03/0721 akan tetapi hanya mendaftarkan 15.000 jiwa, kemudian pemda berinisiatif melanjutkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan warga tidak mampu untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat serta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemda untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin dan warga tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang Tergolong Miskin dan Tidak Mampu.

Piutang ini tidak disajikan di Lembar Muka karena sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua; Lampiran I: PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian; Paragraf 22 Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.



Piutang Jampersal dan Piutang Bansosda di BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp9.157.776.517,00 dieliminasi dengan utang Jampersal dan utang Bansosda di Dinas Kesehatan.

10. Piutang BLUD RSUD Raja Tombolotutu

Piutang BLUD pada RSUD Raja Tombolotutu merupakan Piutang yang timbul akibat pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jampersal dan Jamkesda dari Pemerintah Daerah, Jasa Raharja, Mandiri Inhealth, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta hasil usaha lainnya, tetapi belum mendapatkan pembayaran sesuai klaim yang diajukan oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Piutang BLUD RSUD Raja Tombolotutu tahun 2023 sebesar Rp885.557.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp500.082.939,00 atau 36,09% dibandingkan dengan Piutang BLUD tahun 2022 sebesar Rp1.385.640.639,00.

Rincian penambahan dan pengurangan Piutang BLUD RSUD Raja Tombolotutu adalah sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	Rp	1.385.640.639,00
Mutasi Tambah	Rp	938.472.750,00
Piutang Klaim BPJS Bulan Desember 2023	Rp	852.573.700,00
Piutang Klaim BPJS Ambulance Bulan Desember 2023	Rp	32.984.000,00
Koreksi Piutang Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan tahun 2022 kurang catat	Rp	52.915.050,00
Mutasi Kurang	Rp	1.438.555.689,00
Penerimaan Piutang BLUD tahun 2022 ke bawah	Rp	1.285.278.150,00
Koreksi Piutang Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan lebih catat karena dipotong biaya administrasi bank atas transfer	Rp	75.063.200,00
Koreksi Piutang Insentif Covid lebih catat karena telah dicatat sebagai utang tanggungan Pemda	Rp	78.214.339,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2023 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	885.557.700,00

RSUD Raja Tombolotutu mempunyai Piutang kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.281.696.328,00 yang terdiri dari Piutang Jampersal sebesar Rp560.777.500,00 dan Piutang Bansosda sebesar Rp720.918.828,00. Piutang Jampersal yaitu klaim transportasi ambulance bulan Januari -Juli dan September 2018 ke Dinas Kesehatan atas pelayanan kesehatan untuk persalinan yang dananya bersumber dari DAK Non Fisik berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan RSUD Raja Tombolotutu tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Persalinan tahun 2019 Nomor 440/02.07/Diskes dan Nomor 000/0106/RSUD/2019. Selain itu, terdapat klaim Bansosda bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 sebesar Rp720.918.828,00 kepada Dinas Kesehatan yang telah diverifikasi.

Piutang ini tidak disajikan di Lembar Muka karena sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua; Lampiran I: PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian; Paragraf 22 Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.



Piutang Jampersal dan Piutang Bansosda di BLUD RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp1.281.696.328,00 dieliminasi dengan utang Jampersal dan utang Bansosda di Dinas Kesehatan.

5.3.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang transfer pemerintah pusat merupakan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan DBH bukan pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat. Saldo Piutang transfer pemerintah pusat dana perimbangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.546.807.236,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp4.546.807.236,00.

5.3.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dari Pemerintah Daerah lainnya sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan. Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.358.403.228,00 mengalami penurunan sebesar Rp196.429.202,00 atau 2,30% dibandingkan piutang tahun 2022 sebesar Rp8.554.832.430,00.

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2024 tanggal 25 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan Piutang Dana Bagi Hasil provinsi sebesar Rp8.358.403.228,00 dikarenakan kurang salur.

Piutang DBH Provinsi tahun 2022 sebesar Rp8.554.832.430,00 telah dibayarkan seluruhnya ke Kas Daerah pada tanggal 22 November 2023. Rincian penambahan dan pengurangan Piutang DBH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.78. Rincian Penerimaan Piutang DBH Provinsi TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.461.655.876,00	1.871.910.090,00	2.461.655.876,00	1.871.910.090,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.729.569.214,00	1.588.561.676,00	1.729.569.214,00	1.588.561.676,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	4.329.269.808,00	4.809.598.037,00	4.329.269.808,00	4.809.598.037,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	34.337.532,00	88.333.425,00	34.337.532,00	88.333.425,00
	Jumlah	8.554.832.430,00	8.358.403.228,00	8.554.832.430,00	8.358.403.228,00

**5.3.1.2.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Tak Tertagih tahun 2023 sebesar Rp15.924.195.349,61 mengalami kenaikan sebesar Rp2.664.888.496,36 atau 20,10% dari penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp13.259.306.853,25, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79. Penyisihan Piutang Tak Tertagih*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.929.715.259,04	3.011.974.592,63	917.740.666,41	30,47
2	Penyisihan Piutang Retribusi	7.791.682.836,00	6.957.503,00	7.784.725.333,00	111.889,64
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	6.849.661.541,00	(6.849.661.541,00)	(100,00)
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.202.797.254,57	3.390.713.216,62	812.084.037,95	23,95
	Jumlah	15.924.195.349,61	13.259.306.853,25	2.664.888.496,36	20,10

Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp15.924.195.349,61 merupakan penyisihan atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Lain-lain sebagaimana yang telah dijelaskan pada masing-masing piutang tersebut diatas. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang berdasarkan jenis piutang.

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sesuai dengan perhitungan sebesar Rp3.929.715.259,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80. Penyisihan Piutang Pajak Daerah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Penyisihan
1	Piutang PBB-P2	3.831.192.154,69
2	Piutang Pajak Rumah Makan	44.058,26
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.747.547,92
4	Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.368.802,52
5	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	20.403.262,40
6	Piutang Pajak Reklame Berjalan	8.767.500,00
7	Piutang Pajak Reklame Kain	92.433,25
8	Piutang BPHTB	3.099.500,00
	Jumlah	3.929.715.259,04

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang retribusi sesuai dengan perhitungan sebesar Rp7.791.682.836,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.81. Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Penyisihan
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.056.095,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan kesehatan di RSUD Buluye Napoa'e	242.750,00
3	Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.587.287,50
4	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	7.765.796.703,50
Jumlah		7.791.682.836,00

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sesuai dengan perhitungan sebesar Rp0,00 dikarenakan Piutang pengelolaan SPAM di reklasifikasi/pindahkan ke Piutang Retribusi.

4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sesuai dengan perhitungan sebesar Rp4.202.797.254,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Penyisihan
1	Piutang Hasil Sewa Barang Milik daerah	852.588.500,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Daerah	14.351.775,00
3	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.938.200,00
4	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.188.758.526,07
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji	166.191.293,90
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38.875,44
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	381.701.981,79
8	Piutang BLUD RS Raja Tombolotutu	4.427.788,50
9	Piutang BLUD RSUD Anuntaloko	567.800.313,87
Jumlah		4.202.797.254,57

Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

5.3.1.2.8 Beban Dibayar Dimuka

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.134.215.921,41 pada 3 OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Umum Sekretariat Daerah

Beban Dibayar Dimuka pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp15.703.009,23 merupakan Beban asuransi mobil dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Perjanjian Asuransi Nomor Polis 80022219001063 dan



80022219001064 tanggal mulai perjanjian 12 Agustus 2019 s.d 12 Agustus 2024 untuk mobil Toyota Alphard 2.5 G AT sebanyak dua unit.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.977.741.412,18 merupakan beban pekerjaan fisik yang belum selesai yang terdiri dari:

- a. Tiga proyek pembangunan tahun 2022 yang belum selesai pengerjaannya sebesar Rp97.367.700,79; dan
- b. Proyek pembangunan tahun 2023 yang belum selesai pengerjaannya sebesar 1.880.373.711,39 pada 12 sekolah.

Rincian Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada *Lampiran 31*.

3. RSUD Anuntaloko

Beban Dibayar Dimuka pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp140.771.500,00 yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.83. Beban Dibayar Dimuka pada RSUD Anuntaloko

No.	Uraian	Nomor Perjanjian	Tanggal Mulai Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian	Beban Dibayar Dimuka
1	Sewa Rumah Dinas Direktur	35.62/005/RSUD	15/02/2023	14/02/2024	2.081.250,00
2	Sewa Rumah Dinas Dokter	04.71/005/RSUD	27/03/2023	26/03/2024	4.162.500,00
3	Sewa Rumah Dinas Dokter	59.71/005/RSUD	03/04/2023	02/04/2024	6.243.750,00
4	Sewa Rumah Dinas Dokter	02b.76/005/RSUD	01/07/2023	30/06/2024	11.988.000,00
5	Sewa Rumah Dinas Dokter	28.78/005/RSUD	01/08/2023	31/07/2024	13.986.000,00
6	Sewa Rumah Dinas Dokter	26.51/005/RSUD	01/11/2023	31/10/2024	19.980.000,00
7	Sewa Rumah Dinas Dokter	25.51/005/RSUD	01/11/2023	31/10/2024	19.980.000,00
8	Sewa Rumah Dinas Dokter	58.61/005/RSUD	01/12/2023	30/11/2024	24.420.000,00
9	Sewa Rumah Dinas Dokter	57.61/005/RSUD	01/12/2023	30/11/2024	24.420.000,00
10	Sewa Mobil Dinas Dokter	07/SP.SEWAKENDARAAN/RSUD-III/2023	12/04/2023	11/02/2024	13.510.000,00
Jumlah					140.771.500,00



5.3.1.2.9 Persediaan

Saldo persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Perangkat Daerah. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.359.714.307,09 jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.722.882.126,11 naik sebesar Rp6.636.832.180,98 atau sebesar 30,55%.

Perbandingan saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.84. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	Barang Pakai Habis				
	Bahan	6.934.681.152,83	8.618.681.731,27	(1.684.000.578,44)	(19,54)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.401.726,00	11.144.000,00	42.257.726,00	379,20
2	Bahan Kimia	2.309.473.990,64	1.903.223.101,40	406.250.889,24	21,35
3	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
4	Isi Tabung Gas	1.598.400,00	2.664.000,00	(1.065.600,00)	(40,00)
5	Bahan Lainnya	4.570.207.036,19	6.671.650.629,87	(2.101.443.593,68)	(31,50)
	Suku Cadang	5.144.531.716,45	0,00	5.144.531.716,45	0,00
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.144.531.716,45	0,00	5.144.531.716,45	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.222.293.007,71	1.295.020.855,25	(72.727.847,54)	(5,62)
1	Alat Tulis Kantor	132.854.709,62	99.086.606,75	33.768.102,87	34,08
2	Kertas dan Cover	45.768.250,00	67.187.527,00	(21.419.277,00)	(31,88)
3	Bahan Cetak	956.275.348,89	1.032.494.685,50	(76.219.336,61)	(7,38)
4	Benda Pos	810.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00
5	Bahan Komputer	0,00	3.160.000,00	(3.160.000,00)	(100,00)
6	Perabot Kantor	54.907.470,00	2.619.200,00	52.288.270,00	1.996,35
7	Alat Listrik	18.875.269,20	25.041.183,00	(6.165.913,80)	(24,62)
8	Suvenir/Cendera Mata	0,00	23.500.000,00	(23.500.000,00)	(100,00)
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.801.960,00	41.526.653,00	(28.724.693,00)	(69,17)
	Obat-obatan	13.893.998.372,77	9.705.807.769,76	4.188.190.603,01	43,15
1	Obat	10.501.173.283,67	7.715.413.575,04	2.785.759.708,63	36,11
2	Obat-obatan Lainnya	3.392.825.089,10	1.990.394.194,72	1.402.430.894,38	70,46
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.142.270.547,33	2.075.033.867,33	(932.763.320,00)	(44,95)
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.142.270.547,33	2.075.033.867,33	(932.763.320,00)	(44,95)
	Natura dan Pakan	21.939.510,00	28.337.902,50	(6.398.392,50)	(22,58)
1	Natura	21.939.510,00	28.337.902,50	(6.398.392,50)	(22,58)
	Jumlah	28.359.714.307,09	21.722.882.126,11	6.636.832.180,98	30,55

Saldo akhir persediaan pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 32*.

**5.3.1.3 Investasi Jangka Panjang**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.196.947.650,67 mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 3,31% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp30.196.947.650,67.

Tabel 5.85. Investasi Jangka Panjang*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Investasi Non Permanen	166.497.933,00	166.497.933,00
2	Penyisihan Investasi Non Permanen	(166.497.933,00)	(166.497.933,00)
3	Investasi Permanen	31.196.947.650,67	30.196.947.650,67
	Jumlah	31.196.947.650,67	30.196.947.650,67

5.3.1.3.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi non permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp166.497.933,00 tidak terdapat perbedaan dengan tahun 2022. Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah berupa dana bergulir

5.3.1.3.1.1 Dana Bergulir

Dana bergulir sebesar Rp166.497.933,00 merupakan nilai pinjaman lunak berupa dana bergulir yang dikucurkan kepada tujuh koperasi dan 20 UMKM. Dana bergulir disalurkan sejak TA. 2007 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp215.000.000,00 sedangkan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dengan Koperasi/UKM.

Dalam surat perjanjian pinjaman tersebut diatur bahwa pengembalian dana bergulir jatuh tempo pada bulan Agustus 2010. Dari jumlah penyaluran dana bergulir sebesar Rp215.000.000,00 telah dikembalikan pinjaman pokok dana bergulir sebesar Rp48.502.067,00 dan jasa pinjaman sebesar Rp11.825.000,00 yang ditampung pada Rekening BRI Nomor 0363-01.004180-50-1. Namun demikian dana tersebut telah ditarik oleh Kepala Dinas Koperasi (Sdr.MMR) sebesar Rp55.147.500,00 sehingga dikenakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada tahun 2010. Sisa dana dalam rekening penampung per 20 April 2013 sebesar Rp5.211.955,00 telah berkurang karena dipotong biaya administrasi bank sehingga saldo sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp4.833.806,00. Telah dilakukan upaya untuk menutup rekening tersebut dan menyetorkan sisa dana tersebut ke rekening daerah dengan menulis surat kepada Dinas Koperasi. Dinas Koperasi telah menutup rekening tersebut dan saldo yang terdapat pada rekening sebesar Rp4.738.769,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 Agustus 2017.

Berdasarkan perhitungan atas pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman diketahui bahwa jumlah pokok dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan sebesar Rp166.497.933,00 dan jasa pinjaman yang belum disetor koperasi dan KUMK sebesar Rp26.938.200,00 Pengembalian pokok dana bergulir dan jasa



pinjaman telah macet sejak Agustus 2010 tidak ada mutasi sejak tahun 2010 s.d tahun 2023.

5.3.1.3.1.1 Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023 sebesar (Rp166.497.933,00)

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan. Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh temponya dana bergulir yaitu pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan kualitas penyisihan dana bergulir macet dan besaran penyisihan dana bergulir sebesar 100%. Perhitungan penyisihan dana bergulir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.86. Penyisihan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kriteria Penyisihan/ Kualitas	Penyisihan Piutang	
				%	Rp
Penyisihan Dana Bergulir					
1	2010	166.497.933,00	Macet	100	166.497.933,00
Total					166.497.933,00

Sehingga nilai bersih dari Dana Bergulir adalah sebesar Rp0,00 (Rp166.497.933,00 - Rp166.497.933,00).

5.3.1.3.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi jangka panjang permanen Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 sebesar Rp31.196.947.650,67 mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.000.000,00 dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp Rp30.196.947.650,67, investasi jangka panjang permanen Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk penyertaan modal.

5.3.1.3.2.1 Penyertaan Modal

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan yang pengelolaan asetnya dilakukan secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu yang dituangkan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah merupakan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan daerah. Penyertaan modal Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.87. Rincian Investasi Permanen***(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Penyertaan Modal pada PD. Parigi Moutong	197.444.650,67	197.444.650,67
2	Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulteng	30.999.503.000,00	29.999.503.000,00
	Jumlah	31.196.947.650,67	30.196.947.650,67

1. Penyertaan Modal pada PD. Kabupaten Parigi Moutong

Penyertaan modal pada PD Parigi Moutong sampai dengan tahun 2020 yang disajikan adalah sebesar Rp197.444.650,67. Nilai investasi pada PD Parigi Moutong disajikan berdasarkan Metode Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah tahun 2017 audited sebesar Rp197.444.650,67.

Penyertaan Modal pada PD Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2006 adalah sebesar Rp2.490.000.000,00 yang dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Penyertaan modal tahun 2005 sebesar Rp500.000.000,00 disalurkan pada tanggal 2 Oktober 2005;
2. Penyertaan modal tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 disalurkan pada tanggal 28 Februari 2006;
3. Penyertaan modal tahun 2008 sebesar Rp490.000.000,00 disalurkan pada tanggal 26 November 2008; dan
4. Penyertaan modal tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 disalurkan pada tanggal 18 Maret 2010.

Penyertaan modal pada perusahaan daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PD Parigi Moutong dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 13 Januari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dan mulai efektif berjalan pada tahun 2006. Kegiatan usaha terdiri dari usaha perkebunan vanila di Desa Baliara Kecamatan Parigi, mesin *stone crusher* dan mobil *dump truck*, usaha BTN PNS di Desa Pelawa Kecamatan Parigi, swalayan di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga dan Radio Kareme Nuvula AM 1458 KHz-FM 94,7 MHz. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 709/37a/RHS/INSPEKTORAT/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, semua bidang usaha PD Parigi Moutong sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2011 dan belum dilakukan inventarisasi aset PD Parigi Moutong.

Tahun 2014 PD Kabupaten Parigi Moutong diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Supriadi Laupe untuk Laporan Perusahaan Daerah Parigi Moutong untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat. Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Per 31 Desember 2013 dan 2012, diketahui Perusahaan Daerah Parigi Moutong telah mengalami kerugian terus menerus sejak pendiriannya. Hingga tanggal 31 Desember 2013 kerugian kumulatif perusahaan adalah sebesar Rp2.249.956.883,00 dan pada tahun 2014 sampai dengan



tahun 2015 tidak terdapat aktifitas pada Perusahaan Daerah, pada Laporan Laba/(Rugi) hanya terdapat beban pinjaman.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 821.22.45/0650/Bag. Hukum tahun 2016 tentang Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2020 terbentuk struktur organisasi baru pada Perusahaan Daerah.

1. Struktur Organisasi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Ahmad Alamri
- b. Direktur Operasional : Teguh Arifianto
- c. Direktur Umum : Fakrudin
- d. Direktur Keuangan : Yuslan Attamimi

Kemudian dibentuk struktur organisasi berdasarkan SK Direksi Perusda 001/PD.PM/II/2016, dengan susunan personil sebagai berikut:

- a. Bendahara : Aisyah Ummul Mukminin
- b. Kepala Tata Usaha : Moh. Yusuf Towanda
- c. Manajer Pemasaran : Andi Putrita Nur Passau
- d. Staf.

2. Susunan Badan Pengawas terdiri dari:

- a. Ketua : H. Ekka Pontoh, SH, M.Si.
- b. Sekertaris : H. Abdul Radjab, SE, M.Si.
- c. Anggota : Masdin, S.Sos., M.Si.

3. Bidang Usaha Perusahaan Daerah adalah:

- a. Budi Daya Ikan yaitu ikan mas, ikan koi dan karamba ikan, lokasi di Desa Lobu dan Desa Lemusa;
- b. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum-Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengalihan Pengelolaan SPAM-IKK dari Dinas Pekerjaan Umum ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Dinas Pekerjaan Umum telah menyerahkan pengelolaan SPAM-IKK dengan Berita Acara Serah Terima pengelolaan Nomor 644-4/0466/SEK-PU tanggal 10 Agustus 2016 kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum-Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) yang diserahkan adalah SPAM-IKK Parigi dan SPAM-IKK Torue.

Perusahaan Daerah Parigi Moutong beroperasi selama satu tahun dan pada tahun 2017 Perusahaan Daerah Parigi Moutong telah menyerahkan kembali pengelolaan SPAM kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 041/PD.PM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017. Bidang Usaha Perkebunan dan Perikanan juga sudah tidak berjalan lagi. Perusahaan Daerah Parigi Moutong tidak beroperasi lagi.

Tahun 2017 berdasarkan Laporan Audit atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada Perusahaan Daerah Parigi Moutong Nomor Lap-340/PW19/4/2017 tanggal 27 Desember 2017 oleh BPKP, menyatakan bahwa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Parigi Moutong sebesar Rp2.490.000.000,00 telah direalisasikan untuk modal usaha dan biaya operasional sebesar Rp2.370.975.285,00 yaitu untuk usaha kebun vanili sebesar Rp160.521.500,00,



usaha mesin *stone crusher* sebesar Rp370.039.000,00 usaha perumahan BTN PNS sebesar Rp879.393.750,00 usaha swalayan sebesar Rp138.000.000,00 pengadaan mobil *Dump Truk* DN 8631 AD sebesar Rp70.718.500,00, kegiatan operasional Radio Kareme Novula sebesar Rp218.109.343,00 dan operasional Perusahaan Daerah sebesar Rp534.193.192,00 sehingga masih terdapat sisa penyertaan modal sebesar Rp119.024.715,00 yang belum diketahui penggunaannya.

Tahun 2017 PD Kabupaten Parigi Moutong diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Supriadi Laupe untuk Laporan Perusahaan Daerah Parigi Moutong untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat. Basis untuk opini tidak memberikan pendapat, KAP Supriadi Laupe menyatakan tidak memperoleh catatan pembukuan perusahaan, bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas serta bukti lainnya, hal ini disebabkan karena manajemen perusahaan sudah tidak aktif lagi.

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah tahun 2017 pada Laporan Ekuitas Penyertaan Modal disajikan sebesar Rp197.444.650,67 (Rp2.490.000.000,00 - Rp2.292.555.349,33). Dengan Metode Ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.88. Rincian Perubahan Ekuitas pada PD Parigi Moutong

(dalam rupiah)

Uraian	Penyertaan Modal	Saldo Laba/(Rugi)	Jumlah
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2013 berdasarkan Audit KAP Supriadi Laupe	2.490.000.000,00	(2.249.956.883,00)	240.043.117,00
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2014	2.490.000.000,00	(2.273.511.032,45)	216.488.967,55
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015	2.490.000.000,00	(2.297.493.379,45)	192.506.620,55
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016	2.490.000.000,00	(2.280.244.159,00)	209.755.841,00
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017	2.490.000.000,00	(2.292.555.349,33)	197.444.650,67

Rincian kerugian Perusahaan Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.89. Rincian Laporan Laba/(Rugi) pada PD Parigi Moutong

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Laba/(Rugi)
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2013 berdasarkan Audit KAP Supriadi Laupe	(2.249.956.883,00)
Laporan Laba/(Rugi) 2014	(23.554.149,45)
Laporan Laba/(Rugi) 2015	(23.982.347,00)
Laporan Laba/(Rugi) 2016	17.249.220,45
Laporan Laba/(Rugi) 2017	(12.311.190,33)
Total Laba/(Rugi)	(2.292.555.349,33)

Sejak penyerahan SPAM dari Perusahaan Daerah Ke Dinas PURP tahun 2017 Perusahaan Daerah sudah tidak beroperasi lagi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong masih mengkaji apakah Perusahaan Daerah Parigi Moutong akan ditutup atau akan dilanjutkan dengan usaha yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan Daerah karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, sehingga laporan



keuangan audited yang diterbitkan terakhir per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

2. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah

Penyertaan modal pada PT Bank Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.999.503.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.000.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp Rp29.999.503.000,00, karena Pemda Parigi Moutong melakukan penambahan penyertaan modal pada tahun 2023, sehingga kepemilikan penyertaan modal masih tetap sebesar 3,92% per April 2023 masih sama dengan tahun 2022, belum menambah penyertaan modal Pemerintah kabupaten Parigi Moutong dikarenakan penambahan modalnya dilakukan di tanggal 27 Desember 2023, adapun rincian penyertaan modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90. Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng

(dalam rupiah)

No	Tahun	Uraian	Dasar Hukum	Jumlah	Penyaluran
1	2005	Penyertaan Modal	PKS No. 979/7413/Bag.Kumdang/2005	250.000.000,00	14-Nov-05
			Nomor 18/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2005		
2	2006	Penambahan Penyertaan Modal	PKS No.979/9339/Bag.Umum/2006	2.475.000.000,00	06-Jul-06
			Nomor 15/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2006		
3	2007	Penambahan Penyertaan Modal	PKS No. 033/11948/Bag.Umum/2007 -	2.475.000.000,00	25-Jun-07
			Nomor 08/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2007		
4	2010	Penambahan Penyertaan Modal	PKS No. 033/11948/Bag.Umum/2007 -	700.000.000,00	30-Des-10
			Nomor 08/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2007		
5	2017	Penambahan Penyertaan Modal	Perda No.8 tahun 2017	2.322.915.000,00	29-Nov-17
6	2017	Penambahan Penyertaan Modal	Perda No.8 tahun 2017	7.447.573.000,00	27-Des-17
7	2018	Penambahan Penyertaan Modal	Perda No.8 tahun 2017	3.664.759.000,00	20-Des-18
8	2019	Penambahan Penyertaan Modal	Perda No.8 tahun 2017	10.664.256.000,00	11-Des-19
9	2023	Penambahan Penyertaan Modal	Perda No.5 tahun 2023	1.000.000.000,00	27-Des-23
		Jumlah		30.999.503.000,00	

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di tanggal 27 Desember 2023, tidak serta menambah nilai investasi yang tercatat di Bank Sulteng akan naik hal ini dikarenakan dilakukan di akhir tahun buku 2023, sehingga



nilai investasi di Bank Sulteng masih tetap sebesar Rp29.999.503.000,00 dengan kepemilikan 211.085 lembar saham dengan harga nominal sebesar Rp21.108.500.000,00 dengan Agio saham Rp8.890.737.015,00 atau 4,94% dari total Saham pada PT. Bank Sulawesi Tengah disajikan berdasarkan metode biaya (*cost method*), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.91. Rincian konversi Modal Saham pada PT Bank Sulteng

(dalam rupiah)

No.	Tanggal Setor	Dana Setoran Modal (DSM)	Konversi			Total saham	Sisa
			Nominal	Lembar Saham	Agio Saham		Belum cukup 1 lembar saham
			100.000,00		58.459,00		
1	2005-2012	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	59.000	0,00	5.900.000.000,00	0,00
2	27/12/2017	7.447.573.000,00	4.700.000.000,00	47.000	2.747.573.000,00	4.700.000.000,00	0,00
3	27/12/2017	2.322.915.000,00	1.465.900.000,00	14.659	856.950.481,00	1.465.900.000,00	64.519,00
4	20/12/2018	3.664.759.000,00	2.312.700.000,00	23.127	1.351.981.293,00	2.312.700.000,00	77.707,00
5	13/12/2019	10.664.256.000,00	6.729.900.000,00	67.299	3.934.232.241,00	6.729.900.000,00	123.759,00
	Total	29.999.503.000,00	21.108.500.000,00	211.085	8.890.737.015,00	21.108.500.000,00	265.985,00

Sejak tahun 2006 s.d. 2023 dari penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah memperoleh bagian keuntungan berupa deviden, seluruhnya sebesar Rp32.650.362.504,75 dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.92. Rincian Penerimaan Dividen

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Tanggal Diterima
1	Dividen dan dana pembangunan tahun 2006 untuk tahun buku 2005	5.253.392,37	07-Agu-06
2	Dividen dan dana pembangunan tahun 2007 untuk tahun buku 2006	322.511.272,23	01-Des-07
3	Dividen dan dana pembangunan tahun 2008 untuk tahun buku 2007	349.926.570,77	29 Mei 208
4	Dividen dan dana pembangunan tahun 2009 untuk tahun buku 2008	752.216.445,26	11-Nov-09
5	Dividen tahun 2010 untuk tahun buku 2009	1.059.246.369,22	17-Jun-10
6	Dividen tahun 2011 untuk tahun buku 2010	1.669.983.603,73	11-Apr-11
7	Dividen tahun 2012 untuk tahun buku 2011	588.201.443,90	03-Mei-13
8	Dividen tahun 2013 untuk tahun buku 2012	676.615.894,41	24-Apr-14
9	Dividen tahun 2014 untuk tahun buku 2013	728.827.715,98	08-Jul-14
10	Dividen tahun 2015 untuk tahun buku 2014	1.612.936.081,26	06-Nov-15
11	Dividen tahun 2016 untuk tahun buku 2015	900.509.583,90	06-Jun-16
12	Dividen tahun 2016 untuk tahun buku 2015	900.509.583,90	02-Nov-16
13	Dividen tahun 2017 untuk tahun buku 2016	1.322.911.029,00	30-Mei-17
14	Dividen Tahun 2018 untuk tahun buku 2017	1.152.607.523,00	22-Mei-18



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Tanggal Diterima
15	Deviden Tahun 2019 untuk tahun buku 2018	1.616.145.686,00	24-Apr-19
16	Deviden Tahun 2020 untuk tahun buku 2019	2.457.250.254,00	03-Jul-20
17	Deviden Tahun 2021 untuk tahun buku 2020	2.495.522.424,67	07-Apr-21
18	Deviden Tahun 2021 untuk tahun buku 2020	1.663.681.616,45	22-Nov-21
19	Deviden Tahun 2022 untuk tahun buku 2021	5.067.381.985,70	14-Jun-22
20	Deviden Tahun 2023 untuk tahun buku 2022	7.308.124.029,00	14-Agu-23
	Jumlah	32.650.362.504,75	

5.3.1.4 Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.491.203.084.090,59 saldo aset tetap tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp55.679.301.900,57 dari tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp2.435.523.782.190,02 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.93. Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2023
1	Tanah	463.582.363.203,43	1.389.195.000,00	189.600.000,00	464.781.958.203,43
2	Peralatan dan Mesin	863.659.620.626,85	108.716.704.146,00	39.664.342.750,68	932.711.982.022,17
3	Gedung dan Bangunan	1.143.686.907.709,22	97.168.964.498,00	15.713.485.953,00	1.225.142.386.254,22
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.417.651.039.834,65	82.927.613.518,00	9.356.273.101,00	1.491.222.380.251,65
5	Aset Tetap Lainnya	26.809.010.184,98	7.469.548.900,00	17.981.676.299,00	16.296.882.785,98
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	29.083.760.392,23	18.532.540.731,23	17.766.657.152,76	29.849.643.970,70
	Jumlah (Aset Tetap)	3.944.472.701.951,36	316.204.566.793,23	100.672.035.256,44	4.160.005.233.488,15
1	Akumulasi Penyusutan	(1.508.948.919.761,34)	(185.439.768.953,76)	(25.586.539.317,54)	(1.668.802.149.397,56)
	Jumlah (Aset Tetap + Penyusutan)	2.435.523.782.190,02	130.764.797.839,47	75.085.495.938,90	2.491.203.084.090,59

Mutasi aset tetap tahun 2023 sebesar Rp215.532.531.536,79 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp316.204.566.793,23 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran belanja modal TA 2022 sebesar Rp221.206.397.626,00;
 - b. Pendapatan Hibah sebesar Rp4.000.082.811,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.521.476.016,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1280.1/BA/DC/2021 dan Nomor 105/1353/Dis.LH tanggal 20 Desember 2021 berupa alat berat excavator;



- 2) Hibah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp45.234.525,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 000.3.4/4685/BAK dan Nomor 000.1.7/571.a/satpol.PP tgl 30 Agustus 2023 berupa Kendaraan bermotor roda dua beserta kelengkapannya;
 - 3) Hibah dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi sebesar Rp171.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang (CSR) Nomor : 000.1.7/14/Sek PT Bank Sulteng Cabang Parigi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 19 Desember 2023 berupa 2 unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga;
 - 4) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp50.811.272,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten parigi Moutong tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 74/BNPB/D-V/RT.03.05/11/2022 dan Nomor: 64.48/005/RSUD, berupa 2 Unit Ventilator merek Yuwell/YH-730 Tanggal 14 november 2021;
 - 5) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp256.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyediaan Alat Ultrasonografi (USG 2D) Nomor BJ.01.04/PPK4.1/479/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 berupa APF Digital Ultrasound Imaging System;
 - 6) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp97.750.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyediaan Pulse Oximeter Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 Tanggal 15 Desember 2023 berupa Pulse Oximeter;
 - 7) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp703.100.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyediaan Antropometri Kit Tahap 2 Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1037/2023 Tanggal 27 Desember 2023 berupa Set Antropometri 2 BT; dan
 - 8) Hibah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp1.154.210.998,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 028/6532/Bag dan 032/0164/Bag Umum Tanggal 17 November 2016 berupa gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jalan Kampali Parigi Moutong.
- c. Penambahan Aset Tetap dari belanja barang dan jasa sebesar Rp20.146.036.937,00;
 - d. Penambahan Aset Tetap dari belanja hibah Bos Daerah sebesar Rp1.091.510.155,00;



- e. Penambahan BMD yang belum tercatat sebagai aset tetap dari hasil inventarisasi sebesar Rp3.468.762.610,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanah bangunan gedung pelelangan ikan berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 000.3/862/BPKAD tentang Nilai Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Daerah tanggal 15 September 2023 sebesar Rp594.000.000,00 yaitu tanah TPI Petapa;
 - 2) Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp127.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Penelusuran Nilai Perolehan Barang Milik Daerah (BMD) Nomor 400.7.3.4/270.b/BPKAD tanggal 16 Mei 2023 berupa minibus isuzu panther;
 - 3) Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp115.700.000,00 berdasarkan Berita Acara Penelusuran Nilai Perolehan Barang Milik Daerah (BMD) Nomor 400.7.3.4/286a/BPKAD tanggal 127 Mei 2023 berupa mobil penumpang toyota avanza;
 - 4) Gedung bangunan tempat pendidikan berdasarkan surat permohonan koreksi pencatatan nilai aset gedung dan bangunan Nomor 032/1427/DISDIKBUD Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp2.632.062.610,00 berupa gedung sekolah, gedung laboratorium, bangunan MCK dll, pada SMPN 1 Bolano Lambunu, SMPN 2 Taopa, SMPN 2 Kasimbar, SMPN 3 Parigi, SMPN 1 Tinombo;
 - f. Pengakuan Aset Tetap berasal dari utang belanja modal sebesar Rp559.623.265,48;
 - g. Pengakuan Aset Tetap berasal dari beban dibayar dimuka untuk KDP Tahun 2022 yang telah selesai dikerjakan di tahun 2023 sebesar Rp569.482.989,38;
 - h. Kapitalisasi dari barang ekstrakomptabel yang dicatat menjadi Aset Tetap karena telah direhab sebesar Rp25.300.000,00;
 - i. Penambahan Aset Tetap dari bangunan kondisi rusak berat yang telah direhab sebesar Rp23.205.000,00; dan
 - j. Penambahan reklasifikasi sebesar Rp65.114.165.399,37.
2. Mutasi kurang sebesar Rp84.271.166.631,44 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hibah kepada sekolah swasta dan kelompok masyarakat sebesar Rp246.358.704,00;
 - b. Reklasifikasi ke aset lainnya kondisi rusak berat sebesar Rp25.738.200.277,54 untuk menunggu proses penghapusan;
 - c. Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp189.600.000,00;
 - d. Barang ekstrakomptabel sebesar Rp5.560.201.568,14;
 - e. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa karena berupa barang pakai habis sebesar Rp1.943.135.596,00;
 - f. Reklasifikasi ke piutang karena adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.880.373.711,39; dan
 - g. Pengurangan reklasifikasi sebesar Rp65.114.165.399,37.

Rincian nilai aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

5.3.1.4.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp464.781.958.203,43 yang merupakan nilai dari 3 jenis tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah



dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Rincian nilai tanah tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.94. Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tanah Persil	101.118.632.371,69	101.523.032.371,69
2	Tanah Non Persil	34.309.121.730,00	34.309.121.730,00
3	Lapangan	328.154.609.101,74	328.949.804.101,74
	Jumlah	463.582.363.203,43	464.781.958.203,43

Total nilai aset tetap tanah tahun 2023 sebesar Rp464.781.958.203,43. Saldo aset tetap tanah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.199.595.000,00 dari tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp463.582.363.203,43. Mutasi aset tetap tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.	Penambahan aset tetap tanah		
a.	Realisasi belanja modal tanah	Rp	698.220.000,00
b.	utang belanja modal tanah	Rp	96.975.000,00
c.	Penambahan aset tetap tanah dari hasil inventarisasi	Rp	594.000.000,00
		Rp	1.389.195.000,00
2.	Pengurangan aset tetap tanah		
a.	Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah	Rp	189.600.000,00
		Rp	189.600.000,00
	Jumlah Mutasi Aset Tetap Tanah (1-2)	Rp	1.199.595.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp1.389.195.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran belanja modal tanah sebesar Rp698.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran tanah lapang, lokasi motor cross di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo sebesar Rp500.000.000,00; dan
 - 2) Pembayaran tanah lapangan sepakbola di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat sebesar Rp198.220.000,00.
 - b. Utang belanja modal tanah sebesar Rp96.975.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berupa lokasi motor cross di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo; dan
 - c. Penambahan Aset Tetap tanah yang belum tercatat, hasil inventarisasi aset tetap sebesar Rp594.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 000.3/862/BPKAD tentang Nilai Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Daerah



tanggal 15 September 2023 sebesar Rp594.000.000,00 yaitu tanah Tempat Pelelangan Ikan Petapa.

2. Pelepasan hak atas tanah lokasi di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi sebesar Rp189.600.000,00. Nilai perolehan Aset Tetap tanah tersebut telah di catat pada tahun 2020 saat utang belanja modal tanah dicatat, namun sampai dengan tahun 2023 utang tersebut belum dilunasi sehingga pemilik tanah menjualnya ke pihak lain.

Pada aset tetap tanah terdapat 36 bidang tanah dengan perolehan tanah luasan 0,00m² berupa nilai pekerjaan cetak sawah, biaya ganti rugi tanaman dan biaya penimbunan lahan yang bukan untuk tujuan pematangan lahan, pencatatan nilai tersebut diatas hanya berdasarkan realisasi belanja modal, adapun berdasarkan hasil inventarisasi BMD nilai tersebut tidak berupa aset tetap tanah dan pada aset tetap tanah masih terdapat tanah yang belum bersertifikat.

Selain itu terdapat Aset Tetap Tanah Pemerintah Daerah yang sedang dalam sengketa hukum berlokasi di Jalan Kampal, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi (dahulu Kabupaten Donggala) sekarang Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 7.529 m², dengan batas-batas sebagai berikut.

1. Sebelah utara : berbatasan dengan jalan;
2. Sebelah timur : dahulu berbatasan dengan ARIS, sekarang berbatasan dengan jalan Auditorium Kantor Bupati;
3. Sebelah selatan : dahulu berbatasan dengan kuala (sungai)/UDIN/HANI SAPONCI, sekarang berbatasan dengan bangunan bagian Kantor Bupati; dan
4. Sebelah barat : dahulu berbatasan dengan ARMAN/TONDI, sekarang berbatasan dengan lokasi upacara Kantor Bupati.

Awal tahun 2024 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sedang menyiapkan memori Peninjauan Kembali (PK) atas *Novum* (alat bukti baru) yang didapatkan dari BPN Parigi yaitu Peta Penataan awal sebelum penataan awal *Land Cosolidation* (LC) tanggal 19 Desember 2002 dan Peta Penataan LC Perkotaan tanggal 16 Juni 2003.

5.3.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp932.711.982.022,17 yang merupakan nilai dari tiga puluh delapan jenis peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Rincian nilai peralatan dan mesin tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.95. Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

(dalam rupiah)			
No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Alat Besar Darat	30.991.730.280,00	32.400.956.296,00
2	Alat Besar Apung	545.627.000,00	545.627.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Alat Bantu	2.659.368.000,00	3.061.152.500,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	142.019.588.817,68	137.287.946.696,98
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	390.279.380,00	394.379.380,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	8.094.204.250,00	7.246.891.250,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	356.350.000,00	206.350.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.361.618.350,00	1.350.130.350,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	735.817.000,00	766.890.500,00
10	Alat Ukur	2.760.648.449,18	2.747.645.969,18
11	Alat Pengolahan	6.227.983.758,58	7.065.014.758,58
12	Alat Kantor	24.745.436.509,29	28.487.350.752,29
13	Alat Rumah Tangga	106.269.104.480,43	116.735.607.676,61
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.670.981.291,11	10.732.874.821,07
15	Alat Studio	10.979.288.088,21	10.961.244.063,21
16	Alat Komunikasi	14.661.097.381,00	13.487.995.731,00
17	Peralatan Pemancar	1.536.765.900,00	1.544.315.900,00
18	Alat Kedokteran	304.576.460.510,31	349.372.243.653,17
19	Alat Kesehatan Umum	495.329.200,00	3.678.377.636,00
20	Unit-unit Laboratorium	28.270.735.130,29	28.212.755.173,29
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	6.597.066.392,00	6.547.366.392,00
22	Alat Peraga/Praktik Sekolah	30.401.510.835,40	30.402.258.335,40
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.060.238.585,00	5.054.181.585,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	64.030.000,00	66.430.000,00
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	100.195.450,00	100.195.450,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.104.566.433,00	2.039.466.433,00
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.054.500,00	8.054.500,00
28	Alat Laboratorium Standarisasi kalibrasi dan Instrumentasi	1.277.718.010,00	1.277.718.010,00
29	Komputer Unit	85.958.157.468,73	94.921.399.007,75
30	Peralatan Komputer	25.319.539.480,64	27.328.028.672,64
31	Alat Eksplorasi Geofisika	2.150.000,00	2.150.000,00
32	Alat Pelindung	451.060.790,00	639.081.518,00
33	Alat SAR	3.389.517.580,00	3.404.184.880,00
34	Alat Kerja Penerbangan	49.800.000,00	54.300.000,00
35	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	44.555.400,00	44.555.400,00
36	Unit/Peralatan Proses Produksi	14.564.770,00	14.564.770,00
37	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.938.502.892,00	2.887.147.892,00
38	Peralatan Olahraga	1.529.978.264,00	1.635.149.069,00
	Jumlah	863.659.620.626,85	932.711.982.022,17

Total nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp932.711.982.022,17, saldo aset tetap peralatan dan mesin tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.052.361.395,32 dari tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp863.659.620.626,85. Mutasi aset tetap peralatan dan mesin dapat diuraikan sebagai berikut:



1.	Penambahan aset tetap peralatan dan mesin		
a.	Realisasi belanja modal	Rp	87.126.556.041,00
b.	Pendapatan hibah	Rp	2.845.871.813,00
c.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari belanja barang dan jasa	Rp	266.122.886,00
d.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari belanja hibah Bos Daerah	Rp	897.905.755,00
e.	utang belanja modal Peralatan dan Mesin	Rp	3.000.000,00
f.	Penambahan BMD yang belum tercatat dari hasil inventarisasi	Rp	242.700.000,00
g.	Reklasifikasi antar KIB	Rp	17.334.547.651,00
		Rp	108.716.704.146,00
2.	Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin		
a.	Reklasifikasi ke beban barang dan jasa (BHP)	Rp	1.643.517.749,00
b.	Barang Ekstrakomptabel	Rp	897.119.463,14
c.	Hibah kepada sekolah swasta	Rp	12.533.400,00
d.	Reklasifikasi ke aset lainnya rusak berat	Rp	20.241.936.933,54
f.	Reklasifikasi antar KIB	Rp	16.869.235.205,00
		Rp	39.664.342.750,68
	Jumlah mutasi aset tetap peralatan dan mesin (1-2)	Rp	69.052.361.395,32

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp108.716.704.146,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp87.126.556.041,00;
 - b. Pendapatan hibah sebesar Rp2.845.871.813,00 yaitu:
 - 1) Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.521.476.016,00 berupa alat berat excavator;
 - 2) Hibah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp45.234.525,00 berupa Kendaraan bermotor roda dua beserta kelengkapannya;
 - 3) Hibah dari PT Bank Sulteng Cabang Parigi sebesar Rp171.500.000,00 berupa 2 unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga;
 - 4) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp50.811.272,00 berupa 2 Unit Ventilator merek Yuwell/YH-730;
 - 5) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp256.000.000,00 berupa APF Digital Ultrasound Imaging System;
 - 6) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp97.750.000,00 berupa Pulse Oximeter; dan
 - 7) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp703.100.000,00 berupa Set Antropometri 2 BT.



- c. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari belanja barang dan jasa sebesar Rp266.122.886,00 yaitu papan pengumuman, papan nama kantor, senter besar taff led, meja tamu dll;
 - d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belanja hibah Dana BOS Daerah sebesar Rp897.905.755,00 yang diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin yaitu :
 - 1) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp1.000.000,00 berupa gerobak dorong;
 - 2) Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp1.500.000,00 berupa mesin pompa air;
 - 3) Peralatan kantor sebesar Rp82.240.000,00 berupa peta, papan pengumuman dan papan tulis;
 - 4) Peralatan rumah tangga sebesar Rp213.946.300,00 berupa kipas angin, kompor gas, tendon air, *sound system*, meja sekolah dll;
 - 5) Alat studio sebesar Rp367.000,00 berupa microphone;
 - 6) Unit alat laboratorium sebesar Rp750.000,00 berupa foto vol/sel surya;
 - 7) Alat peraga praktek sekolah sebesar Rp55.651.500,00 berupa bel listrik, *portable generating set*, meja sekolah, bangku sekolah dll;
 - 8) Komputer unit sebesar Rp437.518.500,00 berupa laptop;
 - 9) Peralatan komputer sebesar Rp95.232.455,00 berupa printer, hard disk, scanner, modem dll;
 - 10) Alat Pelindung sebesar Rp1.600.000,00 berupa baterai dry fit; dan
 - 11) Alat SAR sebesar Rp8.100.000,00 berupa tenda.
 - e. Utang belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.000.000,00 berupa meubelair sekolah swasta yang belum dibayarkan.
 - f. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari BMD yang belum tercatat hasil inventarisasi sebesar Rp242.700.000,00 berdasarkan hasil inventarisasi terdiri dari :
 - 1) Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp127.000.000,00 berupa minibus isuzu panther; dan
 - 2) Alat angkutan darat bermotor sebesar Rp115.700.000,00 berupa mobil penumpang toyota avanza.
 - g. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp17.334.547.651,00.
2. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp39.664.342.750,68 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa berupa barang habis pakai sebesar Rp1.643.517.749,00 yaitu:
 - 1) Alat Pengolahan sebesar Rp2.720.200,00 berupa drum;
 - 2) Alat Kantor sebesar Rp37.998.300,00 berupa tempat sampah, papan tulis berkotak dan papan nama ruangan akrilik;
 - 3) Alat Rumah Tangga sebesar Rp139.027.580,00 berupa sepatu boot, kursi plastic, perbaikan pintu, tirai dan mainan perosotan anak;



- 4) Alat studio sebesar Rp57.500.000,00 berupa speaker, sound system dan microphone;
- 5) Alat Kedokteran sebesar Rp1.071.905.419,00 berupa gunting, pinset gigi, *penlight*, *coldpack*, *balance board kettler*, *spons pad tens*, *gigli wire saw manset*, regulator O2 dll;
- 6) Alat Kesehatan Umum sebesar Rp4.412.250,00 berupa *MVA Plus Set*;
- 7) Unit alat laboratorium sebesar Rp313.804.000,00 berupa tabung oksigen, *cool box*, *stetoskop littmann*, tiang infus, *ophthalmoscope stainless*, lampu pemeriksaan bistos, timbangan analitik, *bordozzo tang besar* dll;
- 8) Alat peraga praktek sekolah sebesar Rp11.651.000,00 berupa bola kaki, jaring gawang, raket dll; dan
- 9) Peralatan olahraga sebesar Rp4.499.000,00 berupa stick gateball.
- b. Barang ekstrakomptabel yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp897.119.463,14, yaitu:
 - 1) Alat bantu sebesar Rp35.051.136,00 berupa pompa air dan *transportable generating*;
 - 2) Alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp2.613.000,00 berupa gerobak dorong (*artco*);
 - 3) Alat ukur sebesar Rp8.436.000,00 berupa alat ukur kelembapan udara, alat ukur suhu kulkas dan alat ukur suhu ruangan;
 - 4) Alat pengolahan sebesar Rp3.216.000,00 berupa penyemprot tangan;
 - 5) Alat kantor sebesar Rp33.199.410,00 berupa *veld bed* dan *artco*;
 - 6) Alat rumah tangga sebesar Rp232.424.150,00 berupa bangku sekolah, penyemprot tangan, *veld bed* dan *artco* dll;
 - 7) Alat kedokteran sebesar Rp20.525.337,14 berupa *probe UNC15*, *dressing drum verband tromol 15 cm*, *spatula lidah logam panjang*, tang tampon *bozemann bergerigi lurus 26cm* dll;
 - 8) Alat kesehatan umum sebesar Rp8.185.780,00 berupa stetoskop, tensi meter, gunting dll;
 - 9) Unit alat laboratorium sebesar Rp238.835.000,00 berupa alat inseminasi buatan, tiang infus, *cool box*, timbangan analitik dll; dan
 - 10) Alat Peraga/Praktek Sekolah sebesar Rp314.633.650,00 berupa catur, lempar lembing, pompa air, penyemprot tangan, gerobak dorong, timbangan, alat peraga matematika, bel listrik, alat praktek IPA dasar dll;
- c. Hibah kepada sekolah swasta yang asetnya tidak dicatat sebagai aset pemerintah daerah karena telah di hibahkan ke pihak sekolah swasta berupa ayunan sekolah TK Alkhairat Parigi sekolah sebesar Rp12.533.400,00;
- d. Reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp20.241.936.933,54 berupa aset tetap peralatan dan mesin dalam keadaan rusak berat dapat dilihat pada *Lampiran 35*; dan
- e. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp16.869.235.205,00.



Pada beberapa perangkat daerah terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan hibah dari APBN yang belum diserahkan sepenuhnya dan belum dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong karena belum terbitnya berita acara serah terima barang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.96. Hibah APBN*(dalam rupiah)*

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	RSUD Anuntaloko	58.510.672.060,88
2	Dinas Kesehatan	19.602.348.849,00
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	38.505.000,00
4	Dinas Sosial	287.920.000,00
5	Dinas Perhubungan	372.739.455,00
	Jumlah	78.812.185.364,88

Rincian hibah yang bersumber dari APBN tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 36*.

5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.225.142.386.254,22 yang merupakan nilai dari lima jenis gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Rincian nilai gedung dan bangunan tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.97. Aset Tetap Gedung Dan Bangunan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.029.403.412.066,66	1.103.485.301.711,66
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	82.271.825.603,85	90.054.869.659,85
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.124.051.000,00	1.124.051.000,00
4	Bangunan menara Perambuan	2.493.415.000,00	1.568.565.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	28.394.204.038,71	28.909.598.882,71
	Jumlah	1.143.686.907.709,22	1.225.142.386.254,22

Total nilai aset tetap gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp1.225.142.386.254,22, saldo aset tetap gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp81.455.478.545,00 dari tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp1.143.686.907.709,22. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:



1.	Penambahan aset tetap gedung dan bangunan		
a.	Realisasi belanja modal gedung dan bangunan	Rp	48.904.164.451,00
b.	Pendapatan hibah	Rp	1.154.210.998,00
c.	Penambahan Aset Tetap gedung dan bangunan dari belanja barang dan jasa	Rp	15.615.967.401,00
d.	Penambahan BMD yang belum tercatat dari hasil inventarisasi	Rp	2.414.494.081,00
e.	Penambahan Aset Tetap berasal dari beban dibayar dimuka untuk KDP Tahun 2022	Rp	416.485.383,53
f.	kapitalisasi dari barang ekstrakomptabel	Rp	25.300.000,00
g.	Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	23.205.000,00
h.	Reklasifikasi antar KIB	Rp	334.581.363,00
i.	Reklasifikasi dari aset renovasi	Rp	12.651.070.000,00
j.	Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan	Rp	15.629.485.820,47
		Rp	97.168.964.498,00
2.	Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan		
a.	Reklasifikasi ke beban barang dan jasa (BHP)	Rp	124.406.140,00
b.	Reklasifikasi ke aset lainnya rusak berat	Rp	1.887.865.802,00
c.	Hibah kepada sekolah swasta	Rp	156.829.800,00
d.	Reklasifikasi antar KIB	Rp	3.797.791.776,00
e.	Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan	Rp	9.746.592.435,00
		Rp	15.713.485.953,00
	Jumlah mutasi aset tetap gedung dan bangunan (1-2)	Rp	81.455.478.545,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp97.168.964.498,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp48.904.164.451,00;
 - b. Hibah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp1.154.210.998,00 berupa gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jalan Kampali Parigi Moutong;
 - c. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp15.615.967.401,00 berupa rehabilitasi bangunan gedung, perencanaan dan pengawasan pekerjaan bangunan gedung sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan dan pengawasan arsitektur pembangunan selasar pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp64.720.000,00;
 - 2) Pembangunan Taman sebesar Rp105.416.087,00 pada Bagian Pemerintahan Umum;
 - 3) Perencanaan dan pengawasan renovasi bangunan laboratorium puskesmas di Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Balinggi dan Kecamatan Moutong pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp51.900.000,00;
 - 4) Perencanaan dan pengawasan pembangunan halte angkutan umum Desa Tanahlanto sebesar Rp3.500.000,00 pada Dinas Perhubungan;
 - 5) Perencanaan dan pengawasan pembangunan *grand house* percontohan balai penyuluh pertanian Kecamatan Sausu, ruang multi fungsi balai penyuluh pertanian Kecamatan Torue dan laboratorium mini balai penyuluh pertanian Kecamatan Taopa sebesar Rp172.000.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;



- 6) Perencanaan dan pengawasan arsitektur pembangunan rehabilitasi selasar pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp104.851.610,00;
 - 7) Perencanaan dan pengawasan arsitektur pekerjaan rehabilitasi gedung cathlab pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp122.412.048,00;
 - 8) Perencanaan dan pengawasan arsitektur pekerjaan rehabilitasi gedung radiologi pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp32.845.965,00;
 - 9) Perencanaan dan pengawasan arsitektur pembangunan tempat parkir ambulance pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp6.919.300,00;
 - 10) Perencanaan dan pengawasan arsitektur pembangunan taman pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp13.697.400,00;
 - 11) Perencanaan dan pengawasan pembangunan instalasi farmasi Rumah Sakit Buluye Napoae Moutong sebesar Rp25.857.450,00;
 - 12) Rehabilitasi ruang perpustakaan, pembangunan gedung tempat ibadah sekolah, rehabilitasi ruang guru dan gedung laboratorium sebesar Rp14.859.378.991,00, dapat dilihat pada *Lampiran 37*;
 - 13) Perencanaan dan pengawasan pembangunan rumah dinas dokter spesialis Rumah Sakit Buluye napoae Moutong sebesar Rp25.857.450,00;
 - 14) Perencanaan dan pengawasan pembangunan rumah jabatan Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp13.741.800,00;
 - 15) Perencanaan pembangunan pagar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp5.950.000,00; dan
 - 16) Perencanaan dan pengawasan pagar Rumah Sakit Anuntaloko sebesar Rp6.919.300,00.
- d. Penambahan BMD yang belum tercatat dari hasil inventarisasi sebesar Rp2.414.494.081,00 berdasarkan koreksi pencatatan nilai aset tetap gedung dan bangunan pada SMPN 1 Bolano Lambunu, SMPN 2 Taopa, SMPN 2 Kasimbar, SMPN 3 Parigi, SMPN 1 Tinombo;
- e. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari beban dibayar dimuka untuk KDP Tahun 2022 yang telah selesai sebesar Rp416.485.383,53 yang telah selesai pekerjaannya yaitu bangunan gedung pada SMP SATAP 3 Palasa, SDN 2 Kayu Agung, SDK Ogobagis dan SMPN 1 Siniu;
- f. Kapitalisasi dari barang ekstrakomptabel yang telah dilakukan rehabilitasi atas gedung dan bangunan induknya sehingga dapat di catat sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp25.300.000,00 berupa rumah dinas guru pada SDN Ambesia, SD INP 2 Ongka dan SDN 2 Bolano;
- g. Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp23.205.000,00 berupa rumah dinas guru SMPN 2 Tinombo yang telah direhab sehingga telah dalam kondisi baik;
- h. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp334.581.363,00;
- i. Reklasifikasi dari aset renovasi sebesar Rp12.651.070.000,00 merupakan gedung bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Bangunan tempat ibadah SD Inpres 2 Lemo sebesar Rp35.000.000,00;
 - 2) Rumah jabatan wakil bupati dan sekretaris daerah sebesar Rp384.600.000,00;
 - 3) Bangunan kantin pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp100.800.000,00;
 - 4) Rehabilitasi bangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp347.476.000,00;
 - 5) Rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati sebesar Rp335.731.000,00;



- 6) Perencanaan gedung kantor BPBD sebesar Rp148.645.000,00;
- 7) Perencanaan rumah pemulihan ketergantungan narkoba di Kecamatan Siniu sebesar Rp49.900.000,00;
- 8) Perencanaan rumah central informasi nelayan sebesar Rp29.750.000,00;
- 9) Rehabilitasi gedung dan bangunan RSUD Anuntaloko sebesar Rp9.446.334.000,00;
- 10) Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala Daerah sebesar Rp523.770.000,00;
- 11) Rehabilitasi gedung kantor camat Bolano Lambunu sebesar Rp272.375.000,00;
- 12) Rehabilitasi gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp26.070.000,00;
- 13) Gedung tempat olahraga di Desa Jonokalora sebesar Rp99.750.000,00;
- 14) Rehabilitasi pintu gerbang Dinas Penanaman Modal sebesar Rp10.720.000,00;
- 15) Rehabilitasi gedung kantor camat Ampibabo sebesar Rp20.250.000,00;
- 16) Pemasangan teralis rumah jabatan camat Kasimbar sebesar Rp35.950.000,00; dan
- 17) Rehabilitasi rumah jabatan ketua DPRD sebesar Rp747.949.000,00.
- j. Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.629.485.820,47 yang telah selesai pembangunannya di tahun 2023 yaitu bangunan gedung tempat pendidikan pada SMP 1 Siniu, SDKM Ogobagis, SDN 2 Kayu Agung
2. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.713.485.953,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa berupa barang habis pakai sebesar Rp124.406.140,00 yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap berupa pemeliharaan *air conditione*, pengecatan dan upah tukang;
 - b. Reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp1.887.865.802,00 berupa aset tetap gedung dan bangunan dalam keadaan rusak berat dapat dilihat pada **Lampiran 35**;
 - c. Hibah kepada sekolah swasta yang asetnya tidak dicatat sebagai aset pemerintah daerah karena telah di hibahkan ke pihak sekolah swasta sebesar Rp156.829.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan ruang kelas baru pada PAUD Buranga sebesar Rp99.837.000,00; dan
 - 2) Pembangunan rumah dinas guru SMP Muhammadiyah 1 Parigi Tengah sebesar Rp56.992.800,00.
 - d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp3.797.791.776,00; dan
 - e. Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp9.746.592.435,00 karena sampai dengan 31 Desember 2023 pembangunan gedung belum selesai dikerjakan yaitu:
 - a) Pembangunan gedung sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp391.998.159,00;
 - b) Pembangunan MCK sekolah sebesar Rp871.887.400,00; dan
 - c) Bangunan tempat pendidikan sebesar Rp8.482.706.876,00.

Pada beberapa perangkat daerah terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang merupakan hibah yang bersumber dari APBN yang belum dicatat sebagai aset



Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong karena belum adanya berita acara serah terima, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.98. Hibah APBN

(dalam rupiah)

NO	Perangkat Daerah	NILAI
1	RSUD Anuntaloko	12.058.741.750,00
2	Dinas Pendidikan	17.110.144.000,00
3	Dinas Kesehatan	25.906.621.000,00
4	Kecamatan Bolano Lambunu	868.000.000,00
5	Kecamatan Kasimbar	623.000.000,00
6	Kecamatan Parigi Tengah	868.000.000,00
	Jumlah	57.434.506.750,00

Rincian hibah yang bersumber dari APBN tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 36*.

5.3.1.4.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.491.222.380.251,65 merupakan nilai dua puluh jenis jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.99. Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jalan	687.805.192.310,71	745.531.033.267,71
2	Jembatan	119.789.708.071,78	121.158.294.765,78
3	Bangunan Air Irigasi	134.308.480.648,48	137.974.935.148,48
4	Bangunan Air Pasang Surut	1.479.772.000,00	1.479.772.000,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	49.883.000,00	49.883.000,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	184.500.394.293,55	190.073.177.304,55
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.139.520.006,25	1.139.520.006,25
8	Bangunan Air Bersih / Air Baku	27.378.924.933,33	30.013.787.710,33
9	Bangunan Air Kotor	28.830.745.846,56	30.035.639.324,56
10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	147.594.060.694,00	148.192.560.694,00
11	Instalasi Air Kotor	10.760.517.270,99	10.760.517.270,99
12	Instalasi Pengolah Sampah	13.942.096.748,00	13.942.096.748,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	12.569.774.064,00	12.569.774.064,00
14	Instalasi Gardu Listrik	22.277.967.702,00	22.877.744.702,00
15	Instalasi Gas	198.440.000,00	198.440.000,00
16	Instalasi Pengaman	89.900.000,00	89.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
17	Jaringan Air Minum	8.628.174.700,00	8.628.174.700,00
18	Jaringan Listrik	8.290.714.999,00	8.490.356.999,00
19	Jaringan Telepon	375.810.546,00	375.810.546,00
20	Jaringan Gas	7.640.962.000,00	7.640.962.000,00
	Total	1.417.651.039.834,65	1.491.222.380.251,65

Total nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp1.491.222.380.251,65, saldo aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp73.571.340.417,00 dari tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp1.417.651.039.834,65. mutasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi diuraikan sebagai berikut:

1.	Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi		
a.	Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp	77.201.512.634,00
b.	Penambahan Aset Tetap dari belanja barang dan jasa	Rp	1.490.580.000,00
c.	Penambahan BMD yang belum tercatat dari hasil inventarisasi	Rp	217.568.529,00
d.	Penambahan Aset Tetap berasal dari beban dibayar dimuka untuk KDP Tahun 2022	Rp	32.247.921,10
e.	Reklasifikasi antar KIB	Rp	3.759.609.605,00
f.	Reklasifikasi dari aset renovasi	Rp	135.821.750,00
g.	Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan	Rp	90.273.078,90
		Rp	82.927.613.518,00
2.	Pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi		
a.	Reklasifikasi ke beban barang dan jasa (BHP)	Rp	124.404.607,00
b.	Barang ekstrakomtabel	Rp	4.641.500,00
c.	Reklasifikasi ke aset lainnya rusak berat	Rp	3.201.353.000,00
d.	Reklasifikasi antar KIB	Rp	593.690.298,00
e.	Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan	Rp	5.432.183.696,00
		Rp	9.356.273.101,00
	Jumlah mutasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi (1-2)	Rp	73.571.340.417,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp82.927.613.518,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp77.201.512.634,00;
 - b. Penambahan Aset Tetap jalan, jaringan dan irigasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.490.580.000,00 merupakan rehabilitasi MCK pada beberapa sekolah;
 - c. Penambahan BMD yang belum tercatat dari hasil inventarisasi sebesar Rp217.568.529,00 merupakan koreksi pencatatan nilai aset bangunan tempat pendidikan pada SMPN 1 Bolano Lambunu, SMPN 2 Taopa, SMPN 2 Kasimbar, SMPN 3 Parigi dan SMPN 1 Tinombo;



- d. Penambahan Aset Tetap berasal dari beban dibayar dimuka untuk KDP Tahun 2022 yang telah selesai sebesar Rp32.247.921,10 yaitu pembangunan MCK SDN 2 Kayu Agung.
 - e. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp3.759.609.605,00;
 - f. Reklasifikasi dari aset tetap renovasi sebesar Rp135.821.750,00 merupakan Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan MCK SMPN 2 Balinggi sebesar Rp34.590.000,00; dan
 - 2) Bangunan jembatan Pulau Lindu Kecamatan parigi sebesar Rp101.231.750,00;
 - g. Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp90.273.078,90 berupa pembangunan MCK SDN 2 Kayu Agung yang telah selesai pengerjaannya di Tahun 2023.
2. Pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp9.356.273.101,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa berupa barang habis pakai sebesar Rp124.404.607,00 yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap yaitu ;
 - 1) Rehabilitasi saluran drainase pada Kelurahan Kampal dan Kelurahan Bantaya sebesar Rp112.975.300;
 - 2) Pemasangan lampu di arena stadion Tombolotutu sebesar Rp4.889.307,00; dan
 - 3) Perabot kantor sebesar Rp6.540.000,00 berupa *playmate*, gorden, pajangan dinding dll.
 - b. Barang ekstrakomptabel yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp4.641.500,00 berupa instalasi pengatur listrik;
 - c. Reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp3.201.353.000,00 berupa aset jalan, irigasi dan jaringan dalam keadaan rusak berat dapat dilihat pada **Lampiran 35**;
 - d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp593.690.298,00 berupa mesin genset, tiang bendera, lemari kayu, sofa, kipas angin dll; dan
 - e. Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp5.432.183.696,00 berupa perencanaan, pengawasan dan pembangunan jalan pada ruas jalan Pembuni-Bronjong Kecamatan Moutong yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan 31 Desember 2023.

5.3.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.296.882.785,98 merupakan nilai dari sepuluh jenis aset tetap lainnya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Rincian nilai aset tetap lainnya tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 5.100. Aset tetap lainnya

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	9.889.786.851,80	12.190.891.202,80
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro	213.900.000,00	213.900.000,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	587.070.973,00	587.070.973,00
4	Musik	0,00	15.950.000,00
5	Barang Bercorak Kesenian	898.155.000,00	1.105.385.000,00
6	Alat Bercorak Kebudayaan	364.497.500,00	364.497.500,00
7	Hewan Piaraan	17.750.000,00	17.750.000,00
8	Ternak	6.000.000,00	6.000.000,00
9	Tanaman	34.786.081,00	34.786.081,00
10	Aset Tetap dalam Renovasi	14.797.063.779,18	1.760.652.029,18
	Total	26.809.010.184,98	16.296.882.785,98

Total nilai aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp16.296.882.785,98 saldo aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar Rp10.512.127.399,00 di bandingkan dengan Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp26.809.010.184,98. Mutasi aset tetap lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.	Penambahan aset tetap lainnya		
a.	Realisasi belanja modal aset tetap lainnya	Rp	7.275.944.500,00
b.	penambahan aset tetap lainnya dari belanja hibah Bos Daerah	Rp	193.604.400,00
		Rp	7.469.548.900,00
2.	Pengurangan aset tetap lainnya		
a.	Reklasifikasi ke beban barang dan jasa (BHP)	Rp	50.807.100,00
b.	Barang ekstrakomptabel	Rp	4.649.440.605,00
c.	Hibah kepada sekolah swasta dan kelompok masyarakat	Rp	76.995.504,00
d.	Reklasifikasi aset renovasi ke aset lainnya rusak berat	Rp	249.520.000,00
e.	Reklasifikasi aset renovasi ke aset tetap gedung dan bangunan	Rp	12.651.070.000,00
f.	Reklasifikasi aset renovasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	Rp	135.821.750,00
g.	Reklasifikasi antar kib	Rp	168.021.340,00
		Rp	17.981.676.299,00
	Jumlah mutasi aset tetap lainnya (1-2)	Rp	(10.512.127.399,00)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp7.469.548.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp7.275.944.500,00; dan
 - b. Penambahan aset tetap lainnya dari belanja hibah BOS Daerah sebesar Rp193.604.400,00 berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku bahasa indonesia kelas 1, modul belajar siswa dll.



2. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp17.981.676.299,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa berupa bahan habis pakai sebesar Rp50.807.100,00 berupa buku administrasi sekolah, buku siswa, raket badminton, pipa plastik dll;
 - b. Barang ekstrakomptabel sebesar Rp4.649.440.605,00 yang merupakan pengadaan buku yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap lainnya;
 - c. Hibah kepada sekolah swasta dan kelompok masyarakat sebesar Rp76.995.504,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hibah alat musik tradisional untuk majelis taklim Al Kautsar sebesar Rp11.998.000,00;
 - 2) Hibah alat kesenian ke sanggar tresno budoyo Desa Sumber Agung Mepanga sebesar Rp15.000.000,00; dan
 - 3) Hibah buku kepada SD Alkhairat Towera sebesar Rp49.997.504,00
 - d. Reklasifikasi aset renovasi ke aset lainnya kondisi rusak berat sebesar Rp249.520.000,00 berupa perencanaan jaringan air bersih;
 - e. Reklasifikasi aset renovasi ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp12.651.070.000,00;
 - f. Reklasifikasi aset renovasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp135.821.750,00; dan
 - g. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp168.021.340,00.

Pada Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata terdapat aset tetap lainnya yang merupakan hibah dari APBN yang belum dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 14 Unit dikarenakan belum terbitnya Berita Acara Serah Terima. Rincian hibah tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 36*.

5.3.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.849.643.970,70 merupakan nilai pekerjaan konstruksi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang belum selesai dikerjakan dan belum diserahkan oleh pihak ketiga atau pelaksana kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.101. Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2023
1	Gedung Tempat Pendidikan	2.333.973.026,93	9.584.236.646,84	1.868.667.880,47	10.049.541.793,30
2	Rumah Dinas Guru	43.557.500,00	0,00	0,00	43.557.500,00
3	Terminal Taopa	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
4	Pagar Kantor Camat	20.899.175,00	0,00	0,00	20.899.175,00
5	Tugu Perbatasan	46.600.000,00	0,00	0,00	46.600.000,00
6	Pra FS Bandara Moutong	195.712.000,00	0,00	0,00	195.712.000,00
7	FS Bandara Moutong	891.275.000,00	0,00	0,00	891.275.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

No	Uraian	Tahun 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2023
8	FS Terminal Moutong	346.832.000,00	0,00	0,00	346.832.000,00
9	Rumah Rehat Terminal Mensung thp I	59.449.000,00	0,00	0,00	59.449.000,00
10	Gedung Galangan Kapal	316.440.210,00	0,00	0,00	316.440.210,00
11	Balai Penyuluh Pertanian	315.390.000,00	0,00	0,00	315.390.000,00
12	Gudang Farmasi RSUD Pratama	574.792.402,00	0,00	574.792.402,00	0,00
13	Gedung Olahraga	13.343.550.080,00	0,00	13.343.550.080,00	0,00
14	Gedung Sarana dan Prasarana Alat Olahraga	0,00	416.577.930,00	0,00	416.577.930,00
15	Jalan Daerah Kabupaten	6.293.652.552,40	5.792.119.513,00	0,00	12.085.772.065,40
16	Jembatan Daerah Kabupaten	3.876.744.367,00	0,00	0,00	3.876.744.367,00
17	Jaringan Air Bersih	324.893.078,90	859.232.930,00	99.273.078,90	1.084.852.930,00
	Jumlah	29.083.760.392,23	16.652.167.019,84	15.886.283.441,37	29.849.643.970,70

Saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.849.643.970,70 mengalami kenaikan sebesar Rp765.883578,47 dibandingkan Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp29.083.760.392,23. Rincian penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp16.652.167.019,84 yaitu:
 - a. Pembangunan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, rumah dinas guru, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan sekolah pada beberapa sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tidak selesai pembangunannya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.463.486.962,09 dapat dilihat pada *Lampiran 38*;
 - b. Pembangunan rumah dinas guru SMP Satap Negeri 3 Palasa sebesar Rp35.606.531,50 merupakan penambahan bobot pekerjaan dari KDP Tahun 2022;
 - c. Rehabilitasi ruang tata usaha dan ruang guru SMP Negeri 1 Parigi sebesar Rp85.143.153,25 merupakan penambahan bobot pekerjaan dari KDP Tahun 2022;
 - d. Pembangunan gedung sarana dan prasarana alat olahraga sebesar Rp416.577.930,00 dengan fisik pekerjaan 84,74% oleh CV Balaesang Mandiri dengan surat perjanjian Nomor 01/SP/DAU/PSPGKBL/SEKRET-PUPRP/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023 nilai kontrak sebesar Rp491.595.386 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - e. Pengawasan kegiatan kontraktual (DAK Penugasan Tematik) sebesar Rp74.933.000,00 oleh CV Geosentris Inti Konsultan dengan surat perjanjian Nomor 01/SP/JK/DAK/Penugasan-Tematik/Rekon-Jln/BM-PUPRP/IV/2023 Tanggal 05 April 2023 nilai kontrak sebesar Rp449.598.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - f. Pekerjaan peningkatan jalan Pembuni – Bronjong Kecamatan Moutong sebesar Rp5.717.186.513,00 dengan fisik pekerjaan 80,04% oleh PT Rizal Nugraha Membangun dengan surat perjanjian Nomor 03/SP/DAK Penugasan-Tematik/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023 nilai kontrak sebesar Rp7.143.000.928,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.



- g. Pembangunan MCK pada beberapa sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tidak selesai pembangunannya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp859.232.930,00 dapat dilihat pada *Lampiran 38*.
2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp15.886.283.441,37 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gedung tempat pendidikan sebesar Rp1.711.143.338,47 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah selesai pekerjaannya dapat dilihat pada *Lampiran 39*.
 - b. Gedung sekolah kondisi rusak berat sebesar Rp157.524.542,00 pada SDN Petapa dan SD Inpres Binangga berdasarkan surat permohonan koreksi pencatatan nilai aset gedung dan bangunan Nomor 132/1427/Disdikbud Tanggal 11 Desember 2023 dapat dilihat pada *Lampiran 39*.
 - c. Gedung instalasi farmasi RSUD Buluye Napoa'e Moutong sebesar Rp574.792.402,00 pada Dinas Kesehatan;
 - d. Gedung Olahraga sebesar Rp13.343.550.080,00 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - e. Pembangunan MCK SDN 2 Kayu Agung sebesar Rp90.273.078,90 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan *Lampiran 39*.
 - f. MCK SD Negeri 5 Terpencil Palasa sebesar Rp9.000.000,00 berupa barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan setelah dihitung bobot hasil reviu Inspektorat.

Pada nilai aset tetap Tahun 2023 yang disajikan masih terdapat aset properti investasi sebesar Rp88.751.119.906,14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kebun di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga sebesar Rp150.000.000,00;
2. Papan pengumuman (*bandogate*) di Jalan Trans Sulawesi Desa Pelawa Baru dan Petapa sebesar Rp399.046.000,00;
3. Gedung pemotongan hewan di Kelurahan Masigi dan Desa Kampal sebesar Rp768.313.050,14;
4. Bangunan tempat pelelangan ikan di Desa Ogotion Sebesar Rp211.155.500,00;
5. Depo pasar ikan di Desa Ogotion dan desa sebesar Rp2.439.777.000,00;
6. Bak Penampung/kolam untuk ikan di Desa Petapa sebesar Rp99.250.000,00;
7. Pasar Tradisional tersebar di beberapa lokasi Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp43.033.093.049,00; dan
8. SPAM Parigi dan SPAM IKK Torue sebesar Rp41.650.485.307,00.

5.3.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca. Akumulasi Penyusutan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 sebesar Rp1.668.802.149.397,56 mengalami kenaikan sebesar Rp159.853.229.636,22 dibanding tahun 2022 sebesar Rp1.508.948.919.761,34. Nilai akumulasi penyusutan diperoleh dari aplikasi SIMDA BMD.

Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada *Lampiran 40*.



Tabel 5.102. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	KIB	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan 2023	Saldo Akhir 31 Desember 2023
1	Peralatan dan Mesin	651.438.640.839,56	(19.740.202.226,54)	77.553.690.312,85	709.252.128.925,87
2	Gedung dan Bangunan	189.138.138.155,00	(4.368.522.902,00)	23.180.092.545,00	207.949.707.798,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	668.372.140.766,78	5.208.360.288,00	77.559.213.177,00	751.139.714.231,78
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	460.598.441,91	460.598.441,91
		1.508.948.919.761,34	(18.900.364.840,54)	178.753.594.476,76	1.668.802.149.397,56

Terdapat koreksi nilai penyusutan aset tetap sebesar Rp18.900.364.840,54 yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan aset tetap dengan nilai perolehan sebelum Tahun 2023. Proses penatausahaan penyusutan aset tetap pada aplikasi SIMDA BMD mencatat sesuai tahun perolehan.

Penambahan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp9.228.159.134,00 terjadi karena adanya koreksi saldo awal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.103. Koreksi Penambahan Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
1	Koreksi Akibat Kapitalisasi	0,00	114.379.986,00	0,00	114.379.986,00
2	Selisih Akibat Penyusutan Perhari	739,00	237,00	137,00	1.113,00
3	Reklasifikasi ke aset lainnya rusak berat	0,00	786.726.567,00	709.534.120,00	1.496.260.687,00
4	Koreksi Penyusutan perbaikan SIMDA	0,00	5.386.930.858,00	2.230.586.490,00	7.617.517.348,00
		739,00	6.288.037.648,00	2.940.120.747,00	9.228.159.134,00

Pengurangan koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp29.808.198.746,54 terjadi karena adanya koreksi saldo awal pada aset tetap yang dapat dilihat dalam rincian tabel berikut.

Tabel 5.104. Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
1	Selisih Akibat Penyusutan Perhari	936,00	228,00	133,00	1.297,00
2	Koreksi Penyusutan Perbaikan SIMDA	0,00	1.919.514.518,00	8.062.350.655,00	9.981.865.173,00
3	Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain	19.740.202.029,54	0,00	86.130.247,00	19.826.332.276,54
		19.740.202.965,54	1.919.514.746,00	8.148.481.035,00	29.808.198.746,54

**5.3.1.4.8 Ekstracomptabel**

Ekstracomptabel yaitu barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai ekstracomptabel Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 sebesar Rp62.808.447.482,64 mengalami kenaikan sebesar Rp5.534.901.568,14 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp Rp57.273.545.914,50 dengan uraian sebagai berikut:

1. Nilai ekstracomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp30.752.731.454,64;
2. Nilai ekstracomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp2.928.992.237,00;
3. Nilai ekstracomptabel jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp455.932.472,00;
4. Nilai ekstracomptabel aset tetap lainnya sebesar Rp28.661.791.319,00; dan
5. Nilai ekstracomptabel konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp9.000.000,00.

Rincian ekstracomptabel dapat dilihat pada *Lampiran 41*.

5.3.1.5 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.3.1.6 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp150.543.734.459,38 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.105. Aset Lainnya*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2022	2023
1	Tagihan Jangka Panjang	2.306.596.953,54	2.306.596.953,54
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	17.717.939.360,25	16.847.428.473,54
3	Aset Tidak Berwujud	3.673.320.280,00	3.399.174.670,00
4	Aset Lain-lain	58.688.120.489,36	61.571.146.362,30
5	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i>	4.582.836.057,00	66.419.388.000,00
	Jumlah	86.968.813.140,15	150.543.734.459,38

Aset Lainnya disajikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp150.543.734.459,38 mengalami kenaikan sebesar Rp63.574.921.319,23 dibandingkan dengan nilai aset lainnya tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp86.968.813.140,15.

5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.306.596.953,54 tidak terdapat mutasi di Tahun 2023, tagihan jangka panjang tersebut merupakan tagihan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada PNS/pihak ketiga yang menyebabkan kerugian daerah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Tuntutan tagihan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan pembebanannya atau melalui upaya damai dengan penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak, tetapi sejak tahun 2012 tidak ada mutasi sehingga masuk dalam kategori macet sebesar Rp2.269.246.953,54; dan



2. Tuntutan tagihan jangka panjang daerah yang belum terbit surat keterangan tanggung jawab mutlak sebesar Rp37.350.000,00 yaitu :
 - a. Kas tunai dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.000.000,00 pada SMP Negeri I Balinggi yang hilang/kecurian di tahun 2019; dan
 - b. Temuan perjalanan dinas oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 sebesar Rp32.350.000,00 di Kecamatan Kasimbar dengan lampiran surat jaminan.

5.3.1.6.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.847.428.473,54 merupakan nilai kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain yaitu Sentra Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, rincian kemitraan dengan pihak ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.106. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2023
1	Kerja Sama Pemanfaatan	20.541.417.409,29	20.541.417.409,29
2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(2.823.478.049,04)	(3.693.988.935,75)
	Jumlah	17.717.939.360,25	16.847.428.473,54

Nilai Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan bersama akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga melalui proses pada aplikasi SIMDA BMD. nilai akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat dilihat pada *Lampiran 42*.

5.3.1.6.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.399.174.670,00 mengalami penurunan sebesar Rp274.145.610,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.673.320.280,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.107. Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2023
1	Aset tidak berwujud	5.482.912.205,00	5.482.912.205,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.809.591.925,00)	(2.083.737.535,00)
	Jumlah	3.673.320.280,00	3.399.174.670,00

Rincian aset tidak berwujud per masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 43*.



Nilai aset tidak berwujud disajikan bersama akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, nilai amortisasi diperoleh melalui proses pada aplikasi SIMDA-BMD, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.108. Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud dan Amortisasinya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Aset Tak Berwujud	Akumulasi Amortisasi	Saldo Aset Tak Berwujud
1	Hak Cipta	29.000.000,00	(9.945.833,00)	19.054.167,00
2	Software	4.261.464.205,00	(1.539.603.669,00)	2.721.860.536,00
3	Kajian	1.192.448.000,00	(534.188.033,00)	658.259.967,00
	Jumlah	5.482.912.205,00	(2.083.737.535,00)	3.399.174.670,00

Rincian akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 44*.

5.3.1.6.4 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.571.146.362,30 mengalami kenaikan sebesar Rp2.883.025.872,94 dibandingkan dengan nilai aset lain-lain Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp58.688.120.489,36 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.109. Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2023
1	Aset Rusak Berat/Usang	152.743.525.015,29	189.152.666.375,83
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(103.110.117.576,59)	(136.636.233.064,19)
3	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	9.054.713.050,66	9.054.713.050,66
	Jumlah	58.688.120.489,36	61.571.146.362,30

1. Aset Rusak Berat/Usang

Aset tetap dalam kondisi rusak berat merupakan aset tetap tahun 2003 sampai dengan Tahun 2023 yang dihentikan dari penggunaan aktif karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi berdasarkan informasi dari pengurus barang perangkat daerah dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang valid dan perencanaan pekerjaan yang menunggu proses identifikasi layak atau tidak dilaksanakan pembangunan fisiknya serta aset yang akan diserahkan ke masyarakat atau pihak ketiga, untuk menunggu proses penghapusan atau berita acara serah terima barang, aset tetap tersebut direklasifikasi ke akun neraca aset lain-lain sesuai nilai tercatat. Aset lain-lain kondisi rusak berat Tahun 2023 sebesar Rp189.152.666.375,83 mengalami kenaikan sebesar Rp36.409.141.360,54 dibanding nilai aset lain-lain rusak berat Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp152.743.525.015,29



2. Akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp136.636.233.064,19 mengalami kenaikan sebesar Rp33.526.115.487,60 dari tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp103.110.117.576,59. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain diperoleh dari aplikasi SIMDA BMD. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain menyajikan nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat dapat di lihat pada *Lampiran 45*.
3. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp9.054.713.050,66, tidak terdapat mutasi selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.110. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2023
1	Kredit Macet KUMK pada PT Bank Sulteng Cabang Parigi	3.002.186.812,66	3.002.186.812,66
2	Aset Lain-lain Sekolah (disdik)	2.376.598.478,00	2.376.598.478,00
3	Aset Lain-lain tanah	3.675.927.760,00	3.675.927.760,00
	Jumlah	9.054.713.050,66	9.054.713.050,66

Rincian aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kredit Macet KUMK sebesar Rp3.002.186.812,66 yang awalnya sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan nilai deposito milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2006 dan 2007.

- 1) Deposito Berjangka senilai Rp5.000.000.000,00.

Deposito Berjangka senilai Rp5.000.000.000,00 dibuka atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan SDB Nomor 001393 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan SDB Nomor 001411 sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan jangka waktu tiga bulan diperpanjang secara otomatis. Deposito tersebut dijadikan jaminan atas pinjaman para nasabah KUMK sesuai Naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati Kabupaten Parigi Moutong dengan Direktur Utama Bank Sulteng Nomor 900/9630/Bagian Umum dan Nomor 17/BPD-DIR/XV-P/2006 tanggal 4 Juli 2006 dan deposito sebesar Rp 2.500.000.000,00 telah dijadikan jaminan atas pinjaman para nasabah KUMK.

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penarikan Deposito berjangka senilai Rp2.500.000.000,00 pada PT Bank Sulteng. Sesuai isi naskah kesepakatan tersebut, Bank berhak mendebet Deposito Pemerintah Daerah sebesar tunggakan kredit macet dan sampai saat ini belum dilakukan pendebitan/pelunasan. Berdasarkan catatan pembukuan bank besarnya tunggakan kredit macet debitor KUMK yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Parigi Moutong adalah sebesar:

Baki Debet (Sisa Pokok kredit)	Rp 442.177.682,00
Tunggakan Bunga Kredit	Rp 171.966.988,00
Total	Rp 614.144.670,00



Dari Deposito Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 tersebut, berdasarkan naskah kesepakatan bersama seperti tersebut di atas, maka Bank Sulteng dapat memperhitungkan haknya sebesar :

Baki Debet (Sisa Pokok kredit)	Rp	442.177.682,00
Tunggakan Bunga Kredit	Rp	68.305.824,00
Total	Rp	510.483.506,00

Sesuai perhitungan tersebut, maka Deposito Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 - Rp510.483.506,00 = Rp1.989.516.494,00. Untuk itu Bank mengkreditkan/ mengembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong No.01.02.00499.4 sebesar Rp1.989.516.494,00 yang merupakan sisa Deposito Pemerintah Daerah pada tanggal 27 Desember 2012.

2) Untuk kredit KUMK yang belum lunas.

Untuk kredit KUMK yang belum lunas Bank Sulteng akan tetap melakukan penagihan kepada debitur dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening khusus penampungan hasil kredit KUMK Nomor 01.03.00420.2 pada Bank Sulteng Cabang Parigi, sesuai Surat Bupati Parigi Moutong No.583/15510/bag. Umum tanggal 14 Nopember 2008. Adapun Posisi Kas per 31 Desember 2012 dalam rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK yang dalam penguasaan PT Bank Sulteng dengan Nomor Rekening 102.01.03.00420-20 atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp8.296.693,34 atau meningkat sebesar Rp244.897,00 dibandingkan per 31 Desember 2011 hanya sebesar Rp8.051.796,34. Kredit KUMK kepada PT Bank Sulteng kategori macet pada tahun 2012 senilai Rp3.002.186.812,66 dengan rincian sebagai berikut :

1) Total jaminan KUMK	Rp	2.500.000.000,00
Kas direkening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK Tahun 2011	Rp	(8.051.796,34)
Total dana kredit macet Tahun 2011	Rp	2.491.948.203,66
2) Kas di rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK Tahun 2011	Rp	8.051.796,34
Total penyetoran pengembalian pinjaman KUMK Tahun 2012	Rp	244.897,00
Kas direkening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK Tahun 2012	Rp	8.296.693,34
3) Total dana kredit macet Tahun 2011	Rp	2.491.948.203,66
Total penyetoran pengembalian pinjaman KUMK Tahun 2012	Rp	(244.897,00)
	Rp	2.491.703.306,66
Total baki debit kredit + tunggakan bunga kredit	Rp	510.483.506,00
Total dana kredit macet KUMK Tahun 2012	Rp	3.002.186.812,66



- 3) Rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK yang dalam penguasaan PT Bank Sulteng dengan Nomor Rekening 102.01.03.00420-20 atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan per 31 Desember 2017 bersaldo nihil, karena pada tanggal 26 November 2015 saldo sebesar Rp9.031.776,34 telah ditarik dengan cek/BG Nomor C. 050061 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dan disetor ke RKUD pada tanggal yang sama.
- b. Aset lain-lain sekolah tahun 2023 sebesar Rp2.376.598.478,00 tidak terdapat mutasi di Tahun 2023. Aset tetap sekolah meliputi peralatan sekolah dan buku-buku sekolah SMA/SMK, dan SLB yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menunggu proses penyerahan aset tetap tersebut direklasifikasi ke akun neraca aset lain-lain.

Aset lain-lain sekolah hanya di catat di Bidang Akuntansi dan tidak tercatat pada SIMDA-BMD di Bidang Aset karena berdasarkan UU NO 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan sekolah menengah atas dan sederajatnya beralih ke Pemerintah Provinsi, sehingga aset SMA/SMK dan SLB pada Aplikasi SIMDA-BMD telah di hapus dan administrator SIMDA-BMD Provinsi Sulawesi Tengah telah menarik semua data Sekolah SMA/SMK dan SLB, tetapi setelah buku aset tetap yang di akui oleh Provinsi Sulawesi Tengah terbit terdapat selisih pencatatan aset lain-lain sekolah tersebut, oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah kami lakukan rekonsiliasi kembali namun sampai saat ini Berita Acara Serah Terima Kembali atau Berita Acara Rekonsiliasi terhadap Peralatan dan Mesin tersebut belum terbit.

- c. Aset lain-lain tanah Tahun 2023 sebesar Rp3.675.927.760,00 merupakan jasa pengukuran tanah, tanah milik instansi vertikal dan desa serta cetak sawah, untuk menunggu proses penyerahan dan penghapusan direklasifikasi ke akun neraca aset lain-lain, tidak terdapat mutasi di Tahun 2023.

Terdapat Selisih pencatatan aset lain-lain tanah pada SIPD di Bidang Akuntansi dan SIMDA-BMD di Bidang Aset, pada Bidang Aset masih mencatat aset tanah tersebut di aset tetap karena aplikasi SIMDA-BMD tidak dapat memproses aset tetap tanah ke aset lainnya, sedangkan di Bidang Akuntansi mencatat di aset lainnya sebesar Rp3.675.927.760,00, aset tanah tersebut terdapat di beberapa perangkat daerah dengan uraian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp236.000.000,00 yaitu tanah sekolah swasta;
2. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp368.457.760,00 yaitu tanah makam, tanah timbunan lapangan olahraga serta jasa pengukuran tanah.
3. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp30.000.000,00 yaitu Tanah Lapangan untuk Desa;
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp2.755.030.000,00 berupa Cetak Sawah; dan
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp286.440.000,00 yaitu tanah lokasi SATPAS Pelayanan SIM Polres.

**5.3.1.6.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility**

Dana *transfer treasury deposit facility* merupakan kas deposito yang berada di kantor pusat Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* serta Berdasarkan Rekening Koran BI TDF TKD Kabupaten Parigi Moutong Nomor 519000494980 Pada Kantor Pusat Bank Indonesia terdapat saldo dana *transfer Treasury Deposit Facility* Tahun 2023 sebesar Rp66.419.388.000,00. Rincian dana *transfer Treasury Deposit Facility* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.111. Transfer Treasury Deposit Facility*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022
1	DBH PBB-LO	546.070.000,00	
2	DBH PPh Pasal 21-LO	1.004.149.000,00	
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	6.622.000,00	
4	DBH SDA Minyak Bumi-LO	805.588.000,00	
5	DBH SDA Gas Bumi-LO	30.869.351.000,00	
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	33.187.608.000,00	
7	DBH PBB		690.410.802,00
8	DBH PPh Pasal 21		499.669.368,00
9	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN		36.554.439,00
10	DBH CHT		16.971.876,00
11	DBH SDA Gas Bumi		1.056.298.391,00
12	DBH SDA Minyak Bumi		247.236.676,00
13	DBH SDA Gas Bumi		385.074.901,00
14	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent		1.419.091.806,00
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH		19.774.587,00
11	DBH SDA Perikanan		211.753.211,00
	Jumlah	66.419.388.000,00	4.582.836.057,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.112. Rincian Kewajiban*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	49.855.779.519,98	49.052.738.572,49	803.040.947,49	1,64
2	Kewajiban Jangka Panjang	227.562.334,00	694.229.001,00	(466.666.667,00)	(67,22)
	Jumlah	50.083.341.853,98	49.746.967.573,49	336.374.280,49	0,68

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian penambahan dan pengurangan kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut.

Tabel 5.113. Rincian Kewajiban Jangka Pendek*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.260.491,00	4.075.141.457,00	587.491,00	4.119.814.457,00
2	Utang Bunga	0,00	19.259.120,40	0,00	19.259.120,40
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	700.000.000,00	466.666.667,00	700.000.000,00	466.666.667,00
3	Pendapatan Diterima di Muka	28.743.344,30	17.493.200,00	28.743.344,30	17.493.200,00
4	Utang Belanja	40.882.954.934,19	22.527.965.581,65	18.178.374.440,26	45.232.546.075,58
5	Utang Jangka Pendek lainnya	7.395.779.803,00	7.890.708.929,00	15.286.488.732,00	0,00
Jumlah		49.052.738.572,49	34.997.234.955,05	34.194.194.007,56	49.855.779.519,98

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah uang yang di pungut oleh Bendahara Pengeluaran yang ada pada PD, BLUD serta PPKD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Negara, BPJS Kesehatan dan Taperum, atau juga disebabkan hasil dari rekonsiliasi dengan stake holder lainnya yang menyebabkan Pemda masih terdapat kurang bayar.

Saldo utang PFK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.119.814.457,00 yang merupakan utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara, BPJS Kesehatan dan Taperum. Hingga akhir tahun 2023, jika dibandingkan dengan saldo utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.260.491,00 terjadi kenaikan utang PFK pada tahun 2023 sebesar Rp4.074.553.966,00, atau 9.002%

Saldo awal utang PFK per 31 Desember 2022 Sebesar Rp45.260.491,00, telah disetorkan ke Kas Negara dan BPJS Kesehatan di tahun 2023 sebesar Rp587.491,00 dan adanya tambahan utang di tahun 2023 sebesar Rp4.075.141.457,00 sehingga saldo akhir utang PFK Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.119.814.457,00.

Saldo akhir Utang PFK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.119.814.457,00 terdiri dari sisa utang tahun 2022 sebesar Rp44.673.000,00 dan utang tahun berjalan 2023 sebesar Rp4.075.141.457,00. Adapun keterangan rincian utang PFK 2023 dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.114. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian PFK	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Sisa Saldo
1	Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Desa BPJS Kesehatan	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
2	PPh 21	0,00	87.874.868,00	0,00	87.874.868,00
3	PPh 22	55.500,00	162.696.044,00	55.500,00	162.696.044,00
4	PPh 23	10.991,00	36.718.685,00	10.991,00	36.718.685,00
5	PPh Pasal 4 (2)	0,00	423.713.388,00	0,00	423.713.388,00
6	PPN	407.000,00	3.364.138.472,00	407.000,00	3.364.138.472,00
7	TAPERUM	44.673.000,00	0,00	0,00	44.673.000,00
	Jumlah	45.260.491,00	4.075.141.457,00	587.491,00	4.119.814.457,00

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.259.120,40 merupakan saldo utang bunga harian yang terhitung dari 16 Oktober hingga 31 Desember 2023 dengan dasar hitungan tagihan bulan April 2024 sebesar Rp46.120.525,18. Dikarenakan di tahun 2022 tidak dicatat sebagai utang atau memiliki saldo Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp19.259.120,40 atau 100%. Sehingga Saldo Utang bunga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.259.120,40. Utang ini merupakan utang bunga Pinjaman Luar Negeri, Loan IBRD LA Nomor 77604786-IND tanggal 20 Oktober 2005 dengan surat Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 Tanggal 5 Oktober 2023.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian lancar utang jangka panjang Per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp466.666.667,00 turun sebesar Rp233.333.333,00 atau (33,33%) dari tahun 2022 sebesar Rp700.000.000,00. Terdapat pengurangan bagian lancar utang jangka panjang dengan adanya pembayaran sebesar Rp700.000.000,00 dan penambahan pengakuan bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp466.666.667,00, dikarenakan skema pembayaran utang jangka panjang semakin menurun hingga tahun 2025. Berdasarkan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 tanggal 5 Oktober 2023, Rincian angsuran pembayaran bagian lancar utang jangka panjang pinjaman luar negeri dapat dilihat pada *Lampiran 46*.

5.3.2.1.4 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.493.200,00 dibandingkan saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.743.344,30 terjadi penurunan



sebesar Rp11.250.144,30 atau sebesar (39,14%). Rincian pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut.

Tabel 5.115. Rincian Pendapatan diterima dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame	20.043.344,30	12.543.200,00	20.043.344,30	12.543.200,00
2	Pendapatan diterima dimuka Sewa Lokasi ATM di BLUD RSUD Anuntaloko	7.500.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00
3	Pendapatan diterima dimuka Sewa Gedung Untuk Koperasi BLUD RSUD Anuntaloko	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Jumlah		28.743.344,30	17.493.200,00	28.743.344,30	17.493.200,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.493.200,00 merupakan pendapatan diterima dimuka pada dua perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah dan BLUD RSUD Anuntaloko.

Saldo tahun 2022 pendapatan diterima dimuka sebesar Rp28.743.344,30 terdapat pengurangan atas pengakuan pendapatan tahun berjalan sebesar Rp28.743.344,30,00 dan adanya penambahan akibat perpanjangan perjanjian sebesar Rp17.493.200,00 sehingga saldo akhir Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.493.200,00. Adapun penjelasan rinciannya sebagai berikut:

1. Saldo awal tahun 2023 untuk Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame pada Bapenda adalah sebesar Rp20.043.344,30. Nilai tersebut telah terealisasi sebagai Pendapatan Pajak Reklame selama tahun 2023. Saldo akhir sebesar Rp12.543.200,00 merupakan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 yang berasal dari Pajak Reklame Papan dan Kain di Bapenda.

Tabel 5.116. Rincian Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nomor Perjanjian	Tanggal Mulai Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian	Pendapatan Diterima Dimuka
1	CV Smart Media Indonesia	001476/SSPD/04 2023 dan 000048/SKPD/04/2023	01/04/2023	31/03/2024	2.457.000,00
2	CV Agung	002135/SSPD/04 2023 dan 000076/SKPD/04/2023	27/07/2023	26/07/2024	6.615.000,00
3	PT RMP Percetakan dan Advertising	002138/SSPD/04 2023 dan 000086/SKPD/04/2023	15/03/2023	14/03/2024	260.325,00
4	CV Kapital Media Perkasa	002185/SSPD/04 2023 dan 000177/SKPD/04/2023	01/08/2023	31/07/2024	1.977.500,00



No.	Uraian	Nomor Perjanjian	Tanggal Mulai Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian	Pendapatan Diterima Dimuka
5	PT Indomobil Finance Indonesia	002198/SSPD/04 2023 dan 000179/SKPD/04/2023	01/10/2023	30/09/2024	1.170.000,00
6	CV Bintang Sinar Jaya	002197/SSPD/04 2023 dan 000210/SKPD/04/2023	24/10/2023	23/01/2024	63.375,00
Jumlah					12.543.200,00

Penetapan pajak reklame secara jabatan (*Official Assesment*) berdasarkan jenis reklame, zona/kawasan, sudut pandang/sisi, ukuran luas dan jangka waktu pemasangan. Hal tersebut diatur melalui Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 59 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Reklame. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

2. Saldo awal pendapatan diterima dimuka berupa sewa lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp7.500.000,00 per 31 Desember 2022, saldo awal ditambah akumulasi dari tambahan pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp7.500.000,00 dan pengurangan akibat pengakuan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp3.750.000,00. Sehingga saldo akhir pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.750.000,00.

Pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp3.750.000,00 merupakan pendapatan dari sewa lahan tanah untuk:

- a. ATM Bank Negara Indonesia dengan Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk bangunan rumah ATM Bank Sulteng di areal BLUD RSUD Anuntaloko dengan masa sewa satu tahun mulai dari 20 Maret 2023 s.d 19 Maret 2024 sebesar Rp15.000.000,00 yang telah menjadi pendapatan sewa selama Bulan Maret s/d Desember 2023 sebesar Rp11.250.000,00 dengan pendapatan diterima dimuka selama tiga bulan dari Januari – Maret 2024 sebesar Rp3.750.000,00. Sehingga saldo pendapatan diterima per 31 Desember 2023 untuk ATM BNI sebesar Rp3.750.000,00;
 - b. ATM Bank Sulteng dengan Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk bangunan rumah ATM Bank Sulteng di areal BLUD RSUD Anuntaloko dengan masa sewa satu tahun mulai dari 1 April 2022 s.d 31 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 yang telah menjadi pendapatan sewa selama Bulan April s/d Desember 2022 sebesar Rp11.250.000,00 dan Januari s/d Maret 2023 sebesar Rp3.750.000,00 sehingga Pendapatan Diterima Dimuka di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
3. Saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka berupa sewa gedung untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp1.200.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 menjadi pendapatan sewa tahun berjalan di tahun 2023. Kemudian pihak koperasi menambah masa kontrak sewa gedung untuk KSU BLUD RSUD Anuntaloko dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 10C.01/005/RSUD antara RSUD dengan KSU BLUD RSUD Anuntaloko tentang Sewa Gedung kontrak sewa Gedung 1 April 2023 - 31 Maret 2024 Sebesar Rp4.800.000,00 dimana Rp3.600.000,00 menjadi Pendapatan tahun 2023, sedangkan Rp1.200.000,00 menjadi Pendapatan di terima dimuka tahun 2023, Sehingga Saldo akhir pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000,00.



5.3.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja Per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.232.546.075,58 mengalami penurunan sebesar Rp4.349.591.141,39 atau 10,64% dari tahun 2022 sebesar Rp40.882.954.934,19 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.117. Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Utang Belanja Pegawai	3.974.518.650,00	0,00	3.974.518.650,00	100,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	40.181.896.290,10	39.327.329.059,79	854.567.230,31	2,17
3	Utang Belanja Hibah	49.701.985,60	0,00	49.701.985,60	100,00
4	Utang Belanja Modal	1.026.429.139,88	1.555.625.874,40	(529.196.734,53)	(34,02)
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	10,00	0,00	10,00	100,00
	Jumlah	45.232.546.075,58	40.882.954.934,19	4.349.591.141,39	10,64

Terdapat saldo Utang sebesar Rp2.880.900.318,00 yang terbentuk di karenakan sampai per 31 Desember 2023 tidak dilakukan penyerahan kas kepada yang berhak menerima sehingga dana tersebut masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran/ Kas Lainnya dan tersebar di belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Penjelasan lebih rinci atas akun utang belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp3.974.518.650,00

Tabel 5.118. Rincian Utang Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan	0,00	3.966.388.250,00	0,00	3.966.388.250,00
	• Utang TPG PNS Daerah	0,00	3.859.763.250,00	0,00	3.859.763.250,00
	• Utang Tamsil Guru PNSD	0,00	106.625.000,00	0,00	106.625.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
	• Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	7.484.400,00	0,00	7.484.400,00
	• Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00
	• Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	302.400,00	0,00	302.400,00
	Jumlah	0,00	3.974.518.650,00	0,00	3.974.518.650,00



Seluruh Utang belanja pegawai merupakan utang yang timbul dikarenakan realisasi belanja masih terdapat di rekening Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023 belum diserahkan kepada para penerima yang berhak, adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Utang belanja honorarium - honorarium pengadaan barang/jasa sebesar Rp646.000,00 yaitu utang honor pengadaan barang jasa bulan Desember 2023 atas nama dr. Herdy Arnawan di Badan Kesatuan Bangsa, sehingga saldo Utang Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp646.000,00.
 - b. Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp7.182.000,00 yaitu Utang Tunjangan Jabatan PJ Bupati bulan Desember 2023 yang belum sempat diserahkan kepada PJ. Bupati di Sekretariat Daerah sehingga saldo Utang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.182.000,00.
 - c. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp302.400,00 yaitu Utang Iuran Jaminan Kesehatan PJ Bupati bulan Desember 2023 yang belum sempat diserahkan ke BPJS Kesehatan di Sekretariat Daerah, sehingga saldo Utang Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp302.400,00.
2. **Utang Barang dan Jasa sebesar Rp40.317.639.324,95.**

Utang Barang dan Jasa tahun 2023 disajikan sebesar Rp40.181.896.290,10, dibandingkan dengan utang barang dan jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp39.327.329.059,79 mengalami kenaikan sebesar Rp854.567.230,31 atau 2,17%. Dikarenakan adanya kenaikan utang pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu.

Tabel 5.119. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan	10.193.185,00	2.612.845.950,00	10.193.185,00	2.612.845.950,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	2.521.800.000,00	0,00	2.521.800.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	83.616.000,00	0,00	83.616.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.193.185,00	0,00	10.193.185,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	7.429.950,00	0,00	7.429.950,00
2	Dinas Kesehatan	6.519.415.441,96	2.709.154.758,00	2.810.521.036,47	6.418.049.163,49
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	88.065.000,00	0,00	88.065.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	7.513.079,00	0,00	0,00	7.513.079,00
	• Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.626.249,96	0,00	4.765.750,47	2.860.499,49
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	28.487.000,00	498.000,00	18.666.500,00	10.318.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	72.481.450,00	0,00	23.387.000,00	49.094.450,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	13.567.268,00	0,00	13.567.268,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	5.916.777.795,00	2.489.695.894,00	2.528.299.918,00	5.878.173.771,00
	• Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	258.211.000,00	0,00	7.083.000,00	251.128.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	205.682.400,00	28.056.600,00	205.682.400,00	28.056.600,00
	• Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.069.200,00	0,00	9.069.200,00	0,00
	• Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	65.839.264,00	0,00	65.839.264,00
3	RSUD Buluye Napoa'e	569.145.976,00	112.451.097,00	425.251.840,00	256.345.233,00
	• Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	106.492.942,00	76.620.525,00	106.492.942,00	76.620.525,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	457.103.034,00	35.830.572,00	318.758.898,00	174.174.708,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00
4	Bagian Umum Sekretariat Daerah	8.986.161.211,00	38.733.619,00	2.000.090.041,00	7.024.804.789,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	8.986.161.211,00	31.750.619,00	2.000.090.041,00	7.017.821.789,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
	• Utang belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
7	Dinas Pekerjaan Umum	440.100,00	0,00	440.100,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	440.100,00	0,00	440.100,00	0,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.772.505,00	0,00	6.772.505,00	0,00
	• Utang belanja barang dan jasa /tagihan internet	6.772.505,00	0,00	6.772.505,00	0,00
10	BLUD RSUD Anuntaloko	14.183.168.560,98	9.127.254.691,00	10.314.136.169,42	12.996.287.082,56
	• Utang belanja Barang dan Jasa BLUD	9.832.404.340,00	9.127.254.691,00	9.809.850.440,00	9.149.808.591,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	4.350.764.220,98	0,00	504.285.729,42	3.846.478.491,56
11	RSUD Raja Tombolotutu	9.034.832.079,85	3.896.169.821,05	2.081.772.828,85	10.849.229.072,05
	• Utang belanja Barang dan Jasa BLUD	8.956.617.740,85	3.883.169.821,05	2.081.772.828,85	10.758.014.733,05
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	78.214.339,00	0,00	0,00	78.214.339,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	Jumlah	39.327.329.059,79	18.503.744.936,05	17.649.177.705,74	40.181.896.290,10

Utang belanja barang dan jasa sebesar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.612.845.950,00**

Saldo Utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.612.845.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.602.652.765,00 atau 25533,26% dibandingkan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp10.193.185,00. Rincian penambahan dan pengurangan Utang Barang dan Jasa pada Dinas pendidikan dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp 10.193.185,00
Mutasi Tambah	Rp 2.612.845.950,00
Utang guru honor swasta	Rp 42.600.000,00
Utang tagihan internet bulan Desember 2023 karena Anggaran di DPA Dinas Pendidikan tidak mencukupi	Rp 7.429.950,00
Kas dibendahara Pengeluaran yang belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerimanya terdiri dari:	
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	Rp 2.479.200.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	Rp 83.616.000,00
Mutasi Kurang	Rp 10.193.185,00
utang belanja jasa kantor tagihan listrik	Rp 10.193.185,00
Saldo akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah - Mutasi Kurang)	Rp 2.612.845.950,00



b. Utang belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar **Rp6.418.049.163,49**

Saldo Utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.418.049.163,49 mengalami penurunan sebesar Rp101.366.278,47 atau 1,55% dibandingkan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp6.519.415.441,96. Rincian penambahan dan pengurangan Utang Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp 6.519.415.441,96
Mutasi Tambah	Rp 2.709.154.758,00
Koreksi Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 1.025.487,00
Koreksi Utang Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 498.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 2.488.670.407,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	Rp 28.056.600,00
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor	Rp 4.500.000,00
Kas dibendahara yang belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerimanya terdiri dari:	
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	Rp 32.500.000,00
Utang Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 88.065.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 65.839.264,00
Mutasi Kurang	Rp 2.810.521.036,47
Pembayaran Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 4.765.750,47
koreksi Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp 23.387.000,00
Koreksi Utang Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 450.000,00
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 93.181.529,00
Koreksi Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 7.083.000,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 2.435.118.389,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	Rp 205.682.400,00
Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Rp 9.069.200,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Rp 13.567.268,00
Pemabayaran Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 18.216.500,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah - Mutasi Kurang)	Rp 6.418.049.163,49

Pada Dinas Kesehatan terdapat Utang Jampersal dan Utang Bansosda yang terutang sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 kepada Puskesmas, BLUD RSUD Anuntaloko dan RSUD Raja Tombolotutu.

Utang Jampersal Dinas Kesehatan tahun 2018 - 2023 sebesar Rp1.994.367.800,00 dan Bansosda sebesar Rp8.445.105.045,00 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.120. Rincian Utang Bansosda dan Jampersal

(dalam rupiah)

No	Unit Layanan Kesehatan	Utang Bansosda	Utang Jampersal	Jumlah
1	RSUD Anuntaloko Parigi	7.724.186.217,00	1.433.590.300,00	9.157.776.517,00
2	RSUD Raja Tombolotutu Tinombo	720.918.828,00	560.777.500,00	1.281.696.328,00
Jumlah		8.445.105.045,00	1.994.367.800,00	10.439.472.845,00

Utang ini tidak disajikan pada Lembar Muka karena sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua; Lampiran I: PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian; Paragraf 22 menyatakan bahwa Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

c. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Buluye Napo'ae sebesar Rp256.345.233,00**

Saldo Utang Belanja barang dan jasa pada RSUD Buluye Napo'ae tahun 2023 disajikan sebesar Rp256.345.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp312.800.743,00 atau 54,96% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp569.145.976,00 Rincian penambahan dan pengurangan Utang Barang dan Jasa pada RSUD Buluye Napo'ae dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp 569.145.976,00
Mutasi Tambah	Rp 112.451.097,00
Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 76.620.525,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 30.652.600,00
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan kurang catat	Rp 5.177.972,00
Mutasi Kurang	Rp 425.251.840,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 209.563.800,00
Pembayaran Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 106.492.942,00
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan lebih catat	Rp 109.195.098,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah - Mutasi Kurang)	Rp 256.345.233,00

d. **Utang belanja barang dan jasa pada Badan Kesatuan Bangsa tahun 2023 sebesar Rp7.135.000,00.**

Saldo utang sebesar Rp Rp7.135.000,00 merupakan utang Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia di akui dikarenakan hingga akhir tahun 2023 belum diserahkan ke penerima yang berhak, sehingga saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.1135.000,00.



e. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tahun 2023 sebesar Rp7.024.804.789,00**

Saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.024.804.789,00 dibandingkan dengan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp8.986.161.211,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.961.356.422,00 atau 21,83%.

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Barang dan Jasa pada Bagian Sekretariat Daerah dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp 8.986.161.211,00
Mutasi Tambah	Rp 38.733.619,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	Rp 31.750.619,00
Kas dibendahara yang belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerimanya terdiri dari:	
Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 180.000,00
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 6.800.000,00
Belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer	Rp 3.000,00
Mutasi Kurang	Rp 2.000.090.041,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	Rp 1.999.792.926,00
koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum karena lebih catat	Rp 297.115,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp 7.024.804.789,00

f. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 sebesar Rp17.200.000,00.**

Saldo awal utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.200.000,00 merupakan sisa utang belanja terkait penanganan *Covid-19*, di tahun 2023 tidak dilakukan pembayaran atas utang tersebut, sehingga saldo utang per 31 Desember 2023 tetap sama sebesar Rp17.200.000,00.

g. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2023 sebesar Rp0,00**

Saldo awal Utang Jasa Kantor berupa Utang Jasa Air per 31 Desember 2022 sebesar Rp440.100,00 dibayarkan melalui SP2D Nomor 18.09/04.0/000284/GU/1.03.2.10.0.00.01.0000/P.05/11/2023 tanggal 14 November 2023, sehingga saldo Utang Belanja Jasa kantor Per 31 Desember 2023 Rp0,00.

h. **Utang Belanja Jasa kantor pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 sebesar Rp0,00.**

Saldo awal Utang sebesar Rp6.722.505,00, merupakan utang tagihan listrik bulan November sampai Desember 2022, di tahun 2023 dilakukan pembayaran sebesar Rp6.722.505,00 dengan mekanisme SPJ GU Nuhil di akhir tahun 2023, sehingga saldo utang belanja jasa kantor per 31 Desember 2023 Rp0,00.

i. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2023 sebesar Rp12.996.287.082,56**

Utang Barang dan Jasa BLUD di RSUD Anuntaloko tahun 2023 disajikan sebesar Rp12.996.287.082,56 dibandingkan dengan Utang Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp14.183.168.560,98 terjadi penurunan sebesar Rp1.186.881.478,42 atau 8,37%, rincian utang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.121. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
Utang tanggungan Pemda		3.846.478.491,56
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.846.478.491,56
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		9.149.808.591,00
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	12.300.000,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku	1.144.340.292,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	174.041.170,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.779.714,00
5	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.521.319.544,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	932.608.501,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	53.896.978,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	4.850.868.213,00
9	Utang Jasa Kontribusi Asosiasi	500.000,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.218.050,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	153.672.929,00
12	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	198.902.880,00
13	Utang pengembalian dana pihak ketiga yang masih di Kas Bendahara	78.360.320,00
TOTAL		12.996.287.082,56

Utang pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp12.996.287.082,56 dibagi 2 bagian yaitu utang tanggungan Pemda sebesar Rp3.846.478.491,56 dan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp9.149.808.591,00 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Utang Belanja Jasa Kantor – Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 tanggungan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.846.478.491,56, dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 4.350.764.220,98
Mutasi Kurang	Rp 504.285.729,42
Pembayaran Utang insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19	Rp 499.285.713,00
Koreksi Utang insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19 karena lebih catat	Rp 5.000.016,42
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp 3.846.478.491,56

2. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp9.149.808.591,00 merupakan utang BLUD kepada pihak internal dan eksternal BLUD RSUD Anuntaloko dikarenakan kas tahun anggaran 2023 tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran, mengalami penurunan sebesar Rp682.595.749,00



atau 6,94% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.832.404.340,00.
Dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 9.832.404.340,00
Mutasi Tambah	Rp 9.127.254.691,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp 9.030.111.042,00
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD karena kurang catat	Rp 18.783.329,00
Kas dibendahara yang belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerimanya dikarenakan ada belanja belum terbayarkan:	Rp 78.360.320,00
Mutasi Kurang	Rp 9.809.850.440,00
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp 9.798.947.182,00
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD karena lebih catat	Rp 10.903.258,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp 9.149.808.591,00

- j. **Utang BLUD RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp10.849.229.072,05**
Saldo Utang BLUD RSUD Raja Tombolotutu tahun 2023 disajikan sebesar Rp10.849.229.072,05 dibandingkan dengan Utang Barang dan Jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp9.034.832.079,85 terjadi kenaikan sebesar Rp1.814.396.992,20 atau 20.08%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.122. Rincian Utang BLUD pada RSUD Raja Tombolotutu

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
Utang tanggungan Pemda		91.214.339,00
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	13.000.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	78.214.339,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		10.758.014.733,05
1	Utang Belanja bahan pakai habis	457.140.172,00
2	Utang belanja Obat	334.358.295,00
3	Utang Belanja Bahan Kimia	273.051.235,00
4	Utang Belanja Alat Tulis Kantor	5.578.875,90
5	Utang Belanja Cetak	7.351.875,15
6	Utang Belanja Kertas & Cover	4.713.750,00
7	Utang Belanja BBM Ambulance	4.793.500,00
8	Utang Jasa Medis	9.510.989.180,00
9	Utang Transportasi dan akomodasi rujukan	106.550.000,00
10	Utang Jasa Pengiriman Limbah B3	41.747.850,00
11	Utang Belanja Perjalanan Dinas	11.740.000,00
TOTAL		10.849.229.072,05

Utang pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp10.849.229.072,05 dibagi 2 bagian yaitu utang tanggungan Pemda sebesar Rp91.214.339,00 dan Utang



Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp10.758.014.733,05 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Utang Belanja tanggungan Pemda per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.214.339,00, dijelaskan berikut :

Saldo Awal (utang Penanganan Covid 19)	Rp	78.214.339,00
Mutasi Tambah	Rp	13.000.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli kepada dr. Herdy Arnawan spesialis Radiologi bulan Desember 2023	Rp	13.000.000,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	91.214.339,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp10.758.014.733,05 merupakan utang BLUD kepada pihak internal dan eksternal BLUD RSUD RJTT dikarenakan kas tahun anggaran 2023 tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran, mengalami kenaikan sebesar Rp1.801.396.992,20 atau 20,11% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp8.956.617.740,85, dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	8.956.617.740,85
Mutasi Tambah	Rp	3.883.169.821,05
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	3.875.738.755,05
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD karena kurang catat	Rp	7.431.066,00
Mutasi Kurang	Rp	2.081.772.828,85
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	1.727.117.795,00
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (jasa medis) karena lebih catat	Rp	354.655.033,85
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	Rp	10.758.014.733,05

Peralihan status ke PPK-BLUD ditahun 2019 dan operasionalnya di tahun 2020 menyebabkan pembagian persentase jasa mediknya pun turut berubah, sesuai dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 446.45/843/RSUD.RTT tentang Pembagian Persentase Jasa Medik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Retribusi Umum Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022, dengan perhitungan Operasional 65% dan jasa medis 35%.

3. Utang Belanja Hibah sebesar Rp49.701.985,60,-
Utang belanja hibah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.701.985,60, dibandingkan utang hibah tahun lalu sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.701.985,60. Utang hibah ini terdapat pada 2 OPD, penjelasannya sebagai berikut :
 - a. Utang belanja hibah tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan sebesar Rp40.495.985,60,- dibandingkan dengan utang belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp40.495.985,60, Utang ini merupakan utang belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan adalah Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Toga secara fisik pekerjaan 100% selesai tetapi belum selesai dibayarkan kepada Pihak pelaksana pekerjaan, sehingga menjadi saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.495.985,60.



- b. Utang belanja hibah tahun 2023 pada Dinas Pendidikan disajikan sebesar Rp9.206.000,00,- dibandingkan dengan utang belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.206.000,00. Utang ini merupakan utang belanja hibah barang kepada badan atau lembaga yang berbadan hukum sesuai peraturan per undang-undangan khususnya sekolah swasta berupa mebubeler seharga Rp9.206.000,00 yang belum sempat terbayarkan kepada Pihak ketiga yang menyediakan barangnya.
4. **Utang Belanja Modal sebesar Rp1.026.429.139,88**
Saldo Utang Belanja Modal tahun 2023 disajikan sebesar Rp1.026.429.139,88,- dibandingkan dengan Utang Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp1.555.625.874,40 mengalami penurunan sebesar Rp529.196.734,53 atau (34,01%).
Utang Belanja Modal tahun 2023 dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.123. Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan	0,00	78.132.677,48	0,00	78.132.677,48
	• Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel		3.000.000,00		3.000.000,00
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	23.555.312,70	0,00	23.555.312,70
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	36.764.164,94	0,00	36.764.164,94
	• Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih Baku/ Air Baku - Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	6.104.700,00	0,00	6.104.700,00
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	8.708.499,84	0,00	8.708.499,84
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.555.625.874,40	481.490.588,00	1.088.820.000,00	948.296.462,40
	• Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	947.020.000,00	0,00	947.020.000,00	0,00
	• Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	96.975.000,00	0,00	96.975.000,00
	• Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam	144.900.000,00	0,00	141.800.000,00	3.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	24.579.771,00	0,00	24.579.771,00
	• Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	463.705.874,40	359.935.817,00	0,00	823.641.691,40
	Total	1.555.625.874,40	559.623.265,48	1.088.820.000,00	1.026.429.139,88

5. Utang Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp10,00

Utang Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 disajikan sebesar Rp10,00 dibandingkan dengan Utang Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10,00.

Utang ini merupakan utang belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang diakui karena kurang bayar kepada BPJS Kesehatan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan aparat desa tahun 2023, sehingga menjadi saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp10,00.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp7.395.779.803,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.395.779.803,00 atau (100%), utang jangka pendek lainnya adalah utang kelebihan pembayaran bagi hasil pusat.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.124. Rincian Utang Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	694.229.001,00	-	466.666.667,00	227.562.334,00
	Jumlah	694.229.001,00	0,00	466.666.667,00	227.562.334,00

5.3.2.2.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Pemerintah Pusat tahun 2023 disajikan sebesar Rp227.562.334,00 merupakan utang penerusan pinjaman luar negeri yang berasal dari *The Internasional Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), dibandingkan dengan utang kepada



Pemerintah Pusat tahun 2022 sebesar Rp694.229.001,00 terjadi penurunan sebesar Rp466.666.667,00 atau 67.22%.

Berdasarkan perjanjian penerusan pinjaman antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah atas Dana Pinjaman dari The Internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Loan Agreement Nomor 4786-IND tanggal 20 Oktober 2005 dalam rangka pembiayaan *Urban Sector Development Reform Project* (USDRP), Nomor SLA-1203/DP3/2006 Tanggal 5 Juli 2006, yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 untuk Pembangunan Terminal Toboli dan Pasar Sentral Parigi, terdapat jadwal pembayaran angsuran IBRD Loan Nomor 4786-IND tanggal 20 Oktober 2005, jadwal tersebut adalah jadwal tanggal angsuran dan jumlah angsuran yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dimulai dari tanggal 15 April 2011 sampai tanggal 15 Oktober 2025, dengan jumlah angsuran menurun.

Sampai dengan tahun 2022 dari total pinjaman sebesar Rp27.994.229.001,00 Pemda Kabupaten Parigi Moutong telah mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp27.300.000.000,00, dan sisa angsuran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp694.229.001,00. Pada tahun 2024 jumlah angsuran pokok pinjaman luar negeri yang jatuh tempo sesuai jadwal angsuran adalah sebesar Rp466.666.667,00. Sehingga nilai tersebut direklasifikasikan/disajikan ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp466.666.667,00. Saldo akhir per 31 Desember 2023 Utang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp227.562.334,00.

Sisa utang kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman luar negeri dapat dilihat pada *Lampiran 40*.

5.3.3

Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.700.542.971.928,99.

Tabel 5.125. Ekuitas

(dalam rupiah)			
No	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas	2.700.542.971.928,99	2.653.118.181.082,26
	Jumlah	2.700.542.971.928,99	2.653.118.181.082,26

Penjelasan Ekuitas dapat dilihat pada laporan perubahan ekuitas.

5.4

PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam satu periode pelaporan. diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

**5.4.1 Pendapatan Daerah - LO**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan - LO tahun 2023 dan 2022. Rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.126. Rincian Pendapatan Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	150.129.287.243,68	120.558.655.542,55
2	Pendapatan Transfer	1.408.265.071.037,00	1.126.940.901.739,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.015.984.723,31	170.616.321.585,45
	Jumlah	1.566.410.343.003,99	1.418.115.878.867,00

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.127. Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pajak Daerah	25.168.752.708,24	23.493.190.060,75
2	Retribusi Daerah	15.219.057.904,00	9.042.753.279,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.308.124.029,00	6.059.444.910,70
4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	102.433.352.602,44	81.963.267.292,10
	Jumlah	150.129.287.243,68	120.558.655.542,55

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.128. Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pajak Hotel	363.462.880,00	298.257.155,00
2	Pajak Restoran/Rumah Makan	2.094.252.926,00	1.948.826.396,20
3	Pajak Hiburan	38.667.900,00	17.535.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
4	Pajak Reklame	836.821.660,44	714.959.237,25
5	Pajak Penerangan Jalan	12.324.642.271,00	11.162.438.502,00
6	Pajak Parkir	24.566.100,00	10.929.900,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	46.318.712,00	41.457.368,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	434.107.767,80	518.873.178,30
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.272.933.532,00	7.145.624.058,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.732.978.959,00	1.634.289.266,00
Jumlah		25.168.752.708,24	23.493.190.060,75

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Tahun 2023 terdapat Piutang Pajak Rumah Makan sebesar Rp8.811.651,00 terhadap 12 wajib pajak;
 - Terdapat Piutang Pajak Reklame sebesar Rp123.409.745,15 yang merupakan pajak reklame papan, reklame kain dan reklame berjalan;
 - Terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.149.509.583,00 yang merupakan piutang pajak penerangan jalan untuk bulan desember, pada PT. PLN Wilayah Sulutenggo Area Palu dan Area Toli-toli;
 - Terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.663.414.872,63 lebih besar dari pelunasan Tahun 2022 sebesar Rp505.117.248,00;
- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA TA 2023 sebesar Rp1.365.153.462,78 (Rp25.168.752.708,24 – Rp23.803.599.245,46). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan selisih LO - LRA

1.365.153.462,78

Penambahan Pendapatan LRA terhadap - LO

Piutang Pajak Restoran Tahun TA,2023	8.811.651,00
Piutang Pajak Reklame TA. 2023	123.409.745,15
Piutang Pajak Penerangan Jalan TA.2023	1.149.509.583,00
Piutang PBBP2 TA. 2023	1.663.414.872,63

Pengurangan Pendapatan LRA terhadap - LO

Pelunasan Piutang Pajak Reklame TA.2022	56.246.672,00
Pelunasan Pajak Penerangan Jalan TA. 2022	1.018.628.469,00
Pelunasan PBBP2 TA. 2022	505.117.248,00

Jumlah Penjelasan selisih

1.365.153.462,78



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.129. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
Retribusi Jasa Umum			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.836.985.073,00	7.982.597.208,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	231.037.500,00	197.544.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	88.426.000,00	51.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	205.939.800,00	204.649.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	21.785.000,00	10.946.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.085.245.320,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	220.621.950,00	179.765.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	36.500.000,00	41.500.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	57.260.000,00	37.620.000,00
4	Retribusi Terminal	53.400.000,00	54.000.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	36.160.000,00	41.420.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.145.183.675,00	149.264.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu			
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.513.586,00	92.247.471,00
2	Retribusi Izin Trayek		
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan		
	Jumlah	15.219.057.904,00	9.042.753.279,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Terdapat Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan TA. 2023 sebesar Rp811.219.000,00 yang merupakan piutang non kapitasi JKN untuk persalinan, rujukan dan RITP pada puskesmas. Dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp48.550.000,00 yang merupakan klaim BPJS pelayanan kesehatan rujukan untuk bulan November dan Desember 2023;
 - b. Terdapat piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi sebesar Rp412.986.000,00;



- c. Terdapat Piutang pada retribusi penjualan produksi usaha daerah yaitu pendapatan dari UPTD Air spam sebesar Rp792.691.825;
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar dari* saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp592.561.825,00 (Rp15.219.057.904,00 - Rp14.626.496.079,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan selisih LO - LRA

592.561.825,00

Penambahan Pendapatan LRA terhadap - LO

piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan TA.2023	811.219.000,00
piutang retribusi pelayanan kesehatan TA. 2023 RUSD Boluye Napoa'e	48.550.000,00
piutang retribusi menara telekomunikasi TA. 2023	412.986.000,00
piutang retribusi PPUD - UPTD SPAM PURP	792.691.825,00

Pengurangan Pendapatan LRA terhadap - LO

Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan TA.2022	1.234.867.000,00
piutang retribusi pelayanan kesehatan TA. 2023 RUSD Boluye Napoa'e	156.616.200,00
Pelunasan piutang retribusi PPUD - UPTD SPAM PUPR	81.401.800,00

Jumlah Penjelasan selisih

592.561.825,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.130. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Deviden BPD Sulteng Cabang Parigi	7.308.124.029,00	5.067.381.985,70
2	Deviden BUMD Bidang Air Minum	0,00	992.062.925,00
Jumlah		7.308.124.029,00	6.059.444.910,70

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
- a. Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan di LO sama dengan nilai di LRA;



- b. Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sudah sesuai dengan hasil RUPS penerimaan Deviden Tahun buku 2022 sebesar Rp7.308.124.029,00;
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini *sama* dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp7.308.124.029,00 tidak ada perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO.

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022, yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.131. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.000.000,00	27.500.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro	2.536.586.505,41	3.434.602.308,01
4	Pendapatan Bunga	111.767.483,88	226.111.477,12
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	705.676.493,71	1.118.519.426,31
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	575.101.413,11	1.117.612.008,17
7	Pendapatan denda Pajak Daerah	205.079.278,11	186.743.571,20
8	Pendapatan dari Pengembalian	2.480.208.143,07	641.712.369,59
9	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	76.207.138.587,15	61.382.759.622,70
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.584.794.698,00	13.827.706.509,00
Jumlah		102.433.352.602,44	81.963.267.292,10

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Terdapat piutang Tahun 2023 pada pendapatan dari pengembalian sebesar Rp57.403.668,00;
 - b. Terdapat piutang Tahun 2023 pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp5.349.003.238,00 dan pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp1.232.984.000,00;
2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp3.246.032.751,22 (Rp102.433.352.602,44 - Rp105.679.385.353,66). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi



penambahan dan pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan selisih LO - LRA

(3.246.032.751,22)

Penambahan Pendapatan LRA terhadap - LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan TA. 2023	49.628.580,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA. 2023	7.775.088,00
Piutang Klaim BPJS BLUD RSUD Tombolotutu TA. 2023	1.232.984.000,00
Pendapatan diterima di muka BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2023	8.700.000,00
Piutang BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2023	5.349.003.238,00

Pengurangan Pendapatan LRA terhadap - LO

Pelunasan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain TA. 2023	3.800.000,00
Pelunasan Piutang Pendapatan Bunga TA. 2022	1.111.477,12
Pelunasan piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan TA. 2023	73.332.492,00
Pelunasan piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung TA. 2023	5.000.000,10
Pelunasan piutang Klaim BPJS BLUD RSUD Tombolotutu TA. 2022	1.285.278.150,00
Pendapatan diterima di muka BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2022	4.950.000,00
Pelunasan piutang BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2022	8.093.434.774,00
piutang sewa ATM Blud RSUD Anuntaloko	3.750.000,00
Piutang klaim jasaraharja Blud Anuntaloko	13.540.464,00
piutang klaim BPJS Blud RSUD Tombolotutu	347.426.300,00
Piutang klaim visum BLUD RSUD Anuntaloko	8.500.000,00
koreksi penyisihan piutang/reklasifikasi piutang covid BLUD RSUD Anuntaloko	54.000.000,00

Jumlah Penjelasan selisih

(3.246.032.751,22)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer - LO tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.132. Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.909.563.020,00	1.070.462.617.948,00
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	72.355.508.017,00	56.478.283.791,00
Jumlah		1.408.265.071.037,00	1.126.940.901.739,00

**5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.133. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022
	Dana Perimbangan – LO		
	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	109.227.281.432,00	52.901.586.977,00
	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	777.097.127.251,00	720.186.220.000,00
	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	210.878.154.045,00	184.496.372.332,00
	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	229.277.142.292,00	112.878.438.639,00
	Insentif Daerah		
	Insentif Fiskal-LO	9.429.858.000,00	0,00
	Jumlah	1.335.909.563.020,00	1.070.462.617.948,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/Atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai Melalui *Treasury Deposit Facility* tanggal 3 Maret 2023, terdapat TDF Dana Bagi Hasil sebesar Rp66.419.388.000,00 sesuai rekening koran Bank Indonesia Nomor 5190000494980 Tanggal 1 Desember 2023;
 - Terdapat Dana Isentif Fiskal sebesar Rp9.429.858.000,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 400 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp57.289.745.400,00 (Rp1.335.909.563.020,00 – 1.278.619.817.620,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Penjelasan selisih LO - LRA

57.289.745.400,00

Penambahan Pendapatan LRA terhadap - LO

TDF DBH PPh 21 TA. 2023	1.004.149.000,00
TDF DBH pajak 25/29 TA. 2023	6.622.000,00
TDF DBH PBB TA. 2023	546.070.000,00
TDF DBH SDA Minyak Bumi TA. 2023	805.588.000,00
TDF DBH SDA Gas Bumi TA. 2023	30.869.351.000,00
TDF DBH SDA Minerba Royalti TA. 2023	33.187.608.000,00

Pengurangan Pendapatan LRA terhadap - LO

TDF TA. 2022	4.582.836.057,00
Pelunasan piutang CHT TA. 2022	5.106.543,00
Pelunasan piutang Minerba Royalti TA. 2022	4.541.700.000,00

Jumlah Penjelasan selisih

57.289.745.400,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.134. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
	Pendapatan Bagi Hasil - LO		
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.249.349.848,00	9.181.189.212,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.061.236.588,00	9.956.261.069,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.621.065.478,00	23.173.263.037,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air permukaan	563.829.915,00	75.672.287,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	20.550.026.188,00	14.091.898.186,00
	Bantuan Keuangan - LO		
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.310.000.000,00	-
	Jumlah	72.355.508.017,00	56.478.283.791,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Terdapat piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp8.358.403.228,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor: 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur DBH Daerah Bagian Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah periode 2023;



- b. Tahun 2023 terdapat Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp8.310.000.000,00 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.3/276/BPKAD-G.ST/2023 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023;
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp196.429.202,00 (Rp72.355.508.017,00 – Rp72.551.937.219,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan selisih LO - LRA

(196.429.202,00)

Penambahan Pendapatan LRA terhadap - LO

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023	1.871.910.090,00
Piutang Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023	1.588.561.676,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023	4.809.598.037,00
Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2023	88.333.425,00

Pengurangan Pendapatan LRA terhadap - LO

Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022	2.461.655.876,00
Pelunasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022	1.729.569.214,00
Pelunasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2022	4.329.269.808,00
Pelunasan Pajak Air Permukaan Tahun 2022	34.337.532,00

Jumlah Penjelasan selisih

(196.429.202,00)

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.135. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Hibah	8.015.984.723,31	112.427.084.088,45
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	58.189.237.497,00
Jumlah		8.015.984.723,31	170.616.321.585,45

**5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Hibah - LO tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.136. Rincian Pendapatan Hibah - LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	3.903.766.769,55	106.901.261.790,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	3.912.717.953,76	4.552.447.298,45
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri - LO	28.000.000,00	343.695.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri - LO	0,00	629.680.000,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	171.500.000,00	0,00
Jumlah		8.015.984.723,31	112.427.084.088,45

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Hibah - LO tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Tahun 2023 pemberian hibah dari pemerintah pusat berkurang;
 - Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan terealisasi Rp28.000.000,00 dikarenakan hasil konsultasi dengan KEMENDAGRI bahwa penjagaan di perbatasan wilayah hanya boleh ada pengawasan, tidak boleh ada pungutan, nilai realisasi LO sama dengan nilai di LRA; dan
 - Tidak terdapat hibah dari badan/lembaga/Organisasi dalam negeri;
- Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.231.857.716,31 (Rp8.015.984.723,31 - Rp2.784.127.007,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan selisih LO - LRA

5.231.857.716,31

Penambahan Pendapatan LRA terhadap - LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Hibah dari KEMENDAGRI 1 unit Motor Trail D-Tracker 150cc, sirine motor, lampu sirine, lampu strobo, tiang/braket kepada Satpol PP	45.234.525,00
Hibah dari pemerintah pusat berupa buku kia dan buku kia khusus bayi kecil serta BMHP SHK BMHP Uji Saring Neonatus pada Dinas Kesehatan	45.555.237,55
Hibah KEMENKES RI Dirjen Kesmas berdasarkan berita acara serah terima penyediaan alat ultrasonografi (USG 2D) pada PKM Sigenti dan PKM Sidoan	256.000.000,00



Hibah dari kemenkes RI Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat berupa pulse oximeter pada 23 Puskesmas	97.750.000,00
Hibah dari kemenkes RI dirjen kesmas berupa penyediaan Antropometri KIT tahap 2 pada PKM	703.100.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	
Hibah berupa Obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Dinas Kesehatan Kab. Parigi Moutong	1.696.330.575,76
Hibah berupa Alat kontrasepsi dan Obat KB dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.216.387.378,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	
Hibah dari Bank SULTENG Parigi Moutong berupa 2 unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, dan biaya transport ke lokasi ke Satuan Polisi Pamong Praja	171.500.000,00
Jumlah Penjelasan selisih	5.231.857.716,31

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.137. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

(dalam rupiah)			
No	Uraian	2023	2022
	Lain-lain Pendapatan-LO		
	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	58.189.237.497,00
	Jumlah	0,00	58.189.237.497,00

Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 1 bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan, oleh karena itu tidak ada realisasi pada pendapatan hibah dana bos pada akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;

1. Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2023 ini Rp0,00 *sama dengan* saldo Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2023.



5.4.2 Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Daerah tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Daerah yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.138. Beban Daerah LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Operasi	1.253.397.650.750,99	1.094.898.384.985,59	158.499.265.765,40	14,48
Beban Penyusutan dan Amortisasi	181.481.662.434,87	239.644.742.798,19	(58.163.080.363,32)	(24,27)
Beban Transfer	92.744.639.517,00	79.319.039.676,00	13.425.599.841,00	16,93
Beban Tidak Terduga	3.051.237.500,00	4.069.572.899,67	(1.018.335.399,67)	(25,02)
Jumlah	1.530.675.190.202,86	1.417.931.740.359,45	112.743.449.843,41	7,95

Beban Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp112.743.449.843,41 atau sebesar 7,95% jika dibandingkan Beban Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022.

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.139. Beban Operasi LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Pegawai	634.008.305.521,00	606.591.834.573,00	27.416.470.948,00	4,52
Beban Barang dan Jasa	510.140.921.487,72	428.226.786.417,17	81.914.135.070,55	19,13
Beban Bunga	177.632.209,40	168.181.692,54	9.450.516,86	5,62
Beban Hibah	103.624.851.752,60	54.790.717.782,00	48.834.133.970,60	89,13
Beban Bantuan Sosial	2.764.651.250,00	2.910.633.250,00	(145.982.000,00)	(5,02)
Beban Penyisihan Piutang	2.681.288.530,27	2.210.231.270,88	471.057.259,39	21,31
Jumlah	1.253.397.650.750,99	1.094.898.384.985,59	158.499.265.765,40	14,48

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp158.499.265.765,40 atau sebesar 14,48% jika dibandingkan Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5.140. Beban Pegawai LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	436.939.182.909,00	421.712.886.878,00	15.226.296.031,00	3,61
Beban Tambahan Penghasilan ASN	76.273.754.936,00	75.664.280.250,00	609.474.686,00	0,81
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.558.215.477,00	93.523.964.752,00	9.034.250.725,00	9,66
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.466.409.466,00	14.786.139.343,00	2.680.270.123,00	18,13
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	152.072.733,00	168.603.350,00	(16.530.617,00)	(9,80)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	565.870.000,00	601.560.000,00	(35.690.000,00)	(5,93)
Beban Pegawai BLUD	52.800.000,00	134.400.000,00	(81.600.000,00)	(60,71)
Jumlah	634.008.305.521,00	606.591.834.573,00	27.416.470.948,00	4,52

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN meningkat sebesar 3,61% disebabkan bertambahnya jumlah pegawai ASN PPPK di tahun 2023;
 - b. Beban Tambahan Penghasilan ASN meningkat sebesar 0,81% disebabkan bertambahnya jumlah PNSD yang menerima tambahan penghasilan di tahun 2023;
 - c. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN meningkat sebesar 9,66% disebabkan antara lain:
 - 1) Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah meningkat sebesar 12,43% diakibatkan meningkatnya pendapatan pajak daerah;
 - 2) Beban TKG PNSD meningkat sebesar 64,51% diakibatkan bertambahnya jumlah guru di daerah terpencil dan adanya kekurangan gaji guru daerah terpencil tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023; dan
 - 3) Beban Tamsil Guru PNSD meningkat sebesar 94,89% diakibatkan bertambahnya jumlah guru PNSD dan PPPK penerima tamsil guru dan adanya kekurangan pembayaran tamsil guru tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023.
 - d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD meningkat sebesar 18,13% disebabkan adanya kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 640.2.45/267/BAG.ADM PEMBANGUNAN tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang disusun berdasarkan Laporan Penilaian Kajian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang oleh kantor jasa penilaian publik Pung's Zulkarnain & Rekan dengan nomor 00494/2.0004-12/PI/11/0548/I/IX/2022 tanggal 30 September 2022;



- e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH menurun sebesar 9,80% disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati Parigi Moutong di tahun 2023 dan digantikan oleh Penjabat Bupati yang masih status PNS;
 - f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH menurun sebesar 5,93% disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati Parigi Moutong di tahun 2023 dan digantikan oleh Penjabat Bupati yang masih berstatus PNS; dan
 - g. Beban Pegawai BLUD menurun sebesar 60,71% disebabkan Belanja Pegawai BLUD RSUD Raja Tombolotutu ditahun 2023 dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa BLUD.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp3.966.388.250,00 (Rp634.008.305.521,00 - Rp630.041.917.271,00). Hal tersebut disebabkan oleh:
- a. Utang Beban Tunjangan Hari Raya TPG PNSD tahun 2023 yang dihitung berdasarkan data pembayaran pada bulan April 2024 sebesar Rp3.859.763.250,00; dan
 - b. Utang Beban Tunjangan Hari Raya Tamsil Guru PNSD tahun 2023 yang dihitung berdasarkan data pembayaran pada bulan April 2024 sebesar Rp106.625.000,00.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Barang dan Jasa tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.141. Beban Barang dan Jasa LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Barang	95.595.502.869,25	64.036.172.536,51	31.559.330.332,74	49,28
Beban Jasa	167.050.040.256,40	135.688.878.215,38	31.361.162.041,02	23,11
Beban Pemeliharaan	19.632.593.506,00	18.430.746.420,96	1.201.847.085,04	6,52
Beban Perjalanan Dinas	97.571.949.697,00	78.798.987.134,00	18.772.962.563,00	23,82
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.310.415.268,00	1.272.635.000,00	1.037.780.268,00	81,55
Beban Barang dan Jasa BOS	53.063.052.950,00	51.307.625.112,00	1.755.427.838,00	3,42
Beban Barang dan Jasa BLUD	74.917.366.941,07	78.691.741.998,32	(3.774.375.057,25)	(4,80)
Jumlah	510.140.921.487,72	428.226.786.417,17	81.914.135.070,55	19,13

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya beban barang sebesar 49,28% antara lain disebabkan meningkatnya Beban Suku Cadang Alat Kedokteran sebagai akibat pemakaian persediaan suku cadang alat kedokteran tahun 2022 yang telah terpakai di tahun 2023;
 - b. Meningkatnya Beban Jasa sebesar 23,11% antara lain disebabkan bertambahnya jumlah guru PPPK, meningkatnya jumlah iuran BPJS bagi kepala desa dan aparat



- desa, meningkatnya jumlah kendaraan sewa bagi pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan meningkatnya kegiatan di tahun 2023;
- Meningkatnya Beban Pemeliharaan sebesar 6,52% disebabkan meningkatnya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi barang milik daerah di tahun 2023;
 - Meningkatnya Beban Perjalanan dinas sebesar 23,82% disebabkan meningkatnya volume kegiatan yang membutuhkan koordinasi antar instansi dan lembaga daerah maupun pusat;
 - Meningkatnya Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 81,55% disebabkan bertambahnya jumlah penerima beasiswa, dan pembayaran jasa *event organizer* kegiatan festival teluk tomini Tahun 2023;
 - Meningkatnya Beban Barang dan Jasa BOS sebesar 3,42% disebabkan bertambahnya jumlah siswa di tahun 2023; dan
 - Menurunnya Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar 4,80% disebabkan adanya penurunan pendapatan BLUD di tahun 2023.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp17.860.232.669,08 (Rp 510.140.921.487,72 – Rp528.001.154.156,80). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Selisih LO – LRA

(17.860.232.669,08)

Penjelasan Selisih:

➤ Penambahan Beban LO		
✓	Sisa persediaan Tahun 2022 yang telah menjadi beban ditahun 2023	22.691.148.303,13
✓	Beban dibayar dimuka yang telah menjadi beban ditahun 2023	26.919.444,40
✓	Dropping dari kemenkes pada dinas kesehatan	45.555.237,55
✓	Utang belanja barang dan jasa tahun 2023	15.514.348.054,05
✓	Reklasifikasi aset tetap dan beban hibah uang menjadi beban barang dan jasa	7.503.337.164,14
➤ Pengurangan Beban LO:		
✓	Belanja barang dan jasa yang belum menjadi beban dan menjadi sisa persediaan Tahun 2023	25.415.262.530,35
✓	Pelunasan utang belanja barang dan jasa Tahun sebelumnya	17.939.469.905,00
✓	Kapitalisasi dan reklasifikasi beban barang dan jasa ke aset tetap	20.146.036.937,00
✓	koreksi kurang saji beban dibayar dimuka	140.771.500,00

Jumlah Penjelasan Selisih

(17.860.232.669,08)

3. Selisih beban barang dan jasa LO dan belanja LRA dijelaskan sebagai berikut :
- Sisa persediaan barang per 31 Desember 2022 yang telah menjadi beban di tahun 2023 sebesar Rp22.691.148.303,13 terdiri dari:
 - Beban persediaan bahan dan bangunan kontruksi sebesar Rp11.144.000,00;
 - Beban persediaan bahan kimia sebesar Rp55.745.598,50;
 - Beban persediaan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp30.000.000,00;
 - Beban persediaan isi tabung gas sebesar Rp2.664.000,00;
 - Beban persediaan bahan lainnya sebesar Rp4.381.181.309,35;



- 6) Beban persediaan suku cadang alat kedokteran sebesar Rp356.820,00;
- 7) Beban persediaan alat tulis kantor sebesar Rp79.446.078,00;
- 8) Beban persediaan kertas dan cover sebesar Rp67.187.527,00;
- 9) Beban Persediaan bahan cetak pada sebesar Rp954.950.466,50;
- 10) Beban persediaan benda pos sebesar Rp405.000,00;
- 11) Beban persediaan bahan computer sebesar Rp3.160.000,00;
- 12) Beban persediaan perabot kantor sebesar Rp2.619.200,00;
- 13) Beban persediaan alat listrik sebesar Rp23.422.503,00;
- 14) Beban persediaan souvenir/cedera mata sebesar Rp23.500.000,00;
- 15) Beban persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp36.179.753,00;
- 16) Beban persediaan obat-obatan sebesar Rp4.625.796.890,05;
- 17) Beban persediaan obat-obatan lainnya sebesar Rp3.144.735.889,72;
- 18) Beban persediaan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.882.334.034,00; dan
- 19) Beban persediaan barang dan jasa BLUD sebesar Rp7.366.319.234,01.
- b. Beban Dibayar Dimuka yang telah menjadi beban ditahun 2023 sebesar Rp26.919.444,40 merupakan Beban Asuransi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah;
- c. *Dropping* dari Kementrian Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp45.555.237,55 terdiri dari buku KIA sebesar Rp43.635.237,55 dan berupa obat-obatan lainnya berupa paket BMHP uji saring neonatus sebesar Rp1.920.000,00;
- d. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.514.348.054,05 terdiri dari:
 - 1) Utang BMHP Tahun 2023 pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp76.620.525,00;
 - 2) Utang Jasa Tenaga Pendidikan (honor daerah guru swasta) Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp42.600.000,00;
 - 3) Utang Jasa Medis Tahun 2023 sebesar Rp2.519.323.007,00 terdiri dari utang jasa medis Dinas Kesehatan sebesar Rp2.488.670.407,00 dan RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp30.652.600,00;
 - 4) Utang Jasa Tenaga Ahli Tahun 2023 pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp13.000.000,00;
 - 5) Utang Jasa Pengolahan Sampah Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.056.600,00;
 - 6) Utang Tagihan Internet Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.429.950,00;
 - 7) Utang Rekening Penerangan Jalan Umum bulan Desember 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp31.750.619,00;
 - 8) Utang Pemeliharaan Alat Pengolahan Air Kotor Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00; dan
 - 9) Utang Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 sebesar Rp12.791.067.353,05 yaitu utang barang dan jasa BLUD pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp3.743.587.950,05 dan BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp9.047.479.403,00.
- e. Reklasifikasi aset tetap dan Beban Hibah Uang menjadi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp7.503.337.164,14 terdiri dari:



- 1) Reklasifikasi aset tetap ke Beban Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya karena berupa barang ekstrakom sebesar Rp5.362.962.768,14;
 - 2) Reklasifikasi dari Belanja Hibah Uang ke Beban Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya karena berupa barang ekstrakom sebesar Rp197.238.800,00; dan
 - 3) Reklasifikasi aset tetap ke Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya karena berupa barang habis pakai sebesar Rp1.943.135.596,00.
- f. Belanja Barang dan Jasa yang belum menjadi beban dan menjadi sisa persediaan Tahun 2023 sebesar Rp25.415.262.530,35 terdiri dari:
- 1) Persediaan bahan bangunan konstruksi sebesar Rp53.401.726,00;
 - 2) Persediaan bahan kimia sebesar Rp482.720.087,67;
 - 3) Persediaan isi tabung gas sebesar Rp1.598.400,00;
 - 4) Persediaan bahan lainnya sebesar Rp759.274.022,71;
 - 5) Persediaan suku cadang alat kedokteran sebesar Rp5.144.888.536,45;
 - 6) Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp90.012.493,00;
 - 7) Persediaan kertas dan cover sebesar Rp45.609.625,00;
 - 8) Persediaan bahan cetak sebesar Rp847.237.918,00;
 - 9) Persediaan benda pos sebesar Rp810.000,00;
 - 10) Persediaan perabot kantor sebesar Rp39.972.320,00;
 - 11) Persediaan obat-obatan sebesar Rp5.245.445.529,01;
 - 12) Persediaan obat-obatan lainnya sebesar Rp453.664.240,72;
 - 13) Persediaan barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp949.570.714,00;
 - 14) Persediaan bahan pakan dan natura sebesar Rp360.000,00; dan
 - 15) Persediaan barang dan jasa BLUD sebesar Rp11.300.696.917,79.
- g. Pelunasan utang belanja barang dan jasa tahun sebelumnya sebesar Rp17.939.469.905,00 terdiri dari:
- 1) Pelunasan utang isi tabung gas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.216.500,00;
 - 2) Pelunasan utang BMHP pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp106.492.942,00;
 - 3) Pelunasan utang jasa medis RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp209.563.800,00;
 - 4) Pelunasan utang beban jasa pelayanan umum pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.640.800.789,00;
 - 5) Pelunasan utang tagihan air pada Dinas PUPRP sebesar Rp440.100,00;
 - 6) Pelunasan tagihan Listrik pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Sekretariat Daerah sebesar Rp2.030.325.884,00;
 - 7) Pelunasan insentif tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp499.285.713,00;
 - 8) Pelunasan utang iuran jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.069.200,00;
 - 9) Pelunasan utang tanah untuk bangunan tempat kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp757.410.000,00;
 - 10) Pelunasan utang tanah makam pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp141.800.000,00; dan



- 11) Pelunasan utang belanja barang dan jasa BLUD pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp11.526.064.977,00.
- h. Kapitalisasi dan reklasifikasi beban barang dan jasa ke aset tetap sebesar Rp20.146.036.937,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi beban alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya ke aset tetap berupa papan pengumuman dan senter besar *taff led* sebesar Rp29.500.000,00;
 - 2) Reklasifikasi beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat ke aset tetap alat SAR berupa tenda sebesar Rp184.871.300,00;
 - 3) Kapitalisasi beban jasa penanganan prasarana dan sarana umum ke aset tetap berupa jasa fasilitator pelaksanaan pengadaan/pembangunan/rehab sebesar Rp2.124.374.300,00;
 - 4) Reklasifikasi dari Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV berlanggan ke peralatan jaringan karena berupa *seagate ironwolf*, *tp-link archer*, *synologi DS923+*, *apc easy ups bxv* Tahun 2022 sebesar Rp35.555.000,00;
 - 5) Kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural berupa perencanaan pelaksanaan pengadaan pembangunan/rehab sebesar Rp370.596.524,00;
 - 6) Kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan arsitektur berupa perencanaan pelaksanaan pengadaan/pembangunan/rehab sebesar Rp266.737.199,00;
 - 7) Kapitalisasi beban pemeliharaan alat kantor lainnya ke aset tetap berupa papan nama instansi sebesar Rp4.964.586,00;
 - 8) Kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan Gedung kantor ke aset tetap berupa meja tamu, taman dan sebagainya sebesar Rp1.294.235.937,00;
 - 9) Kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung laboratorium ke aset tetap karena berupa rehab bangunan laboratorium sebesar Rp698.895.000,00;
 - 10) Kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan tempat ibadah ke aset tetap berupa rehabilitasi gedung tempat ibadah sebesar Rp106.940.000,00;
 - 11) Kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan ke aset tetap karena berupa rehabilitasi ruang kelas dan sebagainya sebesar Rp8.968.656.600,00;
 - 12) Kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan ke aset tetap karena berupa rehabilitasi gedung perpustakaan sebesar Rp766.111.500,00;
 - 13) Kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan fasilitas umum ke aset tetap karena berupa papan nama kantor, rehab ruang guru dan sebagainya sebesar Rp2.024.678.391,00;
 - 14) Kapitalisasi Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal lainnya ke aset tetap berupa rehabilitasi rumah dinas guru dan sebagainya sebesar Rp3.256.082.000,00; dan
 - 15) Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD berupa perencanaan dan pengawasan pada bangunan pagar RSUD Anuntaloko sebesar Rp13.838.600,00.
- i. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD disebabkan kurang saji beban dibayar dimuka BLUD RSUD Anuntaloko atas sewa 2 unit kendaraan roda 4 dinas dan sewa 9 unit rumah dinas direktur dan dokter sebesar Rp140.771.500,00.

**5.4.2.1.3 Beban Bunga**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Bunga Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.142. Beban Bunga LO TA 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	177.632.209,40	168.181.692,54	9.450.516,86	5,62
Jumlah	177.632.209,40	168.181.692,54	9.450.516,86	5,62

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

Beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri – jangka panjang turun sebesar 5,62% disebabkan beban bunga pinjaman dihitung berdasarkan besarnya pokok pinjaman yang belum dibayarkan. Sisa pokok pinjaman Tahun 2023 lebih kecil bila dibandingkan sisa pokok pinjaman tahun 2022.

2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2023 sebesar Rp19.259.120,00 (Rp177.632.209,40 – Rp158.373.089,00). Hal tersebut disebabkan adanya utang bunga pinjaman luar negeri periode 16 Oktober hingga 31 Desember 2023.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.143. Beban Hibah LO TA 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.336.237.300,00	200.000.000,00	15.136.237.300,00	7.568,12
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	364.000.000,00	0,00	364.000.000,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.665.832.767,00	(1.665.832.767,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.180.127.500,00	10.736.111.140,00	4.444.016.360,00	41,39
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	37.602.846.649,00	7.536.375.381,00	30.066.471.268,00	398,95
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.877.734.803,60	33.608.492.994,00	269.241.809,60	0,80



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.043.905.500,00	1.043.905.500,00	0,00	0,00
Jumlah	103.624.851.752,60	54.790.717.782,00	48.834.133.970,60	89,13

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Hibah tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Beban hibah uang kepada pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 7.568,12% disebabkan adanya bantuan uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam rangka menghadapi pemilihan umum presiden dan legislatif di tahun 2024;
 - Beban hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya mengalami peningkatan sebesar 100% disebabkan melaksanakan kegiatan gebyar PAUD dan pelatihan kelompok kerja tingkat Kabupaten di tahun 2023;
 - Beban hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan mengalami kenaikan sebesar 41,39% disebabkan antara lain hibah uang ke kepolisian dalam rangka pengamanan kegiatan festival durian, hibah uang untuk KONI, KORMI dan lembaga lainnya; dan
 - Beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar mengalami kenaikan sebesar 398,95% disebabkan di tahun 2023 belanja hibah pada SD, SMP, PAUD dan PKBM swasta telah dicatat dalam beban hibah LO sedangkan di tahun 2022 belum dicatat sebagai beban LO.
- Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp795.449.465,40 (Rp103.624.851.752,60 – Rp104.420.301.218,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO – LRA

(795.449.465,40)

Penjelasan Selisih:

➤	Penambahan Beban LO	
✓	Reklasifikasi aset tetap ke beban hibah	246.358.704,00
✓	Utang beban hibah barang Tahun 2023	49.701.985,60
➤	Pengurangan Beban LO:	
✓	Reklasifikasi beban hibah ke aset tetap	1.091.510.155,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	

(795.449.465,40)

- Selisih beban hibah LO dan belanja LRA dijelaskan sebagai berikut:
 - Nonkapitalisasi aset tetap ke beban hibah sebesar Rp246.358.704,00 terdiri dari:



- 1) Nonkapitalisasi aset tetap *home use* ke beban hibah barang berupa ayunan pada TK Alkairat Parigi dan KB Lantibu sebesar Rp10.367.400,00;
 - 2) Nonkapitalisasi aset tetap mebel ke beban hibah berupa belanja meubel pada SD Alkairat Towera sebesar Rp2.166.000,00;
 - 3) Non kapitalisasi rumah negara gol I dan bangunan gedung tempat pendidikan ke beban hibah berupa belanja modal pada SMP Muhammadiyah 1 Parigi Tengah dan PAUD Buranga sebesar Rp156.829.800,00;
 - 4) Nonkapitalisasi aset tetap lainnya ke beban hibah berupa belanja buku umum pada SD Alkhairat Towera, belanja alat musik berupa lalove, kodode dan mbasi-mbasi pada Majelis Taklim Alkautsar dan alat bercorak kesenian lainnya pada Sanggar Tresno Budoyo Kecamatan Mepanga sebesar Rp76.995.504,00.
- b. Utang beban hibah barang Tahun 2023 sebesar Rp49.701.985,60 yaitu utang belanja modal meubel pada sekolah swasta sebesar Rp9.206.000,00 dan utang beban hibah barang kepada Desa Toga sebesar Rp40.495.985,60 yang merupakan kelebihan pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Desa Toga. Sampai dengan 31 Desember 2023 bobot pekerjaan sudah 100,00% namun bobot pembayaran masih sebesar 95,76%.
- c. Reklasifikasi beban hibah menjadi aset tetap sebesar Rp1.091.510.155,00 terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi belanja BOSDA ke aset tetap peralatan dan mesin karena berupa peta, meja sekolah, kompor gas dan lainnya sebesar Rp845.029.255,00;
 - 2) Reklasifikasi belanja BOSDA ke aset tetap lainnya karena berupa buku aljabar, buku teori bilangan sebesar Rp49.242.100,00; dan
 - 3) Reklasifikasi beban hibah ke beban barang dan jasa berupa belanja modal aset tetap lainnya BOSDA sekolah negeri namun tidak mencapai batas kapitalisasi (barang ekstrakom) berupa buku matematika, buku pandai berhitung dan lainnya sebesar Rp197.238.800,00.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.144. Beban Bantuan Sosial LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.739.651.250,00	2.910.633.250,00	(170.982.000,00)	(5,87)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
Jumlah	2.764.651.250,00	2.910.633.250,00	(145.982.000,00)	(5,02)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:



- a. Beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu mengalami penurunan sebesar 5,87% disebabkan berkurangnya jumlah mahasiswa penerima bantuan penyelesaian pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - b. Beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu meningkat 100% merupakan belanja barang yang diserahkan kepada bekas warga binaan.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2023 Rp2.764.651.250,00.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.145. Beban Penyisihan Piutang LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	917.740.666,41	892.868.932,85	24.871.733,56	2,79
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	935.063.792,00	3.030.218,00	932.033.574,00	30.757,97
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.018.063.131,50	(1.018.063.131,50)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	828.484.071,86	296.268.988,53	532.215.083,33	179,64
Jumlah	2.681.288.530,27	2.210.231.270,88	471.057.259,39	21,31

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Beban penyisihan piutang pajak daerah, beban penyisihan retribusi daerah dan beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah meningkat di tahun 2023 disebabkan bertambahnya jumlah pelunasan piutang tahun sebelumnya;
 - b. Berkurangnya beban penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah direklas ke piutang hasil sewa BMD karena salah penempatan kode rekening neraca.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.400.033,91 [Rp2.681.288.530,27 - (Rp15.924.195.349,61 - Rp13.259.306.853,25)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Selisih LO – LRA

(16.400.033,91)

Penjelasan Selisih:

➤ Penambahan Beban LO

✓ Koreksi atas akulasi penyusutan piutang yaang piutangnya tertagih di Tahun 2023 21.436.331,73

➤ Pengurangan Beban LO:

✓ Koreksi ekuitas karena adanya pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas tahun sebelumnya dan kurang catat beban penyisihan piutang non kapitasi BPJS pada Dinas Kesehatan 6.174.335,00

✓ Koreksi ekuitas karena lebih catat piutang pendapatan BLUD dan koreksi kesalahan pencatatan beban penyisihan piutang insentif covid pada RSUD Raja Tombolotutu 14.358.565,40

✓ Koreksi ekuitas karena adanya pelunasan piutang dari penembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung kantor tahun sebelumnya yang tidak dilaporkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.000.000,00

✓ Koreksi ekuitas karena adanya pelunasan piutang dari penembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung kantor tahun sebelumnya yang tidak dilaporkan pada Dinas Sosial 6.997.792,23

✓ Koreksi ekuitas karena adanya pelunasan piutang lain-lain PAD yang sah tahun sebelumnya dan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai penyisihan piutang selama tahun 2017 s.d 2023 dan reklasifikasi atas pencatatan piutang covid tahun 2020 yang baru di catat pada thn 2023 pada BLUD RSUD Anuntaloko 8.578.600,01

✓ Koreksi ekuitas karena lebih catat dan pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun sebelumnya pada RSUD pada RSUD Buluye Napoa'e 783.168,00

Jumlah Penjelasan Selisih

(16.400.033,91)

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.146. Beban Penyusutan dan Amortisasi LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	77.553.690.312,85	126.805.580.661,93	(49.251.890.349,08)	(38,84)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.180.092.545,00	26.556.423.316,00	(3.376.330.771,00)	(12,71)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	77.559.213.177,00	81.765.617.620,39	(4.206.404.443,39)	(5,14)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	460.598.441,91	0,00	460.598.441,91	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.453.922.348,11	4.269.238.839,87	(1.815.316.491,76)	(42,52)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	274.145.610,00	247.882.360,00	26.263.250,00	10,60
Jumlah	181.481.662.434,87	239.644.742.798,19	(58.163.080.363,32)	(24,27)

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan antara lain pengadaaan aset Tahun Anggaran 2023, reklas aset karena kesalahan rekening belanja dan reklas aset tetap ke aset lainnya karena kondisi rusak.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK



terkait Penjelasan atas Neraca pada *Poin 5.3.1.4.7 akumulasi penyusutan aset tetap*; dan

3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Neraca pada *Poin 5.3.1.6.5 akumulasi amortisasi aset tidak berwujud*, dan juga dapat dilihat pada *Lampiran 38*.

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.147. Beban Transfer LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bagi Hasil	2.575.077.892,00	2.708.757.744,00	(133.679.852,00)	(4,94)
Beban Bantuan Keuangan	90.169.561.625,00	76.610.281.932,00	13.559.279.693,00	17,70
Jumlah	92.744.639.517,00	79.319.039.676,00	13.425.599.841,00	16,93

Beban transfer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp13.425.599.831,00 atau sebesar 16,93% jika dibandingkan Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022.

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.148. Beban Transfer Bagi Hasil LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	1.557.394.200,00	1.716.484.241,00	(159.090.041,00)	(9,27)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	1.017.683.692,00	992.273.503,00	25.410.189,00	2,56
Jumlah	2.575.077.892,00	2.708.757.744,00	(133.679.852,00)	(4,94)

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa turun sebesar 9,27%; dan
 - b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota Kepada Pemerintah Desa naik sebesar 2,56%.
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.575.077.892,00.

**5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.149. Beban Bantuan Keuangan LO TA 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	90.169.561.615,00	76.610.281.932,00	13.559.279.683,00	17,70
Jumlah	90.169.561.615,00	76.610.281.932,00	13.559.279.683,00	17,70

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan antara lain karena Belanja Transfer pada Dinas Sosial digunakan untuk program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp241.123.454.490,00 (Rp90.169.561.625,00 - Rp331.293.016.115,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO – LRA**(241.123.454.490,00)****Penjelasan Selisih:****➤ Penambahan Beban LO**

- ✓ Utang belanja bantuan keuangan umum daerah pada Desa Ogoalas tahun 2023 10,00

➤ Pengurangan Beban LO:

- ✓ Tidak diakui pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua 241.123.454.500,00

Jumlah Penjelasan Selisih**(241.123.454.490,00)**

3. Selisih beban transfer bantuan keuangan LO dan belanja LRA dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Utang belanja bantuan dana desa pada Desa Ogoalas merupakan kelebihan pemotongan iuran BPJS Kesehatan terhadap pencairan SP2D Dana Desa Ogoalas dan akan dikembalikan ke Desa Ogoalas melalui BTT di tahun 2024 ;
 - b. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.



5.4.2.3 Beban Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Tidak Terduga tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Tidak Terduga yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.150. Beban Tidak Terduga LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Tidak Terduga	3.051.237.500,00	4.069.572.899,67	(1.018.335.399,67)	(25,02)
Jumlah	3.051.237.500,00	4.069.572.899,67	(1.018.335.399,67)	(25,02)

Beban Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.018.335.399,67 atau sebesar 25,02% jika dibandingkan Beban Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022. Penurunan beban tidak terduga karena di tahun 2023 bencana alam banjir yang terjadi tidak separah di tahun 2022.

5.4.3 Surplus/Defisit Non-Operasional - LO

5.4.3.1 Surplus Non-Operasional

Surplus non operasional Tahun Anggaran 2023 adalah surplus dari kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Tidak terdapat surplus dari kegiatan non operasional lainnya selama Tahun 2023.

5.4.3.2 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan non-operasional di tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.151. Beban Non-Operasional LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	0,00	1.813.990.008,00	(1.813.990.008,00)	(100,00)
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	0,00	1.691.418.057,00	(1.691.418.057,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	3.505.408.065,00	(3.505.408.065,00)	(100,00)

Penjelasan:

Perubahan nilai Defisit Non-Operasional tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan tidak adanya penjualan/penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di tahun 2023.

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak



diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. Pos luar biasa Tahun Anggaran 2023 adalah pendapatan luar biasa dan beban luar biasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Tidak terdapat pendapatan luar biasa dan beban luar biasa selama tahun 2023.

5.4.5 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus/(Defisit) - LO tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari.

Tabel 5.152. Surplus/(Defisit) LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	150.129.287.243,68	120.558.655.542,55
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.408.265.071.037,00	1.126.940.901.739,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	8.015.984.723,31	170.616.321.585,45
➤ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.530.675.190.202,86	1.417.931.740.359,45
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	3.505.408.065,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	35.735.152.801,13	(3.321.269.557,45)

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas LPE pada *Poin 5.6*.

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas LAK Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.



5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.153. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.746.469.941.053,12	1.601.341.080.521,85
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.602.305.728.491,80	1.454.313.759.918,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	144.164.212.561,32	147.027.320.603,44

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5.154. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	23.803.599.245,46	21.836.945.893,41
Pajak Hotel	363.462.880,00	298.257.155,00
Pajak Restoran	2.085.441.275,00	1.948.826.396,20
Pajak Hiburan	38.667.900,00	17.535.000,00
Pajak Reklame	769.658.587,29	649.984.708,05
Pajak Penerangan Jalan	12.193.761.157,00	10.955.174.494,00
Pajak Parkir	24.566.100,00	10.929.900,00
Pajak Sarang Burung Walet	46.318.712,00	41.457.368,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	434.107.767,80	518.873.178,30
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.114.635.907,37	5.761.618.427,86
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.732.978.959,00	1.634.289.266,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Penerimaan Retribusi Daerah	14.626.496.079,00	8.554.953.079,00
Retribusi Jasa Umum	13.588.146.893,00	7.959.136.008,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.368.699.273,00	7.494.797.008,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	231.037.500,00	197.544.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	88.426.000,00	51.200.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	205.939.800,00	204.649.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	21.785.000,00	10.946.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	672.259.320,00	-
Retribusi Jasa Usaha	837.835.600,00	503.569.600,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	220.621.950,00	179.765.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	36.500.000,00	41.500.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	57.260.000,00	37.620.000,00
Retribusi Terminal	53.400.000,00	54.000.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	36.160.000,00	41.420.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	433.893.650,00	149.264.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu	200.513.586,00	92.247.471,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.513.586,00	92.247.471,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.308.124.029,00	5.259.068.360,70
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.308.124.029,00	5.259.068.360,70
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.308.124.029,00	5.067.381.985,70
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	-	191.686.375,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	105.679.385.353,66	98.775.262.063,74
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.000.000,00	-
Jasa Giro	2.536.586.505,41	3.434.602.308,01
Pendapatan Bunga	112.878.961,00	225.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	709.476.493,71	1.290.833.432,07
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	575.101.413,11	1.117.612.008,17
Pendapatan Denda Pajak Daerah	205.079.278,11	186.743.571,20
Pendapatan dari Pengembalian	2.501.136.967,17	951.191.773,59
Pendapatan BLUD	79.427.331.037,15	77.741.572.461,70
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.584.794.698,00	13.827.706.509,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	1.519.743.272.120,00	1.342.698.896.105,00
Dana Perimbangan	1.269.189.959.620,00	1.112.514.280.305,00
Dana Desa	241.123.454.500,00	230.184.615.800,00
Insentif Fiskal	9.429.858.000,00	-
Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	72.551.937.219,00	56.476.667.879,00
Pendapatan Bagi Hasil	64.241.937.219,00	56.476.667.879,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.839.095.634,00	8.280.235.691,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.202.244.126,00	10.548.258.751,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.140.737.249,00	23.502.589.376,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	509.834.022,00	53.685.875,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.550.026.188,00	14.091.898.186,00
Bantuan Keuangan	8.310.000.000,00	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.310.000.000,00	-
Penerimaan Hibah	2.784.127.007,00	5.188.307.081,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	3.344.612.081,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.500.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	28.000.000,00	343.695.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	2.756.127.007,00	-
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		62.550.980.060,00
Lain-lain Pendapatan	-	62.550.980.060,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	-	62.550.980.060,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.746.496.941.053,12	1.601.341.080.521,85

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5.155 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Pembayaran Belanja Pegawai	630.041.917.271,00	606.804.834.573,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	436.939.182.909,00	421.712.886.878,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	76.273.754.936,00	75.877.280.250,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.591.827.227,00	93.523.964.752,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.466.409.466,00	14.786.139.343,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	152.072.733,00	168.603.350,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	565.870.000,00	601.560.000,00
Belanja Pegawai BLUD	52.800.000,00	134.400.000,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	528.001.154.156,80	463.930.556.559,87
Belanja Barang	89.041.942.824,00	59.628.050.015,87
Belanja Jasa	172.567.709.145,00	139.408.494.398,00
Belanja Pemeliharaan	35.704.731.924,00	37.796.206.063,00
Belanja Perjalanan Dinas	97.571.949.697,00	78.798.987.134,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.310.415.268,00	1.272.635.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	53.063.052.950,00	55.095.108.275,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	77.741.352.348,80	91.931.075.674,00
Pembayaran Belanja Bunga	158.373.089,00	168.181.692,54
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	158.373.089,00	168.181.692,54
Pembayaran Belanja Hibah	104.420.301.218,00	67.528.737.267,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.336.237.300,00	200.000.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	364.000.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	87.676.158.418,00	66.284.831.767,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.043.905.500,00	1.043.905.500,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.764.651.250,00	1.669.622.250,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.764.651.250,00	1.669.622.250,00
Belanja Tidak Terduga	3.051.237.500,00	4.708.172.100,00
Belanja Tidak Terduga	3.051.237.500,00	4.708.172.100,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	2.575.077.892,00	2.708.757.744,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.557.394.200,00	1.716.484.241,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.017.683.692,00	992.273.503,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	331.293.016.115,00	306.794.897.732,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	331.293.016.115,00	306.794.897.732,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.602.305.728.491,80	1.454.313.759.918,41

5.5.2

Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.156. Arus Kas dari Aktivitas Investasi***(dalam rupiah)*

URAIAN	2023	2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	27.000.000,00	27.500.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	222.206.397.626,00	175.499.998.170,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(222.179.397.626,00)	(175.472.498.170,66)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Tabel 5.157. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi*(dalam rupiah)*

URAIAN	2023	2022
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.000.000,00	27.500.000,00
Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	27.000.000,00	27.500.000,00
Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00
Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	27.000.000,00	27.500.000,00



Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Tabel 5.158. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	698.220.000,00	149.500.000,00
Belanja Modal Tanah Persil	0,00	90.000.000,00
Belanja Modal Lapangan	698.220.000,00	59.500.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	87.126.556.041,00	59.378.243.109,00
Belanja Modal Alat Besar	315.795.636,00	578.721.710,00
Belanja Modal Alat Angkutan	1.104.867.000,00	2.676.487.620,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	23.386.000,00	234.225.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	5.936.200,00	38.062.500,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.874.034.249,00	9.088.571.878,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	239.511.250,00	923.346.750,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	50.469.998.053,00	20.851.741.517,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	7.709.393.719,00	18.468.691.250,00
Belanja Modal Komputer	5.797.032.870,00	6.239.183.084,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	55.000.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	231.808.920,00	6.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	33.645.000,00	29.962.500,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.499.000,00	188.249.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.316.648.144,00	0,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	48.904.164.451,00	58.628.339.943,66
Belanja Modal Bangunan Gedung	48.412.358.907,00	57.494.488.943,66
Belanja Modal Monumen	0,00	50.000.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	491.805.544,00	1.083.851.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.201.512.634,00	54.814.456.891,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	64.806.529.502,00	34.547.462.791,00
Belanja Modal Bangunan Air	11.453.619.632,00	10.424.044.500,00
Belanja Modal Instalasi	941.363.500,00	9.663.251.700,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	179.697.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.275.944.500,00	2.529.458.227,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.827.211.950,00	1.609.060.427,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	256.885.000,00	26.559.800,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	893.838.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.191.847.550,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Goodwill	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Lisensi dan Frenchise	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Hak Cipta	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Hak Paten	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Kajian	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Investasi BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	222.206.397.626,00	175.499.998.170,66

5.5.3

Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.159. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	700.000.000,00	933.333.333,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(700.000.000,00)	(933.333.333,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Tabel 5.160. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan*(dalam rupiah)*

URAIAN	2023	2022
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Tabel 5.161. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan*(dalam rupiah)*

URAIAN	2023	2022
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	700.000.000,00	933.333.333,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	700.000.000,00	933.333.333,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00



(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00
Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	700.000.000,00	933.333.333,00

5.5.4

Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.162. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	95.451.603.916,00	92.331.863.218,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	91.408.121.284,00	92.473.934.822,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	4.043.482.632,00	(142.071.604,27)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Tabel 5.163. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	95.451.603.916,00	92.331.863.218,00
Iuran Wajib Pajak 1%	3.382.412.998,00	0,00
Iuran Wajib Pajak 8%	23.206.981.552,00	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan Gaji 1%)	13.553.103.225,00	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPP 1%)	734.504.968,00	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPG 1%)	910.119.312,00	0,00
Iuran Kesehatan Perangkat Desa BPJS Kesehatan	556.781.561,00	0,00
JKK	672.243.943,00	0,00
JKM	2.016.724.836,00	0,00
PPh Pasal 21	19.228.544.936,00	92.331.863.218,00
PPh 22	1.891.249.893,00	
PPh 23	753.170.079,00	0,00
PPh 4 (2)	3.025.983.823,00	0,00
PPN	25.519.782.790,00	0,00
Pajak Penghasilan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00
Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
Asuransi Kesehatan	0,00	0,00
PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	95.451.603.916,00	92.331.863.218,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Tabel 5.164. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.408.121.284,00	92.473.934.822,27
Iuran Wajib Pajak 1%	3.377.721.748,00	0,00
Iuran Wajib Pajak 8%	23.206.981.552,00	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan Gaji 1%)	13.557.794.475,00	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPP 1%)	734.504.968,00	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPG 1%)	910.119.312,00	0,00
Iuran Kesehatan Perangkat Desa BPJS Kesehatan	556.781.561,00	0,00
JKK	672.263.267,00	0,00
JKM	2.016.705.512,00	0,00
PPh Pasal 21	19.146.130.109,00	92.331.863.218,00
PPh 22	1.728.553.849,00	0,00
PPh 23	721.341.640,00	0,00
PPh 4 (2)	2.602.270.435,00	0,00
PPN	22.176.365.365,00	0,00
Pajak Penghasilan	0,00	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00
Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
Pembayaran atas Penerimaan Pajak di Bendahara 2022	10.991,00	0,00
pembayaran atas Penerimaan Pajak di Bendahara Blud RJTT 2022	462.500,00	0,00
Penerimaan Pajak di Bendahara Blud RJTT 2021	114.000,00	142.071.604,27
Jumlah Arus Keluar Kas	91.408.121.284,00	92.473.934.822,27

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh RSUD Raja Tombolotutu.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.165. Kenaikan/(Penurunan) Kas

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	144.164.212.561,32	147.027.320.603,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(222.179.397.626,00)	(175.472.498.170,66)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(700.000.000,00)	(933.333.333,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	4.043.482.632,00	(142.071.604,27)
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	(74.671.702.432,68)	(29.520.582.504,49)

**5.5.6 Saldo Awal Kas**

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.166. Saldo Awal Kas*(dalam rupiah)*

URAIAN	2023	2022
Kas di Kas Daerah	82.432.831.215,03	90.490.499.723,23
Kas di Bendahara Penerimaan	2.097.772,20	56.019.472,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	121.962.131,67	192.618,00
Kas di BLUD	9.700.682.284,02	27.506.584.361,32
Kas Dana BOS	363.261.121,57	873.986.917,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	112.514.619,00	3.139.789.952,16
Kas Lainnya	473.491,00	142.071.604,27
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Jumlah Saldo Awal Kas	92.733.822.634,49	122.209.144.647,98

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.167. Koreksi SiLPA Tahun Lalu*(dalam rupiah)*

URAIAN	2023	2022
Koreksi Saldo Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.212.623,66	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD RSUD Anuntaloko	(13.930.315,82)	0,00
Jumlah Koreksi SiLPA Tahun Lalu	(12.717.692,16)	0,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas LP SAL pada **Poin 6.6.4** di bawah.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

**Tabel 5.168. Saldo Akhir Kas***(dalam rupiah)*

URAIAN	2023	2022
Kas di Kas Daerah	2.509.551.842,90	82.432.831.215,03
Kas di Bendahara Penerimaan	6.852.300,20	2.097.772,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.128.000,00	121.962.131,67
Kas di BLUD	9.308.670.323,55	9.700.682.284,02
Kas Dana BOS	383.441.343,00	363.261.121,57
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	313.984.557,00	112.514.619,00
Kas Lainnya	2.880.900.318,00	473.491,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.520.774.143,00	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	20.930.302.827,65	92.733.822.634,49

Saldo akhir kas Tahun 2023 sebesar Rp20.930.302.827,65, saldo akhir tersebut mengalami penurunan sebesar Rp71.803.519.806,84 dari Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp92.733.822.634,49. Saldo akhir tersebut merupakan saldo Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS Kas Dana Kapitasi, Kas Lainnya dan Kas Dana BOK Puskesmas, rincian saldo akhir kas dapat dilihat pada penjelasan atas neraca pada akun aset lancar dan dapat dilihat pada tabel di atas.

5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.169. Ekuitas Awal Tahun 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	2.653.118.181.082,26	2.562.645.074.947,81

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

**5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO**

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.170. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) - LO	35.735.152.801,13	(3.321.269.557,45)

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas LO.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.171. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas Kas	(12.717.692,16)	-
Koreksi Atas Piutang	(27.021.361,32)	10.018.297.283,50
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	14.157.360.114,21
Koreksi Nilai Utang	7.857.009.305,74	(1.807.938.898,20)
Koreksi Aset Tetap	16.914.706.979,00	-
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	18.900.364.840,54	72.059.946.612,01
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	(31.942.704.026,20)	(578.321.992,78)
Koreksi Nilai Persediaan	-	(54.967.426,84)
Jumlah Dampak Kumulatif	11.689.638.045,60	93.794.375.691,90

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penyesuaian.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2023 dan 2022.



Tabel 5.172. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Ekuitas Akhir	2.700.542.971.928,99	2.653.118.181.082,26

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Neraca.



Pengungkapan Informasi yang Tidak Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

Untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai, perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan Laporan Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2006 Pemerintah Daerah Parigi Moutong melakukan perjanjian penerusan pinjaman LOAN IBRD LA Nomor 4786-IND tanggal 20 Oktober 2005 dengan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 Tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 Tanggal 5 Oktober 2023.

Pinjaman tersebut untuk pembiayaan pembangunan Pasar Sentral dan Terminal Toboli sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pasar Sentral Parigi sebesar Rp21.500.000.000,00.
- b. Terminal Toboli sebesar Rp6.500.000.000,00.

Jangka waktu pinjaman adalah 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun dalam 30 kali angsuran persetengah-tahunan pada tanggal 15 April dan tanggal 15 Oktober setiap tahun, dengan angsuran mulai pada tanggal 15 April 2011 berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025 sesuai jadwal angsuran yang terlampir pada perjanjian.

Pemda Parigi Moutong menarik pinjaman sebesar Rp28.000.000.000,00, dan sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp27.300.000.000,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp20.552.329.057,68. Angsuran tersebut dibayar setelah dilakukan rekonsiliasi antara Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yaitu program untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Sejak tahun 2008-2023 Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar di 170 Desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 146 Desa didanai APBN dan 24 Desa didanai APBD. Adapun sumber pendanaan melalui APBN sebesar Rp28.368.602.000,00 dan sumber dana APBD sebesar Rp5.548.899.400,00 serta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp1.075.410.000,00 dan program ini juga terdapat dana masyarakat dalam bentuk uang tunai (*In Cash*) sebesar Rp1.502.760.056,00 serta dalam bentuk tenaga/material (*In Kind*) sebesar Rp6.011.040.224,00. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan baik pra rencana maupun pada pasca kegiatan Program Pamsimas. Sesuai data keberlanjutan Program PAMSIMAS 2008-2017, tercatat status akses sarana air minum yang berfungsi baik sebanyak 113 desa, 31 desa berfungsi sebagian, dan tidak berfungsi sebanyak 5 desa. Dari data yang sama, jumlah pemanfaat program Pamsimas sudah



mencapai 149.569 jiwa dari total jiwa yang direncanakan sebesar 242.345 jiwa, masih ada selisih sebesar 65.523 jiwa, atau jika di persentasekan jumlah jiwa pemanfaat sudah mencapai 62%.

Beberapa sarana dan prasarana dari Pamsimas tersebut diatas disebabkan tidak lain belum optimalnya sebagian masyarakat melakukan pengelolaan dengan baik. Selain itu, masih terdapat desa yang belum mengeluarkan Peraturan Desa untuk mendukung pengelolaan sarana yang telah di bangun. Untuk menangani hal-hal diatas, perlu dilakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan di tingkat masyarakat dan pemerintah Desa khususnya yang berkaitan dengan penanganan SPAM. Hal lain juga yang sangat perlu dilakukan adalah peningkatan pendanaan melalui anggaran APBDes setiap tahunnya khususnya di sektor air minum dan sanitasi agar sarana dapat terjaga dan berkelanjutan.

Penanganan diatas menjadi penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung target Nasional pada tahun 2019 semua masyarakat sudah 100% mempunyai akses air minum yang layak dan akses sanitasi.

Adapun pada tahun 2023 ini, Kabupaten Parigi Moutong merencanakan sebanyak 12 desa yang mendapatkan Program PAMSIMAS yang terdiri dari 10 desa APBN dan 2 desa APBD dengan total anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp4.000.000.000,00 dan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp800.000.000,00.

3. Per 31 Agustus tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menghentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hal ini sesuai dengan surat dari BPJS Kesehatan Nomor 191/X-03/0920 tentang berakhirnya perjanjian kerjasama. Sehingga Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berinisiatif untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial Daerah (Bansosda) untuk mengantisipasi layanan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam BPJS secara mandiri, dengan menerbitkan Peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 37 tahun 2020 tentang Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu. Tanggal 31 Desember 2022 Pemda Kabupaten Parigi Moutong menandatangani perjanjian kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu terkait kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan peserta yang di daftarkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan nomor Perjanjian Kerjasama 440/249.05/DINKES dan 149/KTR/X.03/1221, dalam perjanjian tersebut pemda Parigi Moutong di tahun 2023 hanya mendaftarkan warga penduduk miskin dan tidak mampu dalam kepesertaan JKN sebesar 15.780 jiwa penduduk.

Melihat kemampuan keuangan daerah yang kurang mampu dalam menganggarkan untuk mengikuti semua jumlah warga miskin dan tidak mampu ke dalam program JKN, Pemda Kabupaten Parigi Moutong berinisiatif tetap melanjutkan program Bansosda, sehingga tagihan klaim atas pelayanan warga miskin dan tidak mampu naik sebesar Rp548.762.924,00 atau 6,20% menjadi sebesar Rp9.399.412.751,70 dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp8.850.649.827,70.

Jumlah tagihan Bansosda per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.327.153.815,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.173. Rincian Tagihan Jaminan Sosial Daerah***(dalam rupiah)*

No	Unit Layanan Kesehatan	Saldo Utang Bansosda per 31 Desember 2022	Pengajuan Klaim 2023			Saldo utang Bansosda per 31 Desember 2023
			klaim	Koreksi	pembayaran	
1	Undata Palu	163.592.170,00	175.376.792,00	(481,00)	163.592.170,00	175.376.311,00
2	Anutapura Palu	78.215.552,00	2.819.148,00	0,00	78.215.552,00	2.819.148,00
3	Madani Palu	88.255.533,00	82.991.311,00	0,00	88.255.533,00	82.991.311,00
4	Anuntaloko Parigi	7.824.314.772,70	4.503.234.503,00	(76.097.354,70)	4.527.265.704,00	7.724.186.217,00
5	Raja Tombolotutu Tinombo	258.665.800,00	718.862.929,00	(21.429.601,00)	235.180.300,00	720.918.828,00
6	Puskesmas se-kab. Parigi Moutong	437.606.000,00	243.120.000,00	(59.864.000,00)	0,00	620.862.000,00
Jumlah		8.850.649.827,70	5.726.404.683,00	(157.391.436,70)	5.092.509.259,00	9.327.153.815,00

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan berusaha membayar seluruh tagihan/klaim setelah dilakukan verifikasi lebih dahulu dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya tagihan Bansosda ini menimbulkan potensi utang jasa medis bagi tenaga kesehatan yang bekerja dilingkungan pelayanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Parigi Moutong

Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Momentum penting pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akta Notaris Nomor 33 tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Ada tiga fase yang menandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Fase pertama dilaksanakannya rapat oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga, yakni pada hari minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi pembentukan Kabupaten Parigi Moutong berturut-turut mengadakan audiensi baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Drs. H. Samijono.

Pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat paripurna pembahasan pembentukan 19 kabupaten dan tiga kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185). Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H Aminudin Ponulele M.S melantik Drs H Longki Djanggola, M.Si sebagai Pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibu kota Kabupaten Parigi Moutong.

6.1.1 Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

1. Dasar Hukum dan Tempat Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185). Kantor Bupati Parigi Moutong beralamatkan di Jalan Kampali Nomor 1 Kelurahan Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Richard Arnaldo, SE, M.SA merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dilantik menjadi Penjabat Bupati Parigi Moutong pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tahun 2024 hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang baru, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4105 tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengisi



kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang telah selesai masa jabatannya pada tanggal 10 Oktober 2023.

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong periode 2019-2024 terdiri dari:

Tabel 6.1. Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	Sayutin Budianto	Ketua
2	Faisan Badja	Wakil Ketua
3	Sugeng Salilama	Wakil Ketua

4. Geografis

Kabupaten Parigi Moutong memiliki luas 6.231,85 km² terdiri atas 23 kecamatan pada tahun 2019. Wilayah ini terbentang dari Sausu (Kecamatan paling selatan) sampai di Moutong (kecamatan paling utara). Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Palasa yaitu 613,16 km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Parigi yaitu sebesar 23,50 km². Luas wilayah yang disajikan ini adalah perhitungan berdasarkan *updating* peta Sensus Penduduk (SP) 2010. Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat/wilayah tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Selama tahun 2018, suhu udara maksimum tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada bulan Oktober dan Desember (33,9°C) dan suhu udara maksimum terendah terjadi pada bulan Februari (32,4°C), sementara suhu udara minimum tertinggi terjadi pada bulan September (27,9°C) dan suhu udara minimum terendah terjadi pada bulan November (22,6°C). Kelembaban udara berada dalam rentang 55,1-91,7%, dengan kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu 80,5% dan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan September yaitu 74,4%. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi, dan perputaran arus udara. Rata-rata curah hujan setiap tahun bervariasi, pada tahun 2018 berkisar antara 8,9-81,3 mm³. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 81,3 mm³, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 8,9 mm³. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Juni 2018 yaitu 23 hari.

Secara Geografis Kabupaten Parigi Moutong terletak di pesisir Timur Pulau Sulawesi yang membentang sepanjang Teluk Tomini yang secara geografis terletak pada 0,75°LU (Lintang Utara)-1°LS (Lintang Selatan) dan posisi 120-121,5°BT (Bujur Timur) yang menjadi acuan dari penentu waktu untuk wilayah yang termasuk dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan dilalui oleh garis Khatulistiwa yang terbentang dari Maleali Kecamatan Sausu sampai dengan desa Moutong Timur Kecamatan Moutong sepanjang ± 472 km. Kabupaten Parigi Moutong mempunyai batas wilayah sebagai berikut:



- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Provinsi Gorontalo;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu; dan
- sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tomini.

Secara Topografi Kabupaten Parigi Moutong berada pada ketinggian 0–2900 mdpl dan garis pantai yang memiliki bibir pantai sepanjang 472 km di Teluk Tomini membentang dari ujung Kecamatan Sausu di bagian selatan hingga Kecamatan Moutong yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sisi utara. Bentuk permukaan tanah di daerah Kabupaten Parigi Moutong bervariasi dari dataran sampai pegunungan. Daerah yang mempunyai dataran cukup luas adalah Kecamatan Bolano Lambunu (pemekaran dari Kecamatan Moutong), Kecamatan Sausu dan Kecamatan Tomini.

Keadaan topografi dengan luas kemiringan lahan rata-rata:

- datar (0 – 8)% = 146.134 Ha.
- bergelombang (8 – 15)% = 60.443 Ha.
- curam (15 – 45)% = 142.186 Ha.
- sangat curam (>45)% = 1.97 Ha.

Landform wilayah Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari dataran rendah dan perbukitan serta pegunungan yang membentang sepanjang pantai dari utara sampai selatan dengan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 15 - 375 m.

5. Administratif dan Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Parigi Moutong terbagi atas 23 kecamatan yang membawahi 278 desa dan lima kelurahan. Pada tahun 2018 semua desa/kelurahan sudah mempunyai sarana pemerintahan berupa Kantor Desa maupun Kantor Kelurahan. Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 63 RT dan Rukun Warga (RW) sebanyak 25 RW yang berada di Kecamatan Parigi yang membawahi lima Kelurahan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 tercatat sebanyak 6.589 orang terdiri dari 5.876 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 713 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan rincian menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Golongan Tahun 2022 – 2023

NO	TAHUN	Status Kependidikan	GOLONGAN				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1	2022	PNS	29	1.296	3.658	1.134	6.117
		P3K	0	11	703	0	714
2	2023	PNS	22	1.072	3.669	1.113	5.876
		P3K	0	8	705	0	713

Sumber: Diolah dari Kab. Parigi Moutong dalam angka 2022 dan Database Gaji Desember 2023



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jabatan struktural/eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.3. Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Eselon Tahun 2022-2023

TAHUN	ESELON				JUMLAH
	II	III	IV	V	
2022	36	204	602	0	842
2023	26	209	603	0	838

Sumber: Diolah dari Kab. Parigi Moutong dalam angka 2022 dan Database Gaji Desember 2023

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jenis kelamin yang menduduki jabatan struktural/eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Parigi Moutong Yang Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

ESELON	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
II	19	73,08	7	26,92	26
III	136	65,07	73	34,93	209
IV	343	56,88	260	43,12	603
JUMLAH	498	59,43	340	40,57	838

Sumber: Diolah dari Kab. Parigi Moutong dalam angka 2022 dan Database Gaji Desember 2023

Pada sisi kualitas pegawai, data terakhir menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Kabupaten Parigi Moutong termasuk berkualitas tinggi, dimana jumlah pegawai yang berpendidikan S3/S2/S1/DIV dan Diploma, jauh lebih besar dari kumulatif pegawai yang berpendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Tabel 6.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
SD	6	66,67	3	33,33	9
SMP	55	61,11	35	38,89	90
SMA	1092	46,49	1257	53,51	2349
Diploma I	59	35,12	109	64,88	168



Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Diploma II	31	36,47	54	63,53	85
Diploma III	84	16,90	413	83,10	497
Diploma IV	3	20,00	12	80,00	15
S1	1513	42,25	2068	57,75	3581
S2	20	58,82	14	41,18	34
Tidak Diketahui	2	66,67	1	33,33	3
Jumlah	2865	41,94	3966	58,06	6831

Sumber: Diolah dari Kab. Parigi Moutong dalam angka 2021 dan Database Gaji Desember 2023

Tabel 6.6. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
Diploma I	0	0,00	1	100,00	1
Diploma III	3	30,00	7	70,00	10
S1	182	25,93	520	74,07	702
JUMLAH	185	25,95	528	74,05	713

Sumber: Diolah dari Database Gaji Desember 2023

6. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan pendataan penduduk tahun 2022 sebanyak 443.170 jiwa yang terdiri atas 227.196 jiwa penduduk laki-laki dan 215.974 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Parigi Moutong per tahun 2020–2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,96%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022 mencapai 71 jiwa/km², kepadatan penduduk di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Parigi dengan kepadatan sebesar 1.316 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Moutong sebesar 37 jiwa/km².

7. Alokasi Dana ke Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan



masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengalokasikan dana ke desa. Dana ke desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan APBD yang diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Adapun jenis dana yang di transfer ke desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:

a. Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) memajukan perekonomian desa; (iii) mengentaskan kemiskinan; (iv) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mempunyai 278 Desa mendapatkan Pagu untuk DD sebesar Rp241.374.897.000,00.

Acuan dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2023 di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Dimana penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional kewenangan Desa dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan bencana non alam.

Adapun realisasi Dana Desa hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp241.123.454.500,00 atau 99,90% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp241.374.897.000,00, sisa yang tidak dicairkan sebesar Rp606.716.825,00, Desa yang tidak mencairkan Dana Desa hingga akhir tahun 2023 yaitu Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino sebesar Rp251.442.500,00.

Adapun alasan bagi Desa Kayu Jati tidak sempat mencairkan DD tahap tiganya dikarenakan hasil rekon tahun 2021 Desa Kayu Jati masih terdapat sisa kas yang terdapat di Rekening Kas Desa sehingga tidak dicairkan lagi.

b. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD Kabupaten/Kota melalui Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pengalokasian ADD dalam APBD paling sedikit 10% dari DAU dan DBH setelah di kurangi DAK setiap tahunnya.



Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menganggarkan ADD sebesar Rp77.202.110.200,00 berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.

ADD di prioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa, dan belanja lainnya seperti belanja tak terduga.

Adapun realisasi ADD hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp76.610.281.932,00 atau 99,23% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp77.202.110.200,00. Terdapat 22 Desa yang tidak mencairkan ADD sebesar Rp591.828.268,00, dikarenakan Desa tidak dapat mencapai batas pencapaian pungutan Pajak PBB P2 di desa nya untuk disetorkan ke Kas Daerah.

c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD)

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pengalokasian DBHPDRD dalam APBD paling sedikit 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah setelah setiap tahunnya.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menganggarkan DBHPDRD sebesar Rp2.652.997.431,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp1.610.200.000,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.042.797.431,00, berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.

DBHPDRD diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun realisasi DBHPDRD hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp2.575.077.892,00 atau 97,06% yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah sebesar Rp1.557.394.200,00 dan bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp1.017.683.692,00.

6.1.2 Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Parigi Moutong terbagi dalam 23 Kecamatan, 278 Desa, dan lima Kelurahan.

Dalam menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah terbentuk Perangkat Daerah pada Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2023, jumlah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah 94 satuan kerja, dimana terdiri 58 Perangkat Daerah, 36 Unit kerja. Daftar lengkap entitas akuntansi adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG****Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

Tabel 6.7. Jumlah Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

No.	Entitas Akuntansi	Kode OPD
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.1.1.1
2	Dinas Kesehatan	1.2.1.1
3	Puskesmas Sausu	1.2.1.2.
4	Puskesmas Balinggi	1.2.1.3.
5	Puskesmas Torue	1.2.1.4.
6	Puskesmas Sumbersari	1.2.1.5.
7	Puskesmas Parigi	1.2.1.6.
8	Puskesmas Lompe Ntodea	1.2.1.7.
9	Puskesmas Pangi	1.2.1.8.
10	Puskesmas Siniu	1.2.1.9.
11	Puskesmas Ampibabo	1.2.1.10.
12	Puskesmas Sienjo	1.2.1.11.
13	Puskesmas Kasimbar	1.2.1.12.
14	Puskesmas Tada	1.2.1.13.
15	Puskesmas Tinombo	1.2.1.14.
16	Puskesmas Palasa	1.2.1.15.
17	Puskesmas Tomini	1.2.1.16.
18	Puskesmas Mepanga	1.2.1.17.
19	Puskesmas Ongka	1.2.1.18.
20	Puskesmas Lambunu 1	1.2.1.19.
21	Puskesmas Lambunu 2	1.2.1.20.
22	Puskesmas Taopa	1.2.1.21.
23	Puskesmas Moutong	1.2.1.22.
24	Puskesmas Sidoan	1.2.1.23.
25	Puskesmas Sigenti	1.2.1.24.
26	BLUD-RSUD Anuntaloko	1.2.2.1
27	BLUD-RSUD Raja Tombolotutu	1.2.3.1
28	RSUD Buluye Napoa'e Moutong	1.2.04.1
29	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.1.1
30	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.4.1.1
31	Satuan Polisi Pamong Praja	1.5.1.1
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5.2.1
33	Dinas Sosial	1.6.1.1
34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.1.1.1
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.2.1.1
36	Dinas Ketahanan Pangan	2.3.1.1
37	Dinas Lingkungan Hidup	2.5.1.1
38	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.6.1.1
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.7.1.1

**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG****Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

No.	Entitas Akuntansi	Kode OPD
40	Dinas Perhubungan	2.9.1.1
41	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.10.1.1
42	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	2.11.1.1
43	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.12.1.1
44	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.17.1.1
45	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.1.1.1
46	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	3.2.1.1
47	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	3.3.1.1
48	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.3.2.1
49	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.6.1.1
50	Sekretariat Daerah	4.1.1.1
51	Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan	4.1.1.2
52	Bagian Hubungan Masyarakat	4.1.1.3
53	Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan	4.1.1.4
54	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	4.1.1.5
55	Bagian Perekonomian	4.1.1.6
56	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sda	4.1.1.7
57	Bagian Pemerintahan Umum	4.1.1.8
58	Bagian Umum	4.1.1.9
59	Bagian Layanan Pengadaan	4.1.1.10
60	Inspektorat Daerah	4.2.1.1
61	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.4.1.1
62	Badan Pendapatan Daerah	4.4.2.1
63	Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.5.1.1
64	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.7.1.1
65	Sekretariat Dewan	4.8.1.1
66	Kecamatan Sausu	4.11.1.1
67	Kecamatan Torue	4.11.2.1
68	Kecamatan Parigi Selatan	4.11.3.1
69	Kecamatan Parigi	4.11.4.1
70	Kelurahan Maesa	4.11.4.2
71	Kelurahan Loji	4.11.4.3
72	Kelurahan Bantaya	4.11.4.4
73	Kelurahan Masigi	4.11.4.5

**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG****Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

No.	Entitas Akuntansi	Kode OPD
74	Kelurahan Kampal	4.11.4.6
75	Kecamatan Ampibabo	4.11.5.1
76	Kecamatan Kasimbar	4.11.6.1
77	Kecamatan Tinombo Selatan	4.11.7.1
78	Kecamatan Tinombo	4.11.8.1
79	Kecamatan Palasa	4.11.9.1
80	Kecamatan Mepanga	4.11.10.1
81	Kecamatan Bolano Lambunu	4.11.11.1
82	Kecamatan Moutong	4.11.12.1
83	Kecamatan Toribulu	4.11.13.1
84	Kecamatan Taopa	4.11.14.1
85	Kecamatan Tomini	4.11.15.1
86	Kecamatan Parigi Barat	4.11.16.1
87	Kecamatan Balinggi	4.11.17.1
88	Kecamatan Siniu	4.11.18.1
89	Kecamatan Parigi Utara	4.11.19.1
90	Kecamatan Parigi Tengah	4.11.20.1
91	Kecamatan Ongka Malino	4.11.21.1
92	Kecamatan Bolano	4.11.22.1
93	Kecamatan Sidoan	4.11.23.1
94	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.12.1.1

6.2 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Events*)

Subsequent Events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut.

6.2.1 Hibah dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan perjanjian-perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terdapat perjanjian yang penyalurannya hanya di tahun berjalan tetapi pelaksanaannya di tahun 2023 dan ada yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2024, adapun perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor PHD - 40/MK.7/2018 Tanggal 12 Desember 2018. Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong



dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga petani kecil di perdesaan. Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong setinggi-tingginya sebesar Rp15.041.000.000,00 yang ditarik sesuai ketentuan dan berdasarkan permintaan penyaluran Dana Hibah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada Direktur Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan. Tahun 2022 Dana *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative* (READSI) sebesar Rp4.647.935.900,00, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendanai kegiatan READSI dari APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan penggantianannya kepada Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran hibah yang berasal dari pinjaman luar daerah. Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Khusus (Reksus) di Bank Indonesia sebagai bagian dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023.

Menindaklanjuti keputusan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan pencatatan atas Hibah dari Pemerintah Pusat tersebut dalam LRA dengan rinciannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan CaLK Hibah Dari Pemerintah Pusat.

6.2.2 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/81/BAPENDA-G.ST/2023 Tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2022, menindaklanjuti keputusan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan pencatatan atas piutang Dana Bagi Hasil Provinsi tersebut dalam neraca dengan rinciannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan CaLK Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Audited)

BAB VII PENUTUP

Sebagai Penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong disusun dan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SiLPA) berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2023 sebesar Rp13.960.659.386,65; dan
3. Rincian SiLPA TA 2023 dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 7.1. Rincian SiLPA TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
- Kas di Kas Daerah	2.509.551.842,90
- Kas di bendahara Penerimaan SKPD	6.852.300,20
- Kas di bendahara Pengeluaran SKPD	6.128.000,00
- Kas di Rek BLUD RSUD Anuntaloko	4.789.265.126,35
- Kas di Rek BLUD RSUD Raja Tombolotutu	4.519.405.197,20
- Kas Dana BOS	383.441.343,00
- Kas di Rek Dana Kapitasi JKN FKTP	313.984.557,00
- Kas Dana BOK Puskesmas	5.520.774.143,00
- Kas Lainnya	2.880.900.318,00
Jumlah	20.930.302.827,65
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan PPh	4.119.814.457,00
- Utang Karena Masih Ada Sisa Saldo Pada Kas Bendahara Pengeluaran	2.849.828.984,00
SILPA (1)	13.960.659.386,65

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 disampaikan untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


BUPATI PARIGI MOUTONG
RICHARD ARNALDO

LAMPIRAN 1

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR
TAHUN 2023

(dalam persen)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PD PENGAMPU	CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN	
		KEUANGAN	KINERJA
PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80,05	100,00
<i>Rata-rata Pendidikan</i>		<i>80,05</i>	<i>100,00</i>
KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	92,15	88,01
	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	96,23	100,00
	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	87,50	91,97
	RSUD BULUYE NAPOA'E MOUTONG	88,51	98,53
<i>Rata-rata Kesehatan</i>		<i>91,10</i>	<i>94,63</i>
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	85,02	91,60
<i>Rata-rata Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>		<i>85,02</i>	<i>91,60</i>
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	95,27	91,76
<i>Rata-rata Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>		<i>95,27</i>	<i>91,76</i>
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	92,96	76,90
	BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH	99,00	100,00
<i>Rata-rata Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>		<i>95,98</i>	<i>88,45</i>
SOSIAL	DINAS SOSIAL	99,28	96,24
<i>Rata-rata Sosial</i>		<i>99,28</i>	<i>96,24</i>
<i>Total Rata-rata Perangkat Daerah</i>		<i>91,60</i>	<i>93,50</i>
<i>Total Rata-rata Urusan</i>		<i>91,12</i>	<i>93,78</i>

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR
TAHUN 2023

(dalam persen)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PD PENGAMPU	CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN	
		KEUANGAN	KINERJA
TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	80,37	94,93
<i>Rata-rata Tenaga Kerja</i>		<i>80,37</i>	<i>94,93</i>
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	98,34	99,33
<i>Rata-rata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>		<i>98,34</i>	<i>99,33</i>
PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	75,59	102,63
<i>Rata-rata Pangan</i>		<i>75,59</i>	<i>102,63</i>
PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	85,02	91,60
<i>Rata-rata Pertanahan</i>		<i>85,02</i>	<i>91,60</i>
LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	99,47	109,79
<i>Rata-rata Lingkungan Hidup</i>		<i>99,47</i>	<i>109,79</i>
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77,65	97,92
<i>Rata-rata Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>		<i>77,65</i>	<i>97,92</i>
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	99,34	97,14
<i>Rata-rata Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>		<i>99,34</i>	<i>97,14</i>
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	98,34	99,33
<i>Rata-rata Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>		<i>98,34</i>	<i>99,33</i>
PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	96,81	84,33
<i>Rata-rata Perhubungan</i>		<i>96,81</i>	<i>84,33</i>
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	98,57	93,84
<i>Rata-rata Komunikasi dan Informatika</i>		<i>98,57</i>	<i>93,84</i>
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	98,39	96,00
<i>Rata-rata Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>		<i>98,39</i>	<i>96,00</i>
PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	97,22	108,89
<i>Rata-rata Penanaman Modal</i>		<i>97,22</i>	<i>108,89</i>
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	98,60	100,00
<i>Rata-rata Kepemudaan dan Olahraga</i>		<i>98,60</i>	<i>100,00</i>
KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80,05	100,00
<i>Rata-rata Kebudayaan</i>		<i>80,05</i>	<i>100,00</i>
PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	97,67	100,00
<i>Rata-rata Perpustakaan</i>		<i>97,67</i>	<i>100,00</i>
KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	97,67	100,00
<i>Rata-rata Kearsipan</i>		<i>97,67</i>	<i>100,00</i>
<i>Total Rata-Rata Perangkat Daerah</i>		<i>92,44</i>	<i>98,48</i>
<i>Total Rata-Rata Urusan</i>		<i>92,44</i>	<i>98,48</i>

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
TAHUN 2023

(dalam persen)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PD PENGAMPU	CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN	
		KEUANGAN	KINERJA
KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,93	97,14
<i>Rata-rata Kelautan dan Perikanan</i>		97,93	97,14
PARIWISATA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	98,60	100,00
<i>Rata-rata Pariwisata</i>		98,60	100,00
PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	94,21	96,79
PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	98,63	99,30
<i>Rata-rata Pertanian</i>		96,42	98,05
PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	86,74	119,21
<i>Rata-rata Perdagangan</i>		88,89	89,17
PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	86,74	119,21
<i>Rata-rata Perindustrian</i>		86,74	119,21
TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	80,37	94,93
<i>Rata-rata Transmigrasi</i>		80,37	94,93
<i>Total Rata-Rata Perangkat Daerah</i>		91,89	103,80
<i>Total Rata-Rata Urusan</i>		91,49	99,75

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN 2023

(dalam persen)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PD PENGAMPU	CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN	
		KEUANGAN	KINERJA
PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	97,89	100,00
<i>Rata-rata Perencanaan</i>		<i>97,89</i>	<i>100,00</i>
KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH	98,15	95,55
KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	97,71	89,75
<i>Rata-rata Keuangan</i>		<i>97,93</i>	<i>92,65</i>
KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	96,28	100,00
<i>Rata-rata Kepegawaian</i>		<i>96,28</i>	<i>100,00</i>
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	97,58	100,00
<i>Rata-rata Pendidikan dan Pelatihan</i>		<i>97,58</i>	<i>100,00</i>
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	99,74	100,00
<i>Rata-rata Penelitian dan Pengembangan</i>		<i>99,74</i>	<i>100,00</i>
<i>Total Rata-Rata Perangkat Daerah</i>		<i>97,89</i>	<i>97,55</i>
<i>Total Rata-Rata Urusan</i>		<i>97,88</i>	<i>98,53</i>

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UNSUR KEWILAYAHAN
TAHUN 2023

(dalam persen)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PD PENGAMPU	CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN	
		KEUANGAN	KINERJA
KECAMATAN	KECAMATAN SAUSU	48,42	20,00
KECAMATAN	KECAMATAN TORUE	71,39	77,30
KECAMATAN	KECAMATAN PARIGI SELATAN	68,30	36,44
KECAMATAN	KECAMATAN PARIGI	99,20	100,00
KECAMATAN	KECAMATAN AMPIBABO	70,95	25,98
KECAMATAN	KECAMATAN KASIMBAR	71,52	61,40
KECAMATAN	KECAMATAN TINOMBO SELATAN	98,99	0,00
KECAMATAN	KECAMATAN TINOMBO	73,21	57,68
KECAMATAN	KECAMATAN PALASA	98,50	96,15
KECAMATAN	KECAMATAN MEPANGA	71,65	63,50
KECAMATAN	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU	96,98	94,64
KECAMATAN	KECAMATAN MOUTONG	98,31	86,67
KECAMATAN	KECAMATAN TORIBULU	12,90	0,00
KECAMATAN	KECAMATAN TAOPA	97,46	96,80
KECAMATAN	KECAMATAN TOMINI	98,60	87,64
KECAMATAN	KECAMATAN PARIGI BARAT	51,65	84,89
KECAMATAN	KECAMATAN BALINGGI	98,59	100,00
KECAMATAN	KECAMATAN SINIU	98,36	0,00
KECAMATAN	KECAMATAN PARIGI UTARA	98,64	100,00
KECAMATAN	KECAMATAN PARIGI TENGAH	85,93	65,74
KECAMATAN	KECAMATAN ONGKA MALINO	98,18	100,00
KECAMATAN	KECAMATAN BOLANO	98,46	93,75
KECAMATAN	KECAMATAN SIDOAN	94,59	0,00
Rata-rata Kecamatan		82,64	62,98

LAMPIRAN 6

**RINCIAN BELANJA PEGAWAI YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023, PERSENTASE CAPAIAN
REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH**

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		%	TAHUN 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.387.592.163,00	3.331.706.373,00	98,35	3.310.625.749,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.765.942.560,00	2.688.161.412,00	97,19	2.767.878.546,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.259.486.494,00	2.210.718.290,00	97,84	2.134.909.792,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.152.706.854,00	5.895.419.315,00	95,82	6.049.749.184,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	56.311.512.247,00	53.549.818.031,00	95,10	41.081.297.131,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.746.517.426,00	4.560.398.024,00	96,08	5.167.916.786,00
7	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	28.990.225.262,00	26.293.923.772,00	90,70	23.808.032.650,00
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.973.211.173,00	2.882.529.061,00	96,95	3.047.860.295,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.630.845.027,00	3.583.338.169,00	98,69	3.503.888.269,00
10	DINAS KESEHATAN	61.407.433.002,00	59.344.929.011,00	96,64	56.756.837.371,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.439.936.925,00	2.358.735.273,00	96,67	2.323.482.860,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.579.823.684,00	2.543.842.192,00	98,61	2.529.274.567,00
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.538.188.460,00	2.500.241.157,00	98,50	2.496.330.704,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.019.643.605,00	2.999.178.749,00	99,32	2.908.520.315,00
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.470.025.096,00	3.364.373.670,00	96,96	3.627.344.618,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	12.262.472.597,00	12.083.276.984	98,54	12.261.723.292,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.509.494.535,00	3.435.299.974,00	97,89	3.428.729.410,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.979.323.655,00	4.867.456.962,00	97,75	5.060.716.952,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.150.266.871,00	3.063.187.456,00	97,24	3.037.257.024,00
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	302.035.048.566,00	293.572.713.611,00	97,20	289.174.587.575,00
21	DINAS PERHUBUNGAN	6.077.250.575,00	5.943.051.957,00	97,79	5.956.907.346,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.933.660.768,00	3.875.428.923,00	98,52	3.869.251.235,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.726.780.107,00	3.633.037.383,00	97,48	3.863.356.073,00
24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.865.739.822,00	2.819.279.853,00	98,38	3.080.673.386,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.347.857.456,00	4.270.736.098,00	98,23	4.362.740.601,00
26	DINAS SOSIAL	2.943.483.158,00	2.853.312.905,00	96,94	2.786.087.622,00
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	11.819.197.999,00	11.671.428.833,00	98,75	11.906.511.393,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.619.362.729,00	2.566.364.607,00	97,98	2.595.319.299,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	8.045.409.422	8.030.900.178,00	99,82	8.260.941.322,00
30	KECAMATAN AMPIBABO	1.770.805.761,00	1.729.190.332,00	97,65	1.659.609.591,00
31	KECAMATAN BALINGGI	1.621.925.925,00	1.602.216.418,00	98,78	1.477.424.336,00
32	KECAMATAN BOLANO	1.394.098.249,00	1.370.067.604,00	98,28	1.390.358.792,00
33	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU	1.717.696.646,00	1.689.273.860,00	98,35	1.701.452.999,00
34	KECAMATAN KASIMBAR	1.858.768.386,00	1.858.025.232,00	99,96	1.809.677.658,00
35	KECAMATAN MEPANGA	1.685.407.717,00	1.658.793.684,00	98,42	1.533.170.623,00
36	KECAMATAN MOUTONG	1.788.381.920,00	1.760.340.983,00	98,43	1.895.278.162,00
37	KECAMATAN ONGKA MALINO	1.277.668.959,00	1.264.819.825,00	98,99	1.310.342.984,00
38	KECAMATAN PALASA	1.434.557.677,00	1.411.997.013,00	98,43	1.428.447.134,00
39	KECAMATAN PARIGI	4.829.245.415,00	4.790.176.359,00	99,19	4.964.910.176,00
40	KECAMATAN PARIGI BARAT	1.383.957.232,00	1.345.922.077,00	97,25	1.395.131.357,00
41	KECAMATAN PARIGI SELATAN	1.532.264.451,00	1.512.484.706,00	98,71	1.416.343.749,00
42	KECAMATAN PARIGI TENGAH	2.184.201.603,00	2.164.791.953,00	99,11	2.047.339.621,00
43	KECAMATAN PARIGI UTARA	1.543.146.704,00	1.518.458.225,00	98,40	1.527.797.592,00
44	KECAMATAN SAUSU	1.942.484.184,00	1.919.638.686,00	98,82	1.941.949.034,00
45	KECAMATAN SIDOAN	1.354.643.550,00	1.330.118.390,00	98,19	1.385.307.861,00
46	KECAMATAN SINIU	1.361.425.145,00	1.336.537.807,00	98,17	1.464.281.259,00
47	KECAMATAN TAOPA	1.367.433.878,00	1.347.750.952,00	98,56	1.401.323.483,00
48	KECAMATAN TINOMBO	1.648.178.983,00	1.635.901.907,00	99,26	1.769.301.490,00
49	KECAMATAN TINOMBO SELATAN	1.965.284.193,00	1.943.381.672,00	98,89	1.739.029.786,00
50	KECAMATAN TOMINI	1.361.990.849,00	1.341.777.231,00	98,52	1.218.291.703,00
51	KECAMATAN TORIBULU	1.266.869.981,00	1.219.581.025,00	96,27	1.212.594.968,00
52	KECAMATAN TORUE	1.677.268.166,00	1.655.498.815,00	98,70	1.599.146.002,00
53	RSUD BULUYE NAPOA"E MOUTONG	2.373.354.283,00	2.198.737.821,00	92,64	1.679.440.104,00
54	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	6.399.650.138,00	4.393.927.576,00	68,66	4.402.196.031,00
55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.011.090.423,00	7.881.116.030,00	98,38	8.278.260.075,00
56	SEKRETARIAT DAERAH	13.967.455.379,00	13.892.496.606,00	99,46	12.976.563.640,00
57	SEKRETARIAT DPRD	21.677.918.178	21.476.106.259,00	99,07	19.021.112.996,00
		651.385.612.213,00	630.041.917.271,00	96,72	606.804.834.573,00

LAMPIRAN 7

RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023, PERSENTASE CAPAIAN REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		%	TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.545.316.248,00	6.243.726.352,00	95,39	4.149.458.725,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.573.252.250,00	3.554.703.816,00	99,48	2.284.320.598,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.505.547.920,00	4.483.484.114,00	99,51	3.109.854.990,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.041.651.617,00	7.958.398.749,00	98,96	7.360.551.752,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	9.011.468.429,00	8.670.995.688,00	96,22	8.215.038.937,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.366.651.801,00	9.339.225.551,00	99,71	8.933.799.296,00
7	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	70.923.362.682,00	74.340.655.591,00	104,82	92.412.754.281,00
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.744.428.746,00	13.592.561.171,00	98,90	12.665.643.960,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.941.319.380,00	2.887.930.727,00	98,18	3.247.988.440,00
10	DINAS KESEHATAN	104.785.384.911,00	92.850.453.183,00	88,61	71.720.927.744,59
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.415.689.870,00	3.897.422.173,00	60,75	2.463.289.977,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.519.649.347,00	4.451.880.865,00	98,50	4.509.191.052,00
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.334.708.265,00	4.295.178.315,00	99,09	4.346.813.981,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.108.696.850,00	6.079.560.265,00	99,52	2.939.860.181,00
15	DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.621.518.663,00	5.598.383.087,00	99,59	6.907.848.059,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	17.839.959.378,00	17.536.546.376	98,30	17.891.105.224,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.187.685.912,00	8.177.515.031,00	99,88	6.069.456.428,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.295.851.523,00	12.163.229.566,00	98,92	8.585.055.646,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.399.796.211,00	2.394.068.790,00	99,76	2.654.177.541,00
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	106.754.750.026,00	97.196.733.053,00	91,05	85.832.525.627,00
21	DINAS PERHUBUNGAN	3.630.236.649,00	3.562.442.883,00	98,13	3.534.008.597,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.681.500.261,00	7.346.629.237,00	84,62	3.823.939.321,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.400.300.688,00	2.348.364.542,00	97,84	1.384.713.528,00
24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.575.114.442,00	2.567.543.306,00	99,71	1.922.511.181,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6.361.067.214,00	6.336.492.422,00	99,61	2.178.563.022,00
26	DINAS SOSIAL	4.773.357.849,00	4.747.256.754,00	99,45	2.584.971.038,00
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	14.324.042.050,00	12.942.774.986,00	90,36	7.223.967.080,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.668.958.590,00	1.583.422.599,00	94,87	1.709.733.561,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	5.943.695.172	5.928.939.671,00	99,75	4.111.695.734,00
30	KECAMATAN AMPIBABO	304.137.052,00	303.694.840,00	99,85	407.921.519,00
31	KECAMATAN BALINGGI	293.450.628,00	285.974.398,00	97,45	367.947.870,00
32	KECAMATAN BOLANO	369.907.529,00	366.715.872,00	99,14	400.219.225,00
33	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU	334.999.552,00	334.525.176,00	99,86	385.365.756,00
34	KECAMATAN KASIMBAR	302.699.502,00	278.068.094,00	91,86	272.464.892,00
35	KECAMATAN MEPANGA	316.465.644,00	315.130.844,00	99,58	368.751.440,00
36	KECAMATAN MOUTONG	334.715.247,00	326.802.434,00	97,64	382.945.168,00
37	KECAMATAN ONGKA MALINO	335.774.805,00	319.671.452,00	95,20	348.473.596,00
38	KECAMATAN PALASA	323.499.902,00	319.574.332,00	98,79	352.131.926,00
39	KECAMATAN PARIGI	2.591.897.757,00	2.569.043.082,00	99,12	2.252.070.116,00
40	KECAMATAN PARIGI BARAT	309.999.746,00	253.703.516,00	81,84	373.637.348,00
41	KECAMATAN PARIGI SELATAN	284.754.902,00	273.131.214,00	95,92	348.807.236,00
42	KECAMATAN PARIGI TENGAH	304.104.000,00	304.043.600,00	99,98	413.858.287,00
43	KECAMATAN PARIGI UTARA	302.094.000,00	301.614.200,00	99,84	354.008.006,00
44	KECAMATAN SAUSU	291.278.000,00	278.863.641,00	95,74	367.652.073,00
45	KECAMATAN SIDOAN	265.030.086,00	201.482.368,00	76,02	273.585.199,00
46	KECAMATAN SINIU	310.000.000,00	307.529.204,00	99,20	368.098.975,00
47	KECAMATAN TAOPA	332.499.550,00	328.930.780,00	98,93	385.714.528,00
48	KECAMATAN TINOMBO	464.000.644,00	456.022.324,00	98,28	437.384.747,00
49	KECAMATAN TINOMBO SELATAN	403.999.762,00	401.940.824,00	99,49	535.037.400,00
50	KECAMATAN TOMINI	359.999.847,00	356.021.194,00	98,89	331.467.673,00
51	KECAMATAN TORIBULU	309.999.544,00	309.907.144,00	99,97	380.884.894,00
52	KECAMATAN TORUE	310.499.719,00	305.088.368,00	98,26	389.833.704,00
53	RSUD BULUYE NAPOA"E MOUTONG	4.496.877.913,00	3.955.984.508,00	87,97	3.206.754.102,28
54	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	12.740.369.425,00	11.777.032.331,80	92,44	7.796.301.564,00
55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.609.657.841,00	3.503.065.582,00	97,05	2.676.628.913,00
56	SEKRETARIAT DAERAH	46.871.101.871,00	46.238.638.800,00	98,65	36.145.412.050,00
57	SEKRETARIAT DPRD	20.891.669.754	19.952.435.171,00	95,50	18.833.432.851,00
		556.640.447.166,00	528.001.154.156,80	94,85	463.930.556.559,87

LAMPIRAN 8

RINCIAN BELANJA HIBAH YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023, PERSENTASE CAPAIAN REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

(dalam rupiah)

No.	OPD	Penerima	Nomor SK/NPHD	Tentang	Tahun 2023		%	Tahun 2022
					Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya				0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KPU	100.1.4/6425/BHP-PM/2023 dan 1133/KU.07-NK/7208/2023	Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023/2024	30.578.905.500,00	16.800.142.800,00	54,94	1.043.905.500,00
		BAWASLU	100.3.7/10/BAWASLU dan 107/KU.00.01/ST.08/11/2023	Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023/2024				
		KOREM 132 Tadulako	000.4.3.2/1107/BADAN KESBANGPOL	Penerima Bantuan Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada KOREM 132/TADULAKO Tahun 2023				
		KOREM 132 Tadulako	000.4.3.2/1107/Badan KESBANGPOL	Penerima Bantuan Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada KOREM 132/TADULAKO Tahun 2023				
		Partai Politik	200.45/691/KESBANGPOL	Besaran Bantuan Kepada Partai Politik Tahun 2019-2024 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Parigi Moutong TA 2023				
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				0,00	0,00	0,00	783.697.200,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan				0,00	0,00		441.139.000,00
5	Dinas Kesehatan	TP PKK Kab. Parigi Moutong	000.4.3.2/868/BID.SEKR ETARIAT		1.296.000.000,00	1.296.000.000,00	100,00	575.000.000,00
		Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Parigi Moutong	000.4.3.2/868/BID.SEKR ETARIAT	Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang pada Dinas Kesehatan Tahun 2023				
		PMI Kab. Parigi Moutong	000.4.3.2/868/BID.SEKR ETARIAT	Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang pada Dinas Kesehatan Tahun 2023				
6	Dinas Ketahanan Pangan	Kelompok	500.1.1/1030/DKP	Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lantai Jemur pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023	1.781.982.000,00	1.781.835.000,00	99,99	6.847.000.000,00
		Kelompok	500.1.1/1031/DKP	Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023				
		Kelompok	520/03/Bid. Ketersediaan	Kelompok Penerima Bantuan Hand Sprayer dan Mesin Paras pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023				
		Kelompok	500.1.4.3/994/Bid. KKP	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Lokus Stunting Penerima Manfaat Bibit Kegiatan Sosialisasi Teras Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023				
		Kelompok	500.1.4.3/984/Bid. KKP	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Lokus Stunting Penerima Manfaat Bibit Kegiatan Sosialisasi Teras Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023				

No.	OPD	Penerima	Nomor SK/NPHD	Tentang	Tahun 2023		%	Tahun 2022 Realisasi
					Anggaran	Realisasi		
7	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok	600.4/390/DISLH	Tentang Penerima Hibah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	30.000.000,00	29.860.000,00	99,53	0,00
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi	000.4.3.2/272/SEKRETA RIAT	Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang dan Dalam Bentuk Barang Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023	5.757.951.000,00	5.746.859.800,00	99,81	5.871.615.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Desa	618.45/571/DIS.PUPRP	Desa Sasaran Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Tahun 2023	10.096.028.728,00	9.992.115.718,00	98,97	16.690.747.486,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	POLRES Parigi Moutong	820/284/PEMDES dan Nomor : 03/VII/2023		1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	1.768.450.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan				0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	420.45/644/DISDIKBUD	Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesejahteraan Tahun 2023	31.917.183.460,00	36.091.998.100,00	113,08	20.586.629.981,00
		Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parigi Moutong (KPMIPM) di Gorontalo	000.4.3.2/881/DISDIKBUD	Penerima Bantuan Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023				
13	Dinas Perhubungan	POLRES Parigi Moutong	500.11/728/Dinas Perhubungan	Hibah berupa uang kepada Kepolisian Resor Parigi Moutong pada Dinas Perhubungan Tahun 2023	322.675.000,00	200.000.000,00	61,98	250.000.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kelompok Tani	524.45/951/DPKH	Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	712.500.000,00
15	Dinas Sosial				0,00	0,00	0,00	1.241.011.000,00
16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kelompok Tani	500.6.45/746/Bid.Hortibun	Penerima Bantuan Pestisida Nabati Kegiatan Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun 2023	27.498.900.000,00	25.580.989.800,00	93,03	6.164.544.100,00
		Kelompok Tani	500.6.45/746/Bid.Hortibun	Penerima Bantuan Mesin Power Spayer Kegiatan Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun 2023				
		Kelompok Tani	500.6.1/12/.39/DITPHP	Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi Kelompok Tani/Pelaku Usaha Penerima Bantuan Timbangan 100 Kilogram Tahun 2023				
		Kelompok Tani	520/02.03/DISTPHP	Penerima Hibah Bibit Alpukat Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun 2023				
		Kelompok Tani	520/02.12/DISTPHP	Penerima Hibah Bibit Durian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun 2023				
		Kelompok Tani	520/30.12/DISTPHP	Penerima Hibah Bibit Kakao Sambung Pucuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun 2023				
		Kelompok Tani	520/34.45/510/DISTPHP	Penerima Hibah Bibit Kakao Sambung Pucuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun 2023				

No.	OPD	Penerima	Nomor SK/NPHD	Tentang	Tahun 2023		%	Tahun 2022 Realisasi
					Anggaran	Realisasi		
		Kelompok Tani	520/34.45/508/DISTPH P	Penerima Hibah Bibit Mangga Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun 2023				
		Kelompok Tani	520/4.5/436/DTPHP	Penerima Manfaat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2023				
		Kelompok Tani	520/05.30/PSP. Peny	Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pertanian Tahun 2023				
		Kelompok Tani	520/05.31/PSP. Peny	Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2023				
		Kelompok Tani	521.2.45/168/DTPHP	Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pogram Tematik Penguatan Kawasan Sentral Produksi Pangan Pertanian, Perikanan dan Hewani Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2023				
17	Satuan Polisi Pamong Praja	POLRES Parigi Moutong	900.45/519/SAT POL PP dan DAMKAR	Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resort Parigi Moutong Tahun 2023	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	200.000.000,00
		POLRES Parigi Moutong	000.4.3.2/1223/SAT POL PP dan DAMKAR F33	Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resort Parigi Moutong Tahun 2023				
		KODIM 1306 Kota Palu	000.4.3.2/1225/SAT POL PP dan DAMKAR F34	Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komando Distrik Militer 1306/Kota Palu Tahun 2023				
		KODIM 1306 Kota Palu	000.4.3.2/1224/SAT POL PP dan DAMKAR	Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komando Distrik Militer 1306/Kota Palu Tahun				
18	Bagian Kesejahteraan				5.209.500.058,00	5.200.500.000,00	99,83	4.252.498.000,00
					116.189.125.746	104.420.301.218,00	89,87	67.528.737.267,00

LAMPIRAN 9

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023, PERSENTASE CAPAIAN REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

(dalam rupiah)

OPD	Penerima	Nomor SK/NPHD	Tentang	Tahun 2023		%	Tahun 2022 Realisasi
				Anggaran	Realisasi		
Dinas Kelautan dan Perikanan	Taruna Taruni Poltek	- 523/1,009/DISLUTKA	Penerimaan Taruna Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan AUP Jakarta pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	300.000.000,00	283.370.000,00	94,46	180.000.000,00
	Taruna Taruni Poltek	- 523/1,010/DISLUTKA	Penerimaan Taruna Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023				
	Taruna Taruni Poltek	- 523/1,011/DISLUTKA	Penerimaan Taruna Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mahasiswa	400.3.3.2/974/DISDIKB	Penerima Bantuan Sosial Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Dinas Perhubungan				0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
Dinas Sosial	Mahasiswa	- 421.4/0064 BKPSDM	Bantuan Pendidikan Komunitas Adat Terpencil Pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu	2.142.077.250,00	2.125.277.250,00	99,22	1.183.472.250,00
	Mahasiswa	- 421.4/0065 BKPSDM	Bantuan Pendidikan Komunitas Adat Terpencil Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa				
	Mahasiswa	- 421.4/0066 BKPSDM	Bantuan Pendidikan Pelaku Utama Anak Perikanan Bela Negara Pada Program Studi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone				
	Mahasiswa	- 421.4/0067 BKPSDM	Bantuan Pendidikan Komunitas Adat Terpencil Pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Kebidanan, Farmasi dan Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur Makasar				
	Individu	- 900/313.2/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.3/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.4/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				

OPD	Penerima	Nomor SK/NPHD	Tentang	Tahun 2023		%	Tahun 2022 Realisasi
				Anggaran	Realisasi		
	Individu	- 900/313.5/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.6/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.7/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.8/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.9/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.10/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
	Individu	- 900/313.11/Bid.Yanreh	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
Dians Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Individu	910/07/04/SEK	Penetapan Penerima Bantuan Sosial Kepada Individu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Program Penetapan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong TA 2023	150.000.000,00	30.000.000,00	20,00	50.000.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Lembaga dan Rumah Ibadah	- 500.17/767/BAGIAN.I	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos	226.004.000,00	226.004.000,00	100,00	120.150.000,00
		- 900.9.11.3/1098/Bag.K	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan Bansos				
				2.918.081.250,00	2.764.651.250,00	94,74	1.669.622.250,00

LAMPIRAN 10

**RINCIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023, PERSENTASE CAPAIAN
REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH**

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		%	TAHUN 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	410.901.900,00	410.529.250,00	99,91	59.329.500,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39.266.000,00	39.254.000,00	99,97	126.770.416,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	138.895.700,00	138.895.700,00	100,00	20.975.000,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	484.576.137,00	478.896.567,00	98,83	783.894.912,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	378.512.100,00	378.300.600,00	99,94	239.970.900,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	235.990.000,00	234.210.300,00	99,25	335.211.616,00
7	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	37.472.749.650,00	36.949.712.734,00	98,60	1.243.047.990,00
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	71.885.000,00	71.885.000,00	100,00	198.738.904,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	465.547.000	465.547.000,00	100,00	120.087.954,00
10	DINAS KESEHATAN	16.134.584.210,00	15.817.875.014,00	98,04	23.369.712.472,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.015.000,00	3.015.000,00	100,00	244.721.248,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	285.428.500,00	285.202.100,00	99,92	1.521.345.950,00
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	81.609.600,00	78.953.600,00	96,75	20.375.000,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	291.925.450,00	291.629.450,00	99,90	503.355.625,00
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	138.274.000,00	138.244.000,00	99,98	306.078.041,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	682.865.057,00	682.019.557	99,88	551.529.650,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58.357.000,00	58.357.000,00	100,00	24.733.333,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.772.827.100,00	2.737.074.800,00	98,71	1.241.866.448,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	57.034.000,00	57.034.000,00	100,00	33.136.100,00
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18.882.494.328,00	20.407.281.144,00	108,08	22.781.592.730,00
21	DINAS PERHUBUNGAN	70.562.000,00	70.562.000,00	100,00	216.552.200,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	242.403.000,00	241.516.207,00	99,63	34.682.583,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	89.500.000,00	89.500.000,00	100,00	0,00
24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	126.576.750,00	126.575.750,00	100,00	85.300.000,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.592.759.534,00	1.573.248.000,00	98,77	25.611.000,00
26	DINAS SOSIAL	216.199.000,00	215.963.500,00	99,89	92.117.100,00
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1.456.647.000,00	1.455.550.000,00	99,92	401.441.000,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	115.389.000,00	115.300.000,00	99,92	50.764.000,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	76.770.000	76.750.000,00	99,97	93.300.000,00
30	KECAMATAN AMPIBABO	5.862.500,00	5.862.500,00	100,00	0,00
31	KECAMATAN BALINGGI	16.549.000,00	16.549.000,00	100,00	35.783.332,00
32	KECAMATAN BOLANO	5.092.000,00	5.092.000,00	100,00	3.083.333,00
33	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
34	KECAMATAN KASIMBAR	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	0,00
35	KECAMATAN MEPANGA	13.534.000,00	13.534.000,00	100,00	35.269.416,00
36	KECAMATAN MOUTONG	0,00	0,00	0,00	25.295.000,00
37	KECAMATAN ONGKA MALINO	14.225.000,00	13.622.000,00	95,76	54.132.498,00
38	KECAMATAN PALASA	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	39.241.248,00
39	KECAMATAN PARIGI	354.614.300,00	354.204.800,00	99,88	255.852.163,00
40	KECAMATAN PARIGI BARAT	0,00	0,00	0,00	23.743.750,00
41	KECAMATAN PARIGI SELATAN	25.245.000,00	25.245.000,00	100,00	33.125.000,00
42	KECAMATAN PARIGI TENGAH	5.896.000,00	5.896.000,00	100,00	19.191.666,00
43	KECAMATAN PARIGI UTARA	7.906.000,00	7.906.000,00	100,00	19.541.666,00
44	KECAMATAN SAUSU	18.722.000,00	18.722.000,00	100,00	0,00
45	KECAMATAN SIDOAN	44.789.500,00	42.846.500,00	95,66	38.625.625,00
46	KECAMATAN SINIU	0,00	0,00	0,00	4.245.833,00
47	KECAMATAN TAOPA	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
48	KECAMATAN TINOMBO	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	64.110.200,00
49	KECAMATAN TINOMBO SELATAN	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	16.145.832,00
50	KECAMATAN TOMINI	0,00	0,00	0,0	59.044.307,00
51	KECAMATAN TORIBULU	0,00	0,00	0,00	27.208.333,00
52	KECAMATAN TORUE	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	10.791.666,00
53	RSUD BULUYE NAPOA'E MOUTONG	169.698.200,00	159.293.200,00	93,87	12.425.000,00
54	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	372.312.472,00	254.298.361,00	68,30	277.541.578,00
55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	293.861.172,00	293.861.000,00	100,00	242.311.600,00
56	SEKRETARIAT DAERAH	1.895.797.200,00	1.846.033.857,00	97,38	2.355.695.466,00
57	SEKRETARIAT DPRD	332.649.500	326.907.550,00	98,27	997.846.925,00
		86.698.097.860,00	87.126.556.041,00	100,49	59.378.243.109,00

LAMPIRAN 11

RINCIAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023, PERSENTASE CAPAIAN REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		%	TAHUN 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	293.007.500,00	292.300.400,00	99,76	99.530.000,00
2	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	4.120.045.000	4.060.337.290,00	98,55	4.490.298.423,66
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	189.000.000,00
4	DINAS KESEHATAN	1.199.181.000,00	1.177.021.167,00	98,15	18.160.830.537,00
5	DINAS KETAHANAN PANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	129.700.000,00
7	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.117.758.155,00	2.015.527.155,00	95,17	6.956.149.123,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	491.595.386,00	391.998.159	79,74	1.073.453.249,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	647.344.000,00
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	35.928.770.493,00	34.310.307.730,00	95,50	22.244.818.058,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	81.500.000,00	81.280.000,00	99,73	0,00
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000,00	49.935.000,00	99,87	0,00
13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	900.000.000,00	886.835.193,00	98,54	0,00
15	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	4.725.000.000,00	4.707.676.357,00	99,63	1.584.107.000,00
16	INSPEKTORAT DAERAH	0	0,00	0,00	473.148.000,00
17	KECAMATAN PARIGI	0,00	0,00	0,00	36.313.000,00
18	KECAMATAN SIDOAN	0,00	0,00	0,00	92.762.000,00
19	KECAMATAN SINIU	0,00	0,00	0,00	34.994.910,00
20	KECAMATAN TOMINI	0,00	0,00	0,00	197.414.000,00
21	RSUD BULUYE NAPOA"E MOUTONG	0,00	0,00	0,00	2.208.477.643,00
22	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	934.900.000,00	920.946.000,00	98,51	0,00
		50.851.757.534,00	48.904.164.451,00	96,17	58.628.339.943,66

LAMPIRAN 12

RINCIAN BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023,
PERSENTASE CAPAIAN REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		%	TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200.000.000,00	199.806.300,00	99,90	0,00
2	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	0,00	0,00	0,00	1.815.000.000,00
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.780.668.600,00	1.769.537.012,00	99,37	0,00
4	DINAS KESEHATAN	189.626.800,00	4.641.500,00	2,45	7.220.274.600,00
5	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	925.000.000,00	924.222.000,00	99,92	0,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	88.883.830.202,00	70.296.246.822	79,09	40.024.357.291,00
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	92.800.000,00
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.998.107.000,00	3.994.559.000,00	99,91	5.467.450.000,00
10	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	0,00	0,00	0,00	194.575.000,00
		95.989.732.602,00	77.201.512.634,00	80,43	54.814.456.891,00

LAMPIRAN 13

RINCIAN BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA YANG DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN PADA TA 2023, PERSENTASE CAPAIAN REALISASINYA DAN YANG DIREALISASIKAN PADA TA 2022 DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		%	TAHUN 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
2	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	0,00	0,00	0,00	299.999.700,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	16.562.500,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	0,00	0	0,00	7.187.500,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.577.564.300,00	7.236.044.500,00	110,01	1.453.850.900,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	24.706.827,00
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS SOSIAL	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00	0,00
11	KECAMATAN PALASA	0,00	0,00	0,00	1.062.500,00
12	KECAMATAN TINOMBO	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
13	RSUD BULUYE NAPOA'E MOUTONG	0,00	0,00	0,00	197.446.000,00
14	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	0,00	0,00	0,00	199.833.300,00
15	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	196.559.000,00
		6.667.464.300,00	7.275.944.500,00	109,13	2.529.458.227,00

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
” TARMIZI ACHMAD ”
Certified Public Accountant

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Jl. Dewi Sartika Raya No. 7
Perumahan UNDIP
Sukorejo - Semarang (50221)



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

“TARMIZI ACHMAD”

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00129/2.0604/AU.5/11/0430-4/1/IV/2024

Kepada Yth.

Dewan Pengawas dan Direksi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko

Parigi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan etika tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali

Halaman 1 dari 3



manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko .

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko .
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

“TARMIZI ACHMAD”

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 091/KM. 6/2004

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Semarang, 16 April 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“TARMIZI ACHMAD”

Prof. Dr. Tarmizi Achmad, MBA., Ak., CPA., CA., CFE., CFrA., CPI
Nomor Izin Akuntan Publik : 0430



***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO***

DAFTAR ISI

1.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
2.	LAPORAN KEUANGAN.....	
2.1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	4
2.2.	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	5
2.3.	NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	6
2.4.	LAPORAN OPERASIONAL TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 ..	7
2.5.	LAPORAN ARUS KAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023	8
2.6.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023.....	9
3.	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
3.1	UMUM	10
3.2	IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	13
3.3	PENJELASAN AKUN LAPORAN KEUANGAN	32
4.	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Catatan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Anggaran	Realisasi	%	
1	PENDAPATAN	3.3.1				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		64.814.142.588,00	69.343.778.950,00	106,99	71.443.797.869,70
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		8.582.133.307,00	5.651.953.021,00	65,86	1.669.081.106,00
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama		70.000.000,00	67.228.510,00	96,04	45.800.000,00
5	Pendapatan Lain-Lain BLUD		185.063.846,00	248.596.028,15	134,33	621.534.843,00
6	Jumlah Pendapatan		73.651.339.741,00	75.311.556.509,15	102,25	73.780.213.818,70
7	BELANJA	3.3.2				
8	BELANJA OPERASI					
9	Belanja Pegawai		28.990.225.262,00	26.293.923.772,00	90,70	23.808.032.650,00
10	Belanja Barang dan Jasa		82.932.362.682,00	80.350.514.092,00	96,89	92.412.754.281,00
11	Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah Belanja Operasi		111.922.587.944,00	106.644.437.864,00	95,28	116.220.786.931,00
14	BELANJA MODAL					
15	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Peralatan dan Mesin		37.463.749.650,00	36.949.712.734,00	98,63	1.243.047.990,00
17	Belanja Gedung dan Bangunan		4.120.045.000,00	4.060.337.290,00	98,55	4.490.298.423,66
18	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	1.815.000.000,00
19	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	299.999.700,00
20	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Belanja Modal		41.583.794.650,00	41.010.050.024,00	98,62	7.848.346.113,66
22	Jumlah Belanja		153.506.382.594,00	147.654.487.888,00	96,19	124.069.133.044,66
23	SURPLUS/DEFISIT LRA		(79.855.042.853,00)	(72.342.931.378,85)	90,59	(50.288.919.225,96)
24	PEMBIAYAAN					
25	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		9.526.865.851,02	9.526.865.851,02	100,00	27.266.896.637,32
26	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pembiayaan Netto		9.526.865.851,02	9.526.865.851,02	0,00	27.266.896.637,32
28	SILPA/SIKPA		(70.328.177.001,98)	(62.816.065.527,83)	89,32	(23.022.022.588,64)

Parigi, 31 Desember 2023
Direktur RSUD Anuntaloko
Kab. Parigi Moutong

dr.REVY J.N. TILAAAR
NIP. 19651129 199903 1 005

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Sisa Anggaran Lebih Awal	9.526.865.851,02	27.266.896.637,32
2	Penggunaan SAL	(9.526.865.851,02)	(27.266.896.637,32)
3	Sub Total (1 s.d. 2)	0,00	0,00
4	SILPA/SIKPA	(62.816.065.527,83)	(23.022.022.588,64)
5	Penyesuaian SILPA/SIKPA atas Transaksi BLUD		
	dengan BUD/BUN	0,00	0,00
6	Pendapatan Alokasi dari APBD	67.260.266.490,00	32.548.888.439,66
7	Pendapatan Alokasi dari APBN	0,00	0,00
8	Belanja dari APBN	0,00	0,00
9	Sub Total (5 s.d 8)	67.260.266.490,00	32.548.888.439,66
10	Sub Total (3+4+9)	4.444.200.962,17	9.526.865.851,02
11	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
12	Lain-Lain	0,00	0,00
13	Sisa Anggaran Lebih Akhir (10+11+12)	4.444.200.962,17	9.526.865.851,02

Parigi, 31 Desember 2023
 Direktur RSUD Anuntaloko
 Kab. Parigi Moutong

dr. REVY J.N. TILAAAR
 NIP. 19651129 199903 1 005

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NERACA**

Per 31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3.3.3	4.444.200.962,17	9.526.865.851,02
Piutang	3.3.4	15.601.657.029,15	19.456.096.040,70
Cadangan Kerugian Piutang		(4.942.568.307,23)	(4.335.185.434,28)
Persediaan	3.3.5	10.573.977.597,85	7.364.702.180,02
Biaya Dibayar Dimuka	3.3.6	140.771.500,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		25.818.038.781,94	32.012.478.637,46
ASET TETAP	3.3.7		
Tanah		2.616.048.330,00	2.616.048.330,00
Gedung dan Bangunan		104.216.652.221,70	99.700.021.538,70
Peralatan dan Mesin		260.080.514.318,98	223.359.474.006,12
Jalan, Irigasi dan Jaringan		22.163.769.841,00	21.864.769.841,00
Aset Tetap Lainnya		9.447.196.500,00	9.447.196.500,00
Konstruksi dalam pengerjaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		398.524.181.211,68	356.987.510.215,82
Akumulasi Penyusutan		(224.101.908.171,12)	(205.047.754.219,12)
Nilai Buku Aset Tetap		174.422.273.040,56	151.939.755.996,70
ASET LAINNYA	3.3.8		
Aset Kondisi Rusak Berat		19.091.244.791,00	8.613.398.708,00
Aset Tidak Berwujud		2.270.967.700,00	2.270.967.700,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(12.758.960.513,00)	(9.446.946.732,68)
Jumlah Aset Lainnya		8.603.251.978,00	1.437.419.675,32
TOTAL ASET		208.843.563.800,50	185.389.654.309,48
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
Hutang Usaha	3.3.9	14.990.333.738,01	13.982.533.311,98
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.3.10	0,00	222.028.849,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.3.11	4.950.000,00	8.700.000,00
Jumlah Kewajiban Lancar		14.995.283.738,01	14.213.262.160,98
Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		14.995.283.738,01	14.213.262.160,98
EKUITAS	3.3.12		
Ekuitas Awal		171.176.392.148,50	214.486.173.186,20
Surplus/Defisit		25.631.047.330,41	(28.000.054.820,06)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar		(2.959.159.416,42)	(15.309.726.217,64)
JUMLAH EKUITAS		193.848.280.062,49	171.176.392.148,50
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		208.843.563.800,50	185.389.654.309,48

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
A. PENDAPATAN	3.3.13		
- Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		71.109.882.378,00	58.659.103.556,70
- Pendapatan Hibah		10.528.657.355,00	64.006.926.778,00
- Pendapatan Hasil Kerja Sama Operasi dengan Pihak Lain		98.148.567,00	63.800.000,00
- Pendapatan APBD		67.260.266.490,00	32.548.888.439,66
- Pendapatan APBN		0,00	0,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		325.402.779,30	625.109.843,00
Jumlah Pendapatan		149.322.357.569,30	155.903.828.617,36
B. BEBAN	3.3.14		
1) Beban Operasional			
- Beban Pegawai		26.293.923.772,00	23.770.032.650,00
- Beban Bahan		26.978.968.862,02	25.586.656.677,32
- Beban Jasa Layanan		44.775.629.351,00	47.466.217.552,98
- Beban Pemeliharaan		2.606.603.450,00	1.903.138.368,00
- Beban Langganan Daya Jasa		2.099.916.118,00	1.848.291.258,00
- Beban Perjalanan Dinas		1.118.887.182,00	800.084.908,00
- Beban Penyusutan		19.167.702.369,00	79.768.609.604,68
- Beban Penyisihan Piutang		607.668.107,73	2.354.760.885,48
- Beban Lain-lain		42.011.027,14	406.091.532,96
Jumlah Beban Operasional		123.691.310.238,89	183.903.883.437,42
2) Beban Non Operasional			
- Beban Bunga		0,00	0,00
- Beban Administrasi Bank		0,00	0,00
- Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap		0,00	0,00
- Beban Kerugian Penurunan Nilai		0,00	0,00
- Beban Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Beban Non Operasional		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		123.691.310.238,89	183.903.883.437,42
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN		25.631.047.330,41	(28.000.054.820,06)

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas :		
1. Pendapatan Jasa Layanan	74.995.731.971,00	73.112.878.975,70
2. Pendapatan Hibah Tidak Terikat	0,00	0,00
3. Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lainnya	67.228.510,00	45.800.000,00
4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	248.596.028,15	621.534.843,00
Jumlah Arus Masuk Kas	75.311.556.509,15	73.780.213.818,70
Arus Keluar Kas :		
Biaya Operasional	106.644.437.864,00	116.220.786.931,00
Biaya Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	106.644.437.864,00	116.220.786.931,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(31.332.881.354,85)	(42.440.573.112,30)
2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
1. Hasil Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
2. Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
1. Perolehan Aset Tetap	41.010.050.024,00	7.848.346.113,66
2. Perolehan Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	41.010.050.024,00	7.848.346.113,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(41.010.050.024,00)	(7.848.346.113,66)
3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
1. APBD	67.260.266.490,00	32.548.888.439,66
2. APBN	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	67.260.266.490,00	32.548.888.439,66
Arus Kas Keluar		
1. Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
2. Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	67.260.266.490,00	32.548.888.439,66
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(5.082.664.888,85)	(17.740.030.786,30)
Kas dan Setara Kas Awal	9.526.865.851,02	27.266.896.637,32
Jumlah Saldo Kas	4.444.200.962,17	9.526.865.851,02

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
 bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
EKUITAS AWAL	171.176.392.148,50	214.486.173.186,20
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN	25.631.047.330,41	(28.000.054.820,06)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR	(2.959.159.416,42)	(15.309.726.217,64)
Koreksi Atas Nilai Persediaan	(23.397.067,60)	(54.931.426,84)
Koreksi Atas Nilai Cadangan Kerugian Piutang	0,00	0,00
Koreksi Atas Nilai Piutang	(51.172.626,70)	(1.276.111.750,30)
Koreksi Atas Nilai Aset	299.000.000,00	(67.900.751.478,00)
Koreksi Atas Nilai Penyusutan Aset Tetap	32,00	59.173.845.591,00
Koreksi Atas Nilai Aset Lainnya	(3.198.465.395,32)	(6.226.290.800,00)
Koreksi Atas Nilai Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Atas Nilai Hutang	14.590.406,42	969.252.085,00
Koreksi Atas Nilai Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Atas Pendapatan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Atas Nilai Penyisihan Piutang	285.234,78	5.261.561,50
EKUITAS AKHIR	193.848.280.062,49	171.176.392.148,50

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3.1. Umum

a. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong

BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan. BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi berdasarkan kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan kabupaten/kota. BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut antara lain:

- a. Rumah Sakit berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Dalam hal ini Rumah Sakit berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan. Rumah Sakit ikut aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.
- b. Rumah Sakit merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Rumah Sakit berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan, melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
- c. Rumah Sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota, telah ditetapkan indikator kinerja dan target pembangunan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BLUD Rumah Sakit Anuntaloko berdiri di tanah seluas 32.728,55 m², mulai beroperasi tahun tahun 1960-an (diperkirakan sekitar tahun 1968) dengan status rumah sakit pembantu wilayah Parigi. Rumah Sakit Parigi saat itu merupakan hasil pengembangan puskesmas perawatan Kecamatan Parigi. Pengembangan ini dilakukan mengingat banyaknya pasien rawat inap yang dilayani oleh Puskesmas Parigi saat itu, serta luasnya cakupan wilayah pelayanannya. RSUD pembantu wilayah Parigi kemudian berubah status menjadi RSUD Parigi pada bulan Maret 1983. Perubahan ini ditandai dengan pemisahan poliklinik rawat jalan yang menjadi Puskesmas Parigi dan pengangkatan direktur RSUD Parigi yang pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala.

RSUD Parigi telah resmi menjadi RSUD Tipe D milik Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Depkes No.1183/Menkes/SK/XI/94 tanggal 23 November 1994. Secara organisasi, RSUD Parigi merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Sementara secara taktis operasional bertanggung jawab langsung kepada Bupati Donggala sedang teknis fungsional dibina oleh kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Saat ini luas bangunan BLUD Rumah Sakit 29.413m².

b. Visi dan Misi RSUD Anuntaloko

Visi BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi sesuai dengan memperhatikan visi Pemerintah Daerah adalah:

**“Rumah Sakit Rujukan Regional Terbaik Dengan Pelayanan Kesehatan
Paripurna di Provinsi Sulawesi Tengah”.**

Misi BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan menuju kemandirian rumah sakit sebagai PPK-BLUD;
2. Memberikan pelayanan kesehatan berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
3. Mengembangkan tata kelola rumah sakit yang baik berbasis informasi dan teknologi;
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menuju rumah sakit kelas B pendidikan;
5. Meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Motto BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi

“Songulara Mompakalompe”

Filosofi BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi

“Kesembuhan Anda Kebahagiaan Kami”

Semboyan BLUD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi

“(3S) SENYUM, SAPA, SANTUN”

c. Dasar Hukum Pembentukan BLUD

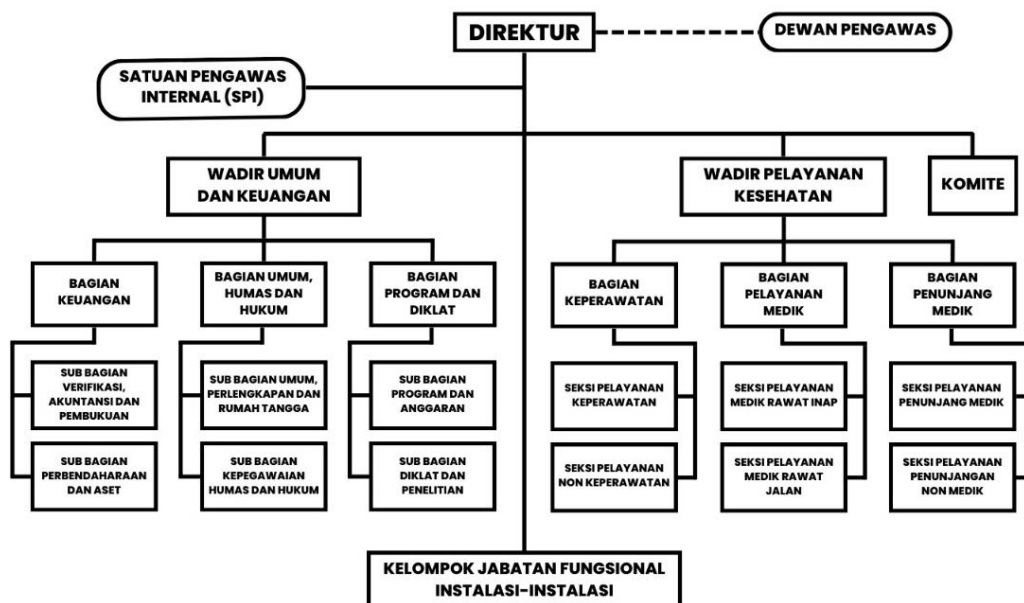
1. Surat Keputusan Depkes No. 1183/Menkes/SK/XI/94 tanggal 23 November 1994 tentang pembentukan RSUD Tipe D.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 870/Menkes/SK/VII/2004 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Keputusan Bupati Nomor 445.900.45/1854/RSUD Anuntaloko, tentang persetujuan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Anuntaloko.

d. Alamat Kantor

BLUD RSUD Anuntaloko Parigi terletak di Jl. Sis Al Jufri No.214 Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kode pos 94471, telp/fax (0450) 21032, Provinsi Sulawesi tengah

e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong

Gambar 1. Struktur Organisasi



**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3.2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a) Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

b) Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

c) Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Mautong

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Anuntaloko yaitu basis akrual. Entitas menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

d) Definisi

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi beserta pengertiannya:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan BLUD RSUD Anuntaloko meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan BLUD RSUD Anuntaloko yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BLUD RSUD Anuntaloko.
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD Anuntaloko sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD RSUD Anuntaloko maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD RSUD Anuntaloko atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Anuntaloko.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Anuntaloko yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Anuntaloko
- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Kas BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Anuntaloko.
- Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Anuntaloko.
- Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

penganggaran BLUD RSUD Anuntaloko terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- Pendapatan BLUD -LO adalah hak BLUD RSUD Anuntaloko yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan BLUD - LRA adalah semua penerimaan rekening BLUD RSUD Anuntaloko yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjaduhkan hak BLUD RSUD Anuntaloko, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Anuntaloko.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- Rekening BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Anuntaloko yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan BLUD - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan BLUD - LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan BLUD - LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Tagihan jangka panjang adalah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Anuntaloko dan/atau hak BLUD RSUD Anuntaloko yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya penjualan angsuran kepada pegawai BLUD RSUD Anuntaloko, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

e) Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD Anuntaloko. Tujuan umum laporan keuangan BLUD RSUD Anuntaloko adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas BLUD RSUD Anuntaloko yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD RSUD Anuntaloko adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD RSUD Anuntaloko ;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD RSUD Anuntaloko ;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi RSUD Anuntaloko;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD RSUD Anuntaloko untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Anuntaloko ; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD RSUD Anuntaloko dalam mendanai aktivitasnya.

f) Tanggung Jawab atas Laporan keuangan

Direktur BLUD RSUD Anuntaloko bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

g) Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Struktur dan Isi

1) Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Nama entitas entitas pelaporan (BLUD RSUD Anuntaloko);
- Cakupan laporan keuangan satu entitas tunggal;
- Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen laporan keuangan;
- Mata uang pelaporan adalah rupiah;
- Bahasa pelaporan adalah bahasa Indonesia; dan
- Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi relevan tidak hilang.

2) Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

3) Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4) Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dalam rangka penyajian neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan BLUD RSUD Anuntaloko yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD Anuntaloko dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

- Pendapatan BLUD - LRA;
- belanja;
- transfer
- surplus/defisit-LRA;
- pembiayaan; dan
- sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pendapatan BLUD RSUD Anuntaloko yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas daerah merupakan Pendapatan Daerah yang diklasifikasikan sebagai Lain-lain PAD yang Sah dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD RSUD Anuntaloko diakui pada saat kas yang diterima BLUD RSUD Anuntaloko disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD Anuntaloko diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD RSUD Anuntaloko diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan BLUD - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD RSUD Anuntaloko menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya maka BLUD RSUD

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Anuntaloko menyusun Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan entitas akuntansi/pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- Saldo Anggaran Lebih awal;
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- Lain-lain;
- Saldo Anggaran Lebih Akhir.

BLUD RSUD Anuntaloko menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya. Penggunaan SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B / SP2B-BLU.

Pos Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLUD dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni. Pos Pendapatan Alokasi APBD merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLUD dan BUD atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D belanja yang dari DPA APBD RSUD Anuntaloko. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan akun untuk menyajikan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BLUD belum disahkan menjadi Kas dan Bank BLUD. Pos Lain-lain merupakan pos untuk menyajikan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

penyesuaian-penyesuaian yang mempengaruhi nilai SAL akhir, misalnya selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran kas dan bank BLUD yang menggunakan mata uang asing pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Pendapatan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

7) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD RSUD Anuntaloko mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD RSUD Anuntaloko menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- Kas dan setara kas;
- Investasi jangka pendek;
- Piutang dari kegiatan BLUD RSUD Anuntaloko;
- Persediaan;
- Aset tetap;
- Kewajiban jangka pendek;
- Kewajiban jangka panjang; dan
- Ekuitas.

BLUD RSUD Anuntaloko mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila BLUD RSUD Anuntaloko menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatannya, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

untuk menilai likuiditas dan solvabilitas BLUD RSUD Anuntaloko. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- berupa kas dan setara kas.
- Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD RSUD Anuntaloko atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi, aset tetap, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Aset tetap terdiri dari:

- Tanah;
- Peralatan dan mesin;
- Gedung dan bangunan;
- Jalan, irigasi, dan jaringan;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Aset tetap lainnya; dan
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan jangka panjang
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Dana Kelolaan
- Aset yang dibatasi penggunaannya
- Aset Tak Berwujud
- Aset Lain-lain
- Akumulasi Amortisasi

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLUD RSUD Anuntaloko dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
 - Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 - Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
 - Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

biaya lainnya yang terjadi berkenaan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
- Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. BLUD RSUD Anuntaloko tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
 - Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Anuntaloko yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BLUD RSUD Anuntaloko mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari kebijakan akuntansi dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- piutang dirinci berdasarkan piutang yang berasal dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional
- persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang aset tetap;

8) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas BLUD RSUD Anuntaloko. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

9) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan BLUD RSUD Anuntaloko dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- Beban dari kegiatan operasional;
- Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- Pos luar biasa; dan
- Surplus/defisit-LO.

BLUD RSUD Anuntaloko menyajikan Pendapatan BLUD - LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- pendapatan hasil kerja sama;
- pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan dari alokasi APBN adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi/atau tugas pembantuan dan lain-lain. Proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan jasa yang diperoleh dari jasa layanan yang sumber dananya berasal dari entitas akuntansi/entitas pelaporan. Contohnya pendapatan yang diperoleh dari program Jaminan Kesehatan Daerah. Pendapatan hasil kerja sama adalah

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

perolehan berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD Anuntaloko Pendapatan yang berasal dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

- Pendapatan BLUD RSUD Anuntaloko lainnya berupa:
- Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan
- Hasil pemanfaatan kekayaan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Anuntaloko
- Hasil investasi

BLUD RSUD Anuntaloko menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan BLUD - LO pada BLUD RSUD Anuntaloko diakui pada saat:

- timbulnya hak atas pendapatan;
- pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan BLUD - LO pada BLUD RSUD Anuntaloko yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan BLUD - LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD RSUD Anuntaloko tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan BLUD - LO pada BLUD RSUD Anuntaloko merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO.

Akuntansi Pendapatan BLUD - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan BLUD - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD RSUD Anuntaloko diakui pada saat:

- timbulnya kewajiban;
- terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD RSUD Anuntaloko tanpa diikuti keluarnya kas. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD RSUD Anuntaloko. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Beban pada BLUD RSUD Anuntaloko diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyesuaian, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

10) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- Lain-lain
- Ekuitas akhir.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BLUD RSUD Anuntaloko menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11) Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Umum tentang BLUD Rumah Sakit Umum Anuntaloko;
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
3.3.1	PENDAPATAN-LRA	75.311.556.509,15	73.780.213.818,70
	Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	A. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	69.343.778.950,00	71.443.797.869,70
	B. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	5.651.953.021,00	1.669.081.106,00
	C. Pendapatan Hasil Kerjasama	67.228.510,00	45.800.000,00
	D. Pendapatan Lain-lain yang Sah	248.596.028,15	621.534.843,00
	Jumlah Pendapatan	75.311.556.509,15	73.780.213.818,70
3.3.2	BELANJA DAERAH	147.654.487.888,00	124.069.133.044,66
	BELANJA OPERASI	106.644.437.864,00	116.220.786.931,00
	- Belanja Pegawai	26.293.923.772,00	23.808.032.650,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pegawai BLUD	18.372.831.763,00	17.142.576.530,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.868.292.009,00	6.617.456.120,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.800.000,00	48.000.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	80.350.514.092,00	92.412.754.281,00
	Belanja Barang	30.474.427.343,00	27.169.369.840,00
	Belanja Jasa	45.998.998.851,00	62.103.155.718,00
	Belanja Pemeliharaan	2.558.776.370,00	1.763.491.868,00
	Belana Perjalanan Dinas	1.118.887.182,00	1.376.736.855,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	199.424.346,00	0,00
	BELANJA MODAL	41.010.050.024,00	7.848.346.113,66
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.949.712.734,00	1.243.047.990,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.060.337.290,00	4.490.298.423,66
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	1.815.000.000,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	299.999.700,00
	Jumlah Belanja Daerah	147.654.487.888,00	124.069.133.044,66
	PEMBIAYAAN		
	- Penerimaan Pembiayaan	9.526.865.851,02	27.266.896.637,32
	- Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Jumlah Pembiayaan	9.526.865.851,02	27.266.896.637,32
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(62.816.065.527,83)	(23.022.022.588,64)
3.3.3	KAS DAN SETARA KAS	4.444.200.962,17	9.526.865.851,02
	Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan perincian sebagai berikut :		
	Kas di Bendahara Penerimaan		
	- Kas di Bendahara Penerimaan Tunai	15.256.000,00	0,00
	- Bank BNI (BLUD RSUD Parigi No. Rek : 0327230966)	4.315.842.525,54	9.433.528.181,00
	- Bank BRI (Bendahara Penerimaan No. Rek : 00000363-01-000425-30-7)	10.784.697,00	85.571.126,00

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
	- Bank Mandiri (Rekening BPJS No. Rek : 151.000.695.8794)	929.913,06	7.757.212,66
	- Bank Mandiri (Rekening BPJS No. Rek : 151.000.736.1352)	2.718,57	9.331,36
	- Bank Mandiri (No. Rek : 151.001.062.6577)	86.393.221,00	0,00
	- Bank Syariah Indonesia (No. Rek : 716665541)	14.991.887,00	0,00
	- Bank Sulteng (No. Rek : 1020207228924)	0,00	0,00
	- Koreksi Kas	0,00	0,00
	Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	4.444.200.962,17	9.526.865.851,02
	Kas di Bendahara Pengeluaran :		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Bank Bank Sulteng No. Rek. : 102-010200195	0,00	0,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas Lainnya :		
	- Kas Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	4.444.200.962,17	9.526.865.851,02
3.3.4	PIUTANG	10.659.088.721,92	15.120.910.606,42
	Jumlah tersebut merupakan klaim atau hak yang dimiliki oleh rumah sakit yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal neraca belum diterima secara kas per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan perincian sebagai berikut :		
	Piutang Usaha		
	- Piutang BPJS Kesehatan	5.197.605.400,00	7.024.723.757,00
	- Piutang BPJS Ketenagakerjaan	16.292.230,00	37.577.900,00
	- Piutang Jasa Raharja	44.129.244,00	106.415.561,00
	- Piutang Jampersal	1.434.088.300,00	1.434.088.300,00
	- Piutang Pasien Covid 19	54.000.000,00	1.095.394.500,00
	- Piutang Klaim TCM Tahun 2022	0,00	7.650.000,00
	- Piutang Pasien Bansos	8.239.533.597,00	926.285.587,70
	- Piutang Tunai	369.890.150,00	361.390.150,00
	- Piutang Parkir	138.170.057,00	126.000.000,00
	- Piutang Sewa ATM	15.000.000,00	0,00
	- Piutang Klaim Visum	8.491.300,00	0,00
	Piutang Lainnya		
	- Piutang Lainnya	84.456.751,15	0,00
	Jumlah Piutang	15.601.657.029,15	19.456.096.040,70
	Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	(4.942.568.307,23)	(4.335.185.434,28)
	Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang	(4.942.568.307,23)	(4.335.185.434,28)
	Jumlah Piutang Bersih	10.659.088.721,92	15.120.910.606,42

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
3.3.5	PERSEDIAAN	10.573.977.597,85	7.364.702.180,02
	Persediaan adalah barang berwujud yang kan habis pakai atau terjual namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai atau terjual. Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Persediaan Bahan Habis Pakai terdiri dari :		
	- Alat Tulis Kantor	34.341.538,12	19.640.528,75
	- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	4.048.605,00	1.618.680,00
	- Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.801.960,00	5.346.900,00
	- Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya	3.582.011.575,02	2.292.109.040,65
	- Persediaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
	Persediaan Bahan Material terdiri dari :		
	- Persediaan Bahan Obat-obatan dan Kedokteran	4.749.099.664,67	3.092.627.406,22
	- Persediaan Bahan Kimia	1.826.753.902,97	1.847.477.502,90
	- Persediaan Barang Cetak	67.283.658,75	77.544.219,00
	- Persediaan Bahan Makanan	21.579.510,00	28.337.902,50
	- Alat Kesehatan	276.057.183,32	0,00
	Jumlah Persediaan	10.573.977.597,85	7.364.702.180,02
3.3.6	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	140.771.500,00	0,00
	- Biaya Sewa Rumah Dinas	127.261.500,00	0,00
	- Biaya Sewa Kendaraan	13.510.000,00	0,00
3.3.7	ASET TETAP	174.422.273.040,56	151.939.755.996,70
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	A. Tanah	2.616.048.330,00	2.616.048.330,00
	B. Gedung dan Bangunan	104.216.652.221,70	99.700.021.538,70
	C. Peralatan dan Mesin	260.080.514.318,98	223.359.474.006,12
	D. Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.163.769.841,00	21.864.769.841,00
	E. Aset Tetap Lainnya	9.447.196.500,00	9.447.196.500,00
	F. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	398.524.181.211,68	356.987.510.215,82
	Akumulasi Penyusutan	(224.101.908.171,12)	(205.047.754.219,12)
	Nilai Buku Aset Tetap	(224.101.908.171,12)	(205.047.754.219,12)
		174.422.273.040,56	151.939.755.996,70
3.3.8	ASET LAINNYA	8.603.251.978,00	1.437.419.675,32
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut		
	- Aset Kondisi Rusak Berat	19.091.244.791,00	8.613.398.708,00
	- Aset Tidak Berwujud	2.270.967.700,00	2.270.967.700,00
	Jumlah Aset Lainnya	21.362.212.491,00	10.884.366.408,00

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
	Akumulasi Penyusutan	(12.758.960.513,00)	(9.446.946.732,68)
		(12.758.960.513,00)	(9.446.946.732,68)
	Nilai Buku Aset Lainnya	8.603.251.978,00	1.437.419.675,32
3.3.9	HUTANG USAHA	14.990.333.738,01	13.982.533.311,98
	Jumlah tersebut merupakan saldo beban obat-obatan dan bahan habis pakai medik yang belum terbayarkan per 31 Desember 2023 dan 2022. Yaitu terdiri dari :		
	Hutang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	12.300.000,00	24.300.000,00
	Hutang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku	1.144.340.292,00	159.103.060,00
	Hutang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	174.041.170,00	260.713.702,00
	Hutang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Alat Tulis Kantor	24.779.714,00	0,00
	Hutang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-/	1.521.319.553,96	1.238.243.480,00
	Hutang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	933.623.191,49	2.473.292.325,00
	Hutang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas	53.896.978,00	14.878.100,00
	Hutang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	10.764.563.979,56	8.887.860.200,98
	Hutang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	80.231.644,00
	Hutang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	0,00	692.835.000,00
	Hutang Belanja Honorarium	4.675.000,00	0,00
	Hutang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	0,00	151.075.800,00
	Hutang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4.218.050,00	0,00
	Hutang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	153.672.929,00	0,00
	Hutang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Ruma	198.902.880,00	0,00
	Jumlah Hutang Usaha	14.990.333.738,01	13.982.533.311,98
3.3.10	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0,00	222.028.849,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022.		
3.3.11	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	4.950.000,00	8.700.000,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022.		
3.3.12	EKUITAS	193.848.280.062,49	171.176.392.148,50
	Jumlah tersebut merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan perincian sebagai berikut :		
	- Ekuitas Awal	171.176.392.148,50	214.486.173.186,20
	- Surplus/Defisit	25.631.047.330,41	(28.000.054.820,06)
	- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	(2.959.159.416,42)	(15.309.726.217,64)
	Koreksi Atas Nilai Persediaan	(23.397.067,60)	(54.931.426,84)
	Koreksi Atas Nilai Cadangan Kerugian Piutang	0,00	0,00
	Koreksi Atas Nilai Piutang	(51.172.626,70)	(1.276.111.750,30)
	Koreksi Atas Nilai Aset	299.000.000,00	(67.900.751.478,00)
	Koreksi Atas Nilai Penyusutan Aset Tetap	32,00	59.173.845.591,00
	Koreksi Atas Nilai Aset Lainnya	(3.198.465.395,32)	(6.226.290.800,00)
	Koreksi Atas Nilai Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
	Koreksi Atas Nilai Hutang	14.590.406,42	969.252.085,00
	Koreksi Atas Nilai Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Atas Pendapatan	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Atas Nilai Penyisihan Piutang	285.234,78	5.261.561,50
	Ekuitas Akhir	193.848.280.062,49	171.176.392.148,50
3.3.13	PENDAPATAN	149.322.357.569,30	91.833.101.839,36
	Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh RSUD Anuntaloko selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	A. Pendapatan Jasa Layanan	71.109.882.378,00	58.659.103.556,70
	B. Pendapatan Hibah	10.528.657.355,00	0,00
	C. Pendapatan Hasil Kerjasama	98.148.567,00	63.800.000,00
	D. Pendapatan APBD	67.260.266.490,00	32.548.888.439,66
	E. Pendapatan APBN	0,00	0,00
	F. Pendapatan Lain-lain yang Sah	325.402.779,30	625.109.843,00
	Jumlah Pendapatan	149.322.357.569,30	91.833.101.839,36
3.3.14	BEBAN OPERASIONAL		
	A. Beban Operasional	123.691.310.238,89	183.903.883.437,42
	Jumlah tersebut merupakan beban operasional selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	- Beban Pegawai	26.293.923.772,00	23.770.032.650,00
	- Beban Bahan	26.978.968.862,02	25.586.656.677,32
	- Beban Jasa Layanan	2.099.916.118,00	1.848.291.258,00
	- Beban Pemeliharaan	2.606.603.450,00	1.903.138.368,00
	- Beban Barang dan Jasa	45.894.516.533,00	48.266.302.460,98
	- Beban Penyusutan	19.167.702.369,00	79.768.609.604,68
	- Beban Penyisihan Piutang	607.668.107,73	2.354.760.885,48
	- Beban Lain-lain	42.011.027,14	406.091.532,96
	Jumlah Beban Operasional	123.691.310.238,89	183.903.883.437,42
	B. Beban Non Operasional	0,00	0,00
	Jumlah tersebut merupakan beban non operasional selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	- Beban Bunga	0,00	0,00
	- Beban Administrasi Bank	0,00	0,00
	- Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	- Beban Kerugian Penurunan Nilai	0,00	0,00
	- Beban Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Non Operasional	0,00	0,00

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	RUMUS	PRESENTASI
Rasio Struktur Pengendalian		
Proporsi Penerimaan BLU (Operasional)	$\frac{\text{Total Pendapatan BLU}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{71.533.433.724,30}{149.322.357.569,30}$	= 47,91 %
Proporsi APBD	$\frac{\text{Total Pendapatan APBD}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{67.260.266.490,00}{149.322.357.569,30}$	= 45,04 %
Proporsi Pendapatan Lain-Lain	$\frac{\text{Total Pendapatan Non Operasioanal}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{-}{149.322.357.569,30}$	= 0,00 %
Rasio Biaya		
Rasio Biaya Pelayanan		
Rasio Biaya Pegawai	$\frac{\text{Jumlah Biaya Pegawai}}{\text{Total Biaya Pelayanan}} = \frac{26.293.923.772,00}{123.691.310.238,89}$	= 21,26 %
Rasio Biaya Bahan	$\frac{\text{Jumlah Biaya Bahan}}{\text{Total Biaya Pelayanan}} = \frac{26.978.968.862,02}{123.691.310.238,89}$	= 21,81 %
Rasio Biaya Jasa Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Biaya Jasa Pelayanan}}{\text{Total Biaya Pelayanan}} = \frac{44.775.629.351,00}{123.691.310.238,89}$	= 36,20 %
Total Biaya Pemeliharaan	$\frac{\text{Jumlah Biaya Pemeliharaan}}{\text{Total Biaya Pelayanan}} = \frac{2.606.603.450,00}{123.691.310.238,89}$	= 2,11 %
Total Biaya Biaya Barang dan Jasa	$\frac{\text{Jumlah Biaya Barang dan Jasa}}{\text{Total Biaya Pelayanan}} = \frac{2.099.916.118,00}{123.691.310.238,89}$	= 1,70 %
Total Biaya Penyusutan	$\frac{\text{Jumlah Biaya Penyusutan}}{\text{Total Biaya Pelayanan}} = \frac{19.167.702.369,00}{123.691.310.238,89}$	= 15,50 %
Rasio Sumber dan Penggunaan		
Rasio Pendapatan/Biaya	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Biaya}} = \frac{149.322.357.569,30}{123.691.310.238,89}$	= 120,72 %
Rasio BLUD/ Total Biaya	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Jasa Layanan}}{\text{Total Biaya}} = \frac{71.109.882.378,00}{123.691.310.238,89}$	= 57,49 %
Rasio APBD/Total Biaya	$\frac{\text{Total APBD}}{\text{Total Biaya}} = \frac{67.260.266.490,00}{123.691.310.238,89}$	= 54,38 %
Rasio APBN/Total Biaya	$\frac{\text{Total APBN}}{\text{Total Biaya}} = \frac{-}{123.691.310.238,89}$	= 0,00 %
Rasio Aktivitas		
Aset Turn Over	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} = \frac{149.322.357.569,30}{208.843.563.800,50}$	= 71,50 %
Fixed Aset Turn Over	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset Tetap}} = \frac{149.322.357.569,30}{174.422.273.040,56}$	= 85,61 %
Surplus Defisit Anggaran	$\frac{\text{Surplus (Defisit)}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{25.631.047.330,41}{149.322.357.569,30}$	= 17,16 %

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
” TARMIZI ACHMAD ”
Certified Public Accountant

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA
TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan angka perbandingan Tahun 2022

Dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Jl. Dewi Sartika Raya No. 7
Perumahan UNDIP
Sukorejo - Semarang (50221)

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU***

DAFTAR ISI

1.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
2.	LAPORAN KEUANGAN.....	
	2.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	4
	2.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	5
	2.3. NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	6
	2.4. LAPORAN OPERASIONAL TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 ..	7
	2.5. LAPORAN ARUS KAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023	8
	2.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023.....	9
3.	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
	3.1 UMUM	10
	3.2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
	3.3 PENJELASAN AKUN LAPORAN KEUANGAN	35
4.	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU***

Laporan Auditor Independen



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

"TARMIZI ACHMAD"

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00107/2.0604/AU.5/11/0430-4/1/III/2024

Kepada Yth.

Dewan Pengawas dan Direksi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – RSUD Raja Tombolotutu

Kab. Parigi Moutong

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Raja Tombolotutu terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan.

Opini wajar dengan pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Raja Tombolotutu tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Hasil audit tahun 2023 menyebutkan terdapat Akun Hutang Jasa Medik sebesar Rp9.808.638.021,85 yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. Sampai tanggal 31 Desember tahun 2023 masih terdapat akun Hutang Jasa Medik sebesar Rp9.808.638.021,85 yang belum dapat diselesaikan oleh pihak RSUD Raja Tombolotutu.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independent terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang

Halaman 1 dari 3



dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Raja Tombolotutu dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – RSUD Raja Tombolotutu atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Raja Tombolotutu .

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Raja Tombolotutu .
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – RSUD Raja Tombolotutu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

“TARMIZI ACHMAD”

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 091/KM. 6/2004

ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – RSUD Raja Tombolotutu tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan di ekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi

Semarang, 30 Maret 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“TARMIZI ACHMAD”

Prof. Dr. Tarmizi Achmad, MBA., Ak., CPA., CA., CFE., CFA., CPI
Nomor Izin Akuntan Publik : 0430



***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU***

Laporan Keuangan

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.000.000.000,00	10.311.364.660,00	257,78	3.961.358.643,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan APBD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jumlah Pendapatan	4.000.000.000,00	10.311.364.660,00	257,78	3.961.358.643,00
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	4.848.362.768,00	4.393.927.576,00	90,63	4.402.196.031,00
12	Belanja Barang dan Jasa	8.172.623.289,00	12.321.758.443,00	150,77	7.796.301.564,00
13	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Belanja Operasi	13.020.986.057,00	16.715.686.019,00	128,37	12.198.497.595,00
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	0,00	254.298.361,00	0,00	0,00
19	Belanja Peralatan dan Mesin	305.976.064,00	920.946.000,00	300,99	277.541.578,00
20	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	195.000.000,00	0,00	0,00	194.575.000,00
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	199.833.300,00
23	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Belanja Modal	700.976.064,00	1.175.244.361,00	167,66	671.949.878,00
25	Jumlah Belanja	13.721.962.121,00	17.890.930.380,00	130,38	12.870.447.473,00
26	SURPLUS/DEFISIT LRA	(9.721.962.121,00)	(7.579.565.720,00)	77,96	(8.909.088.830,00)
27	PEMBIAYAAN				
28	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	239.687.724,00	173.816.433,00	72,52	239.687.724,00
29	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pembiayaan Netto	239.687.724,00	173.816.433,00	72,52	239.687.724,00
31	SILPA/SIKPA	(9.482.274.397,00)	(7.405.749.287,00)	78,10	(8.669.401.106,00)

Tinombo, 31 Desember 2023
Direktur

dr. Flora Merlin, M.Kes, AAAM
Nip. 19780508 200903 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	174.278.933,00	242.890.195,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	173.816.433,00	239.687.724,00
3	Subtotal (1-2)	462.500,00	3.202.471,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(7.405.749.286,80)	(8.669.401.106,00)
5	Subtotal (3+4)	(7.405.286.786,80)	(8.666.198.635,00)
6	Penyesuaian SILPA/SIKPA atas Transaksi BLUD dengan BUD/BUN		
7	Pendapatan Alokasi dari APBD	11.925.154.484,00	8.843.217.539,00
8	Pendapatan Alokasi dari APBN	0,00	0,00
9	Sub Total (5 s.d 10)	11.925.154.484,00	8.843.217.539,00
10	Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	0,00	0,00
11	Lain - lain	(462.500,00)	(2.739.971,00)
12	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	4.519.405.197,20	174.278.933,00

Tinombo, 31 Desember 2023

Direktur

dr. Flora Merlin, M.Kes, AAAM

Nip. 19780508 200903 2 003

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022

(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3.3.3	4.519.405.197,20	174.278.933,00
Piutang	3.3.4	1.989.557.130,66	2.725.835.439,00
Penyisihan Piutang	3.3.4	(587.731.585,15)	(9.518.340,50)
Persediaan	3.3.5	727.066.895,07	725.225.090,08
Jumlah Aset Lancar		6.648.297.637,78	3.615.821.121,58
ASET TETAP	3.3.6		
Tanah		499.469.003,00	499.469.003,00
Gedung dan Bangunan		33.073.792.000,00	53.154.092.966,54
Peralatan dan Mesin		53.226.690.126,54	32.088.126.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		4.048.287.000,00	4.048.287.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		90.848.238.129,54	89.789.974.969,54
Akumulasi Penyusutan		(46.639.072.468,54)	(39.742.087.608,69)
Nilai Buku Aset Tetap		44.209.165.661,00	50.047.887.360,85
ASET LAINNYA	3.3.7		
Aset Kondisi Rusak Berat		139.305.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		388.560.000,00	139.305.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(179.688.208,00)	(1.160.875,00)
Jumlah Aset Lainnya		348.176.792,00	138.144.125,00
TOTAL ASET		51.205.640.090,78	53.801.852.607,43
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Lancar	3.3.8		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	462.500,00
Pendapatan diterima dimuka		0,00	0,00
Utang Belanja Gaji		13.000.000,00	0,00
Utang Beban Jasa		10.035.150.210,85	8.419.047.426,85
Utang Beban Persediaan		1.086.987.703,05	617.559.326,00
Utang Beban Makan dan Minum		0,00	0,00
Utang Perjalanan Dinas		11.740.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Lancar		11.146.877.913,90	9.037.069.252,85
Kewajiban Jangka Panjang	3.3.8	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		11.146.877.913,90	9.037.069.252,85
EKUITAS	3.3.9		
Ekuitas Awal		44.325.972.652,79	51.756.374.643,06
Surplus/Defisit		(4.403.838.092,91)	(6.961.842.318,48)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar		136.627.617,00	(29.748.970,00)
JUMLAH EKUITAS		40.058.762.176,88	44.764.783.354,58
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		51.205.640.090,78	53.801.852.607,43

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
A. PENDAPATAN	3.3.10		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		10.029.739.739,00	5.438.417.702,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan		0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	5.850.941,00
Pendapatan Lain-Lain BLUD		12.170.101,66	0,00
Pendapatan APBD		11.925.154.484,00	8.843.217.539,00
Pendapatan APBN		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		21.967.064.324,66	14.287.486.182,00
B. BEBAN	3.3.11		
1) Beban Operasional			
- Beban Pegawai		4.406.927.576,00	4.227.196.031,00
- Beban Barang dan Jasa		14.316.382.977,97	9.404.815.575,18
- Beban Penyisihan Piutang		572.079.690,75	6.242.139,31
- Beban Penyusutan dan Amortisasi		7.075.512.172,85	7.611.074.755,00
- Beban Lain-lain		0,00	0,00
Jumlah Beban Operasional		26.370.902.417,57	21.249.328.500,49
2) Beban Non Operasional			
- Beban Bunga		0,00	0,00
- Beban Administrasi Bank		0,00	0,00
- Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap		0,00	0,00
- Beban Kerugian Penurunan Nilai		0,00	0,00
- Beban Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Beban Non Operasional		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		26.370.902.417,57	21.249.328.500,49
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN		(4.403.838.092,91)	(6.961.842.318,49)

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
 bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas :		
1. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	10.311.364.660,00	3.961.358.643,00
2. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	0,00	0,00
3. Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
4. Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
5. Pendapatan Lain-Lain BLUD	0,00	0,00
6. Pendapatan APBD	0,00	8.843.217.539,00
7. Pendapatan APBN	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	10.311.364.660,00	12.804.576.182,00
Arus Keluar Kas :		
1. Beban Operasional	16.715.686.019,00	12.198.497.595,00
2. Beban Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	16.715.686.019,00	12.198.497.595,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(6.404.321.359,00)	606.078.587,00
2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
1. Hasil Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
2. Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
1. Perolehan Aset Tetap	1.175.244.361,00	671.949.878,00
2. Perolehan Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.175.244.361,00	671.949.878,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.175.244.361,00)	(671.949.878,00)
3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
1. APBD	11.925.154.484,00	0,00
2. APBN	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	11.925.154.484,00	0,00
Arus Kas Keluar		
1. Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
2. Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	11.925.154.484,00	0,00
4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	462.500,00	2.739.971,00
Jumlah Arus Kas Keluar	462.500,00	2.739.971,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(462.500,00)	(2.739.971,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	4.345.126.264,00	(68.611.262,00)
Kas dan Setara Kas Awal	174.278.933,00	242.890.195,00
Jumlah Saldo Kas	4.519.405.197,00	174.278.933,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)

bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
EKUITAS AWAL	44.325.972.652,79	51.756.374.643,06
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN	(4.403.838.092,91)	(6.961.842.318,48)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR	136.627.617,00	(29.748.970,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	136.627.617,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	40.058.762.176,88	44.764.783.354,58

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU***

Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3.1. Umum

a. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu Kabupaten Parigi Moutong

RSUD Raja Tombolotutu Tinombo adalah rumah sakit kelas C milik pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong beralamat di jalan trans sulawesi Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. RSUD Raja Tombolotutu Tinombo di dirikan pada tahun 2012, mulai di operasikan pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 445/04751/DINKES, tentang izin operasional RSUD Raja Tombolotutu Tinombo.

RSUD Raja Tombolotutu Tinombo telah resmi di tetapkan menjadi RSUD pada kelas atau tipe D + milik Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014 dengan nomor kode rumah sakit 7208013S, dan secara organisasi merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, dan secara taktis operasional bertanggung jawab langsung kepada Bupati Parigi Moutong sedangkan teknis fungsional dibina oleh kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejak berdirinya RSUD Raja Tombolotutu Tinombo pada tahun 2012 awalnya masih di bawah naungan Dinas Kesehatan. Tahun 2014 berubah menjadi SKPD sendiri dan di bawahi oleh seorang direktur. RSUD Raja Tombolotutu Tinombo memiliki fasilitas dan kemampuan menyelenggarakan 6 (enam) pelayanan poliklinik dan 4 pelayanan dasar dengan tenaga dokter spesialis, yaitu pelayanan spesialis penyakit d alam, spesialis anak, spesialis kandungan dan spesialis bedah sentral.

Dalam perjalanan dari awal berdirinya RSUD Raja Tombolotutu sampai dengan saat ini sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang masa periodenya diurut sebagai berikut :

1. Tahun 2013 s/d 2016 : dr. A. Sudarmi Pakki
2. Januari 2016 s/d November 2016 : dr. Siti Rahma Fatimah Djanggola
3. November 2016- s/d Desember 2016 : drg. Junita
4. Januari 2017 s/d Agustus 2020 : dr. Rustan Mangga
5. Agustus 2020 s/d Sekarang : dr. Flora Merlin, M.Kes,AAAM,AIFO-K

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Pelayanan kesehatan di rumah sakit sangatlah dinamis dan terus mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya pengetahuan serta kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan oleh karena itu RSUD Raja tombolotutu terus berbenah untuk pengembangan dengan meningkatkan pelayanan rumah sakit sesuai standar nasional akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Komisi Rumah Sakit (KARS) dan berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah berupaya untuk meninggalkan pola-pola lama yang cenderung birokrasis, lamban, kumuh, kurang melayani, boros dan berbagai kesan buruk lainnya yang menunjukkan kurang profesionalitas, pola-pola tersebut diubah menjadi pola-pola yang berorientasi pada tata kelola bisnis yang sehat dengan ciri-ciri efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel. Upaya RSUD Raja Tombolotutu dalam memenuhi kriteria menjadi badan layanan umum daerah. Akhirnya berbuah manis dengan ditetapkannya RSUD Raja Tombolotutu lulus akreditasi rumah sakit oleh komisi akreditasi rumah sakit tingkat Perdana dengan Nomor : KARS-SERT/91/XII/2018 tanggal 12 desember tahun 2018, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 Sesuai Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 445/45/2878/RSUD-RJTT Tanggal 1 oktober 2019 tentang persetujuan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, RSUD Raja Tombolotutu dinyatakan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga sudah ada pengakuan dari yang berwenang bahwa RSUD Raja Tombolotutu telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang meliputi administrasi, manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan dan rekam medis, namun demikian sistem pelayanan belum terintergrasi dengan baik sehingga sulit untuk dilakukan real time monitoring, akan dimulai pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) rumah sakit dan diharapkan pada tahun 2023 SIMRS mampu mengintergrasikan tata kelola dan administrasi pelayanan.

Pada tahun 2014 RSUD Raja Tombolotutu Tinombo juga telah bekerja sama dengan Universitas Udayana melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yaitu dokter spesialis penyakit dalam, pada tahun 2017 bekerja sama dengan Universitas Samratulangi Manado yaitu dokter spesialis penyakit dalam, pada tahun 2017-2019 kerjasama Kementerian Kesehatan untuk tenaga dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anastesi Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan pada tahun 2023 melalui Program

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yaitu dengan mendatangkan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis kandungan serta beberapa dokter kontrak (dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anastesi).

Dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan tersebut maka RSUD Raja Tombolotutu Tinombo menjadi rumah sakit rujukan, terutama bagi puskesmas yang ada di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.

RSUD Raja Tombolotutu Tinombo terletak di jalur Trans Sulawesi, yaitu jalur antara Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Wilayah kerjanya mencakup dari 12 Puskesmas 1 Rumah Sakit, terdiri dari :

1. Puskesmas Tada
2. Puskesmas Sigenti
3. Puskesmas Sidoan
4. Puskesmas Tinombo
5. Puskesmas Palasa
6. Puskesmas Tomini
7. Puskesmas Mepanga
8. Puskesmas Ongka
9. Puskesmas Lambunu 1
10. Puskesmas Lambunu 2
11. Puskesmas Taopa
12. Puskesmas Moutong
13. RSUD Buluye Napoa`e Moutong

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu dengan luas Tanah yang dimiliki adalah seluas 3.636,6 m² dan luas bangunan terdistribusi dalam beberapa gedung yaitu gedung manajemen dan rawat jalan konstruksi 2 lantai yang difungsikan sebagai pelayanan manajemen dan pelayanan rawat jalan seluas 85 m², gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) seluas 42 m², gedung kebidanan seluas 42 m², gedung Intensive Care Unit (ICU) seluas 44 m², Instalasi Bedah Sentral (IBS) seluas 57 m², gedung laboratorium seluas 31 m², gedung farmasi seluas 29 m², gedung perawatan kelas 2 dan kelas 3 seluas 49 m², gedung radiologi seluas 32,9 m², gedung instalasi gizi seluas 31,9 m², gedung rawat inap isolasi seluas 38,8 m² , sehingga total bangunan seluas 567,6 m².

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Bangunan yang terdiri dari gedung administrasi dan rawat jalan (7 poliklinik), gedung IGD, gedung farmasi, gedung KIA, gedung gizi (dapur), gedung laboratorium, gedung radiologi, rumah dinas direktur, rumah dinas dokter spesialis 4 unit, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), asrama, gedung bedah sentral, gedung ICU, gedung perawatan kelas I dan II, gedung perawatan kelas III, gedung Central Sterile Supply Departement (CSSD), gedung isolasi, instalasi O2 sentral dan kamar jenazah.

Jumlah ketenagaan pada saat ini sebanyak 263 orang yang terdiri dari 7 orang dokter spesialis, 9 orang dokter umum (4 orang PNS tubel), 2 orang dokter gigi, tenaga perawat 76 orang, tenaga paramedis Non Perawat 100 orang, ditambah dengan tenaga non medis 69 orang.

b. Visi dan Misi RSUD Raja Tombolotutu

Visi dari RSUD Raja Tombolotutu Tinombo adalah:

VISI :

“Menjadi Rumah Sakit Yang Tanggap, Berkualitas dan Mandiri”

MISI :

Merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mampu bertindak dengan segera dalam memberikan pelayanan terhadap seluruh pasien tanpa bersikap diskriminatif.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan perawatan yang sesuai dengan standar asuhan keperawatan.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Terwujudnya sistem manajemen dan sumber daya manusia yang mandiri.

TUJUAN :

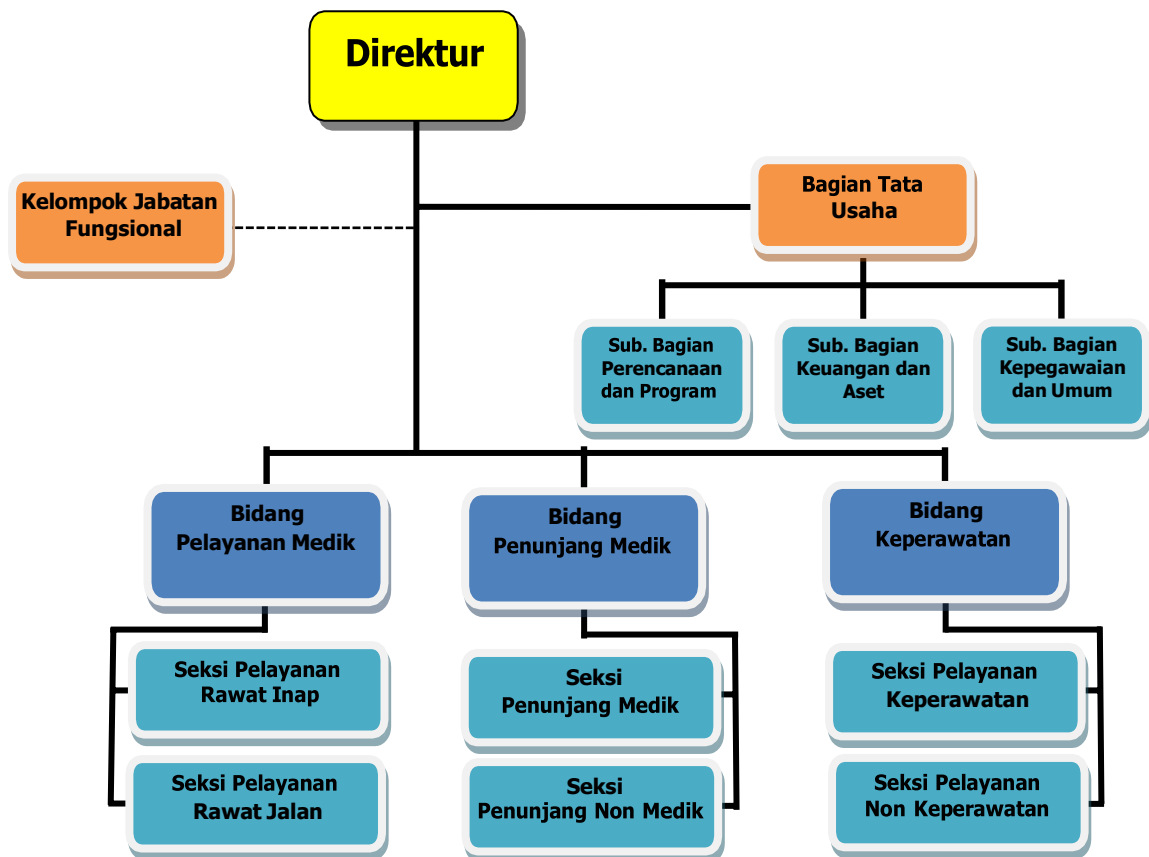
1. Tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan profesional.
2. Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit.
3. Meningkatkan pemanfaatan pelayanan rumah sakit oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja SDM rumah sakit.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Raja Tombolotutu Kabupaten Parigi Moutong

Berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong No. 5 Tahun 2023 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong tanggal 30 maret 2023, struktur organisasi RSUD Raja Tombolotutu di pimpin oleh seorang direktur, yang membawahi 1 bagian tata usaha, 3 bidang (bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang penunjang medik). bagian tata usaha membawahi 3 sub bagian sedangkan masing-masing bidang membawahi 2 seksi, satuan pengawas internal, komite -komite, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



Gambar 1. Struktur Organisasi

3.2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a) Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

b) Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

c) Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Raja Tombolotutu Kabupaten Parigi Mautong

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Raja Tombolotutu yaitu basis akrual. Entitas menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

d) Definisi

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi beserta pengertiannya:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan BLUD RSUD Raja Tombolotutu meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu.
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu.
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Raja Tombolotutu
- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Kas BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu.
- Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Raja Tombolotutu.
- Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD RSUD Raja Tombolotutu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Pendapatan BLUD-LO adalah hak BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan BLUD - LRA adalah semua penerimaan rekening BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Raja Tombolotutu, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- Rekening BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan BLUD - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan BLUD - LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan BLUD - LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Tagihan jangka panjang adalah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Raja Tombolotutu dan/atau hak BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya penjualan angsuran kepada pegawai BLUD RSUD Raja Tombolotutu, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

e) Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu. Tujuan umum laporan keuangan BLUD RSUD Raja Tombolotutu adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD RSUD Raja Tombolotutu adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD RSUD Raja Tombolotutu;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD RSUD Raja Tombolotutu;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi RSUD Raja Tombolotutu;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD RSUD Raja Tombolotutu untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD RSUD Raja Tombolotutu dalam mendanai aktivitasnya.

f) Tanggung Jawab atas Laporan keuangan

Direktur BLUD RSUD Raja Tombolotutu bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

g) Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Struktur dan Isi

1) Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- Nama entitas entitas pelaporan (BLUD RSUD Raja Tombolotutu);
- Cakupan laporan keuangan satu entitas tunggal;
- Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen laporan keuangan;
- Mata uang pelaporan adalah rupiah;
- Bahasa pelaporan adalah bahasa Indonesia; dan
- Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi relevan tidak hilang.

2) Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

3) Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

4) Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dalam rangka penyajian neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan.

5) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

- Pendapatan BLUD - LRA;
- belanja;
- transfer
- surplus/defisit-LRA;
- pembiayaan; dan
- sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pendapatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas daerah merupakan Pendapatan Daerah yang diklasifikasikan sebagai Lain-lain PAD yang Sah dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu diakui pada saat kas yang diterima BLUD RSUD Raja Tombolotutu disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan BLUD - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD RSUD Raja Tombolotutu menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya maka BLUD RSUD Raja Tombolotutu menyusun Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan entitas akuntansi/pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- Saldo Anggaran Lebih awal;
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- Lain-lain;
- Saldo Anggaran Lebih Akhir.

BLUD RSUD Raja Tombolotutu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya. Penggunaan SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B / SP2B-BLU.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Pos Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLUD dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni. Pos Pendapatan Alokasi APBD merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLUD dan BUD atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D belanja yang dari DPA APBD RSUD Raja Tombolotutu. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan akun untuk menyajikan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BLUD Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLUD. Pos Lain-lain merupakan pos untuk menyajikan penyesuaian-penyesuaian yang mempengaruhi nilai SAL akhir, misalnya selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran kas dan bank BLUD yang menggunakan mata uang asing pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Pendapatan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

7) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD RSUD Raja Tombolotutu mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD RSUD Raja Tombolotutu menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- Kas dan setara kas;
- Investasi jangka pendek;
- Piutang dari kegiatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu;
- Persediaan;
- Aset tetap;
- Kewajiban jangka pendek;
- Kewajiban jangka panjang; dan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

– Ekuitas.

BLUD RSUD Raja Tombolotutu mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila BLUD RSUD Raja Tombolotutu menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatannya, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas BLUD RSUD Raja Tombolotutu. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- berupa kas dan setara kas.
- Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi, aset tetap, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Aset tetap terdiri dari:

- Tanah;
- Peralatan dan mesin;
- Gedung dan bangunan;
- Jalan, irigasi, dan jaringan;
- Aset tetap lainnya; dan
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan jangka panjang
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Dana Kelolaan
- Aset yang dibatasi penggunaannya
- Aset Tak Berwujud
- Aset Lain-lain
- Akumulasi Amortisasi

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

- Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
- Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. BLUD RSUD Raja Tombolotutu tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya,

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BLUD RSUD Raja Tombolotutu mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari kebijakan akuntansi dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- piutang dirinci berdasarkan piutang yang berasal dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional
- persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang aset tetap;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

8) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

9) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan BLUD RSUD Raja Tombolotutu dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- Beban dari kegiatan operasional;
- Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- Pos luar biasa; dan
- Surplus/defisit-LO.

BLUD RSUD Raja Tombolotutu menyajikan Pendapatan BLUD - LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- pendapatan hasil kerja sama;
- pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan dari alokasi APBN adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi/atau tugas pembantuan dan lain-lain. Proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan jasa yang diperoleh dari jasa layanan yang sumber dananya berasal dari entitas akuntansi/entitas pelaporan. Contohnya pendapatan yang diperoleh dari program Jaminan Kesehatan Daerah. Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD Raja Tombolotutu Pendapatan yang berasal dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Pendapatan BLUD RSUD Raja Tombolotutu lainnya berupa:

- Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan
- Hasil pemanfaatan kekayaan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu
- Hasil investasi

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BLUD RSUD Raja Tombolotutu menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan BLUD - LO pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu diakui pada saat:

- timbulnya hak atas pendapatan;
- pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan BLUD - LO pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan BLUD - LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD RSUD Raja Tombolotutu tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan BLUD - LO pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO.

Akuntansi Pendapatan BLUD - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan BLUD - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu diakui pada saat:

- timbulnya kewajiban;
- terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD RSUD Raja Tombolotutu tanpa diikuti keluarnya kas. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD RSUD Raja Tombolotutu. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Beban pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

10) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- Lain-lain
- Ekuitas akhir.

BLUD RSUD Raja Tombolotutu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11) Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Umum tentang BLUD Rumah Sakit Umum Raja Tombolotutu;
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CATATAN	URAIAN	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)
3.3.1	PENDAPATAN-LRA	10.311.364.660,00	3.961.358.643,00
	Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh RSUD Tombolotutu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	A. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	10.311.364.660,00	3.961.358.643,00
	B. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00
	C. Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
	D. Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
	F. Pendapatan APBD	0,00	0,00
	G. Pendapatan APBN	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	10.311.364.660,00	3.961.358.643,00
3.3.2	BELANJA DAERAH	17.852.530.380,00	12.870.447.473,00
	BELANJA OPERASI	16.677.286.019,00	12.198.497.595,00
	Jumlah tersebut merupakan belanja operasi yang direalisasikan RSUD Tombolotutu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai	4.355.527.576,00	4.402.196.031,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.941.945.350,00	2.189.543.231,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.413.582.226,00	2.126.252.800,00
	Belanja Pegawai BLUD	0,00	86.400.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.400.000,00	0,00
	 Belanja Barang dan Jasa	12.321.758.443,00	7.796.301.564,00
	Belanja Barang	1.603.969.686,00	546.935.356,00
	Belanja Jasa	4.664.457.222,00	3.347.323.878,00
	Belanja Perjalanan Dinas	12.840.000,00	10.000.074,00
	Belanja Pemeliharaan	329.014.000,00	99.800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.711.477.535,00	3.792.242.256,00
	 BELANJA MODAL	1.175.244.361,00	671.949.878,00
	Jumlah tersebut merupakan belanja modal yang direalisasikan RSUD Tombolotutu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Modal Tanah	254.298.361,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920.946.000,00	277.541.578,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	194.575.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	199.833.300,00
	 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN PEMBIAYAAN	(7.579.565.719,80)	(21.107.586.425,00)
	Penerimaan Pembiayaan	173.816.433,00	239.687.724,00
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	SILPA/(SIKPA)	(7.405.749.286,80)	(20.867.898.701,00)
3.3.3	KAS DAN SETARA KAS	4.519.405.197,20	174.278.933,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di BLUD :		
	- BRI No.107601000523307	4.519.234.391,20	173.693.433,00
	- BRI No.107601000653568	170.806,00	0,00
	-Kas Tunai yang Belum disetor	-	123.000,00
	Jumlah Kas di BLUD	4.519.405.197,20	173.816.433,00
	 Kas Lainnya	0,00	462.500,00
	PPh 22	0,00	0,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	4.519.405.197,20	174.278.933,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CATATAN	URAIAN	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)
3.3.4	PIUTANG	1.989.557.130,66	2.725.835.439,00
	Jumlah tersebut merupakan klaim atau hak yang dimiliki oleh rumah sakit yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal neraca belum diterima secara kas per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan perincian sebagai berikut :		
	Piutang Pajak	0,00	0,00
	Piutang Retribusi	1.989.557.130,66	2.725.835.439,00
	Piutang Jampersal	577.898.000,00	577.898.000,00
	Piutang BPJS Kesehatan	677.926.100,00	1.307.426.300,00
	KIS APBD Non Aktif	718.862.929,00	762.296.800,00
	Piutang Pendapatan dari pengembalian	12.170.101,66	78.214.339,00
	Piutang Pasien Tunai	2.700.000,00	0,00
	Jumlah Piutang	1.989.557.130,66	2.725.835.439,00
	 Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	 0,00	 0,00
	Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya	(587.731.585,15)	(9.518.340,50)
	Jumlah Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang	(587.731.585,15)	(9.518.340,50)
	Jumlah Piutang Bersih	1.401.825.545,51	2.716.317.098,50
3.3.5	PERSEDIAAN	727.066.895,07	725.225.090,08
	Persediaan adalah barang berwujud yang kan habis pakai atau terjual namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai atau terjual. Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Persediaan Bahan Habis Pakai terdiri dari :		
	Alat Tulis Kantor	8.500.678,50	7.622.530,00
	Persediaan Kebersihan & Bahan Pembersih	14.935.150,00	0,00
	Persediaan Cetakan	41.753.772,14	13.138.867,50
	Persediaan Kertas dan Cover	158.625,00	801.377,00
	Persediaan Alat Listrik	14.826.664,20	2.124.003,00
	Persediaan Obat-Obatan	409.674.827,90	430.326.847,90
	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	166.719.625,06
	Persediaan Bahan Habis Pakai	137.416.727,33	4.691.389,62
	Persediaan Bahan Habis Pakai Covid 19	960.000,00	960.000,00
	Persediaan Bahan Habis Hibah	98.840.450,00	98.840.450,00
	Jumlah Persediaan	727.066.895,07	725.225.090,08
3.3.6	ASET TETAP	44.209.165.661,00	50.047.887.360,85
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	A. Tanah	499.469.003,00	499.469.003,00
	B. Gedung dan Bangunan	33.073.792.000,00	53.154.092.966,54
	C. Peralatan dan Mesin	53.226.690.126,54	32.088.126.000,00
	D. Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.048.287.000,00	4.048.287.000,00
	E. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	F. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	90.848.238.129,54	89.789.974.969,54
	 Akumulasi Penyusutan	 (46.639.072.468,54)	 (39.742.087.608,69)
	Nilai Buku Aset Tetap	44.209.165.661,00	50.047.887.360,85
3.3.7	ASET LAINNYA	348.176.792,00	138.144.125,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainya per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut		
	Aset Kondisi Rusak Berat	139.305.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud	388.560.000,00	139.305.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	527.865.000,00	139.305.000,00
	 Akumulasi Penyusutan	 (179.688.208,00)	 (1.160.875,00)
	Nilai Buku Aset Lainnya	348.176.792,00	138.144.125,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CATATAN	URAIAN	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)
3.3.8	KEWAJIBAN	11.146.877.913,90	9.037.069.252,85
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	462.500,00
	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00
	Utang Belanja Gaji	13.000.000,00	0,00
	Utang Beban Jasa	10.035.150.210,85	8.419.047.426,85
	Utang Beban Persediaan	1.086.987.703,05	617.559.326,00
	Utang Beban Makan dan Minum	0,00	0,00
	Utang Perjalanan Dinas	11.740.000,00	0,00
	Utang belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Bank	0,00	0,00
	Utang Koperasi	0,00	0,00
	Jumlah Hutang Usaha	11.146.877.913,90	9.037.069.252,85
3.3.9	EKUITAS	40.058.762.176,88	44.764.783.354,58
	Jumlah tersebut merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Ekuitas Awal	44.325.972.652,79	51.756.374.643,06
	Surplus/Defisit	(4.403.838.092,91)	(6.961.842.318,48)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	136.627.617,00	(29.748.970,00)
	Ekuitas Akhir	40.058.762.176,88	44.764.783.354,58
3.3.10	PENDAPATAN-LO	21.954.894.223,00	14.287.486.182,00
	Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh RSUD Tombolotutu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	A. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	10.029.739.739,00	5.438.417.702,00
	B. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00
	C. Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
	D. Pendapatan Usaha Lainnya	-	5.850.941,00
	E. Pendapatan APBD	11.925.154.484,00	8.843.217.539,00
	F. Pendapatan APBN	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	21.954.894.223,00	14.287.486.182,00
3.3.11	BEBAN		
	Jumlah tersebut merupakan beban-beban usaha RSUD Tombolotutu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut		
	A. Biaya Operasional	26.370.902.417,57	21.249.328.500,49
	Jumlah tersebut merupakan biaya operasional RSUD Tombolotutu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Beban Pegawai	4.406.927.576,00	4.227.196.031,00
	Beban Barang dan Jasa	14.316.382.977,97	9.404.815.575,18
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.075.512.172,85	7.611.074.755,00
	Beban Penyisihan Piutang	572.079.690,75	(2.503.471,00)
	Beban Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Beban Operasional	26.370.902.417,57	21.240.582.890,18
	B. Beban Non Operasional	0,00	0,00
	Jumlah tersebut merupakan beban non operasional RSUD Tombolotutu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
	Beban Bunga	0,00	0,00
	Beban Administrasi Bank	0,00	0,00
	Beban Kerugian Penjualan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Beban Kerugian Penurunan Nilai	0,00	0,00
	Beban Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Non Operasional	0,00	0,00

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU***

Lampiran – lampiran

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJATOMBOLOTUTU
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	RUMUS	PERSENTASE
Rasio Struktur Pengendalian		
Proporsi Penerimaan BLU (Operasional)	Total Pendapatan BLU = 10.029.739.739,00	= 45,66 %
	Total Pendapatan = 21.967.064.324,66	
Proporsi APBD	Total Pendapatan APBD = 11.925.154.484,00	= 54,29 %
	Total Pendapatan = 21.967.064.324,66	
Proporsi Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan Non Operasioanal = 0,00	= 0,00 %
	Total Pendapatan = 21.967.064.324,66	
Rasio Beban		
Rasio Beban Pelayanan		
Rasio Beban Pegawai	Jumlah Beban Pegawai = 4.406.927.576,00	= 16,71 %
	Total Beban Pelayanan = 26.370.902.417,57	
Rasio Beban Bahan	Jumlah Beban Bahan = 0,00	= 0,00 %
	Total Beban Pelayanan = 26.370.902.417,57	
Rasio Beban Jasa Pelayanan	Jumlah Beban Jasa Pelayanan = 0,00	= 0,00 %
	Total Beban Pelayanan = 26.370.902.417,57	
Total Beban Pemeliharaan	Jumlah Beban Pemeliharaan = 0,00	= 0,00 %
	Total Beban Pelayanan = 26.370.902.417,57	
Total Biaya Beban Barang dan Jasa	Jumlah Beban Barang dan Jasa = 14.316.382.977,97	= 54,29 %
	Total Beban Pelayanan = 26.370.902.417,57	
Total Beban Penyusutan	Jumlah Beban Penyusutan = 7.075.512.172,85	= 26,83 %
	Total Beban Pelayanan = 26.370.902.417,57	
Rasio Sumber dan Penggunaan		
Rasio Pendapatan/Beban	Total Pendapatan = 21.967.064.324,66	= 83,30 %
	Total Beban = 26.370.902.417,57	
Rasio BLUD/ Total Beban	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan = 10.029.739.739,00	= 38,03 %
	Total Beban = 26.370.902.417,57	
Rasio APBD/Total Beban	Total APBD = 11.925.154.484,00	= 45,22 %
	Total Beban = 26.370.902.417,57	
Rasio APBN/Total Beban	Total APBN = 0,00	= 0,00 %
	Total Beban = 26.370.902.417,57	
Rasio Aktivitas		
Aset Turn Over	Total Pendapatan = 21.967.064.324,66	= 42,90 %
	Total Aset = 51.205.640.090,78	
Fixed Aset Turn Over	Total Pendapatan = 21.967.064.324,66	= 49,69 %
	Total Aset Tetap = 44.209.165.661,00	
Surplus Defisit Anggaran	Surplus (Defisit) = (4.403.838.092,91)	= (20,05) %
	Total Pendapatan = 21.967.064.324,66	

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KAS DANA BOS
TAHUN 2023

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening (Bank Sulteng)	Total Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2022 (+)	Penambahan			Pengurangan			Total Saldo Kas BOS Per 31 Desember 2023
				Pendapatan Dana BOS Reguler TA 2023 (+)	Pendapatan Dana BOS Kinerja TA 2023 (+)	Pendapatan atas pelunasan piutang TGR (+)	Realisasi Belanja Dana BOS Reguler TA 2023 (-)	Realisasi Belanja Dana BOS Kinerja TA 2023 (-)	Jasa Gizi/Silpa Dana Bos TA 2022 telah setor KASDA (-)	
1	SD INPRES 1 SAUSU	1050102000124	166,00	101.520.000,00			101.520.000,00	-		166,00
2	SD INPRES 2 SAUSU	1050102000135	570,00	139.119.824,00	22.500.000,00		139.075.500,00	22.500.000,00		44.500,00
3	SD INPRES 3 SAUSU	1050102000021	54,00	46.060.000,00			46.060.000,00	-		54,00
4	SD INPRES 4 SAUSU	1050102000404	116,00	188.000.000,00			187.999.830,00	-		170,00
5	SD INPRES 5 SAUSU	1050102000216	368,00	42.300.000,00			42.300.000,00	-		368,00
6	SD INPRES 6 SAUSU	1050102000102	886,00	203.980.000,00			203.384.999,00	-		595.001,00
7	SD INPRES MALEALI	1050102000360	155,00	50.760.000,00			50.760.000,00	-		155,00
8	SD INPRES PAKAREME	1050102000205	188,00	96.820.000,00			96.820.000,00	-		188,00
9	SD KECIL CEMPAKASARI	1050102000220	64,00	41.360.000,00			41.360.000,00	-		64,00
10	SD KECIL SALUBANGA	1050102000301	195,00	56.400.000,00			56.393.900,00	-		6.100,00
11	SD KECIL SIWAKARYA	1050102000415	198,00	44.180.000,00			44.154.950,00	-		25.050,00
12	SD NEGERI 1 SAUSU TRANS	1050102000032	22,00	103.400.000,00			103.372.500,00	-		27.500,00
13	SD NEGERI MALEALI	1050102000393	188,00	118.440.000,00	22.500.000,00		118.440.000,00	22.500.000,00		188,00
14	SD NEGERI SAUSU PEORE	1050102000065	308.279,00	90.871.800,00			91.180.000,00	-		79,00
15	SD NEGERI TERPENCIL MANGGALAPI	1050102000183	114.896,00	56.286.000,00			56.480.000,00	-		96,00
16	SDK SAUSU TORONO	1050102000113	85,00	50.760.000,00			50.760.000,00	-		85,00
17	SD INPRES 1 Balinggi	1050102000371	-	120.320.000,00			120.320.000,00	-		-
18	SD INPRES 1 SULI	1050102000312	548,00	74.260.000,00			74.260.000,00	-		548,00
19	SD INPRES 2 SULI	1050102000150	27,00	65.800.000,00			65.800.000,00	-		27,00
20	SD INPRES 2 Balinggi	1050102000264	1.415,00	110.919.000,00			110.920.000,00	-		415,00
21	SD INPRES 3 Balinggi	1050102000323	290,00	48.880.000,00			48.880.000,00	-		290,00
22	SD INPRES 3 SULI	1050102000253	211,00	109.980.000,00	22.500.000,00		109.980.000,00	22.500.000,00		211,00
23	SD INPRES 4 Balinggi	1050102000382	2.633.418,00	64.114.800,00			66.740.000,00	-		8.740,00
24	SD INPRES 5 Balinggi	1050102000242	166,00	87.420.000,00			87.420.000,00	-		166,00
25	SD INPRES MALAKOSA	1050102000555	195,00	185.180.000,00			185.180.000,00	-		195,00
26	SD KECIL TAMASOVO	1050102000441	802,00	44.180.000,00			44.180.000,00	-		802,00
27	SD NEGERI 2 TOLAI	1050102000172	1.038,00	72.379.100,00			72.380.000,00	-		138,00
28	SD NEGERI 3 TOLAI	1050102000290	405,00	60.160.000,00			60.160.000,00	-		405,00
29	SD NEGERI 4 TOLAI	1050102000275	58.654,00	70.441.500,00			70.500.000,00	-		154,00
30	SD NEGERI MALAKOSA	1050102000231	239.650,00	183.060.480,00			183.380.000,00	-		130,00
31	SD INPRES 1 TOLAI	1050102000522	7.439,00	274.472.760,00	22.500.000,00		274.479.100,00	22.500.000,00		900,00
32	SD INPRES 2 TOLAI	1050102000485	-	126.900.000,00			126.708.800,00	-		191.200,00
33	SD INPRES 3 TOLAI	1050102000463	713.302,00	152.729.700,00			152.855.100,00	-		587.900,00
34	SD INPRES TANALANTO	1050102000544	249,00	96.820.000,00			96.820.000,00	-		249,00
35	SD INPRES TORUE	1050102000511	511,00	97.759.870,00			97.694.000,00	-		66.000,00
36	SD NEGERI 1 TOLAI	1050102000474	32,00	123.140.000,00			123.140.000,00	-		32,00
37	SD NEGERI 5 TOLAI	1050102000496	697.461,00	57.552.000,00			58.268.000,00	-		61,00
38	SD NEGERI ASTINA	1050102000570	11.984,00	132.508.500,00	22.500.000,00		131.075.800,00	22.500.000,00		1.464.200,00
39	SD NEGERI KECIL TOKASA	1050102000500	131,00	85.539.938,00			85.540.000,00	-		69,00
40	SD NEGERI PURWOSARI	1050102000533	417.122,00	257.143.010,00			257.560.000,00	-		132,00
41	SD NEGERI TORUE	1050102000430	234.557,00	144.526.350,00			144.760.000,00	-		907,00
42	SD INPRES 1 NAMBARU	1020102002813	222,00	160.740.000,00			160.643.600,00	-		96.400,00
43	SD INPRES BOYANTONGO	1020102001450	6.031,00	116.553.972,00			116.560.000,00	-		3,00
44	SD INPRES DOLAGO	1020102001085	4,00	187.060.000,00	22.500.000,00		187.060.000,00	22.500.000,00		4,00
45	SD INPRES LEMSA	1020102000945	9,00	53.227.000,00			53.387.300,00	-		188,00
46	SD INPRES SUMBERSARI	1020102000422	1.524.191,00	117.500.000,00	22.500.000,00		119.024.000,00	22.500.000,00		191,00
47	SD INPRES TINDAKI	1020102001343	663,00	119.379.500,00			119.380.000,00	-		163,00
48	SD KECIL BONESOMPE	1020102000282	20,00	69.560.000,00			69.560.000,00	-		20,00
49	SD KECIL OLOBARU	1020102002592	6.242,00	79.893.850,00			79.900.000,00	-		92,00
50	SD KECIL PKMT LEMUSA	1020102000304	72,00	60.160.000,00	22.500.000,00		59.989.750,00	22.500.000,00		72,00
51	SD KECIL UWEMEA DOLAGO	1020102005683	1.810,00	53.578.380,00	22.500.000,00		53.580.000,00	15.810.000,00		190,00
52	SD NEGERI DOLAGO	1020102000351	108,00	142.860.000,00	22.500.000,00		142.860.000,00	22.500.000,00		108,00
53	SD NEGERI INTI LEMUSA	1020102000352	317,00	128.779.766,00			128.780.000,00	-		83,00
54	SD NEGERI INTI MASARI	1020102002673	150,00	109.980.000,00	22.500.000,00		109.978.900,00	22.500.000,00		150,00
55	SD NEGERI SUMBERSARI	1020102000326	144.645,00	167.176.000,00	22.500.000,00		167.320.000,00	22.500.000,00		195,00
56	SD NEGERI TINDAKI	1020102004250	1.054,00	103.399.000,00			103.400.000,00	-		54,00
57	SDN INF 2 NAMBARU	1020102000993	43.229,00	87.376.800,00	22.500.000,00		87.420.000,00	22.500.000,00		29,00
58	SD INPRES 1 INTI BANTAYA	1020102005241	15,00	492.560.000,00			492.560.000,00	-		15,00
59	SD INPRES 2 BANTAYA	1020102005344	384.460,00	80.000.000,00			384.460.000,00	80.000.000,00		-
60	SD INPRES LEMO	1020102004154	79,00	130.660.000,00			130.660.000,00	-		79,00
61	SD INPRES MASIGI	1020102005871	75,00	140.060.000,00			140.060.000,00	-		75,00
62	SD INPRES MERTASARI	1020102004246	28,00	86.480.000,00			86.480.000,00	-		28,00
63	SD NEGERI 1 PARIGI	1020102002452	95,00	160.740.000,00			160.714.000,00	-		95,00
64	SD NEGERI 2 PARIGI	1020102002566	40.009,00	174.840.000,00			174.880.000,00	-		9,00
65	SD NEGERI 3 PARIGI	1020102005716	-	406.080.000,00			406.080.000,00	-		-
66	SD NEGERI 4 PARIGI	1020102002463	62,00	178.600.000,00			178.600.000,00	-		62,00
67	SD NEGERI BAMBALEMO	1020102005554	89,00	188.940.000,00			188.940.000,00	-		89,00
68	SD NEGERI INTI OLAYA	1020102001494	95,00	189.880.000,00			189.880.000,00	-		95,00
69	SD NEGERI POMBALOWO	1020102005462	28,00	102.460.000,00			102.460.000,00	-		28,00
70	SD NEGERI RANOMASAI	1020102000864	-	48.880.000,00			48.880.000,00	-		-
71	SD NEGERI TRANS OLAYA	1020102002216	20,00	70.500.000,00			70.500.000,00	-		20,00
72	SD INPRES 1 PARIGIMPUU	1020102003546	53,00	106.100.000,00			106.100.000,00	-		53,00
73	SD INPRES 2 PARIGIMPUU	1020102005834	106,00	117.499.988,00			101.345.000,00	-		16.155.000,00
74	SD INPRES KAYUBOKO	1020102004800	960,00	93.693.840,00			93.693.840,00	-		960,00
75	SD KECIL LANTIBU PARIGIMPUU	1020102003163	126,00	77.080.000,00			77.080.000,00	-		126,00
76	SD KECIL LENGARU	1020102003664	28.751,00	15.951.298,00			14.480.000,00	-		1.500.000,00
77	SD NEGERI BALIARA	1020102005926	27,00	61.100.000,00			61.100.000,00	-		27,00
78	SD NEGERI KAYUBOKO	1020102003211	194,00	174.839.812,00			173.890.000,00	-		6,00
79	SD NEGERI PARIGIMPUU	1020102001166	54,00	64.860.000,00			64.860.000,00	-		54,00
80	SD INPRES BINANGGA	1020102004434	9.028,00	62.971.094,00	22.500.000,00		62.980.000,00	18.060.000,00		122,00
81	SD INPRES PELAWA	1020102002522	83,00	66.740.000,00			66.740.000,00	-		83,00
82	SD KECIL AMPERA	1020102005446	247,00	82.720.000,00			82.720.000,00	-		247,00
83	SD NEGERI BINANGGA	1020102004025	37,00	117.500.000,00			117.500.000,00	-		37,00
84	SD NEGERI PELAWA	1020102002625	1.000,00	172.959.000,00			172.960.000,00	-		-
85	SD NEGERI PETAPA	1020102003373	33,00	176.720.000,00			176.720.000,00	-		33,00
86	SDN KECIL JONONUNU	1020102004316	97.759,00	69.462.500,00			69.560.000,00	-		259,00
87	SD INPRES 1 TOBOLI	1020102004294	75,00	148.520.000,00	80.000.000,00		148.520.000,00	80.000.000,00		75,00
88	SD INPRES 2 TOBOLI	1020102002006	1.119,00	124.079.062,00			124.080.000,00	-		181,00
89	SD KECIL KERUN SAYUR	1020102002331	211,00	11.280.000,00	22.500.000,00		11.280.000,00	22.500.000,00		211,00
90	SD KECIL PANGI	1020102007130	516,00	74.259.568,00			74.260.000,00	-		84,00
91	SD NEGERI INTI PANGI	1020102000960	70,00	117.499.960,00			117.500.000,00	-		30,00
92	SD NEGERI TOBOLI	1020102001774	246,00	94.940.000,00			94.940.000,00	-		246,00
93	SDK SAKINAH JAYA	1020102002474	207,00	56.399.986,00	22.500.000,00		56.400.000,00	22.500.000,00		193,00
94	SDK TARIPA JAYA	1020102002091	561,00	13.159.478,00			13.160.000,00	-		39,00
95	SDK TOBOLI BARAT	1020102004235	75,00	98.700.000,00			98.700.000,00	-		75,00
96	SD INPRES MARANTALE	1020102003421	1.081,00	81.779.200,00						

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening (Bank Sulteng)	Total Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2022 (+)	Penambahan			Pengurangan			Total Saldo Kas BOS Per 31 Desember 2023
				Pendapatan Dana BOS Reguler TA 2023 (+)	Pendapatan Dana BOS Kinerja TA 2023 (+)	Pendapatan atas pelunasan piutang TGR (+)	Realisasi Belanja Dana BOS Reguler TA 2023 (-)	Realisasi Belanja Dana BOS Kinerja TA 2023 (-)	Jasa Giro/Silpa Dana BOS TA 2022 oleh Penerima KASDA (-)	
123	SD NEGERI TOMBI	1020102004180	61,00	188.000.000,00			188.000.000,00	-	61,00	-
124	SDK PORAEGOA INDAH	1020102003535	85,00	42.300.000,00	22.500.000,00		42.300.000,00	20.790.000,00	85,00	1.710.000,00
125	SDN 1 INTI PEMBARA AMPHIBABO	1020102004482	219,00	143.820.000,00			143.820.000,00	-	219,00	-
126	SD INPRES 1 SIENO	1020102005930	71,00	147.580.000,00			147.580.000,00	-	71,00	-
127	SD INPRES 1 TOMOLI	1020102006022	38,00	104.340.000,00			104.340.000,00	-	38,00	-
128	SD INPRES 1 TORIBULU	1020102005996	12,00	125.960.000,00			125.960.000,00	-	12,00	-
129	SD INPRES 2 SIENO	1020102000761	102,00	54.520.000,00			54.520.000,00	-	102,00	-
130	SD INPRES 2 TORIBULU	1020102005436	240,00	163.560.000,00			163.560.000,00	-	240,00	-
131	SD INPRES 3 TORIBULU	1020102005985	22,00	56.400.000,00			53.300.000,00	-	22,00	3.100.000,00
132	SD INPRES 4 TORIBULU	1020102005904	70,00	160.740.000,00			160.740.000,00	-	70,00	-
133	SD INPRES PINOTU	1020102003642	73,00	110.920.000,00			110.920.000,00	-	73,00	-
134	SD INPRES TOMOLI SELATAN	1020102005333	150.000,00	92.910.000,00			93.060.000,00	-	-	-
135	SD KECIL SINGURA	1020102003395	73,00	92.120.000,00	22.500.000,00		90.344.000,00	9.900.000,00	73,00	14.376.000,00
136	SD KECIL TAEDO	1020102001903	69,00	17.860.000,00			17.860.000,00	-	69,00	-
137	SD NEGERI PINOTU	1020102004261	59,00	60.160.000,00			60.160.000,00	-	59,00	-
138	SD NEGERI SIBALAGO	1020102001251	296,00	69.560.000,00	22.500.000,00		69.560.000,00	22.500.000,00	296,00	-
139	SD NEGERI TORIBULU	1020102001321	270,00	53.580.000,00			53.580.000,00	-	270,00	-
140	SD TERPENCIL BUKIT INDAH SINGURA	1020102005941	77,00	18.800.000,00			18.800.000,00	-	77,00	-
141	SDN INTI TOMOLI	1020102006000	16.756,00	93.043.288,00			93.040.000,00	-	44,00	-
142	SD INPRES 1 DONGGULU	1020102003432	18.706,00	135.341.550,00			135.360.000,00	-	256,00	-
143	SD INPRES 1 KASIMBAR	1020102003244	48,00	201.160.000,00			201.160.000,00	-	48,00	-
144	SD INPRES 2 KASIMBAR	1020102003970	9,00	68.620.000,00			68.620.000,00	-	9,00	-
145	SD INPRES 3 KASIMBAR	1020102001063	370,00	130.660.000,00			130.660.000,00	-	370,00	-
146	SD INPRES 4 KASIMBAR	1020102005285	9.052,00	47.931.000,00			47.940.000,00	-	52,00	-
147	SD INPRES BANPRES POSONA	1020102001866	761,00	64.860.000,00			64.860.000,00	-	761,00	-
148	SD INPRES DESPOT POSONA	1020102003174	283,00	73.320.000,00			73.320.000,00	-	283,00	-
149	SD INPRES LAEMANTA	1020102003885	500,00	131.599.500,00			124.026.900,00	-	-	7.573.100,00
150	SD KECIL LAEMANTA	1020102003874	53,00	78.960.000,00			78.960.000,00	-	53,00	-
151	SD KECIL TORIAPES KASIMBAR	1020102005355	185,00	47.000.000,00			47.000.000,00	-	185,00	-
152	SD KECIL TSM POSONA	1020102001310	28,00	28.199.972,00			28.200.000,00	-	-	-
153	SD NEGERI 1 DONGGULU	1020102002614	79,00	107.160.000,00			107.160.000,00	-	79,00	-
154	SD NEGERI 1 KASIMBAR	1020102004493	327,00	86.480.000,00			86.480.000,00	-	327,00	-
155	SD NEGERI 1 LAEMANTA	1020102006044	8.963.241,00	159.298.451,00			158.260.000,00	14.445.000,00	-	1.038.000,00
156	SD NEGERI 1 POSONA	1020102005226	202,00	86.480.000,00			86.480.000,00	-	202,00	-
157	SD NEGERI 2 DONGGULU	1020102003513	-	105.280.000,00			105.280.000,00	-	-	-
158	SD NEGERI 2 KASIMBAR	1020102003561	138,00	113.740.000,00			113.740.000,00	-	138,00	-
159	SD NEGERI 2 LAEMANTA	1020102004176	189.216,00	77.831.000,00			78.020.000,00	-	216,00	-
160	SD NEGERI 2 POSONA	1020102005311	40,00	154.160.000,00			154.160.000,00	-	40,00	-
161	SD NEGERI 3 KASIMBAR	1020102006033	1.006,00	59.219.125,00			59.220.000,00	-	131,00	-
162	SD NEGERI AMALALANG KASIMBAR SELATAN	1020102003010	7.833,00	29.140.000,00	22.500.000,00		29.140.000,00	-	33,00	8.055.000,00
163	SD NEGERI SILAMPAYANG	1020102002205	26.113,00	73.294.000,00			73.120.000,00	-	113,00	200.000,00
164	SD INPRES 1 MALANGGO	1020102003012	7.607,00	95.872.400,00			95.880.000,00	-	7,00	-
165	SD INPRES 1 MANINILI	1020102005414	305,00	54.519.700,00			54.519.700,00	-	5,00	300,00
166	SD INPRES 1 SIGENTI	1020102000794	-	73.320.000,00			73.320.000,00	-	-	-
167	SD INPRES 1 SINEY	1020102003723	71.033,00	83.589.000,00	22.500.000,00		83.660.000,00	22.465.000,00	33,00	35.000,00
168	SD INPRES 1 TADA	1020102005742	1.546,00	143.818.500,00			143.820.000,00	-	46,00	-
169	SD INPRES 2 MALANGGO	1020102004401	62,00	164.500.000,00			144.748.600,00	-	62,00	19.751.400,00
170	SD INPRES 2 MANINILI	1020102003080	948.020,00	29.132.000,00			30.080.000,00	-	20,00	-
171	SD INPRES 2 SIGENTI	1020102005650	7.000,00	56.393.000,00			56.400.000,00	-	-	-
172	SD INPRES 2 SINEY	1020102001424	202,00	102.460.000,00			102.460.000,00	-	202,00	-
173	SD INPRES 2 TADA	1020102002426	16,00	156.980.000,00			156.980.000,00	-	16,00	-
174	SD INPRES 3 MANINILI	1020102002640	10.202,00	137.230.000,00			137.240.000,00	-	202,00	-
175	SD INPRES 3 SIGENTI	1020102000492	379,00	136.300.000,00			136.300.000,00	-	379,00	-
176	SD INPRES 3 SINEY	1020102005116	26,00	53.580.000,00			53.580.000,00	-	26,00	-
177	SD INPRES 3 TADA	1020102002842	32,00	68.620.000,00			68.620.000,00	-	32,00	-
178	SD INPRES 4 TADA	1020102002345	-	62.980.000,00			62.980.000,00	-	-	-
179	SD INPRES 5 TADA	1020102002555	3.062,00	192.697.000,00			192.700.000,00	-	62,00	-
180	SD KECIL PIMPIT	1020102003115	69,00	21.620.000,00			21.620.000,00	-	69,00	-
181	SD KECIL TERPENCIL MALETOTO	1020102000831	2.140,00	4.697.920,00	22.500.000,00		4.700.000,00	22.500.000,00	60,00	-
182	SD NEGERI BAHARI TADA	1020102002544	51,00	68.620.000,00			68.620.000,00	-	51,00	-
183	SD NEGERI INTI SIGENTI	1020102002581	-	157.920.000,00			157.920.000,00	-	-	-
184	SD NEGERI MALANGGO	1020102004412	58,00	78.960.000,00			78.960.000,00	-	58,00	-
185	SD NEGERI MANINILI	1020102001446	1.061,00	103.399.000,00			103.400.000,00	-	61,00	-
186	SD NEGERI SIBALIDA SIGENTI	1020102004423	1,00	94.000.000,00			94.000.000,00	-	1,00	-
187	SD NEGERI SINEY	1020102005661	95,00	84.600.000,00			84.600.000,00	-	95,00	-
188	SD NEGERI SINEY TENGAH	1020102006055	27.057,00	75.173.000,00			75.200.000,00	-	57,00	-
189	SD NEGERI TADA	1020102005403	319,00	114.680.000,00			114.680.000,00	-	319,00	-
190	SD NEGERI TERPENCIL LAMBANI TADA	1020102001273	24,00	24.440.000,00			24.440.000,00	-	24,00	-
191	SD NEGERI UPT MANINILI	1020102005613	13.653,00	19.726.500,00			19.740.000,00	-	153,00	-
192	SD PPT 2 MANINILI	1020102000363	95,00	51.700.000,00			51.700.000,00	-	95,00	-
193	SDN TANGKELAI	1020102002533	55,00	101.520.000,00			101.520.000,00	-	55,00	-
194	SD INPRES 1 SIDOAN	1020102004062	30,00	117.500.000,00			117.500.000,00	-	30,00	-
195	SD INPRES 2 BAINAA	1020102004165	4.589,00	58.275.500,00			58.280.000,00	-	89,00	-
196	SD INPRES 2 SIDOAN	1020102003896	25.022,00	116.535.000,00			116.560.000,00	-	22,00	-
197	SD INPRES 3 SIDOAN	1020102003583	81,00	110.920.000,00			110.920.000,00	-	81,00	-
198	SD INPRES 4 TERPENCIL SIDOAN	1020102005543	36,00	88.360.000,00			88.360.000,00	-	36,00	-
199	SD INPRES SIPAYO	1020102003852	173,00	45.790.000,00			45.790.000,00	-	173,00	-
200	SD KECIL BANGKALAN	1020102003841	18.222,00	93.042.000,00			93.060.000,00	-	222,00	-
201	SD KECIL OGABAGIS	1020102004073	10.184,00	85.530.000,00			84.540.000,00	-	184,00	1.000.000,00
202	SD KECIL OGOLEMO BOLONG	1020102004014	67,00	117.500.000,00			117.500.000,00	-	67,00	-
203	SD KECIL POLOBUU	1020102003955	72,00	25.380.000,00			25.380.000,00	-	72,00	-
204	SD KECIL SIDOAN TIMUR	1020102005322	48,00	65.800.000,00			65.800.000,00	-	48,00	-
205	SD KECIL TERPENCIL PULA AN	1020102003233	60,00	28.200.000,00			28.200.000,00	-	60,00	-
206	SD NEGERI 1 SIDOAN	1020102005856	56,00	133.480.000,00			133.480.000,00	-	56,00	-
207	SD NEGERI 2 SIDOAN	1020102003922	87,00	132.540.000,00			132.540.000,00	-	87,00	-
208	SD NEGERI BONDYOYONG	1020102003491	75,00	121.260.000,00			121.260.000,00	-	75,00	-
209	SD NEGERI SIPAYO	1020102004051	177,00	109.040.000,00			109.040.000,00	-	177,00	-
210	SDK TERPENCIL OGOTULO	1020102000256	81,00	80.840.000,00			80.840.000,00	-	81,00	-
211	SD INPRES 1 BAINAA	1020102000040	11.975,00	44.168.050,00	22.500.000,00		44.180.000,00	22.500.000,00	25,00	-
212	SD INPRES 1 DUSUNAN	1020102004445	123,00	67.680.000,00			67.680.000,00	-	123,00	-
213	SD INPRES 1 LOMBOK	1020102005451	688,00	31.959.540,00			31.960.000,00	-	228,00	-
214	SD INPRES 1 TINOMBO	1020102003890	127.070,00	85.475.000,00			85.475.000,00	-	127.025,00	1.950.000,00
215	SD INPRES 2 TERPENCIL LOMBOK	1020102000783	876,00	238.759.200,00			238.760.000,00	-	75,00	-
216	SD INPRES 2 TINOMBO	1020102005215	50,00	58.280.000,00	22.500.000,00		58.280.000,00	22.500.000,00	50,00	-
217	SD INPRES 3 TERPENCIL BAINAA	1020102000702	150.140,00	118.440.000,00			118.440.000,00	-	150.140,00	-
218	SD INPRES 3 TERPENCIL LOMBOK	1020102003502	55.079,00	219.905.000,00			219.960.000,00	-	79,00	-
219	SD INPRES DONGKAS	1020102005381	34.810,00	79.896.000,00						

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening (Bank Sulteng)	Total Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2022 (+)	Penambahan			Pengurangan			Total Saldo Kas BOS Per 31 Desember 2023
				Pendapatan Dana BOS Reguler TA 2023 (+)	Pendapatan Dana BOS Kinerja TA 2023 (+)	Pendapatan atas pemenuhan piutang TGR (+)	Realisasi Belanja Dana BOS Reguler TA 2023 (-)	Realisasi Belanja Dana BOS Kinerja TA 2023 (-)	Jasa Giro/Silpa Dana Bos TA 2022 selanjutnya KASDA (-)	
256	SD NEGERI1 BOBALO	1020102005764	26,00	121.260.000,00			121.260.000,00	-	26,00	-
257	SD NEGERI1 EEYA	1020102002161	206,00	108.100.000,00			108.100.000,00	-	206,00	-
258	SD NEGERI1 PALASA	1020102005753	182,00	219.960.000,00			219.960.000,00	-	182,00	6.124.000,00
259	SD NEGERI2 PALASA	1020102002146	106.437,00	40.420.000,00	22.500.000,00		40.420.000,00	20.985.000,00	106.437,00	1.515.000,00
260	SD NEGERI2 TERPENCIL BOBALO	1020102005624	33,00	171.080.000,00			171.080.000,00	-	33,00	-
261	SD NEGERI3 PALASA	1020102001870	276,00	106.220.000,00	22.500.000,00		106.220.000,00	18.626.500,00	276,00	3.873.500,00
262	SD NEGERI3 TERPENCIL BOBALO	1020102000293	73,00	60.160.000,00			60.160.000,00	-	73,00	-
263	SD NEGERI3 TERPENCIL EEYA	1020102000713	103,00	67.680.000,00			67.680.000,00	-	103,00	-
264	SD NEGERI4 PALASA	1020102001763	263,00	86.480.000,00			86.480.000,00	-	263,00	-
265	SD NEGERI4 TERPENCIL MAGANGGAL BOBA	1020102001844	113,00	131.600.000,00			131.600.000,00	-	113,00	-
266	SD NEGERI5 TERPENCIL PALASA	1030102000200	36,00	172.960.000,00	22.500.000,00		172.960.000,00	22.500.000,00	36,00	-
267	SD NEGERI TERPENCIL PEBOUNANG	1020102002253	83,00	209.620.000,00			209.620.000,00	-	83,00	-
268	SD NEGERI TERPENCIL PINESANGKANG	1020102000315	45,00	107.160.000,00			106.160.000,00	-	45,00	1.000.000,00
269	SD NEGERI ULATAN	1020102005705	105.029,00	45.955.000,00	22.500.000,00		46.060.000,00	22.500.000,00	29,00	-
270	SDN 2 TERPENCIL EEYA	1020102002404	190,00	145.700.000,00			145.700.000,00	-	190,00	-
271	SDN INP 5 PALASA	1020102006081	209,00	123.140.000,00			123.140.000,00	-	209,00	-
272	SDN KECIL OGOMJOLO	1020102002334	54,00	112.800.000,00			112.800.000,00	-	54,00	-
273	SDN KECIL TERPENCIL BOBOLI ULATAN	1020102002150	189,00	204.920.000,00	22.500.000,00		204.920.000,00	22.500.000,00	189,00	-
274	SDN KECIL TERPENCIL DONGKALAN	1020102003255	125,00	113.740.000,00			113.740.000,00	-	125,00	-
275	SDN KECIL TERPENCIL OGUANG	1020102002754	78,00	177.660.000,00	22.500.000,00		177.659.800,00	22.467.000,00	78,00	33.200,00
276	SDN KECIL TERPENCIL POLU KAPAL	1020102002802	91,00	61.100.000,00			61.100.000,00	-	91,00	-
277	SD INPRES 1 AMBESIA	1020102001133	60,00	202.099.958,00			202.100.000,00	-	18,00	-
278	SD INPRES 1 OGOTOMUBU	1020102000886	182,00	95.880.000,00			95.880.000,00	-	182,00	-
279	SD INPRES 1 TILUNG	1020102001074	39,00	200.220.000,00			200.220.000,00	-	39,00	-
280	SD INPRES 1 TINGKULANG	1020102000890	285,00	130.659.330,00			130.660.000,00	-	215,00	-
281	SD INPRES 1 TOMINI	1030102000816	66,00	123.140.000,00	22.500.000,00		123.140.000,00	22.500.000,00	66,00	-
282	SD INPRES 2 AMBESIA	1020102001704	47,00	144.760.000,00			144.760.000,00	-	47,00	-
283	SD INPRES 2 OGOTOMUBU	1020102001155	80,00	148.520.000,00			148.520.000,00	-	80,00	-
284	SD INPRES 2 TOMINI	1020102000724	11,00	177.660.000,00			177.660.000,00	-	11,00	-
285	SD K TERPENCIL SARAMBU	1020102001365	162,00	75.200.000,00			75.200.000,00	-	162,00	-
286	SD KECIL TERPENCIL GINONGAN	1020102000842	50,00	52.640.000,00			52.640.000,00	-	50,00	-
287	SD KECIL TERPENCIL GUNUNG PAKUKU TIN	1020102001100	71,00	61.100.000,00			61.100.000,00	-	71,00	-
288	SD KECIL TERPENCIL PANATALAN	1020102005602	94,00	62.040.000,00			62.040.000,00	-	94,00	-
289	SD KECIL TERPENCIL SALIJENGI SULILOPON	1020102005974	364,00	45.119.672,00			45.120.000,00	-	36,00	-
290	SD KECIL TERPENCIL TAMBALANG-Tomini Utara	1020102001041	74,00	61.100.000,00			61.100.000,00	-	74,00	-
291	SD NEGERI1 OGOTOMUBU	1020102001203	13,00	157.920.000,00			157.920.000,00	-	13,00	-
292	SD NEGERI1 TILUNG	1020102001170	91,00	55.460.000,00			55.460.000,00	-	91,00	-
293	SD NEGERI2 TERPENCIL OGOTOMUBU	1020102001634	9,00	106.220.000,00			106.220.000,00	-	9,00	-
294	SD NEGERI2 TILUNG	1020102001096	48,00	91.180.000,00			91.180.000,00	-	48,00	-
295	SD NEGERI AMBESIA	1020102000536	32.253,00	185.147.850,00			182.830.000,00	-	103,00	2.350.000,00
296	SD NEGERI TINGKULANG	1020102000923	40,00	89.360.000,00			89.360.000,00	-	40,00	-
297	SD NEGERI TOMINI	1020102002301	33,00	121.260.000,00			121.260.000,00	-	33,00	-
298	SD INPRES 1 KOTARAYA	1030102001025	66,00	244.400.000,00			244.400.000,00	-	66,00	-
299	SD INPRES 1 MENSUNG	1030102000104	169,00	158.860.000,00			158.860.000,00	-	169,00	-
300	SD INPRES 1 MEPANGA	1030102000185	3.086.074,00	167.994.000,00			171.080.000,00	-	74,00	-
301	SD INPRES 2 KAYU AGUNG	1030102000793	100.003,00	114.580.000,00			114.680.000,00	-	3,00	-
302	SD INPRES 2 KOTARAYA	1030102000594	4.064,00	156.036.000,00			156.040.000,00	-	64,00	-
303	SD INPRES 2 MENSUNG	1030102000115	65.052,00	142.880.000,00			142.880.000,00	-	65.052,00	-
304	SD INPRES 2 MEPANGA	1030102000071	39,00	156.980.000,00			156.980.000,00	-	39,00	-
305	SD INPRES 2 TILUNG	1030102000093	28,00	110.920.000,00			110.920.000,00	-	28,00	-
306	SD INPRES 3 KAYU AGUNG	1030102001014	602.045,00	116.898.000,00			117.500.000,00	-	45,00	-
307	SD INPRES 3 KOTARAYA	1030102000863	72,00	126.900.000,00			126.900.000,00	-	72,00	-
308	SD NEGERI1 KAYU AGUNG	1030102000362	127,00	178.600.000,00			178.600.000,00	-	127,00	-
309	SD NEGERI2 KAYU AGUNG	1030102000885	5,00	92.120.000,00			92.120.000,00	-	5,00	-
310	SD NEGERI BUCIS	1030102000524	70,00	119.380.000,00			119.380.000,00	-	70,00	-
311	SD NEGERI KOTARAYA	1030102000012	205.695,00	306.234.400,00	22.500.000,00		306.440.000,00	22.500.000,00	95,00	-
312	SD NEGERI MENSUNG	1030102000373	4.535,00	147.575.330,00			147.580.000,00	-	65,00	-
313	SD NEGERI MEPANGA	1030102000782	206,00	136.299.800,00		6.613.000,00	142.313.000,00	-	6,00	600.000,00
314	SD NEGERI OGOTIOT	10301020000410	85.058,00	182.275.000,00			182.360.000,00	-	58,00	-
315	SD INPRES 1 MALINO	1030102000981	-	86.480.000,00			86.480.000,00	-	-	-
316	SD INPRES 1 ONGKA	1030102001084	78.004,00	197.382.000,00			197.400.000,00	-	60.004,00	-
317	SD INPRES 1 TINOMBALA	1030102000395	40,00	131.600.000,00	22.500.000,00		131.600.000,00	22.500.000,00	40,00	-
318	SD INPRES 2 MALINO	1030102001106	17.045,00	66.740.000,00			66.740.000,00	-	66,74	-
319	SD INPRES 2 ONGKA	1030102001051	31,00	154.160.000,00			154.160.000,00	-	31,00	-
320	SD INPRES 2 TINOMBALA	1030102000970	42,00	157.920.000,00			157.920.000,00	-	42,00	-
321	SD INPRES 3 MALINO	1030102001062	30,00	88.360.000,00			88.360.000,00	-	30,00	-
322	SD K KARYA MANDIRI Wilayah Khusus	1030102000174	83,00	48.880.000,00	22.500.000,00		48.880.000,00	22.500.000,00	83,00	-
323	SD K TABOLO BOLO	1030102000550	46,00	85.540.000,00			85.540.000,00	-	46,00	-
324	SD KECIL LANGSAT	1030102000911	12.023,00	34.780.000,00			34.780.000,00	-	23,00	-
325	SD KECIL TINOMBAKASARI	1030102000110	92,00	89.300.000,00			89.300.000,00	-	92,00	-
326	SD NEGERI1 ONGKA	1030102000992	3,00	195.520.000,00			195.520.000,00	-	3,00	-
327	SD NEGERI2 ONGKA	1030102001246	904,00	116.559.096,00			116.560.000,00	-	-	-
328	SD NEGERI DESPOT ONGKA	1030102000572	49,00	19.740.000,00			19.740.000,00	-	49,00	-
329	SD NEGERI MALINO	1030102001235	-	154.160.000,00			154.160.000,00	-	-	-
330	SD NEGERI SALMEKAR Wilayah Khusus	1030102001095	148,00	70.500.000,00			69.900.000,00	-	148,00	600.000,00
331	SD NEGERI TINOMBALA	1030102001121	43,00	69.560.000,00	22.500.000,00		69.560.000,00	22.500.000,00	43,00	-
332	SDN OGOMEGANGDAERAH KHUSUS	1030102000066	102,00	75.960.000,00	22.500.000,00		75.280.000,00	22.500.000,00	102,00	-
333	SDN SANTIGI	1030102000900	3,00	114.680.000,00			114.680.000,00	-	3,00	-
334	SD INPRES 1 WANAMUKTI	1030102000620	-	136.300.000,00			136.300.000,00	-	-	-
335	SD INPRES 2 WANAMUKTI	1030102000141	84,00	133.480.000,00			133.480.000,00	-	84,00	-
336	SD INPRES 3 WANAMUKTI	1030102000690	300,00	114.679.717,00			114.680.000,00	-	17,00	-
337	SD INPRES BAJO	1030102001036	26,00	116.560.000,00			116.560.000,00	-	26,00	-
338	SD INPRES BERINGIN JAYA	1030102000432	500,00	167.319.659,00			167.320.000,00	-	159,00	-
339	SD INPRES BOLANG	1030102000734	186,00	82.720.000,00			82.720.000,00	-	186,00	-
340	SD INPRES BOMBAN	1030102001040	79,00	83.660.000,00			83.660.000,00	-	79,00	-
341	SD INPRES SRITABAANG	1030102000852	188.004,00	123.892.000,00			124.080.000,00	-	4,00	-
342	SD K BOLANO	1030102000664	148,00	28.200.000,00			28.200.000,00	-	148,00	-
343	SD KECIL BOMBAN	1030102000712	90,00	15.040.000,00			15.040.000,00	-	90,00	-
344	SD KECIL TALUNDANG	1030102000756	144,00	31.960.000,00			31.960.000,00	-	144,00	-
345	SD NEGERI1 BOLANO	1030102000535	6,00	135.360.000,00			135.360.000,00	-	6,00	-
346	SD NEGERI2 BOLANO	1030102000874	65,00	123.140.000,00			123.140.000,00	-	65,00	-
347	SD NEGERI WANAMUKTI UTARA	1030102000126	88.892,00	39.631.500,00			35.710.000,00	-	103,00	500,00
348	SDK BANGKARA	1030102000723	1.000,00	51.699.194,00			51.700.000,00	-	194,00	-
349	SDN BAO	1030102000476	41,00	125.960.000,00			125.960.000,00	-	41,00	-
350	SD INPRES 1 KOTANAGAYA	1030102001073	17.076,00	190.803.000,00			190.820.000,00	-	76,00	-
351	SD INPRES 1 LAMBUNU	1030								

No	Nama Sekolah	Nomor Rekening (Bank Sulteng)	Total Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2022 (+)	Penambahan			Pengurangan			Total Saldo Kas BOS Per 31 Desember 2023
				Pendapatan Dana BOS Reguler TA 2023 (+)	Pendapatan Dana BOS Kinerja TA 2023 (+)	Pendapatan atas pemasaran piutang TGR (+)	Realisasi Belanja Dana BOS Reguler TA 2023 (-)	Realisasi Belanja Dana BOS Kinerja TA 2023 (-)	Jasa Giro/Silpa Dana Bos TA 2022 melalui KASDA (-)	
386	SD KECIL OLONGGATA	1030102000255	21,00	103.400.000,00			103.376.000,00	-	21,00	24.000,00
387	SD NEGERI 1 MOUTONG	1030102000491	650,00	140.059.400,00			140.060.000,00	-	50,00	-
388	SD NEGERI 1 TULADENGGI	1030102000660	702.942,00	36.659.421,00			37.212.000,00	-	363,00	150.000,00
389	SD NEGERI 2 MOUTONG	1030102001250	5.157,00	156.034.843,00			155.947.300,00	-	-	92.700,00
390	SD NEGERI 2 TULADENGGI	1030102000222	77,00	64.860.000,00			64.860.000,00	-	77,00	-
391	SD NEGERI 3 MOUTONG	1030102000023	100.231,00	154.059.800,00			154.160.000,00	-	31,00	-
392	SD NEGERI 4 MOUTONG	1030102001283	173,00	125.960.000,00	22.500.000,00		125.960.000,00	22.500.000,00	173,00	-
393	SD NEGERI GIO	1030102000351	40.060,00	171.040.000,00	80.000.000,00		171.080.000,00	80.000.000,00	60,00	-
394	SD NEGERI PEMBUNI	1030102000244	86,00	108.100.000,00			108.099.900,00	-	86,00	100,00
395	SD NEGERI SEJOLI	1030102000266	55,00	94.000.000,00			93.950.000,00	-	55,00	50.000,00
TOTAL KAS DANA BOS SD			28.398.678,00	42.707.322.237,00	1.695.000.000,00	6.613.000,00	42.654.011.978,00	1.646.235.500,00	801.438,00	136.284.999,00
1	SMP NEGERI 1 SAUSU	1050102000345	1.237.412,00	295.098.400,00	140.000.000,00		291.139.900,00	140.000.000,00	812,00	5.195.100,00
2	SMP NEGERI 2 SAUSU	1050102000076	100.380,00	207.540.000,00			207.640.000,00	-	380,00	-
3	SMP NEGERI 3 SAUSU	1050102000043	1.806.978,00	109.662.000,00			111.453.000,00	-	978,00	15.000,00
4	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SAUSU	1050102000426	28.000,00	37.119.288,00			37.147.000,00	-	288,00	-
5	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 SAUSU	1050102000566	11.550,00	89.148.450,00	35.000.000,00		88.155.000,00	29.000.000,00	-	6.005.000,00
6	SMP NEGERI SATU ATAP 3 SAUSU	1050102000801	29.838,00	34.796.000,00			34.825.000,00	-	838,00	-
7	SD SMP SATU ATAP NEGERI 4 SAUSU	1050102000054	25.173,00	69.600.000,00			69.625.000,00	-	173,00	-
8	SMP NEGERI 1 BALINGGI	1050102000146	995.155,00	391.088.000,00	35.000.000,00		388.303.000,00	29.000.000,00	3.155,00	9.777.000,00
9	SMP NEGERI 2 BALINGGI	1050102000161	248.406,00	260.752.000,00			259.854.600,00	-	406,00	1.145.400,00
10	SMP NEGERI 3 BALINGGI	1050102000334	3.610.786,00	296.848.700,00	35.000.000,00		297.189.600,00	29.000.000,00	19.486,00	9.250.400,00
11	SMP NEGERI 1 TORUE	1050102000010	2.450.937,00	316.735.300,00			309.801.500,00	-	237,00	9.384.500,00
12	SMP SATU ATAP NEGERI 1 TORUE	1050102000286	587.373,00	80.780.750,00	35.000.000,00		80.872.500,00	28.926.500,00	123,00	6.569.000,00
13	SMP NEGERI 1 PARIGI SELATAN	1020102002603	498,00	241.280.000,00			241.158.000,00	-	498,00	122.000,00
14	SMP NEGERI 2 PARIGI SELATAN	1020102000595	30.438,00	143.809.000,00			143.840.000,00	-	38,00	-
15	SMP SATU ATAP NEGERI 3 PARIGI SELATAN	1020102000735	238.918,00	61.480.000,00			61.118.000,00	-	918,00	600.000,00
16	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 PARIGI SELATAN	1020102000805	1.976,00	62.639.200,00			62.628.000,00	-	1.176,00	12.000,00
17	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 3 PARIGI SELATAN	1020102001052	11.123,00	35.960.000,00			35.971.000,00	-	123,00	-
18	SMP NEGERI 1 PARIGI	1020102004272	786.481,00	560.654.000,00	25.000.000,00		561.440.000,00	19.000.000,00	481,00	6.000.000,00
19	SMP NEGERI 2 PARIGI	1020102003804	3.036.789,00	571.178.300,00			574.215.000,00	-	89,00	-
20	SMP NEGERI 3 PARIGI	1020102003443	236.159,00	165.867.200,00			166.102.800,00	-	559,00	-
21	SMP NEGERI MODEL TONIASA PARIGI	1020102000971	10,00	74.240.000,00			74.240.000,00	-	-	10,00
22	SMP SATU ATAP NEGERI 1 PARIGI BARAT	1020102001413	329.182,00	146.991.800,00			147.320.800,00	-	182,00	-
23	SMP SATAP NEGERI 2 PARIGI BARAT	1020102003992	44.403,00	78.880.000,00			78.924.000,00	-	-	403,00
24	SMP NEGERI 1 PARIGI TENGAH	1020102001531	38.801,00	106.720.000,00			106.758.000,00	-	801,00	-
25	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 PARIGI TENGAH	1020102003675	37.024,00	49.880.000,00			49.917.000,00	-	24,00	-
26	SMP NEGERI 1 PARIGI UTARA	1020102005694	119.173,00	293.390.500,00	35.000.000,00		293.509.000,00	29.000.000,00	673,00	6.000.000,00
27	SMP NEGERI 1 SINIU	1020102004471	681,00	168.200.000,00			168.200.000,00	-	681,00	-
28	SMP NEGERI 1 AMPIBABO	1020102005392	4.448,00	394.396.000,00			394.389.000,00	-	448,00	11.000,00
29	SMP NEGERI 2 AMPIBABO	1020102003550	5.564.411,00	299.233.400,00			297.736.000,00	-	811,00	7.061.000,00
30	SMP NEGERI NEGERI 3 AMPIBABO	1020102005731	437.881,00	142.244.000,00			142.319.000,00	-	1.881,00	361.000,00
31	SMP NEGERI SATU ATAP 1 AMPIBABO	1020102000385	375.618,00	187.544.500,00			187.920.000,00	-	118,00	-
32	SD SMP SATU ATAP NEGERI 2 AMPIBABO	1020102003270	66.117,00	109.186.000,00			109.186.000,00	-	117,00	-
33	SMP NEGERI 1 TORIBULU	1020102003844	68.363,00	260.983.750,00			258.857.000,00	-	-	2.195.113,00
34	SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 TORIBULU	1020102003465	1.398,00	140.360.000,00			140.360.000,00	-	1.398,00	-
35	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 TORIBULU	1020102004386	41.288,00	47.560.000,00	35.000.000,00		47.600.000,00	27.150.000,00	1.288,00	7.850.000,00
36	SMP NEGERI 1 KASIMBAR	1020102003900	8.813.172,00	501.587.000,00			501.587.000,00	-	-	8.813.172,00
37	SMP NEGERI 2 KASIMBAR	1020102001004	6.407.484,00	163.110.000,00			169.360.000,00	-	484,00	157.000,00
38	SMP NEGERI 3 KASIMBAR	1020102001855	96,00	205.320.000,00			205.320.000,00	-	96,00	-
39	SMP NEGERI 4 KASIMBAR	1020102004456	400.664,00	154.048.000,00			154.448.000,00	-	664,00	-
40	SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 KASIMBAR	1020102003086	105.887,00	105.560.000,00			105.560.000,00	-	-	-
41	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 KASIMBAR	1020102003454	144.039,00	77.720.000,00	35.000.000,00		77.864.000,00	29.000.000,00	39,00	6.000.000,00
42	SMP NEGERI 1 TINOMBO SELATAN	1020102005300	4.993,00	291.155.700,00			288.220.000,00	-	693,00	2.940.000,00
43	SMP NEGERI 2 TINOMBO SELATAN	1020102004110	396.328,00	201.535.950,00			201.205.590,00	-	278,00	726.410,00
44	SMP NEGERI 3 TINOMBO SELATAN	1020102003815	35.336,00	156.565.000,00	35.000.000,00		155.400.000,00	29.000.000,00	336,00	7.200.000,00
45	SMP NEGERI 4 TINOMBO SELATAN	1020102003734	1.334.344,00	206.506.600,00			207.316.000,00	-	944,00	524.000,00
46	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 TINOMBO SELATAN	1020102004132	192.593,00	88.139.850,00			87.491.400,00	-	443,00	840.600,00
47	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TINOMBO SELATAN	1020102001925	196.374,00	106.708.850,00			105.725.000,00	-	224,00	1.180.000,00
48	SMP SATU ATAP NEGERI 3 TINOMBO SELATAN	1020102003196	72.311,00	63.731.350,00	35.000.000,00		63.650.000,00	29.000.000,00	3.661,00	6.150.000,00
49	SMP NEGERI 2 TINOMBO	1020102003793	9.784.561,00	287.316.200,00			297.100.000,00	-	761,00	-
50	SMP NEGERI 4 TINOMBO	1020102005252	109.726,00	176.314.000,00			176.320.000,00	-	726,00	103.000,00
51	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TINOMBO	1030102000616	1.623.387,00	111.359.700,00			112.983.000,00	-	87,00	-
52	SMP NEGERI 1 TINOMBO	1020102003760	148.769,00	234.320.000,00			231.768.700,00	-	69,00	2.700.000,00
53	SMP NEGERI 3 TINOMBO	1020102006070	355.157,00	106.720.000,00			107.074.000,00	-	1.157,00	-
54	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 TINOMBO	1020102001240	20.322,00	45.331.000,00			44.641.000,00	-	-	609.000,00
55	SMP SATU ATAP NEGERI 3 TINOMBO	1020102001306	53.800,00	191.348.362,00			191.400.000,00	-	2.162,00	-
56	SMP SATU ATAP NEGERI 4 TINOMBO	1020102003771	25,00	284.200.000,00			284.200.000,00	-	25,00	-
57	SMPN 1 PALASA	1020102004121	963.575,00	515.236.700,00			514.036.700,00	-	275,00	2.163.300,00
58	SMP NEGERI 2 PALASA	1020102003782	120.337,00	160.080.000,00			160.200.000,00	-	-	337,00
59	SMP NEGERI 6 TOMINI	1020102006092	575.157,00	167.781.800,00			168.356.950,00	-	7,00	-
60	SMP SATU ATAP NEGERI 1 PALASA	1020102006114	310.257,00	203.000.000,00			179.325.500,00	-	257,00	23.984.500,00
61	SMP SATU ATAP NEGERI 3 PALASA	1030102000830	420.811,00	235.330.000,00			235.750.000,00	-	811,00	-
62	SMP SATU ATAP NEGERI 4 PALASA	1020102002485	171.000,00	95.117.442,00			95.280.400,00	-	42,00	-
63	SMP NEGERI 1 TOMINI	1020102005230	262.766,00	603.177.500,00			602.210.000,00	-	266,00	1.230.000,00
64	SMPN 2 TOMINI	1020102005672	536.820,00	180.423.180,00			180.960.000,00	-	-	-
65	SMP SATU ATAP NEGERI 2 TOMINI	1020102006103	6.000,00	53.360.000,00			53.106.000,00	-	-	260.000,00
66	SMP SATU ATAP NEGERI 3 TOMINI	1020102006140	364.367,00	26.678.100,00			27.042.000,00	-	467,00	-
67	SMP NEGERI 1 MEPANGA	1020102004106	5.975.649,00	414.107.800,00			419.906.950,00	-	449,00	176.050,00
68	SMP N 2 MEPANGA	1020102004095	106.684,00	115.953.300,00			116.059.000,00	-	984,00	-
69	SMP NEGERI 3 MEPANGA	1030102000454	259.288,00	342.188.500,00			323.706.827,00	-	288,00	18.740.673,00
70	SMP SATU ATAP NEGERI 1 MEPANGA	1030102000384	686,00	164.719.952,00			164.720.000,00	-	638,00	-
71	SMP SATU ATAP NEGERI 2 MEPANGA	1020102004084	151.945,00	48.719.900,00	35.000.000,00		48.863.000,00	29.000.000,00	1.845,00	6.007.000,00
72	SMP NEGERI 2 BOLANO LAMBUNU	1030102000196	53.552,00	120.640.000,00			120.693.000,00	-	552,00	-
73	SMP NEGERI 3 BOLANO LAMBUNU	1030102000605	5.138.754,00	58.661.250,00			63.800.000,00	-	4,00	-
74	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 BOLANO LAMBUNU	1030102001294	-	67.280.000,00	35.000.000,00		65.460.000,00	27.300.000,00	-	9.520.000,00
75	SMP SATU ATAP 3 BOLANO LAMBUNU	1030102000701	64,00	15.080.000,00			14.715.000,00	-	-	365.064,00
76	SMP SATU ATAP NEGERI 3									

DAFTAR UTANG PFK DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam rupiah)

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Pajak Belanja Dana BOS Tahun 2023 Disetor Tahun 2024			
			Pajak Negara			
			PPN	PPH 21	PPH 23	Total
1	SD INPRES 5 SAUSU	Sausu	346.846,00	60.000,00	-	406.846,00
2	SD NEGERI POMBALOWO	Parigi	-	27.600,00	124.060,00	151.660,00
3	SD NEGERI PELAWA	Parigi Tengah	3.902.573,00	-	48.000,00	3.950.573,00
4	SDN KECIL JONONUNU	Parigi Tengah	658.731,00	-	54.720,00	713.451,00
5	SD NEGERI 2 POSONA	Kasimbar	1.679.926,00	-	129.900,00	1.809.826,00
6	SD KECIL BANGKALAN	Sidoan	-	-	141.000,00	141.000,00
7	SD KECIL POLOBUU	Sidoan	470.720,00	12.500,00	67.000,00	550.220,00
8	SD INPRES 1 TINOMBO	Tinombo	-	60.000,00	-	60.000,00
9	SD INPRES DONGKAS	Tinombo	-	-	38.400,00	38.400,00
10	SD KECIL BABONG	Tinombo	237.837,00	-	106.900,00	344.737,00
11	SD NEGERI DONGKAS	Tinombo	1.342.791,00	-	40.240,00	1.383.031,00
12	SD NEGERI TINOMBO	Tinombo	865.729,00	549.000,00	241.600,00	1.656.329,00
13	SDK TERPENCIL PATINGKE	Tinombo	981.081,00	-	176.600,00	1.157.681,00
14	SDK TERPENCIL SIABANANG	Tinombo	351.999,00	-	25.400,00	377.399,00
15	SD INPRES 3 WANAMUKTI	Bolano	-	24.000,00	40.000,00	64.000,00
16	SD INPRES BERINGIN JAYA	Bolano	3.496.856,00	378.000,00	36.480,00	3.911.336,00
17	SD INPRES BOMBAN	Bolano	805.179,00	-	-	805.179,00
18	SD INPRES SRITABAANG	Bolano	1.102.476,00	-	89.200,00	1.191.676,00
19	SDK BANGKARA	Bolano	346.846,00	-	-	346.846,00
20	SD INPRES 2 PETUNASUGI	Bolano Lambunu	380.540,00	-	40.000,00	420.540,00
21	SD NEGERI KUALA BUGIS	Bolano Lambunu	-	-	171.600,00	171.600,00
22	SD INPRES 2 GIO	Moutong	459.720,00	270.000,00	1.236.666,00	1.966.386,00
JUMLAH UTANG PFK BOS SD			17.429.850,00	1.381.100,00	2.807.766,00	21.618.716,00
1	SMP NEGERI 1 SAUSU	Sausu	-	-	240.000,00	240.000,00
2	SMP NEGERI 3 Balinggi	Balinggi	-	-	60.800,00	60.800,00
3	SMP NEGERI 1 PARIGI UTARA	Parigi Utara	-	-	61.400,00	61.400,00
4	SMP NEGERI 2 AMPIBABO	Ampibabo	2.860.116,00	915.000,00	483.200,00	4.258.316,00
5	SMP NEGERI 3 KASIMBAR	Kasimbar	-	150.000,00	-	150.000,00
6	SMP NEGERI 4 KASIMBAR	Kasimbar	-	-	226.800,00	226.800,00
7	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 KASIMBAR	Kasimbar	-	49.000,00	18.000,00	67.000,00
8	SMP NEGERI 4 TINOMBO	Tinombo	-	1.162.200,00	60.000,00	1.222.200,00
9	SMP NEGERI 1 TINOMBO	Tinombo	431.081,00	31.500,00	-	462.581,00
10	SMP NEGERI 3 TINOMBO	Tinombo	-	27.000,00	480,00	27.480,00
11	SMP NEGERI 2 PALASA	Palasa	-	48.000,00	-	48.000,00
12	SMP SATU ATAP NEGERI 1 PALASA	Palasa	-	54.000,00	646.400,00	700.400,00
13	SMP NEGERI 1 MEPANGA	Mepanga	-	-	38.600,00	38.600,00
14	SMP NEGERI 4 BOLANO LAMBUNU	Bolano Lambunu	-	1.006.500,00	-	1.006.500,00
15	SMP NEGERI 2 TAOPA	Taopa	-	462.600,00	246.800,00	709.400,00
16	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 MOUTONG	Moutong	-	150.000,00	-	150.000,00
JUMLAH UTANG PFK BOS SMP			3.291.197,00	4.055.800,00	2.082.480,00	9.429.477,00
JUMLAH UTANG PFK DANA BOS TA 2023			20.721.047,00	5.436.900,00	4.890.246,00	31.048.193,00

LAMPIRAN 18

DAFTAR PIUTANG PAJAK RUMAH MAKAN BERDASARKAN SKPKDB TAHUN 2023

(dalam rupiah)

NO	TANGGAL	MASA PAJAK	NO. SKPKDB	NAMA WAJIB PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	JUMLAH TOTAL PIUTANG 2023	KET
1	05-Jun-23	01/05/2023 S.D 30/05/2023	870/1083.a/BID. NAGBER	YANTO MONGGOH	W.M. HARVEST	JLN. TRANS SULAWESI DESA PALASA KEC. PALASA	408.750,00	
2	05-Jun-23	01/05/2023 S.D 30/05/2023	870/1083.b/BID. NAGBER	PUJI ASTUTI	CAFÉ PATRESIA	KOTARAYA BAEAR KEC. MEPANGA	438.850,00	
3	05-Jun-23	01/05/2023 S.D 30/05/2023	870/1083.c/BID. NAGBER	M. MUHDI	W.M.MOJO AGUNG	KOTANAGAYA KEC. BOLANO LAMBUNU	535.000,00	
4	05-Jun-23	01/05/2023 S.D 30/05/2023	870/1083.c/BID. NAGBER	ULFIANA SAMIN A	RUMAH MAKAN SIMPATI	DESA TOMINI KEC. TOMINI	27.800,00	
5	05-Jun-23	01/05/2023 S.D 30/05/2023	870/1081,.b/BID. NAGBER	MEIDI	RUMAH MAKAN GORONTALO TOMINI	DESA TOMINI KEC. TOMINI	306.500,00	
6	04-Sep-23	01/08/2023 S.D 30/08/2023	000.5.3.1/1598.a/BID NAGBER	WAHYU KURNIAWAN	W.M MAS WAWAN 01	TOBOLI/ PARIGI UTARA	499.750,00	
7	04-Sep-23	01/08/2023 S.D 30/08/2023	000.5.3.1/1598.b/BID NAGBER	NGATIAH	TENDA MALAM SEDAP MALAM	KELURAHAN LOJI KEC. PARIGI	215.500,00	
8	04-Sep-23	01/08/2023 S.D 30/08/2023	000.5.3.1/026/BID NAGBER	HAYCENG	RUMAH MAKAN RISKA RAHMATU	JLN. TRANS SULAWESI DESA TOBOLI BARAT KEC. PARIGI UTARA	452.000,00	
9	04-Sep-23	01/08/2023 S.D 30/08/2023	000.5.3.1/023/BID NAGBER	MAS ROCHAN	RUMAH MAKAN MBA MIN	JLN. TRANS SULAWESI DESA TOBOLI BARAT KEC. PARIGI UTARA	590.001,00	
10	04-Sep-23	01/08/2023 S.D 30/08/2023	000.5.3.1/027/BID NAGBER	LILWIA DJAFAR K	WARUNG MAKAN WANDA 1	JLN. TRANS SULAWESI DESA TOBOLI BARAT KEC. PARIGI UTARA	1.335.250,00	
11	04-Sep-23	01/08/2023 S.D 30/08/2023	000.5.3.1/020/BID NAGBER	MAS ANA	WARUNG MAKAN RAJA LALAMPA	JLN. TRANS SULAWESI DESA TOBOLI BARAT KEC. PARIGI UTARA	3.568.500,00	
12	04-Sep-23	01/08/2023 S.D 30/08/2023	000.5.3.1/020/BID NAGBER	LILWIA DJAFAR K	WARUNG MAKAN WANDA 2	JLN. TRANS SULAWESI DESA TOBOLI BARAT KEC. PARIGI UTARA	433.750,00	
JUMLAH TOTAL							Rp 8.811.651,00	

DAFTAR PIUTANG PAJAK REKLAME
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

TANGGAL	MASA PAJAK	NO. SKPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	JUMLAH		JUMLAH TOTAL PIUTANG 2017-2023	SETORAN		TANGGAL PENYETORAN	SISA PIUTANG
					POKOK	DENDA		POKOK	DENDA		
20-Feb-17	01 s/d 28 Feb 2017	13/SKPD/4.1.1.09.05/II/2017	Loundry Martenizing	Jl Magau Janggo Kel. Mas	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
20-Feb-17	01 Feb s/d 31 Des 2017	10/SKPD/4.1.1.09.05/II/2017	Ifmi Motor	Jl. Transul Ds. Mertasari R	Rp 6.600.000,00		Rp 6.600.000,00	Rp -		-	Rp 6.600.000,00
08-Mar-17	01 s/d 31 Mar 2017	24/SKPD/4.1.1.09.05/II/2017	Loundry Martenizing	Jl Magau Janggo Kel. Mas	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
07 Des 2017	01 s/d 31 Mei 2017	000021/SKPD/04/2017	PT. Surya Mustika Nusantara	Jl. Zebra Kel. Birobuli Uta	Rp 600.000,00		Rp 600.000,00	Rp -		-	Rp 600.000,00
	TAHUN 2017				Rp 7.500.000,00	Rp -	Rp 7.500.000,00	Rp -	Rp -		Rp 7.500.000,00
01-Agu-18	Januari 2018	93/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
01-Agu-18	Februari 2018	94/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
01-Agu-18	Maret 2018	95/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
01-Agu-18	April 2018	96/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
01-Agu-18	April 2018	97/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
01-Agu-18	Juni 2018	98/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
01-Agu-18	Juli 2018	99/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
01-Agu-18	Agustus 2018	100/SKPD/4.1.1.09.05/V/2018	Yamaha Parigi	Jl. Trans Sulawesi Kampal	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00	Rp -		-	Rp 150.000,00
18-Des-18	01 Jan s/d 31 Des 2018	132/SKPD/4.1.1.09.01/XII/2018	Rumah Makan Latanza	Kampal	Rp 2.316.600,00		Rp 2.316.600,00	Rp -		-	Rp 2.316.600,00
28-Sep-18	01 Agr s/d 31 Des 2018	113/SKPD/4.1.1.09.02/VII/2018	CV Palu Abadi Sarana	Jl. Asam III Palu	Rp 3.702.400,00		Rp 3.702.400,00	Rp -		-	Rp 3.702.400,00
	TAHUN 2018				Rp 7.219.000,00	Rp -	Rp 7.219.000,00	Rp -	Rp -		Rp 7.219.000,00
30-Okt-19	01 Jul 2019 s/d 31 Des 2019	000096/SKPD/04/2019	PT. INTAN GAS	Kayubura	Rp 4.050.000,00		Rp 4.050.000,00	Rp -		-	Rp 4.050.000,00
30-Okt-19	01 Jul 2019 s/d 31 Des 2019	000096/SKPD/04/2019	PT. INTAN GAS	Kayubura	Rp 900.000,00		Rp 900.000,00	Rp -		-	Rp 900.000,00
13-Nov-19	01 Jan 2019 s/d 31 Des 2019	000118/SKPD/04/2019	PT. WIN ACCESS Telecommunica	Jl. Marina Indah Raya No.1 Jakarta	Rp 1.093.950,00		Rp 1.093.950,00	Rp -		-	Rp 1.093.950,00
	TAHUN 2019				Rp 6.043.950,00	Rp -	Rp 6.043.950,00	Rp -	Rp -		Rp 6.043.950,00
17-Jul-20	01 Des 2019 s/d 31 Des 2019	000028/SKPD/04/2020	PT. BUMI NYIUR SWALAYAN	Jl. S. Parman No. 44, RT/RW kel.Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu	Rp 244.920,00		Rp 244.920,00	Rp -		-	Rp 244.920,00
17-Jul-20	01 Ags 2019 s/d 31 Des 2019	000029/SKPD/04/2020	PT. BUMI NYIUR SWALAYAN	Jl. S. Parman No. 44, RT/RW kel.Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu	Rp 557.700,00		Rp 557.700,00	Rp -		-	Rp 557.700,00
17-Jul-20	01 Jan 2019 s/d 31 Des 2019	000030/SKPD/04/2020	PT. BUMI NYIUR SWALAYAN	Jl. S. Parman No. 44, RT/RW kel.Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu	Rp 2.409.264,00		Rp 2.409.264,00	Rp -		-	Rp 2.409.264,00
17-Jul-20	01 Jan 2020 s/d 31 Des 2020	000031/SKPD/04/2020	PT. BUMI NYIUR SWALAYAN	Jl. S. Parman No. 44, RT/RW kel.Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu	Rp 6.686.784,00		Rp 6.686.784,00	Rp -		-	Rp 6.686.784,00
	TAHUN 2020				Rp 9.898.668,00	Rp -	Rp 9.898.668,00	Rp -	Rp -		Rp 9.898.668,00
	TOTAL S/D TAHUN 2020				Rp 30.661.618,00	Rp -	Rp 30.661.618,00	Rp -	Rp -		Rp 30.661.618,00
05 Nov 2021	01 Jan s/d 31 Des 2021	000064/SKPD/04/2021	PT Intan Parigi Gas	Jl. Trans Sulawesi Desa Parigi Kec. Parigi Utara	Rp 5.850.000,00		Rp 5.850.000,00			28/12/2022	Rp 5.850.000,00

TANGGAL	MASA PAJAK	NO. SKPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	JUMLAH		JUMLAH TOTAL PIUTANG 2017-2023	SETORAN		TANGGAL PENYETORAN	SISA PIUTANG
					POKOK	DENDA		POKOK	DENDA		
11 Nov 2021	14 Apr 2021 s/d 13 Apr 2022	000070/SKPD/04/2021	PT Republik Citra Media	Jl. Dewi Sartika No. 89 Kel Birobuli Utara	Rp 6.552.000,00		Rp 6.552.000,00				Rp 6.552.000,00
19 Okt 2021	01 Jan s/d 31 Des 2021	000061/SKPD/04/2021	PT Win Access Telecommunication	Jl. Marina Indah raya Kel. Kamal Muara Kec. Peniarangan	Rp 3.013.536,00		Rp 3.013.536,00				Rp 3.013.536,00
	TAHUN 2021				Rp 15.415.536,00	Rp -	Rp 15.415.536,00	Rp -	Rp -		Rp 15.415.536,00
	TOTAL S/D TAHUN 2021				Rp 46.077.154,00	Rp -	Rp 46.077.154,00	Rp -	Rp -		Rp 46.077.154,00
21-Feb-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000026/SKPD/04/2022	PT SPBU TRIO CELEBES SEJAHTERA	KEL KAMPAL KEC PARIGI	Rp 4.521.600,00		Rp 4.521.600,00	4.521.600,00	452.160,00	19 Juni 2023	Rp -
02-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000029/SKPD/04/2022	KITJA HORA	DS BOYA KEC BANAWA DONGGALA	Rp 5.652.000,00		Rp 5.652.000,00	5.652.000,00	565.200,00	04 Oktober 2023	Rp -
07-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000034/SKPD/04/2022	PT REKHAY JAYA SEJAHTERA	JLN SIS ALJUFRI KEL MASIGI PARIGI	Rp 5.400.000,00		Rp 5.400.000,00	5.400.000,00	864.000,00	23 Agustus 2023	Rp -
25-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000064/SKPD/04/2022	INTAN CAFÉ DAN RESTO	DESA TOLAI KEC TORUE	Rp 669.240,00		Rp 669.240,00	-	-		Rp 669.240,00
22-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000068/SKPD/04/2022	DILA HIJAB	DESA TORUE KEC TORUE	Rp 223.080,00		Rp 223.080,00	-	-		Rp 223.080,00
25-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000066/SKPD/04/2022	PT HASRAT ABADI TORUE	DS TOLAI BARAT KEC TORUE	Rp 669.240,00		Rp 669.240,00	669.240,00	40.155,00	15 Maret 2023	Rp -
25-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000069/SKPD/04/2022	PT HASJRAT ABADI TOYOTA OUTLET	KEL MAESA KEC PARIGI	Rp 1.669.860,00		Rp 1.669.860,00	1.669.860,00	100.192,00	15 Maret 2023	Rp -
25-Mar-22	01/03/2022 S.D 31/03/2022	000063/SKPD/04/2022	AGEN MS GLOW PARIGI	KEL MAESA KEC PARIGI	Rp 236.250,00		Rp 236.250,00	-	-		Rp 236.250,00
22-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000051/SKPD/04/2022	PT SPBU TRIO CELEBES SEJAHTERA	KEL KAMPAL KEC PARIGI	Rp 3.330.912,00		Rp 3.330.912,00	3.330.912,00	333.091,20	19 Juni 2023	Rp -
22-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000054/SKPD/04/2022	KSP GOTONG ROYONG	DESA TANALANTO KEC TORUE	Rp 1.561.560,00		Rp 1.561.560,00	-	-		Rp 1.561.560,00
25-Apr-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000081/SKPD/04/2022	SYAMSUL FANY KEYLA WEDDING	DS KASIMBAR SELATAN	Rp 356.928,00		Rp 356.928,00	-	-		Rp 356.928,00
24 JUNI 2022	01/04/2022 S.D 30/06/2022	000096/SKPD/04/2022	AGEN MS GLOW PARIGI	KEL MAESA KEC PARIGI	Rp 708.750,00		Rp 708.750,00	-	-		Rp 708.750,00
9 JUNI 2022	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000087/SKPD/04/2022	ELDI PURNOMO	DS SAUSU TORONO	Rp 205.920,00		Rp 205.920,00	-	-		Rp 205.920,00
9 JUNI 2022	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000089/SKPD/04/2022	NI NYOMAN HENDRIANIS	DS SULI INDAH KEC RAINGGI	Rp 334.620,00		Rp 334.620,00	-	-		Rp 334.620,00
25 JULI 2022	15/06/2022 S.D 14/07/2022	000104/SKPD/04/2022	CV SETIA BUDI DUA	KEL TALETE 1 KEC TOMOHON TENGAH	Rp 903.662,50		Rp 903.662,50	-	-		Rp 903.662,50
26-Agu-22	01/07/2022 S.D 31/12/2022	000135/SKPD/04/2022	KAMILUS LEO	TAMAN CIBODAS KEC PRIUK	Rp 555.360,00		Rp 555.360,00	555.360,00	55.536,00	20 September 2023	Rp -
07-Sep-22	01/04/2022 S.D 31/12/2022	000138/SKPD/04/2022	PT GLOBALGEMILANG EKSPRESS	MANADO	Rp 669.240,00		Rp 669.240,00	-	-		Rp 669.240,00
16-Sep-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000150/SKPD/04/2022	PT SPBU TRIO CELEBES SEJAHTERA	KEL KAMPAL KEC PARIGI	Rp 9.796.800,00		Rp 9.796.800,00	9.796.800,00	979.680,00	19 Juni 2023	Rp -
21-Sep-22	01/04/2022 S.D 31/03/2023	000154/SKPD/04/2022	PT REPUBLIK CITRA MEDIA	PALU SELATAN	Rp 6.552.000,00		Rp 6.552.000,00	-	-		Rp 6.552.000,00
21-Sep-22	14/04/2022 S.D 31/03/2023	000155/SKPD/04/2022	PT REPUBLIK CITRA MEDIA	PALU SELATAN	Rp 7.560.000,00		Rp 7.560.000,00	-	-		Rp 7.560.000,00
04-Okt-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000160/SKPD/04/2022	PT REPUBLIK CITRA MEDIA	PALU SELATAN	Rp 22.727.040,00		Rp 22.727.040,00	0	0		Rp 22.727.040,00
11-Nov-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000182/SKPD/04/2022	PT BANK MANDIRI PARIGI	KEL MASIGI PARIGI	Rp 5.228.100,00		Rp 5.228.100,00	5.228.100,00	104.562,00	11 Januari 2023	Rp -
26-Nov-22	01/07/2022 S.D 31/12/2022	000198/SKPD/04/2022	TEA BREAK	KOTA BATAM	Rp 514.800,00		Rp 514.800,00	0	0		Rp 514.800,00
22-Mar-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000052/SKPD/04/2022	PT GLOBAL GEMILANG EXPRESS	DS OGOMOLOS KEC MEPANGA	Rp 1.921.920,00		Rp 1.921.920,00	0	0		Rp 1.921.920,00
11-Nov-22	01/01/2022 S.D 31/12/2022	000184/SKPD/04/2022	PT MUHS AUS PUTRA ARBA MANDIRI	DS OGOMOLOS KEC MEPANGA	Rp 6.879.600,00		Rp 6.879.600,00	6.879.600,00	1.375.920,00	21 November 2023	Rp -
	TAHUN 2022				Rp 88.848.482,50	Rp -	Rp 88.848.482,50	Rp 43.703.472,00	Rp 4.870.496,20		Rp 45.145.010,50
	TOTAL S/D TAHUN 2022				Rp 134.925.636,50	Rp -	Rp 134.925.636,50	Rp 43.703.472,00	Rp 4.870.496,20	Rp -	Rp 91.222.164,50
27-Dec-22	01/01/2023 S.D 31/12/2023	000217/SKPD/04/2023	ELA PRISILIA	DS RANOMAI SI	Rp 768.960,00		Rp 768.960,00				Rp 768.960,00
07-Feb-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	000031/SKPD/04/2023	KALILA CELL	KAMPAL	Rp 446.160,00		Rp 446.160,00				Rp 446.160,00
12-Feb-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	000052/SKPD/04/2023	PT SPBU TRIO CILEBES	KEC PARIGI	Rp 17.649.312,00		Rp 17.649.312,00				Rp 17.649.312,00
11-Jun-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	000060/SKPD/04/2023	PT BNS	PALU TIMUR	Rp 6.686.784,00		Rp 6.686.784,00				Rp 6.686.784,00
12-Jun-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	000061/SKPD/04/2023	PT SUHARMIGAS	KASIMBAR SEKATAN	Rp 5.400.000,00		Rp 5.400.000,00				Rp 5.400.000,00
06-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	000093/SKPD/04/2023	KSP MEGA JAYA LESTARI	TORUE	Rp 356.928,00		Rp 356.928,00				Rp 356.928,00
06-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	000096/SKPD/04/2023	WAHYUDI	MALANG	Rp 3.967.560,00		Rp 3.967.560,00				Rp 3.967.560,00

TANGGAL	MASA PAJAK	NO. SKPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	JUMLAH		JUMLAH TOTAL PIUTANG 2017-2023	SETORAN		TANGGAL PENYETORAN	SISA PIUTANG
					POKOK	DENDA		POKOK	DENDA		
09-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000103/SKPD/04/2023	ELA PRISILIA	PARIGI	267.696,00		Rp 267.696,00				Rp 267.696,00
14-Agu-23	06/08/2023 S.D 15/08/2023	0000105/SKPD/04/2023	PT DANA INDAH YASA	JAKARTA SELATAN	381.466,80		Rp 381.466,80				Rp 381.466,80
14-Agu-23	06/08/2023 S.D 15/08/2023	0000106/SKPD/04/2023	PT DANA INDAH YASA	JAKARTA SELATAN	5.115.554,55		Rp 5.115.554,55				Rp 5.115.554,55
14-Agu-23	06/08/2023 S.D 15/08/2023	0000107/SKPD/04/2023	PT DANA INDAH YASA	JAKARTA SELATAN	4.051.353,60		Rp 4.051.353,60				Rp 4.051.353,60
14-Agu-23	06/08/2023 S.D 15/08/2023	0000108/SKPD/04/2023	PT DANA INDAH YASA	JAKARTA SELATAN	160.231,50		Rp 160.231,50				Rp 160.231,50
14-Agu-23	06/08/2023 S.D 15/08/2023	0000109/SKPD/04/2023	PT DANA INDAH YASA	JAKARTA SELATAN	413.400,00		Rp 413.400,00				Rp 413.400,00
23-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000113/SKPD/04/2023	RASMAN	PELAWA	535.392,00		Rp 535.392,00				Rp 535.392,00
23-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000116/SKPD/04/2023	KOPMEN MERTE BUDI LUHUR	SUMBER SARI	401.544,00		Rp 401.544,00				Rp 401.544,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000132/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.544.400,00		Rp 1.544.400,00				Rp 1.544.400,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000133/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.338.480,00		Rp 1.338.480,00				Rp 1.338.480,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000134/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.338.480,00		Rp 1.338.480,00				Rp 1.338.480,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000135/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.235.520,00		Rp 1.235.520,00				Rp 1.235.520,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000136/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.544.400,00		Rp 1.544.400,00				Rp 1.544.400,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000137/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.338.480,00		Rp 1.338.480,00				Rp 1.338.480,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000138/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.338.480,00		Rp 1.338.480,00				Rp 1.338.480,00
30-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000139/SKPD/04/2023	PT INDOMARCO PRISMATAMA	MAKASAR	1.338.480,00		Rp 1.338.480,00				Rp 1.338.480,00
31-Agu-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000148/SKPD/04/2023	SK CAR WASH	TORUE	669.240,00		Rp 669.240,00				Rp 669.240,00
05-Sep-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000153/SKPD/04/2023	PT PARINDO UTAMA MANDIRI	PARIGI UTARA	2.700.000,00		Rp 2.700.000,00				Rp 2.700.000,00
05-Sep-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000161/SKPD/04/2023	PT REKHAY JAYA	PARIGI	5.400.000,00		Rp 5.400.000,00				Rp 5.400.000,00
05-Sep-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000163/SKPD/04/2023	NURHADI	PARIGI	694.980,00		Rp 694.980,00				Rp 694.980,00
12-Sep-23	01/01/2023 S.D 31/12/2023	0000166/SKPD/04/2023	KSPBINA EJAHTERA PRIMA	PARIGI SELATAN SUMBER	713.856,00		Rp 713.856,00				Rp 713.856,00
14-Sep-23	01/04/2023 S.D 31/03/2024	0000168/SKPD/04/2023	REPUBLIK CITRA MEDIA	PALU SELATAN	9.828.000,00		Rp 9.828.000,00				Rp 9.828.000,00
14-Sep-23	01/04/2023 S.D 31/03/2024	0000169/SKPD/04/2023	REPUBLIK CITRA MEDIA	PALU SELATAN	11.340.000,00		Rp 11.340.000,00				Rp 11.340.000,00
03-Okt-23	01/02/2023 S.D 31/12/2023	0000178/SKPD/04/2023	PT PRIMA GLORA AGUNG LESTA	PALU UTARA	892.320,00		Rp 892.320,00				Rp 892.320,00
07-Jun-23	13/03/2023 S.D 14/09/2023	0000181/SKPD/04/2023	PT MUTIARA KHATULISTIWA	PARIGI	1.417.500,00		Rp 1.417.500,00				Rp 1.417.500,00
11-Okt-23	13/10/2023 S.D 12/10/2024	0000182/SKPD/04/2023	PT GAJAH TUNGGAL	JAKARTA	1.299.542,40		Rp 1.299.542,40				Rp 1.299.542,40
11-Okt-23	13/10/2023 S.D 12/10/2024	0000183/SKPD/04/2023	PT GAJAH TUNGGAL	JAKARTA	3.912.300,00		Rp 3.912.300,00				Rp 3.912.300,00
09-Nov-23	01/12/2023 S.D 31/12/2023	0000184/SKPD/04/2023	PT AKAR TUNAS MANUNGGAL	PALU	6.879.600,00		Rp 6.879.600,00				Rp 6.879.600,00
	TAHUN 2023				Rp 103.366.400,85	Rp -	Rp 103.366.400,85	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 103.366.400,85
	TOTAL S/D TAHUN 2023				Rp 238.292.037,35	Rp -	Rp 238.292.037,35	Rp 43.703.472,00	Rp 4.870.496,20	Rp -	Rp 194.588.565,35

**DAFTAR PIUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TAHUN 2023**

(dalam rupiah)

NO	TANGGAL PENETAPAN	WAJIB PAJAK	PEKERJAAN	PENETAPAN	Sisa Piutang Tahun 2022	SETORAN	TANGGAL PENYETORAN	SISA PIUTANG 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 - 11
1	03-Mei-16	PT. TUNGGAL MANDIRI JAYA	PELEBARAN JLN PARIGI TOLAI	Rp 183.434.857,00	Rp 58.434.857,00	0,00	-	Rp 58.434.857,00
2	29-Nov-17	CV. BUMI KHATULISTIWA	PEMBANGUNAN GEDUNG BANK DAERAH	Rp 1.933.945,52	Rp 1.933.945,52	0,00	-	Rp 1.933.945,52
JUMLAH				Rp 185.368.802,52	Rp 60.368.802,52	Rp -		Rp 60.368.802,52

Lampiran 21

DAFTAR PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

(dalam rupiah)

NO.	SALDO PIUTANG Per 31 Desember 2022		Penghapusan Piutang Karena Objek tidak ada / Dobel	Penghapusan Piutang Ditemukan Bukti Bayar	Penagihan / Pembayaran Tahun 2023	Penghapusan Piutang Karena Kadaluwarsa	Sisa Piutang s/d 2023
	TAHUN	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8=4-5-6-7
1	2014	584.094.077,00	2.728.407,00	467.175,00	3.855.966,00		577.042.529,00
2	2015	362.481.342,00	554.487,00	219.963,00	5.174.841,00		356.532.051,00
3	2016	309.079.431,00	2.152.523,00	194.823,00	8.215.420,00		298.516.665,00
4	2017	593.049.576,00	2.023.862,00	234.775,00	12.585.768,00		578.205.171,00
5	2018	821.598.939,00	8.800.814,00	619.815,00	22.938.383,00		789.239.927,00
6	2019	813.804.189,28	10.181.155,00	674.837,00	25.683.447,00		777.264.750,28
7	2020	1.035.750.903,74	12.363.188,00	809.914,00	35.227.925,00		987.349.876,74
8	2021	1.442.930.291,06	19.104.671,00	1.598.102,00	49.398.509,00		1.372.829.009,06
9	2022	2.406.380.066,14	25.295.624,00	1.562.224,00	342.036.989,00		2.037.485.229,14
		8.369.168.815,22	83.204.731,00	6.381.628,00	505.117.248,00	-	7.774.465.208,22
	Ketetapan PBB-P2 2023						7.272.933.532,00
	Realisasi Murni Tahun 2023						5.609.518.659,37
	Sisa Tunggalakan 2023						1.663.414.872,63
	Total Saldo Piutang Sampai dengan 2023						9.437.880.080,85

**DAFTAR DATA PIUTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
TAHUN 2023**

(dalam rupiah)

NO	TANGGAL	NAMA PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN	ALAMAT PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN	ALAMAT OBJEK	LUAS		NILAI PEROLEHAN			JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN								NILAI BPHTB (Rp)	KET
					BUMI	BGN	NJOP PBB	HARGA TRANSAKSI	NILAI PASAR	JUAL BELI	TUKAR MENUMUKAR	LELANG	HIBAH	WARISAN	PRONA	REDIS	DILUAR PELEPASAN HAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=11+12+13+14+ 15+16+17+18	20
1	23 Mei 2017	Musdin MS. Lagundu	Ds. Pangli Kec. Parigi Utara	Blok Kabikua I Ds. Pangli Parigi Utara	16.350 M2	0,00	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.500,00	0,00	1.087.500,00	
2	23 Mei 2017	Warham Ramli	Dsn. III Ds. Pangli Kec. Parigi Utara	Blok Kabikua I Ds. Pangli Parigi Utara	17.520 M2	0,00	87.600.000,00	0,00	87.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	
3	23 Mei 2017	Incemi	Ds. Pangli Kec. Parigi Utara	Blok Walawau II Ds. Pangli Parigi Utara	12.170 M2	0,00	29.816.500,00	0,00	60.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	
4	17 Oktober 2017	Ambotang Labatjo	Ds. Lemusa Kec. Parigi Selatan	Jl. Raya Lemusa Ds. Lemusa Kec. Parigi Selatan	4.943 M2	60 M2	62.930.000,00	0,00	62.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	
5	17 Oktober 2017	Lumba Lagarinda	Dsn. II Ds. Lemusa Kec. Parigi Selatan	Jl. Raya Lemusa Ds. Lemusa Kec. Parigi Selatan	6.886 M2	0,00	68.860.000,00	0,00	68.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	
JUMLAH										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.500,00	2.510.000,00	0,00	3.099.500,00	

Lampiran 23

REKAPITULASI PIUTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (SPAM) TAHUN 2011 S/D 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022(AUDITED) BPK RI	TAHUN 2023							SALDO PER 31 DESEMBER 2023
		PENAMBAHAN			PENGURANGAN				
		MUTASI TAMBAH	KOREKSI PENAMBAHAN THN SEBELUMNYA	NO. BAST/ BUKTI TAGIHAN	PEMBAYARAN	TANGGAL	No. Bukti Transfer	KOREKSI PENGURANGAN TAHUN SEBELUMNYA	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12 = 3+4 +6-8-10
Tahun 2011	62.388.597,00				-				62.388.597,00
Tahun 2012	150.717.116,00								150.717.116,00
Tahun 2013	346.436.467,00								346.436.467,00
Tahun 2014	407.142.285,00								407.142.285,00
Tahun 2015	708.792.689,00								708.792.689,00
Tahun 2016	431.686.021,00								431.686.021,00
Tahun 2017	776.829.631,00				6.500,00				776.823.131,00
Tahun 2018	1.090.490.100,00				401.600,00				1.090.088.500,00
Tahun 2019	867.468.290,00				2.506.925,00			89.175,00	864.872.190,00
Tahun 2020	413.046.432,00		732.800,00		1.377.350,00				412.401.882,00
Tahun 2021	1.142.461.488,00				12.023.850,00			591.850,00	1.129.845.788,00
Tahun 2022	904.404.850,00		149.325.150,00		65.085.575,00			388.300,00	988.256.125,00
Tahun 2023		792.691.825,00			-				792.691.825,00
JUMLAH	7.301.863.966,00	792.691.825,00	150.057.950,00	-	81.401.800,00	-	-	1.069.325,00	8.162.142.616,00

**DAFTAR PIUTANG TAGIHAN ANGSURAN SEWA KIOS PASAR TOLAI
PER 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR PIUTANG SUDAH TIDAK ADA PEMILIKNYA*(dalam rupiah)*

NO	NAMA PEMILIK	LOKASI/BLOK	PIUTANG PER APRIL 2013	SETORAN 2013 S/D 31 DESEMBER 2018	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018	SETORAN S.D 31 DESEMBER 2023	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
1	Dr. Tinus	G 12, G 13, G 14,G 15	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	
2	Hi. Nasir / Ondeng	J 5	21.970.000,00	0,00	21.970.000,00	0,00	21.970.000,00	
3	Hj. Rosmawati	H 13	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	
4	Ratnawati	H 15	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	
5	Mursati	G 5	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	
6	Ilham	G 7	12.799.000,00	0,00	12.799.000,00	0,00	12.799.000,00	
7	Rusli	G 4	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	
8	Made Sulastra	G 2	17.285.000,00	0,00	17.285.000,00	0,00	17.285.000,00	
9	I Made Suardi	G 9 dan G 10	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	
10	Taming	G 6	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	
JUMLAH			347.204.000,00	0,00	347.204.000,00	0,00	347.204.000,00	

DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK BERSEDIA UNTUK MEMBAYAR

NO	NAMA BERDASARKAN PERNYATAAN FEB 2012	LOKASI/BLOK	PIUTANG PER APRIL 2013	SETORAN 2013 S/D 31 DESEMBER 2018	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018	SETORAN S.D 31 DESEMBER 2023	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
1	Hj. Ipa	K 10	16.246.000,00	0,00	16.246.000,00	0,00	16.246.000,00	Pernyataan Arfan Hasim
2	Amir	H 15	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	Pernyataan Amir
JUMLAH			43.746.000,00	0,00	43.746.000,00	0,00	43.746.000,00	

DAFTAR PIUTANG YANG BERSEDIA UNTUK MEMBAYAR

NO	NAMA PEMILIK	LOKASI/BLOK	PIUTANG PER APRIL 2013	SETORAN 2013 S/D 31 DESEMBER 2018	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018	SETORAN S.D 31 DESEMBER 2023	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN MEMBAYAR
1	Hi. Rafid	M. 13	33.525.000,00	9.700.000,00	23.825.000,00	0,00	23.825.000,00	Hi. Rafid
2	Darmiati	J. 14	16.120.000,00	0,00	16.120.000,00	0,00	16.120.000,00	Darmiati
3	Sahyat	N. 5	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	Sahyat
4	Hj. Rustani	I. 1	7.500.000,00	5.900.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Hj. Rustani
5	Andi Passepu	I. 3	27.762.000,00	7.012.000,00	20.750.000,00	0,00	20.750.000,00	Andi Passepu
6	Hi. Baharudin	J. 4	1.795.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Hi. Baharudin
7	Hj. Kartini / Bpk Joni	I. 16	9.644.000,00	2.700.000,00	6.944.000,00	0,00	6.944.000,00	Hj. Kartini / Bpk Joni
8	Hj. Hasna	N. 1	3.550.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	Hj. Hasna

NO	NAMA PEMILIK	LOKASI/BLOK	PIUTANG PER APRIL 2013	SETORAN 2013 S/D 31 DESEMBER 2018	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018	SETORAN S.D 31 DESEMBER 2023	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN MEMBAYAR
9	Ali / Sudi	H. 5	6.250.000,00	3.450.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	Ali / Sudi
10	Hj. Tamba	I. 9	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	Bahsang Hj. Tamba
11	Samsudin / Hj. Tar	I. 10	20.925.000,00	0,00	20.925.000,00	0,00	20.925.000,00	Bahsang Hj. Tamba
12	Hania	I. 5	11.475.000,00	5.050.000,00	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00	Abdul Hakim
13	Mustapa / Bayyung	L. 9	20.675.000,00	2.350.000,00	18.325.000,00	0,00	18.325.000,00	Abdul Hakim
14	Hi. Bahri	H. 7	18.875.000,00	4.400.000,00	14.475.000,00	0,00	14.475.000,00	Hj. Mukrramah
15	Hi. Payyo	J. 10	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	Syamsul Bahri
16	Mustapa / Olleng	I. 12	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	Syamsul Bahri
17	Hi. Yusri	M. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hj. Darna
18	Hi. Side	G. 8	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	Hi. Side
19	Gede Darnito	G. 2	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	Supeni
20	Hj. Nadira	I. 7	20.750.000,00	2.000.000,00	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	Hi. Nasir
21	I Made Artini	N. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Ketut Sri Asih
22	Hj. Kartini	G. 16	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	Hi. Abdullah
23	Hi. Ulla / Hj. Kartini	H. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hi. Abdullah
24	Hj. Nurhayati	L. 14	21.824.000,00	2.950.000,00	18.874.000,00	0,00	18.874.000,00	Hj. Nurhayati
25	Hi. Nasir / Adiman	H. 8	9.600.000,00	2.700.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	Supriadi
26	Hj. Warda	H. 10	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	Hi. Mattalatta
27	Samsul Bahri	H. 4	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	Syamsul Bahri
28	Hi. Syamsudin	H. 11	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	Hi. Syamsudin
29	Hj. Nani	K. 10	14.787.500,00	0,00	14.787.500,00	0,00	14.787.500,00	Hj. Nani
30	Hi. Muslimin / Kasman	H. 6	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	Hj. Farida
31	Hj. Haliang	I. 6	32.450.000,00	4.700.000,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	Hi. Baso Herman
32	Hi. Aco	J. 2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Hi. Aco / Takdir
33	Hi. Payyo	J. 11	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Hi. Baharudin
34	Agusman	K. 12	11.850.000,00	4.850.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	Anas Messa
35	Tammare	L. 15	24.955.000,00	2.000.000,00	22.955.000,00	0,00	22.955.000,00	Tammare
36	Suryanti	K. 5	18.399.000,00	0,00	18.399.000,00	0,00	18.399.000,00	Hj. Surianti
37	Hi. Bolong / Surya	K. 4	3.724.000,00	0,00	3.724.000,00	0,00	3.724.000,00	Hi. Bolong / Surya
	TOTAL		525.195.500,00	63.562.000,00	461.638.500,00	0,00	461.638.500,00	
	TOTAL PIUTANG		916.145.500,00	63.562.000,00	852.588.500,00	0,00	852.588.500,00	

**Daftar Perhitungan Dana Bergulir KUKM
Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No.	Nama KUKM	Lokasi	Nomor Akad Pinjaman	Akad Pinjaman	Jatuh Tempo	Nilai Pokok Pinjaman	Nilai Jasa Pinjaman	Realisasi Pengembalian		Sisa Tunggalan		
								Nilai Pokok Pinjaman	Nilai Jasa Pinjaman	Nilai Pokok Pinjaman	Nilai Jasa Pinjaman	Total Sisa Tunggalan
1	KPN Handayani Mandiri/I Wayan Suada	Ds. Tolai Kec. Torue	083/314.1/IDKPM/KOP/IX/2007	20-Sep-07	36 Bulan	12.500.000,00	2.250.000,00	12.500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	KSP Sekar Tani Handayani/Harun Made, S.Pi	Ds. Balinggi Kec. Sausu	083/272.12/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	12.500.000,00	2.250.000,00	12.500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3	KUD Moutong/Saidi Supu	Ds. Moutong, Kec. Moutong	083/272.16/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	12.500.000,00	2.250.000,00	12.500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4	KOP Pemuda Syariah Al-Amri/Muh. Nur Saleh Damar	Ds./Kel Masigi . Kec Parigi	083/272.13/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	12.500.000,00	2.250.000,00	1.325.000,00	312.500,00	11.175.000,00	1.937.500,00	13.112.500,00
5	KUD Lompe Singgani/Andu L. Kaduku	Ds. Pelawa. Kec. Parigi	083/272.14/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	12.500.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	312.500,00	11.500.000,00	1.937.500,00	13.437.500,00
6	Kopwan Al Armathu Saleha/Olivia Rishanty	Ds./Kel Maesa Kec. Parigi	083/272.15/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	12.500.000,00	2.250.000,00	0,00	312.500,00	12.500.000,00	1.937.500,00	14.437.500,00
7	Kopontren Alizah Almadiah/Wahyudi, S.Ag	Ds. Tolai Kec. Torue	083/272.13/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	12.500.000,00	2.250.000,00	687.500,00	312.500,00	11.812.500,00	1.937.500,00	13.750.000,00
8	Usaha Kel Pertanian/Zainuddin	Ds. Parigi,mpu,u	083/272.8/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	23.000.000,00	4.140.000,00	471.450,00	575.000,00	22.528.550,00	3.565.000,00	26.093.550,00
9	UKM Usaha Dagang/ Amirudin	Ds. Marantale Kec. Ampibabo	083/272.9/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	4.000.000,00	723.200,00	0,00	100.000,00	4.000.000,00	623.200,00	4.623.200,00
10	UKM Jual Beli Ikan/Arsip	Ds. Mepanga Kec. Mepanga	083/314.2/IDKPM/KOP/IX/2007	20-Sep-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	0,00	125.000,00	5.000.000,00	779.000,00	5.779.000,00
11	Industri Kopi/Riyan	Ds. Mepanga Kec. Mepanga	083/314.4/IDKPM/KOP/I/2007	20-Sep-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	0,00	125.000,00	5.000.000,00	779.000,00	5.779.000,00
12	UKM Dagang Sembako/Arwan Gino	Ds. Mepanga Kec. Mepanga	083/314.3/IDKPM/KOP/	20-Sep-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	0,00	125.000,00	5.000.000,00	779.000,00	5.779.000,00
13	Servis Elektronik/Haris G Labri	Ds. Mepanga Kec. Mepanga	083/314.1/IDKPM/KOP/IX/2007	20-Sep-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	0,00	125.000,00	5.000.000,00	779.000,00	5.779.000,00
14	UKM Kel Usaha Tani Utama Mandiri /Ali Akbar H Sahido	Ds. Donggulu Kec.Kasimbar	083/314.5/IDKPM/KOP/	20-Sep-07	36 Bulan	10.000.000,00	1.800.000,00	1.275.000,00	250.000,00	8.725.000,00	1.550.000,00	10.275.000,00
15	Usaha Dagang/Nio H Panti	Ds. Bantaya	083/272.3/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	0,00	125.000,00	5.000.000,00	779.000,00	5.779.000,00
16	UKM Kios Nelayan/Satman	Ds. Boyantongo Kec. Parigi Selatan	083/272.2/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	1.020.357,00	125.000,00	3.979.643,00	779.000,00	4.758.643,00
17	Usaha Dagang/Djardin	Ds. Jononunu	083/272.1/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	0,00	125.000,00	5.000.000,00	779.000,00	5.779.000,00
18	Usaha Dagang/Fatma	Kel. Loji Kec. Parigi	083/272.7/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	0,00	125.000,00	5.000.000,00	779.000,00	5.779.000,00
19	Usaha Peternakan/Nursiah	Ds. Baliara	083/272.6/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	500.000,00	125.000,00	4.500.000,00	779.000,00	5.279.000,00
20	Usaha Dagang/Abd. Fatah	Kel. Loji Kec. Parigi	083/272.5/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	125.000,00	125.000,00	4.875.000,00	779.000,00	5.654.000,00
21	Usaha Dagang/Kader Jafar	Ds. /Kel Masigi	083/272.4/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	904.000,00	300.000,00	250.000,00	4.700.000,00	654.000,00	5.354.000,00
22	Kel. Usaha Indutri/Yorik T	Ds. Bolano Utara	083/272.10/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	12.000.000,00	2.160.000,00	0,00	300.000,00	12.000.000,00	1.860.000,00	13.860.000,00
23	UKM Indutri Parut Kelapa/Nelson	Ds. Lemusa . Kec. Parigi Selatan	083/272.11/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	3.500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	630.000,00	4.130.000,00
24	UKM Flamboyan/Halimah	Kel. Loji Kec. Parigi	083/271.1/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00						
25	UKM Melati/Hj. Sahaimi	Kel. Loji Kec. Parigi	083/271.4/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00						
26	UKM/Anggrek/Misbahu	Kel. Loji Kec. Parigi	083/271.2/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00	3.616.000,00	4.297.760,00	1.100.000,00	15.702.240,00	2.516.000,00	18.218.240,00
27	UKM Mawar / Ibu Ruslan	Kel. Loji Kec. Parigi	083/271.3/IDKPM/KOP/VIII/2007	23-Agu-07	36 Bulan	5.000.000,00						
	Jumlah					215.000.000,00	38.763.200,00	48.502.067,00	11.825.000,00	166.497.933,00	26.938.200,00	193.436.133,00

**PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)

NO	TANGGAL SKTJM	NAMA	JABATAN	JENIS TEMUAN	TAHUN	TANGGAL SKTJM	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	SISA 2022	SETORAN. S.D SEKARANG 2023	KOREKSI KURANG CATAT	SISA 2023	KET
	SKTJM 2011											
1	Parigi, 07 Januari 2011	Samsudin A. Petarani	Kabid Infokom Dinas Dukcapil	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tahun 2008	2008	07/01/2011	12 Bulan	770.000,00	0,00		770.000,00	
2	Parigi, 07 Januari 2011	Ahmad Nandil	Staf Tata Pemerintahan Setda	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tahun 2008	2008	07/01/2011	1 Bulan	480.000,00	0,00		480.000,00	
3	Parigi, 07 Januari 2011	Rusdin Laulembah	Staf Dinas PPKAD	Sisa uang pada bendahara Pengeluaran yang belum disetor	2005	07/01/2011	maret-desember	32.676.486,00	0,00		32.676.486,00	TP Rp44.852.119 sdh setor Rp11.175.633. SKTJM Rp33.676.486
4	Parigi, 07 Januari 2011	Asri	Staf Perizinan Terpadu	Kelebihan pembayaran kegiatan workshop dan bimbingan teknis yang tidak sesuai ketentuan 2008	2008	07/01/2011	1 Bulan	1.150.000,00	0,00		1.150.000,00	TP Rp1.250.000, sudah byr Rp50.000. SKTJM Rp1.200.000
5	Parigi, 07 Januari 2011	Nur Ilham	Kasi Perlindungan Konsumen Dinas Perindag	Penyalagunaan penerimaan uang pendapatan asli daerah pada tahun 2009	2009	07/01/2011	12 Bulan	54.110.000,00	0,00		54.110.000,00	diambil dari R/C
6	Parigi, 17 Januari 2011	Yamin	Staf Penanggulangan Bencana Daerah	Kelebihan perjalanan dinas pada tahun 2008	2008	17/01/2011	16 Bulan	7.266.000,00	0,00		7.266.000,00	
7	Parigi, 10 Februari 2011	H.Pangile Karandja	Anggota DPRD	pembayaran reses tidak sesuai ketentuan tahun 2007	2007	10/02/2011	24 Bulan	7.350.000,00	0,00		7.350.000,00	
8	Parigi, 10 Februari 2011	Ahludin S.Asabu	Anggota DPRD	Pembiayaan reses dan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	2007	10/02/2011	24 Bulan	11.354.750,00	0,00		11.354.750,00	
9	Parigi, 10 Februari 2011	Sahrin MS. Belike	Anggota DPRD	Pembiayaan reses dan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	2007	10/02/2011	24 Bulan	11.180.000,00	0,00		11.180.000,00	
10	Parigi, 10 Februari 2011	Rusli Kinsal	Anggota DPRD	Pembiayaan reses dan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	2007-2008	10/02/2011	24 Bulan	19.660.000,00	0,00		19.660.000,00	
11	Parigi, 10 Februari 2011	Rizhan	Wakil Ketua Partai PBR	Pemberian bantuan kepada partai politik tidak sesuai ketentuan tahun 2007	2007	10/02/2011	februari-desember	7.500.000,00	0,00		7.500.000,00	
12	Parigi, 10 Februari 2011	Masudin K. Mustapa	Anggota DPRD	Pembiayaan reses tidak sesuai ketentuan 2007	2007	10/02/2011	24 Bulan	10.500.000,00	0,00		10.500.000,00	
13	Parigi, 10 Februari 2011	Moh. Thaslim Ntosa	Anggota DPRD	kelebihan perjalanan dinas, kegiatan reses dan temuan partai PDIP	2007-2008-2009	10/02/2011	10 Bulan	11.500.000,00	0,00		11.500.000,00	
14	Parigi, 10 Februari 2011	Drs.Nur Alam Muis (ahli waris)	Anggota DPRD	Kelebihan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan 2006	2006	10/02/2011	12 Bulan	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	
16	Parigi, 10 Februari 2011	Hendra	Staf Tata Pemerintahan Setda	kelebihan perjalanan dinas tahun 2008	2008	10/02/2011	3 Bulan	480.000,00	0,00		480.000,00	
17	Parigi 18 April 2011	Olumsyah Saehana, S.Pd, MM	Camat Kasimbar	Sisa UP/TU Belum disetor ke kas daerah tahun anggaran 2009	2009	18/04/2011	2 Tahun	15.927.554,00	0,00		15.927.554,00	TP Rp20.864.850 sdh setor Rp3.462.185. SKTJM
18	Parigi, 08 Juli 2011	Asmir Ntosa	Anggota DPRD	Pelaksanaan belanja bantuan sosial	2008	08/07/2011	2 Tahun	8.670.000,00	0,00		8.670.000,00	
19	Parigi, 08 Juli 2011	Salmin G. Lodji	Anggota DPRD	Pembayaran dukungan perjalanan dinas, Pembayaran biaya reses tidak sesuai ketentuan tahun 2007	2007	08/07/2011	2 Tahun	7.000.000,00	0,00		7.000.000,00	
20	Parigi, 08 Juli 2011	Usman Yamin, SE	Anggota DPRD	Pembayaran biaya reses tidak sesuai ketentuan tahun 2007, Pembayaran dukungan perjalanan dinas ganda tahun 2008	2008	08/07/2011	2 Tahun	13.600.000,00	0,00		13.600.000,00	Tidak ada Bukti setoran

NO	TANGGAL SKTJM	NAMA	JABATAN	JENIS TEMUAN	TAHUN	TANGGAL SKTJM	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	SISA 2022	SETORAN. S.D SEKARANG 2023	KOREKSI KURANG CATAT	SISA 2023	KET
21	Parigi, 07 Juli 2011	Nur Daeng Rahmatu	Mantan Anggota DPRD	Pembayaran dukungan perjalanan dinas 2006, Pembayaran biaya reses 2007, perjalanan dinas 2007, perjalanan dinas ganda 2008	2007-2008	07/07/2011	2 Tahun	28.260.000,00	0,00		28.260.000,00	
22	Parigi, 07 Juli 2011	Drs.H.Mustamirudin Borman	Pensiunan PNS	Kelebihan Perjalana Dinas tahun 2009	2009		10 Bulan	5.100.000,00	0,00		5.100.000,00	
23	Parigi, 07 Juli 2011	Ndali J. Sahibu	Staf Ahli Sekretariat Daerah	(panjar Dispora) Panjar kas yang belum dipertanggung jawabkan tahun anggaran 2010	2010	07/07/2011	1 Tahun	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	Belum ada bukti setorat, dari R/C
24	Parigi, 07 Juli 2011	Sakti Lasimpala	Ketuan KNPI	(panjar Setda) Kelalaian dalam melunasi penyewaan stand pameran pembangunan	2010	07/07/2011	3 Bulan	3.500.000,00	0,00		3.500.000,00	
25	Parigi 21 Juli 2011	Sabarudin Killis.SE	Sekretariat BKD	(panjar Setda) Belum menyeter ke kas daerah uang kontribusi stand pameran tahun 2010	2010	21/07/2011	3 Bulan	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	
26	Parigi 25 Juli 2011	Hamka Lagala. SE	Camat Parigi tahun 2009	Panjar kas tahun 2009 pada camat parigi	2009	25/07/2011	2 Tahun	10.500.000,00	0,00		10.500.000,00	
27	Parigi, Agustus 2011	Adiman, SH.M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas Tapem An. Drs.Anwar Ponulele		agustus	2 Tahun	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	
28	Parigi 19 Juli 2011	Irwan S. Alimin	Staf Dinas PPKAD	Panjar kas KPU Parigi moutong tahun 2008	2008	19/07/2011	2 Tahun	36.937.570,00	0,00		36.937.570,00	KPU
		Irwan S. Alimin	Staf Dinas PPKAD	Uang Persediaan (UP) 2008	2008	19/07/2011		200.351.407,00	0,00		200.351.407,00	UP 2009
		Irwan S. Alimin	Staf Dinas PPKAD	Bantuan Koni yg tdk disalurkan	2008	19/07/2011		59.107.000,00	0,00		59.107.000,00	Koni
29	Parigi, 03 Agustus 2011	Tauhid	Staf Keuangan Dinas Sosial	(panjar dispora) Panjar kas 2010	2010	03/08/2011	8 Bulan	32.037.150,00	0,00		32.037.150,00	
30	Parigi, 18 Oktober 2011	Ir. Adhan Sukara,M.Si	Kepala Dinas ESDM	Aset tetap yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop	2009-2010	18/08/2011	2 Tahun	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	
31	Parigi,	Makmur.SH	Kepala Dinas KUKM	Pengelolaan Dana Bergulir KUKM tidak sesuai ketentuan	2010	-	2 Tahun	55.147.400,00	0,00		55.147.400,00	
33	Parigi, 03 Oktober 2011	Zubair,SP	Staf Bakorlum Pertanian,perikanan dan kelautan kabupaten sigi	Aset tetap yang hilang saat digunakan PNS/Pejabat berupa 1 (satu) Buah sepeda motor Dn 6277	2009-2010	03/10/2011	2 Tahun	13.020.000,00	0,00		13.020.000,00	
34	Parigi, 20 Desember 2011	Saharuddin	Satf Biro Pemerintahan Umum	Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas tapem pada tahun 2008	2008	20/12/2011	2 tahun	2.606.000,00	0,00		2.606.000,00	
35	Parigi, 07 Januari 2012	Minarti,AS	Bendahara Rutan	Panjar Kas Tahun 2008 tidak sesuai ketentuan belum disetorkan ke-kas daerah	2008	07/01/2012	10 Bulan	500.000,00	0,00		500.000,00	
36	Parigi, 03 Januari2012	Lode,S.Sos.M.Si	Kasih Pemerintahan Kec. Parigi Tengah	Kelebihan pembayaran pada kegiatan sosialisasi pedoman tata naskah dinas dan najak yang tidak dipungut	2005/2006	03/02/2012	2 Tahun	24.834.241,67	0,00		24.834.241,67	
37	Parigi, 03 Januari2012	Kamil,SE	Kasi Sosial Budaya Dinas Nakertras	Karena PPN/PPH tidak di pungut	2010		6 Bulan	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00	
38	Parigi,11 April 2012	Drs. H. Anwar Yabi		Panjar Kas tidak sesuai ketentuan	2008	11/04/2012	2 Tahun	814.720.649,13	0,00		814.720.649,13	
39	Parigi, 25 April 2012	Dolyana Pandan		Pajar kas pada bagian perlengkapan umum 2006/2007	2006/2007	25/04/2012	2 Tahun	35.036.568,27	0,00		35.036.568,27	
								1.562.832.776,07	0,00		1.562.832.776,07	
	SKTJM 2019											
40	Agustus 2019	Rustam Makarama, S.Sos / Riri Adriani, SE	Staf BPKAD	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap dan Melebihi SBU	2011	Agustus 2011	24 Bulan	5.040.000,00	0,00		5.040.000,00	
41	Nov-19	Rony Adisatya Tombolotutu, S.Sos.M.Sos	Kasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tahun 2008	2013	Nov-11	1 Bulan	4.710.000,00	0,00		4.710.000,00	
42	Mei-20	Hendra Wijaya	Staff Bapelitbangda	Ketekoran Kas Kec. Kasimbar	2019	29-Mei-20	24 Bulan	72.355.750,00	0,00		72.355.750,00	
								82.105.750,00	0,00		82.105.750,00	
	SKTJM 2020											
43	Jul-20	Ahmad Rudianto	Staf Dinas PUPRP	Kerugian/Kekurangan yang disebabkan oleh Pengadaan Tanah	2016	30-Jul-20	24 Bulan	517.870.000,00	0,00		517.870.000,00	
44	Jul-20	Rivani Makaramah, S.Pi	Kasi Hubungan Antara Lembaga Satpol PP	Kerugian/Kekurangan yang disebabkan oleh Pengadaan Tanah	2016	30-Jul-20	24 Bulan	569.770.000,00	0,00		569.770.000,00	
								1.087.640.000,00	0,00	-	1.087.640.000,00	
		Jumlah						2.732.578.526,07	0,00	-	2.732.578.526,07	

**PIUTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI PNS YANG PENSIUN
PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	Saldo Awal 2022	SETORAN TAHUN 2023	PIUTANG TAHUN 2023	KETERANGAN
1	MURTININGSIH	195308161985012001	5.217.000,0000	-	5.217.000,0000	Bukti pot. Hutang belum ada dari PT. Taspen Madiun
	Total 2014		5.217.000,0000	-	5.217.000,0000	
2	DIRHAM SAEHANA, S.Pd	196504051985121003	66.149.000,0000		66.149.000,0000	
3	dr. MAGY SATOLOM	1975080320021222001	10.598.900,0000	-	10.598.900,0000	
	Total 2016		76.747.900,0000	-	76.747.900,0000	
4	Dra. ARDIAN/BEKSI	196911272014112001	2.238.004,0000	-	2.238.004,0000	
	2018		2.238.004,0000	-	2.238.004,0000	
	TOTAL S/D 2018		84.202.904,0000	-	84.202.904,0000	
5	ARSID, S.Pd		2.082.720,0000	-	2.082.720,0000	temuan Inspektorat
6	NOVAL	196605251991041002	632.576,0000	-	632.576,0000	
7	HAIS MAKARAMA	196112121985031027	34.444.200,0000	-	34.444.200,0000	
8	ARIYANI	196001032014062001	32.079.018,0000	-	32.079.018,0000	
	2019		69.238.514,0000	-	69.238.514,0000	
	TOTAL S/D 2019		153.441.418,0000	-	153.441.418,0000	
9	NASRUN/NUR ALAM	195912131981031015	24.000.000,0000	-	24.000.000,0000	
10	ARIS	196212281983101001	6.500,0000	-	6.500,0000	tidak sesuai
11	SRI ELEN	196207301986032007	21.657.116,0000	21.657.116,0000	-	
12	KUSNADIN NONO	196201152014091001	2.800.000,0000	2.800.000,0000	-	
	2020		48.463.616,0000	24.457.116,0000	24.006.500,0000	
	TOTAL S/D 2020		201.905.034,0000	24.457.116,0000	177.447.918,0000	
13	TASIK	196203182012121001	5.950.000,0000	2.700.000,0000	3.250.000,0000	
	2021		5.950.000,0000	2.700.000,0000	3.250.000,0000	
	TOTAL S/D 2021		207.855.034,0000	27.157.116,0000	180.697.918,0000	
14	ANDJASRIKA,SP	196312261987092001	2.000.000,0000	2.000.000,0000	-	
15	SAHARUDIN	197709062007011012	2.696.600,0000	-	2.696.600,0000	
16	WIRNA EDWARD HANAFI	197705242014062002	2.612.600,0000	2.612.600,0000	-	
17	I WAYAN SUMARDIKA	197705011999031002	800.000,0000	800.000,0000	-	
18	ASMAIN TOMBOLOTUTU	196404211989031015	4.500.000,0000	4.500.000,0000	-	
19	IWAYAN MULIASARA	196405031988031011	1.500.000,0000	1.500.000,0000	-	
20	GAMAR	196402232014111001	28.246.600,0000	21.246.600,0000	7.000.000,0000	
21	RIZALI	196410121986031031	37.000.000,0000	12.000.000,0000	25.000.000,0000	
22	HAMSIN	196301241992031005	1.516.176,0000	1.516.176,0000	-	
	2022		80.871.976,0000	46.175.376,0000	34.696.600,0000	
	TOTAL S/D 2022		288.727.010,0000	73.332.492,0000	215.394.518,0000	
23	NURMIN DJ MAITA/RUSLI	196808172014102001			7.019.530,0000	
24	MOHAMAD RIZAL	196504201991121001		-	22.781.400,0000	
25	SIANE	196308301983102004		-	14.071.050,0000	
26	I GEDE SUMADIASA	196510191987011001		-	5.756.600,0000	
	2023		-	-	49.628.580,0000	
	TOTAL S/D 2023		288.727.010,0000	73.332.492,0000	265.023.098,0000	

**DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kriteria Penyisihan/ Kualitas	Penyisihan Piutang	
				%	Rp
Piutang PBB-P2					
1	2014	577.042.529,00	Macet	100	577.042.529,00
2	2015	356.532.051,00	Macet	100	356.532.051,00
3	2016	298.516.665,00	Macet	100	298.516.665,00
4	2017	578.205.171,00	Macet	100	578.205.171,00
5	2018	789.239.927,00	Macet	100	789.239.927,00
6	2019	777.264.750,28	Diragukan	50	388.632.375,14
7	2020	987.349.876,74	Diragukan	50	493.674.938,37
8	2021	1.372.829.009,06	Kurang Lancar	10	137.282.900,91
9	2022	2.037.485.229,14	Kurang Lancar	10	203.748.522,91
10	2023	1.663.414.872,63	Lancar	0,5	8.317.074,36
Total		9.437.880.080,85			3.831.192.154,69
Piutang Pajak Rumah Makan					
1	2023	8.811.651,00	Lancar	0,5	44.058,26
Total		8.811.651,00			44.058,26
Piutang Pajak Penerangan Jalan					
1	2023	1.149.509.583,00	Lancar	0,5	5.747.547,92
Total		1.149.509.583,00			5.747.547,92
Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1	2016	58.434.857,00	Macet	100	58.434.857,00
2	2017	1.933.945,52	Macet	100	1.933.945,52
Total		60.368.802,52			60.368.802,52
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron					
1	2018	6.019.000,00	Macet	100	6.019.000,00
2	2019	6.043.950,00	Diragukan	50	3.021.975,00
3	2020	9.898.668,00	Diragukan	50	4.949.334,00
4	2021	15.415.536,00	Kurang Lancar	10	1.541.553,60
5	2022	44.241.348,00	Kurang Lancar	10	4.424.134,80
6	2023	89.453.000,85	Lancar	0,5	447.265,00
Total		171.071.502,85			20.403.262,40
Piutang Pajak Reklame Berjalan					
1	2017	7.500.000,00	Macet	100	7.500.000,00
2	2018	1.200.000,00	Macet	100	1.200.000,00
3	2023	13.500.000,00	Lancar	0,5	67.500,00
Total		22.200.000,00			8.767.500,00
Piutang Pajak Reklame Kain					
1	2022	903.662,50	Kurang Lancar	10	90.366,25
2	2023	413.400,00	Lancar	0,5	2.067,00
Total		1.317.062,50			92.433,25
Piutang BPHTB					
1	2017	3.099.500,00	Macet	100	3.099.500,00
Total		3.099.500,00			3.099.500,00
Total Piutang Pajak Daerah		10.854.258.182,72			3.929.715.259,04

Lampiran 29

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kriteria Penyisihan/ Kualitas	Penyisihan Piutang	
				%	Rp
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas					
1	2023	811.219.000,00	Lancar	0,5	4.056.095,00
Total		811.219.000,00			4.056.095,00
Piutang Retribusi Pelayanan kesehatan di RSUD Buluye Napoa'e					
1	2023	48.550.000,00	Lancar	0,5	242.750,00
Total		48.550.000,00			242.750,00
Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					
1	2022	205.498.500,00	Kurang Lancar	10	20.549.850,00
2	2023	207.487.500,00	Lancar	0,5	1.037.437,50
Total		412.986.000,00			21.587.287,50
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan					
1	2011	62.388.597,00	Macet	100	62.388.597,00
2	2012	150.717.116,00	Macet	100	150.717.116,00
3	2013	346.436.467,00	Macet	100	346.436.467,00
4	2014	407.142.285,00	Macet	100	407.142.285,00
5	2015	708.792.689,00	Macet	100	708.792.689,00
6	2016	431.686.021,00	Macet	100	431.686.021,00
7	2017	776.823.131,00	Macet	100	776.823.131,00
8	2018	1.090.088.500,00	Macet	100	1.090.088.500,00
9	2019	864.872.190,00	Macet	100	864.872.190,00
10	2020	412.401.882,00	Macet	100	412.401.882,00
11	2021	1.129.845.788,00	Macet	100	1.129.845.788,00
12	2022	988.256.125,00	Macet	100	988.256.125,00
13	2023	792.691.825,00	Diragukan	50	396.345.912,50
Total		8.162.142.616,00			7.765.796.703,50
Total Keseluruhan		9.434.897.616,00			7.791.682.836,00

Lampiran 30

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kriteria Penyisihan/ Kualitas	Penyisihan Piutang	
				%	Rp
Piutang Hasil Sewa Barang Milik daerah					
	sewa Kios Pasar Tolai				
1	2013	852.588.500,00	Macet	100	852.588.500,00
Total		852.588.500,00			852.588.500,00
Piutang Hasil Kerjasama Daerah					
1	2008	8.813.797,50	Macet	100	8.813.797,50
2	2009	5.537.977,50	Macet	100	5.537.977,50
Total		14.351.775,00			14.351.775,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
1	2010	26.938.200,00	Macet	100	26.938.200,00
Total		26.938.200,00			26.938.200,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah					
1	2011	685.941.317,00	Macet	100	685.941.317,00
2	2012	876.891.459,07	Macet	100	876.891.459,07
3	2019	82.105.750,00	Macet	100	82.105.750,00
4	2020	1.087.640.000,00	Diragukan	50	543.820.000,00
Total		2.732.578.526,07			2.188.758.526,07
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji					
1	2014	5.217.000,00	Macet	100	5.217.000,00
2	2016	76.747.900,00	Macet	100	76.747.900,00
3	2018	2.238.004,00	Macet	100	2.238.004,00
4	2019	69.238.514,00	Macet	100	69.238.514,00
5	2020	24.006.500,00	Diragukan	50	12.003.250,00
6	2021	3.250.000,00	Kurang Lancar	10	325.000,00
7	2022	34.696.600,00	Lancar	0,5	173.483,00
8	2023	49.628.580,00	Lancar	0,5	248.142,90
Total		265.023.098,00			166.191.293,90
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
1	2023	7.775.088,00	Lancar	0,5	38.875,44
Total		7.775.088,00			38.875,44
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal					
1	2020	97.505.431,10	Macet	100	97.505.431,10
2	2022	2.841.965.506,90	Kurang Lancar	10	284.196.550,69
Total		2.939.470.938,00			381.701.981,79
Piutang BLUD RS Raja Tombolotutu					
1	2023	885.557.700,00	Lancar	0,5	4.427.788,50
Total		885.557.700,00			4.427.788,50
Piutang BLUD RSUD Anuntaloko					
1	2016	100.528.750,00	Macet	100	100.528.750,00
2	2017	83.606.800,00	Macet	100	83.606.800,00
3	2018	60.332.800,00	Macet	100	60.332.800,00
4	2019	22.369.300,00	Macet	100	22.369.300,00
5	2020	184.552.500,00	Macet	100	184.552.500,00
6	2021	66.000.000,00	Macet	100	66.000.000,00
7	2022	24.064.100,00	Macet	100	24.064.100,00
8	2023	5.269.212.774,00	Lancar	0,5	26.346.063,87
Total		5.810.667.024,00			567.800.313,87
Total Keseluruhan		13.534.950.849,07			4.202.797.254,57

**DAFTAR PEMBANGUNAN FISIK SWAKELOLA YANG MENJADI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS PEKERJAAN FISIK	NILAI KONTRAK	NILAI TAGIHAN (SP2D CAIR)	BOBOT PEKERJAAN s.d 31 DES 2022 (KDP)		PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA per 31 Des 2023 (Rp)	TANGGAL PENYELESAIAN PEKERJAAN 100%
					BOBOT (%)	NILAI (Rp)		
1	2		3	4	5	6 = 3 x 5	8 = 4 - 6	9
1	SMP NEGERI 1 PARIGI	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	193.375.296,00	193.375.296,00	93,33%	180.477.163,76	12.898.132,24	
2	SMP NEGERI 1 PARIGI	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	193.375.350,00	193.375.350,00	87,90%	169.976.932,65	23.398.417,35	
3	SMP SATAP NEGERI SATAP PALASA	RUMAH NEGARA GOLONGAN 1	183.067.000,00	183.067.000,00	66,64%	121.995.848,80	61.071.151,20	
JUMLAH PEKERJAAN DARI 2022			569.817.646,00	569.817.646,00		472.449.945,21	97.367.700,79	
4	SD INPRES 2 BALINGGI	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	76,73%	104.091.918,00	31.568.082,00	
5	SD INPRES 3 KASIMBAR	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	97,90%	132.811.140,00	2.848.860,00	
6	SD NEGERI TANGKELAI	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	76,31%	103.522.146,00	32.137.854,00	
7	SD NEGERI 3 PALASA	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	92,44%	125.404.104,00	10.255.896,00	
8	SD NEGERI 4 PALASA	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	69,59%	94.405.794,00	41.254.206,00	
9	TK NEGERI 5 SAUSU	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	112.322.000,00	78.625.400,00	32,40%	36.392.328,00	42.233.072,00	
10	SMP NEGERI SATU ATAP 2 PARIGI BARAT	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	116.950.000,00	116.950.000,00	100,00%	116.950.000,00	-	
11	SD NEGERI 5 TERPENCIL PALASA	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	50.000.000,00	20.000.000,00	18,00%	9.000.000,00	11.000.000,00	
12	SD NEGERI PARANGGI	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	745.820.200,00	745.820.200,00	87,02%	649.012.738,04	96.807.461,96	
13	SD INPRES 3 KASIMBAR	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	217.689.600,00	217.689.600,00	82,67%	179.963.992,32	37.725.607,68	
14	SD INPRES 3 KASIMBAR	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	92.164.800,00	92.164.800,00	97,29%	89.667.133,92	2.497.666,08	
15	SD INPRES 3 KASIMBAR	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	210.730.600,00	210.730.600,00	87,88%	185.190.051,28	25.540.548,72	
16	SD INPRES 2 SINEY	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	369.009.000,00	258.306.300,00	68,62%	253.213.975,80	5.092.324,20	
17	SD INPRES 2 SINEY	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	92.164.800,00	92.164.800,00	83,14%	76.625.814,72	15.538.985,28	
18	SD INPRES 2 SINEY	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	225.235.200,00	225.235.200,00	84,57%	190.481.407,82	34.753.792,18	
19	SD INPRES 2 SINEY	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	217.689.600,00	152.382.720,00	67,49%	146.918.711,04	5.464.008,96	
20	SD INPRES 2 SINEY	RUMAH NEGARA GOLONGAN 1	172.318.500,00	172.318.500,00	78,09%	134.563.516,65	37.754.983,35	
21	SD NEGERI TANGKELAI	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	369.009.000,00	369.009.000,00	71,87%	265.206.768,30	103.802.231,70	
22	SD NEGERI TANGKELAI	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	217.689.600,00	217.689.600,00	86,15%	187.539.590,40	30.150.009,60	
23	SD NEGERI TANGKELAI	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	92.164.800,00	92.164.800,00	85,14%	78.469.110,72	13.695.689,28	
24	SD NEGERI TANGKELAI	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	225.235.200,00	225.235.200,00	85,14%	191.765.249,28	33.469.950,72	
25	SD NEGERI TANGKELAI	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	210.730.600,00	210.730.600,00	85,47%	180.111.443,82	30.619.156,18	
26	SD NEGERI TANGKELAI	RUMAH NEGARA GOLONGAN 1	172.318.500,00	172.318.500,00	79,38%	136.786.425,30	35.532.074,70	
27	SD NEGERI INTI 1 SIDOAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN 1	289.329.000,00	289.329.000,00	78,69%	227.672.990,10	61.656.009,90	
28	SD NEGERI 3 PALASA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	309.854.400,00	309.854.400,00	81,10%	251.291.918,40	58.562.481,60	
29	SD NEGERI 3 PALASA	RUMAH NEGARA GOLONGAN 1	96.443.000,00	96.443.000,00	81,89%	78.977.172,70	17.465.827,30	
30	SD NEGERI 3 PALASA	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	111.753.000,00	111.753.000,00	77,24%	86.318.017,20	25.434.982,80	
31	SD NEGERI 4 PALASA	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	225.235.200,00	225.235.200,00	68,55%	154.398.729,60	70.836.470,40	
32	SD NEGERI 4 PALASA	RUMAH NEGARA GOLONGAN 1	172.318.500,00	120.622.950,00	68,55%	118.124.331,75	2.498.618,25	
33	SD NEGERI 2 BOLANO	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	225.235.200,00	225.235.200,00	78,56%	176.944.773,12	48.290.426,88	
34	SD NEGERI 2 BOLANO	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	217.689.600,00	217.689.600,00	78,56%	171.016.949,76	46.672.650,24	
35	SD NEGERI 2 BOLANO	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	92.164.800,00	92.164.800,00	78,56%	72.404.666,88	19.760.133,12	
37	SMP NEGERI SATU ATAP 2 PARIGI BARAT	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	792.734.851,00	792.734.851,00	82,26%	652.103.688,43	140.631.162,57	
38	SMP NEGERI SATU ATAP 1 PARIGI TENGAH	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	952.959.000,00	667.071.300,00	55,14%	525.461.592,60	141.609.707,40	
39	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TINOMBO SELATAN	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	484.335.000,00	484.335.000,00	70,85%	343.151.347,50	141.183.652,50	
40	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TINOMBO SELATAN	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.046.350.350,00	1.046.350.350,00	65,76%	688.079.990,16	358.270.359,84	
41	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TINOMBO SELATAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	230.472.000,00	230.472.000,00	70,60%	162.713.232,00	67.758.768,00	
JUMLAH PEKERJAAN DARI 2023			9.834.415.901,00	9.257.126.471,00		7.376.752.759,61	1.880.373.711,39	
JUMLAH KESELURUHAN PEKERJAAN DARI 2022-2023			10.404.233.547,00	9.826.944.117,00		7.849.202.704,82	1.977.741.412,18	

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Saldo Awal Desember 2022	Koreksi Persediaan 2022	Saldo Awal Januari 2023	Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Saldo Akhir 2023
						mutasi tambah/unaudited	koreksi audited	jumlah mutasi tambah	mutasi kurang/unaudited	koreksi audited	jumlah mutasi kurang	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	alat tulis kantor	7.225.000,00			415.007.631,00		415.007.631,00	414.830.631,00		414.830.631,00	7.402.000,00
2	DINAS KESEHATAN	Bahan Lainnya	4.151.492.771,08			401.143.480,00		401.143.480,00	3.793.362.228,37	1.639.720,14	3.795.001.948,51	757.634.302,57
		Obat	4.177.791.886,41			4.630.046.422,00		4.630.046.422,00	3.990.356.788,17	3.010.721,22	3.993.367.509,39	4.814.470.799,02
		Obat-obatan Lainnya	1.794.538.296,72			1.877.115.165,38		1.877.115.165,38	1.439.714.506,00		1.439.714.506,00	2.231.938.956,10
		Suku Cadang Alat Kedokteran				6.230.375.916,00		6.230.375.916,00	1.219.084.091,00	356.820,00	1.219.440.911,00	5.010.935.005,00
3	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	Bahan Kimia	1.847.477.502,90	12.366.442,60	1.835.111.060,30	13.324.932.678,39		13.324.932.678,39	13.333.289.835,72		13.333.289.835,72	1.826.753.902,97
		Bahan Lainnya	2.292.109.040,66			9.828.881.522,04		9.828.881.522,04	8.537.386.873,69		8.537.386.873,69	3.583.603.689,01
		alat tulis kantor	19.640.528,75			284.017.517,75		284.017.517,75	269.316.508,38		269.316.508,38	34.341.538,12
		Bahan Cetak	77.544.219,00			406.806.440,00		406.806.440,00	417.067.000,25		417.067.000,25	67.283.658,75
		Alat Listrik	1.618.680,00			92.478.645,00		92.478.645,00	90.048.720,00		90.048.720,00	4.048.605,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.346.900,00			129.509.387,50		129.509.387,50	122.054.327,50		122.054.327,50	12.801.960,00
		Obat	3.092.627.406,21			16.446.620.559,21	19.014.451,19	16.465.635.010,40	14.533.105.568,62	1.592.114,00	14.534.697.682,62	5.023.564.733,99
		Natura	28.337.902,50	11.030.625,00	17.307.277,50	463.563.195,00		463.563.195,00	459.290.962,50		459.290.962,50	21.579.510,00
4	BLUD-RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	Bahan Lainnya	167.679.625,06			1.148.754.478,03	52.691.784,70	1.201.446.262,73	1.138.564.729,19		1.138.564.729,19	230.561.158,60
		alat tulis kantor	7.622.530,00			41.678.374,90	1,00	41.678.375,90	40.800.227,40		40.800.227,40	8.500.678,50
		Kertas dan Cover	801.377,00			21.429.875,00		21.429.875,00	22.072.627,00		22.072.627,00	158.625,00
		Obat	338.142.416,63			1.327.202.618,50	123.923.774,93	1.451.126.393,43	1.374.877.652,55	24.939,99	1.374.902.592,54	414.366.217,52
		Bahan Cetak	13.138.867,50			165.207.717,15		165.207.717,15	136.592.812,51		136.592.812,51	41.753.772,14
		Alat Listrik	2.124.003,00			67.943.378,70		67.943.378,70	55.240.717,50		55.240.717,50	14.826.664,20
		Obat-obatan Lainnya	98.840.450,00					-			-	98.840.450,00
		Perabot Kantor				54.581.500,00		54.581.500,00	39.646.350,00		39.646.350,00	14.935.150,00
5	RSUD BULUYE NAPOA"E	Bahan Lainnya	33.028.193,07					-			-	33.028.193,07
		Suku Cadang Alat Kedokteran				163.666.687,00		163.666.687,00	63.098.168,62		63.098.168,62	100.568.518,38
		Obat	106.851.865,79			326.630.361,00		326.630.361,00	186.302.807,64		186.302.807,64	247.179.419,15
		Isi Tabung Gas	2.664.000,00			56.449.050,00		56.449.050,00	57.514.650,00		57.514.650,00	1.598.400,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.144.000,00			194.657.580,00		194.657.580,00	152.399.854,00		152.399.854,00	53.401.726,00
		Bahan Kimia	39.014.851,50					-	3.379.908,83		3.379.908,83	35.634.942,67
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.835.804.034,00			9.992.115.718,00		9.992.115.718,00	10.913.321.738,00		10.913.321.738,00	914.598.014,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bahan Lainnya	22.000.000,00			23.700.000,00		1.700.000,00	23.700.000,00		23.700.000,00	-
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	239.229.833,33			44.946.798,00		44.946.798,00	91.476.798,00		91.476.798,00	192.699.833,33
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Obat-obatan Lainnya	97.015.448,00			2.216.387.378,00		2.216.387.378,00	1.251.357.143,00		1.251.357.143,00	1.062.045.683,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Alat tulis kantor	30.882.500,00			242.282.381,00		242.282.381,00	247.262.081,00		247.262.081,00	25.902.800,00
		Kertas dan Cover	39.468.000,00				18.089.500,00	18.089.500,00	39.468.000,00		39.468.000,00	18.089.500,00
		Bahan Cetak	281.707.818,00			216.193.400,00		216.193.400,00	392.795.218,00		392.795.218,00	105.106.000,00
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Alat tulis kantor	599.375,00			29.342.350,00		29.342.350,00	29.941.725,00		29.941.725,00	-
		Kertas dan Cover	350.000,00			14.500.100,00		14.500.100,00	14.850.100,00		14.850.100,00	-
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat				1.650.236.805,00		1.650.236.805,00	1.615.264.105,00		1.615.264.105,00	34.972.700,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Saldo Awal Desember 2022	Koreksi Persediaan 2022	Saldo Awal Januari 2023	Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Saldo Akhir 2023
						mutasi tambah/unaudited	koreksi audited	jumlah mutasi tambah	mutasi kurang/unaudited	koreksi audited	jumlah mutasi kurang	
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	535.000,00					-	535.000,00		535.000,00	-
12	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Alat tulis kantor				126.045.900,00		126.045.900,00	124.445.300,00		124.445.300,00	1.600.600,00
		Kertas dan Cover				52.978.200,00		51.825.100,00	51.825.100,00		1.153.100,00	
		Bahan kimia	16.730.747,00			663.780.000,00	95.418.375,00	759.198.375,00	328.843.977,00		328.843.977,00	447.085.145,00
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Alat tulis kantor	678.100,00			25.815.590,00		25.815.590,00	26.493.690,00		26.493.690,00	-
		Benda Pos	230.000,00			930.000,00		930.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00	-
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	105.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00	25.105.000,00		25.105.000,00	-
14	SEKRETARIAT DAERAH	Alat tulis kantor	10.043.880,00			371.241.387,00		371.241.387,00	374.178.942,00		374.178.942,00	7.106.325,00
		Kertas dan Cover	8.905.505,00			142.209.125,00		142.209.125,00	140.146.580,00		140.146.580,00	10.968.050,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.821.000,00			203.930.000,00		203.930.000,00	235.751.000,00		235.751.000,00	-
		Suvenir/Cendera Mata	23.500.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00	48.500.000,00		48.500.000,00	-
		Benda Pos	50.000,00			39.958.000,00		39.698.000,00	39.698.000,00		39.698.000,00	310.000,00
		Alat listrik	21.298.500,00			520.348.696,00		520.348.696,00	541.647.196,00		541.647.196,00	-
		Bahan Bakar dan Pelumas	30.000.000,00			726.044.800,00		726.044.800,00	756.044.800,00		756.044.800,00	-
		Bahan Lainnya	5.341.000,00			431.896.000,00		431.896.000,00	437.237.000,00		437.237.000,00	-
		Bahan Cetak	4.800.000,00			315.978.850,00		315.978.850,00	319.658.850,00		319.658.850,00	1.120.000,00
		Perabot Kantor				211.640.400,00		183.455.378,00	183.455.378,00		28.185.022,00	
		Natura				144.119.000,00		144.119.000,00	143.759.000,00		143.759.000,00	360.000,00
15	SEKRETARIAT DPRD	Alat tulis kantor	1.510.415,00			145.790.550,00		145.562.715,00	145.562.715,00		1.738.250,00	
		Kertas dan Cover	718.745,00			82.090.600,00		82.090.600,00	81.837.245,00		81.837.245,00	972.100,00
		Benda Pos	125.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00	9.625.000,00		9.625.000,00	500.000,00
		Bahan Komputer	1.900.000,00					-	1.900.000,00		1.900.000,00	-
		Perabot Kantor	2.529.200,00			406.693.830,00		406.693.830,00	398.697.782,00		398.697.782,00	10.525.248,00
16	INSPEKTORAT DAERAH	Alat tulis kantor	5.024.548,00			97.225.300,00		98.123.948,00	98.123.948,00		4.125.900,00	
		Kertas dan Cover	836.451,00			23.212.600,00		23.212.600,00	23.211.051,00		23.211.051,00	838.000,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	718.753,00					-	718.753,00		718.753,00	-
		Perabot Kantor				14.452.700,00		14.452.700,00	13.190.650,00		13.190.650,00	1.262.050,00
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Alat tulis kantor	15.859.730,00			98.638.250,00		98.638.250,00	72.361.362,00		72.361.362,00	42.136.618,00
		Kertas dan Cover	16.107.449,00			135.851.998,00		135.851.998,00	138.370.572,00		138.370.572,00	13.588.875,00
		Bahan Cetak	655.303.781,00			395.922.710,00		395.922.710,00	310.214.573,00		310.214.573,00	741.011.918,00
		Bahan Komputer	1.260.000,00					-	1.260.000,00		1.260.000,00	-
		Perabot Kantor	90.000,00			174.900,00		174.900,00	264.900,00		264.900,00	-
		Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00			9.000.000,00		9.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	-
JUMLAH			21.722.882.126,11	23.397.067,60	1.852.418.337,80	77.952.374.495,55	309.137.886,82	78.261.512.382,37	71.594.658.818,44	6.624.315,35	71.601.283.133,79	28.359.714.307,09

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MOUTONG

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK YANG TAHUN BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
Lapaoran Auditor Independen	
Neraca	1
Per 31 Desember 2017 dan 2016	
Laporan Laba Rugi	2
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	
Laporan Arus Kas	4
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 15



Kantor Akuntan Publik
Drs. Supriadi Laupe

No. Izin Usaha : KEP - 494/KM.5/2004

Jl. Dewi Sartika No. 84C Palu 94121 Telp. (0451) 481960, Fax. (0451) 481960

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 18.1/GL/2018

Kepada Yth
Pemilik dan Direktur Perusahaan Daerah Parigi Moutong
Di Tempat

Kami telah ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Daerah Parimo terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2017, serta laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraph basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit.

Basis untuk opini tidak memberi pendapat

Kami tidak memperoleh catatan pembukuan perusahaan, bukti-bukti penerimaa kas dan pengeluaran kas serta bukti pembukuan lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena manajemen perusahaan sudah tidak aktif (tidak berkantor) lagi pada saat kami akan melakukan audit atas laporan keuangan. Sehubungan dengan itu kami tidak dapat menempuh prosedur audit apapun untuk menyakini kewajaran atas laporan keuangan perusahaan.



Kantor Akuntan Publik
Drs. Supriadi Laupe

No. Izin Usaha : KEP - 494/KM.5/2004

Jl. Dewi Sartika No. 84C Palu 94121 Telp. (0451) 481960, Fax. (0451) 481960

Opini tidak memberi pendapat

Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraph basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Parigi Moutong tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir.

Hormat kami,

Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe

Dr. Supriadi Laupe, M.Si, Ak, CA, CPA

NRAP AP.0779

Palu 23 Maret 2018

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
NERACA

Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ASET			
<u>Aset Lancar</u>			
Kas dan Setara Kas	2b,3	12,256,925	28,305,407
Piutang	2c,4	-	1,702,814,884
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2c,4	-	(1,702,814,884)
Pekerjaan Dalam Proses		272,411,542	272,411,542
Jumlah Aset Lancar		284,668,467	300,716,949
<u>Aset Tetap</u>			
Harga Perolehan Aset Tetap	2e,6	751,906,588	744,736,588
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2e,6	(383,880,167)	(380,447,458)
Nilai Buku Aset Tetap		368,026,421	364,289,130
TOTAL ASET		652,694,888	665,006,079
KEWAJIBAN			
Kewajiban Bank	2g,7	455,250,238	455,250,238
Kewajiban Lain-lain	2g,7		
Jumlah Kewajiban		455,250,238	455,250,238
EKUITAS			
Penyertaan Modal Pemda Parigi Mautong	8	2,490,000,000	2,490,000,000
Saldo Laba/Rugi	8	(2,292,555,350)	(2,280,244,159)
Jumlah Ekuitas		197,444,650	209,755,841
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		652,694,888	665,006,079

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Perkebunan	2j,9	200,000	1,450,000
Pendapatan Perikanan	2j,9	-	2,725,000
Pendapatan SPAM	2j,9	467,572,535	476,959,985
Pendapatan Non Air	2j,9	1,329,840	35,662,570
Pendapatan Penjualan Rangka Baja	2j,9	7,990,000	
Jumlah Pendapatan Usaha		477,092,375	516,797,555
BEBAN USAHA			
Beban Gaji	2j,10	(414,275,308)	(368,330,962)
Beban Iklan	2j,10	(300,000)	(8,850,000)
Beban Persediaan	2j,10	(1,600,000)	
Beban Operasional	2j,10	(63,580,549)	(70,858,686)
Beban Tenaga Ahli	2j,10	(4,000,000)	(4,850,000)
Beban Bunga	2j,10	-	(26,008,389)
Beban Denda	2j,10	-	(1,933,840)
Beban Penyusutan	2j,10	(3,432,708)	(478,958)
Beban Lain-lain	2j,10	(2,215,000)	(18,237,500)
Jumlah Beban Usaha		(489,403,565)	(499,548,335)
LABA/(RUGI) KOTOR		(12,311,190)	17,249,220
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain		-	-
Beban Lain-lain		-	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain		-	-
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(12,311,190)	17,249,220
PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA BERSIH		(12,311,190)	17,249,220

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

	Modal Saham	Saldo Laba	Jumlah
Saldo 31 Desember 2015	2,490,000,000	(2,297,493,379)	192,506,621
Laba/(Rugi) Tahun 2016		17,249,220	17,249,220
Saldo 31 Desember 2016	2,490,000,000	(2,280,244,159)	209,755,841
Tambahan Modal Disetor			-
Laba/(Rugi) Tahun 2017		(12,311,190)	(12,311,190)
Saldo 31 Desember 2017	2,490,000,000	(2,292,555,349)	197,444,651

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Tahun Berjalan	(12,311,190)	17,249,220.45
Penyesuaian untuk:		
Beban Penyusutan	3,432,709	478,958.00
Laba/(Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja		
Penurunan/(Kenaikan) Piutang Lain-lain	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	-	18,361,340.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(8,878,481)	36,089,518
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(7,170,000)	(7,785,000)
Pembelian Aset Tidak Berwujud	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(7,170,000)	(7,785,000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyertaan Modal	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Dividen	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(16,048,481)	28,304,518
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	28,305,407.00	889
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	12,256,926	28,305,407

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

1. UMUM

a. Pendirian

Perusahaan Daerah Parigi Mautong didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Mautong Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah Parigi Mautong efektif berjalan sejak tahun 2006 setelah pengangkatan dan pelantikan Direktur Utama Perusahaan Daerah atas nama Abdullah Passau dan Direktur Operasional/Teknis atas nama Ir. Sugendi Samudin.

b. Pengurus

Kepengurusan Perusahaan Daerah Parigi Mautong disempurnakan kembali dengan surat Keputusan Bupati Parigi Mautong Nomor. 539/1478/Bag. Umum tanggal 22 Juni 2010 tentang Perubahan Kepengurusan Perusahaan Daerah Parigi Mautong dan diubah dengan Surat Keputusan Bupati Parigi Mautong Nomor: 821.22-45/0650/Bag. Hukum tanggal 4 Januari 2016 tentang Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Mautong Masa Bakti 2016-2020 dengan kepengurusan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ahmad Alamri
Direktur Operasional	: Teguh Afriyanto
Direktur Umum	: Fakrudin
Direktur Keuangan	: Yuslan Attamimi

Badan Pengawas

Ketua	: H. Ekka Pontoh, SH, M.Si
Anggota	: H. Abdul Radjab, SE., M.Si
Anggota	: Masdin S.Sos. M.Si

c. Bidang Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Mautong Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah, usaha Perusahaan Daerah Parigi Mautong adalah bergerak dalam

- a. Penyediaan air minum
- b. Pengelolaan persampahan
- c. Pengelolaan air kotor
- d. Rumah potong hewan
- e. Pengelolaan pasar
- f. Pengelolaan objek wisata
- g. Pengelolaan sarana wisata
- h. Perbankan dan Pengkreditan
- i. Penyediaan Pemukiman
- j. Penyediaan transportasi

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai sejak berdirinya perusahaan.

Manajemen perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2017 dengan angka komparatif 2016 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya".

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan estimasi tingkat ketidaktertagihan saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak

d. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Penyisihan untuk persediaan usang dan lambat bergerak ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap. Adapun tarif penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Jenis Aset Tetap		
Kelompok Bukan Bangunan	Umur Ekonomis	Tarif Penyusutan
-Kelompok I	4	25%
-Kelompok II	8	12.50%
-Kelompok III	16	6.25%
-Kelompok IV	20	
Kelompok Bangunan		
-Permanen	20	5%
-Non Permanen	10	10%

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Aset tetap dikelompokkan kedalam masing-masing kelompok aset tetap sesuai dengan 90/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada organisasi tahun berjalan.

f. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset berwujud diukur pada biaya perolehan dikurangi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai aset.

g. Kewajiban

Kewajiban dinyatakan dengan lengkap agar tergambar seluruh kewajiban perusahaan yang terhutang pada akhir tahun. Hutang jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang. kewajiban bunga atas hutang jangka panjang yang timbul selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang dalam perkiraan "Bunga Masa Tenggang".

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Kewajiban (lanjutan)

Bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang setelah tanggal neraca, termasuk yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dilunasi, harus dipisahkan dari kelompok kewajiban jangka panjang dan disajikan sebagai "kewajiban Jangka Pendek"

h. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

i. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan belum mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 tentang Imbalan Kerja. Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 adalah program imbalan pasti.

j. Penghasilan dan Beban

Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan.

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam melaksanakan aktivitas entitas yang biasa. Beban yang timbul dalam melaksanakan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban administrasi, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasa berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Laporan Keuangan Pokok

Laporan keuangan PT. Pembangunan Sulteng disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK ETAP Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kas:		
Kas Tunai	12,256,925	28,305,407
Bank:		
Giro PT. Bank Tabungan Negara Tbk	-	-
Giro PT. Bank Sulteng	-	-
Jumlah	<u>12,256,925.00</u>	<u>28,305,407.00</u>

4. PIUTANG

Saldo piutang Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Piutang Usaha	-	1,702,814,884
Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	(1,702,814,884)
Jumlah	<u>-</u>	<u>1,702,814,884</u>

Perusahaan memiliki piutang usaha per tanggal 31 Desember 2017 yang berasal dari piutang atas usaha penyediaan air minum sebesar Rp 1.702.814.484

Perusahaan tidak memiliki piutang per 31 Desember 2017, hal ini disebabkan piutang tahun 2016 merupakan hasil penyerahan atas piutang yang diserahkan pengelolaannya dari Unit Pelaksana Teknis Air Minum (UPT-AM) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Mautong kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Mautong sesuai dengan Peraturan Bupati Parigi Mautong Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengalihan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan dari Dinas Pekerjaan Umum ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Mautong tanggal 1 Juli 2016.

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

4. PIUTANG (Lanjutan)

Pada tanggal 4 Oktober 2017 Perusahaan Daerah Parigi Mautong menyerahkan kembali pengelolaan SPAM IKK Parigi dan Torue kepada Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Parigi Mautong Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017, serta Berita Acara Serah Terima Nomor 041/PD.PM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017

Atas piutang tersebut diatas sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Mautong Tahun 2016 seluruhnya telah dikategorikan piutang macet dan telah disisihkan.

5. PEKERJAAN DALAM PROSES

Saldo Pekerjaan Dalam Proses Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Perumahan BTN	272,411,542	272,411,542
Jumlah	272,411,542	272,411,542

Perumahan BTN terdiri dari 18 unit rumah dengan kondisi sebagai berikut:

- a. 6 unit rumah telah selesai dibangun (diatapi, diplester, dan dicat) namun belum ditempati
- b. 2 unit yang sudah diatapi, namun belum diplester dan dicat
- c. 12 unit rumah telah didinding, namun belum ada rangka dan belum diatapi

Perusahaan Daerah Parigi Mautong belum melakukan penilaian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai pada pekerjaan dalam proses yang kondisinya sudah mulai rusak.

6. ASET TETAP

Rekonsiliasi aset tetap untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017			
	31/12/2016	Penambahan	Pengurangan	31/12/2017
Harga Perolehan:				
Tanah	356,983,088	-	-	356,983,088
Kendaraan dan Mesin	338,218,500	-	-	338,218,500
Inventaris	49,535,000	7,170,000	-	56,705,000
Jumlah Harga Perolehan	744,736,588	7,170,000	-	751,906,588
Akumulasi Penyusutan:				
Kendaraan dan Mesin	(338,218,500)	-	-	(338,218,500)
Inventaris	(42,228,958)	(3,432,709)	-	(45,661,667)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(380,447,458)	(3,432,709)	-	(383,880,167)
Nilai Buku Aset Tetap	364,289,130			368,026,421

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

6. ASET TETAP (Lanjutan)

	2016			
	31/12/2015	Penambahan	Pengurangan	31/12/2016
Harga Perolehan:				
Tanah	356,983,088	-	-	356,983,088
Kendaraan dan Mesin	338,218,500	-	-	338,218,500
Inventaris	41,750,000	7,785,000	-	49,535,000
Jumlah Harga Perolehan	736,951,588	7,785,000	-	744,736,588
Akumulasi Penyusutan:				
Kendaraan dan Mesin	(338,218,500)	-	-	(338,218,500)
Inventaris	(41,750,000)	(478,958)	-	(42,228,958)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(379,968,500)	(478,958)	-	(380,447,458)
Nilai Buku Aset Tetap	356,983,088			364,289,130

Aset tanah terdiri dari:

- a. Lahan perkebunan seluas 4.257 M2 di Desa Balara Kecamatan Parigi Barat
- b. Lahan perkebunan dengan luas sekitar 44.000 M2 di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah

Aset kendaraan dan mesin terdiri dari:

- a. Mobil Dump Truk DN 8691 AD dengan kondisi rusak berat.
- b. Mesin Stone Crusher dengan kondisi rusak berat dan tidak dikuasai lagi oleh perusahaan.

Penambahan aset tetap senilai Rp 7.170.000 berupa:

<u>Nama Barang</u>	<u>Harga</u>
CCTV	6,820,000
Briket TV	350,000
	7,170,000

7. KEWAJIBAN

Saldo kewajiban bank Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PT. Bank Tabungan Negara Tbk.	309,775,238	309,775,238
PT Bank Sulteng	145,475,000	145,475,000
Jumlah	455,250,238	455,250,238

Kewajiban per 31 Desember 2017 sama dengan per 31 Desember 2016, hal ini disebabkan Manajemen tidak mendapatkan rekening kredit selama tahun 2017 dari PT. Bank Tabungan Negara

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

7. KEWAJIBAN (Lanjutan)

Kewajiban perusahaan ini merupakan kewajiban yang timbul pada periode sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. adalah kewajiban atas kredit pengembang perumahan di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah.
- b. Kewajiban pada PT. Bank Sulteng adalah kewajiban atas kredit yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

8. MODAL

Saldo ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Penyertaan Modal Pemerintah Parigi Mautong	2,490,000,000	2,490,000,000
(Laba Ditahan)/Akumulasi Kerugian	(2,292,555,349)	(2,280,244,159)
Jumlah	<u>197,444,651</u>	<u>209,755,841</u>

9. PENDAPATAN

Saldo pendapatan usaha Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pendapatan Perkebunan	200,000	1,450,000
Pendapatan Perikanan	-	2,725,000
Pendapatan SPAM	467,572,535	476,959,985
Pendapatan Non Air	1,329,840	35,662,570
Pendapatan Penjualan Rangka Baja	7,990,000	-
Jumlah	<u>469,102,375</u>	<u>516,797,555</u>

10. BEBAN

Saldo beban usaha Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban Gaji	414,275,308	368,330,962
Beban Iklan	300,000	8,850,000
Beban Persediaan	1,600,000	-
Beban Operasional	63,580,549	70,858,686
Beban Tenaga Ahli	4,000,000	4,850,000
Beban Bunga	-	26,008,389
Beban Denda	-	1,933,840
Beban Penyusutan	3,432,708	478,958
Beban Lain-lain	2,215,000	18,237,500
Jumlah	<u>489,403,565</u>	<u>499,548,335</u>

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

11. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Persediaan

- 1) Peralatan dan Aksesoris
- 2) Bahan Kimia
- 3) Pasir Silika

Atas persediaan tersebut diatas kami tidak bisa memperoleh rincian jumlah unit dan harga satuan, namun perusahaan telah membuat daftar persediaan dan harga perolehan persediaan per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Bahan Instalasi

Water Meter	116,800,500
Klem Sadle	517,500
Dop	1,943,500
Kran 1/2 Inch	5,203,750
Shoet T 1/2 mm	1,490,400
Pengaman Box Meter	2,656,500
Double Nipple	2,403,000
Pipa Gip	3,801,900
Pipa 4 Inch	252,000,000
Pipa 2 Inch	5,500,000
Pipa 3/4 Inch	2,760,000
Jumlah	395,077,050

Bahan Operasi

Pasir Silica	87,500,000
Kaporit	10,327,500
Alum	4,000,000
Jumlah	101,827,500

Perusahaan tidak memiliki data penggunaan persediaan tahun 2017, oleh sebab itu untuk akun persediaan kami ungkapkan di bab Pengungkapan Lainnya.

b. Aset Tetap

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 644.4/0466/SEK.PU tanggal 10 Agustus 2016 Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) menyerahkan Aset Tetap berupa:

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

11. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Lanjutan)

b. Aset Tetap (lanjutan)

1) SPAM IKK Parigi

	Jumlah	
Bangunan Intake	2	Unit
Jaringan Pipa Transmisi 10"	2.5	Km
Rumah Jaga Intake	1	Unit
IPA Kapasitas 20 ltr/detik	1	Unit
IPA Kapasitas 5 ltr/detik	1	Unit
Reservoir Kapasitas 400 m3	2	Unit
Laboratorium	2	Unit
Gudang Bahan Kimia	1	Unit
Gudang Aksesoris	1	Unit
Gudang Pipa	1	Unit
Rumah Genset	1	Unit
Genset	1	Unit
Kantor	1	Unit
Tempat Parkir	1	Unit

2) SPAM IKK Torue

	Jumlah	
Bangunan Intake	1	Unit
Jaringan Pipa Transmisi 10"	1	Km
IPA Kapasitas 10 ltr/detik	1	Unit
Reservoir Kapasitas 250 m3	1	Unit
Laboratorium	1	Unit
Gudang Bahan Kimia	1	Unit
Gudang Pipa	1	Unit
Rumah Genset	1	Unit
Genset	1	Unit

PERUSAHAAN DAERAH PARIGI MAUTONG

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

11. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Lanjutan)

b. Aset Tetap (lanjutan)

3) Inventaris Kantor

	Jumlah	Harga
Alat Rumah Tangga lain-lain	1 Unit	855,200
Filling Besi	2 Unit	4,000,000
Kursi Putar	4 Unit	5,200,000
Kursi Lipat	6 Unit	2,400,000
Printer	1 Unit	2,000,000
Meja Komputer	2 Unit	930,000
Meja Kerja	6 Unit	4,800,000
Lemari Arsip	3 Unit	4,350,000
Kain Gorden	1 Unit	19,075,000
AC Unit	5 Unit	20,500,000
Alat Uji Tekan	1 Unit	54,600,000
PC Unit	2 Unit	12,900,000
Alat Lab Lain-lain	1 Unit	89,694,000
Stationary Water Pump	2 Unit	11,900,000
Handy Talky	2 Unit	14,900,000
Mesin Potong Rumput	1 Unit	2,500,000
Alat Ukur Lainnya	2 Unit	19,950,000
Sepeda Motor	1 Unit	14,500,000
Inventaris kantor yang tidak lengkap datanya		
Mesin Pemotong Rambut	N/A	N/A
Mesin Pemotong Pipa	N/A	N/A
Mesin Ulir	N/A	N/A
Brankas	N/A	N/A
Sensor Tangan	N/A	N/A
Komputer	2 Unit	N/A

Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2017 Perusahaan Daerah Parigi Mautong meyerahkan kembali pengelolaan SPAM IKK Parigi dan Torue kepada Dinas Pkerjaan Umum sesuai engan Peraturan Bupati Parigi Mautong Nomor 25 Taun 2017 tanggal 25 Juli 2017, serta Berita Acara Sera Terima Nomor 041/PD.PM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017

12. PERSETUJUAN UNTUK MENERBITKAN LAPORAN KEUANGAN

Direktur bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan tanggal 19 Januari 2018.

Lampiran 34

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINCIAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam rupiah)

NO	Perangkat Daerah	ASET TETAP						TOTAL ASET TETAP
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	
1	Sekretariat DPRD	2.450.246.055,00	14.985.396.853,34	35.747.148.091,00	188.907.000,00	218.946.520,00	0,00	53.590.644.519,34
2	Bagian Pemerintahan Umum	68.320.091.304,44	3.808.693.941,65	2.315.446.000,00	147.376.668,00	211.330.000,00	67.499.175,00	74.870.437.089,09
3	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	-	429.119.750,00	-	-	359.675.400,00	-	788.795.150,00
4	Bagian Kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan	-	902.486.800,00	-	-	-	-	902.486.800,00
5	Bagian Perekonomian	-	804.293.545,00	-	-	-	-	804.293.545,00
6	Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA	-	1.324.658.602,00	-	-	5.000.000,00	-	1.329.658.602,00
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.048.209.950,00	-	-	-	-	1.048.209.950,00
8	Bagian Umum	2.140.600.000,00	50.830.787.120,71	39.391.823.226,00	2.891.929.891,00	657.022.000,00	-	95.912.162.237,71
9	Bagian Hubungan Masyarakat		1.477.656.250,00			2.615.000,00		1.480.271.250,00
10	Bagian Organisasi	-	318.763.750,00	-	-	-	-	318.763.750,00
11	Bagian Sumber Daya Alam	-	36.568.600,00	-	-	-	-	36.568.600,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	307.362.218.483,00	33.143.146.601,00	45.244.656.217,87	1.258.888.756.614,75	-	16.214.344.995,40	1.660.853.122.912,02
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	765.200.610,00	1.399.999.600,00	3.319.937.459,00	14.954.043.000,00	-	-	20.439.180.669,00
14	Dinas Perhubungan	1.031.304.442,00	23.666.235.407,92	27.245.395.682,00	14.094.093.388,00	74.900.000,00	1.909.708.210,00	68.021.637.129,92
15	Dinas Kesehatan	4.875.528.599,00	156.329.142.287,75	160.786.072.585,79	24.278.520.308,00	55.000.000,00	-	346.324.263.780,54
16	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Anuntaloko	2.616.048.330,00	260.056.428.664,98	113.662.986.221,70	22.163.769.841,00	862.500,00	-	398.500.095.557,68
17	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo	499.469.003,00	53.226.690.126,54	33.073.792.000,00	4.048.287.000,00	-	-	90.848.238.129,54
18	Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoe	-	3.675.452.294,00	6.623.197.123,00	-	-	-	10.298.649.417,00
19	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	33.827.112.996,00	152.510.872.941,00	491.946.853.834,16	7.598.110.332,00	10.367.215.077,80	10.943.332.223,30	707.193.497.404,26

NO	Perangkat Daerah	ASET TETAP						TOTAL ASET TETAP
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	
20	Dinas Sosial	838.215.040,00	2.941.531.931,00	6.356.481.778,77	39.790.000,00	60.000.000,00	-	10.236.018.749,77
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.132.293,74	1.450.231.713,00	1.261.636.000,00	2.357.308.234,00	435.957.830,00	-	5.519.266.070,74
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	136.087.630,00	7.518.080.819,00	673.775.664,00	10.750.000,00	-	-	8.338.694.113,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	146.201.236,00	12.951.525.057,40	7.486.809.791,60	10.000.000,00	-	-	20.594.536.085,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.479.131.589,00	13.905.068.054,99	22.287.727.105,00	11.861.554.612,00	13.789.436,00	-	49.547.270.796,99
25	Dinas Ketahanan Pangan	-	1.411.230.848,00	10.000.000,00	-	-	-	1.421.230.848,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.071.900.000,00	14.470.121.488,00	30.026.171.276,01	34.723.699.999,99	682.095.499,18	315.390.000,00	81.289.378.263,18
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.000.000,00	4.097.210.500,00	2.516.465.095,14	-	23.750.000,00	-	6.737.425.595,14
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.990.215.857,25	4.822.431.086,00	71.329.907.088,35	464.623.072,91	-	-	86.607.177.104,51
29	Dinas Koperasi dan UKM	-	1.674.457.525,00	4.715.602.844,00	11.710.800,00	-	-	6.401.771.169,00
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.461.401.561,00	1.342.326.900,00	218.019.400,00	4.280.000,00	-	3.026.027.861,00
31	Badan Pendapatan Daerah	-	10.447.548.784,89	58.470.000,00	29.400.000,00	205.293.000,00	-	10.740.711.784,89
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	309.300.000,00	14.859.226.304,00	1.776.900.500,00	28.092.969.742,00	366.825.000,00	-	45.405.221.546,00
33	Inspektorat Daerah	-	2.532.562.802,00	3.369.904.000,00	41.546.000,00	-	-	5.944.012.802,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	6.143.383.175,00	1.646.888.000,00	121.140.000,00	-	-	7.911.411.175,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	227.900.000,00	8.490.142.316,00	2.984.192.552,00	309.307.000,00	1.061.258.573,00	-	13.072.800.441,00
36	Dinas Lingkungan Hidup	893.526.940,00	15.961.880.811,00	5.384.736.994,00	14.557.977.948,00	91.400.000,00	-	36.889.522.693,00
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.780.000,00	4.226.898.568,00	3.292.018.997,00	6.330.411.300,00	-	399.369.367,00	14.423.478.232,00
38	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	3.080.398.802,00	9.550.425.075,00	28.241.032.601,00	1.149.060.000,00	424.278.581,00	-	42.445.195.059,00
39	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	146.834.656,00	2.161.330.281,00	1.166.601.844,00	-	-	-	3.474.766.781,00
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	147.299.164,00	5.693.644.337,00	4.660.195.594,00	15.000.000,00	208.968.600,00	-	10.725.107.695,00

NO	Perangkat Daerah	ASET TETAP						TOTAL ASET TETAP
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	
41	Badan Kepegawaian Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	-	4.653.590.350,00	7.607.157.661,00	101.244.000,00	-	-	12.361.992.011,00
42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.511.500.000,00	2.949.432.247,00	1.384.100.844,00	40.893.100,00	560.771.269,00	-	6.446.697.460,00
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	82.415.000,00	4.470.885.363,00	771.673.252,00	-	133.750.000,00	-	5.458.723.615,00
44	Kecamatan Sausu	1.616.200.000,00	601.574.200,00	3.543.471.241,58	10.497.300.000,00	-	-	16.258.545.441,58
45	Kecamatan Balinggi	-	560.675.536,00	1.858.344.287,00	-	-	-	2.419.019.823,00
46	Kecamatan Torue	21.700.000,00	426.336.216,00	2.174.415.500,00	-	-	-	2.622.451.716,00
47	Kecamatan Parigi Selatan	3.000.000,00	466.342.700,00	1.944.864.500,00	-	-	-	2.414.207.200,00
48	Kecamatan Parigi	1.692.753.920,00	1.074.001.253,00	96.313.000,00	5.193.100.000,00	-	-	8.056.168.173,00
49	Kecamatan Parigi Barat	-	556.972.840,00	1.584.670.046,00	-	-	-	2.141.642.886,00
50	Kecamatan Parigi Tengah	75.000.000,00	536.901.716,00	1.991.849.692,00	18.530.000,00	-	-	2.622.281.408,00
51	Kecamatan Parigi Utara	-	476.301.366,00	1.928.024.542,00	28.000.000,00	-	-	2.432.325.908,00
52	Kecamatan Siniu	115.000.000,00	406.642.233,00	2.616.492.975,00	5.500.000,00	-	-	3.143.635.208,00
53	Kecamatan Ampibabo	6.475.800.000,00	515.173.320,00	2.110.585.200,00	-	-	-	9.101.558.520,00
54	Kecamatan Toribulu	10.170.000,00	319.043.208,00	1.666.959.295,00	-	-	-	1.996.172.503,00
55	Kecamatan Kasimbar	-	581.716.850,00	1.363.958.666,00	73.751.000,00	7.693.500,00	-	2.027.120.016,00
56	Kecamatan Tinombo Selatan	10.000.000,00	358.097.832,00	2.109.475.000,00	-	-	-	2.477.572.832,00
57	Kecamatan Tinombo	1.115.250.000,00	778.728.103,00	3.618.738.566,58	-	-	-	5.512.716.669,58
58	Kecamatan Palasa	2.519.810.000,00	544.505.848,00	7.464.327.200,00	-	-	-	10.528.643.048,00
59	Kecamatan Tomini	184.827.892,00	522.334.932,00	1.975.324.526,00	-	-	-	2.682.487.350,00
60	Kecamatan Mepanga	-	410.530.971,00	1.701.495.050,00	-	-	-	2.112.026.021,00
61	Kecamatan Bolano Lambunu	5.734.250.000,00	531.532.950,00	1.517.512.850,00	11.860.600.000,00	14.205.000,00	-	19.658.100.800,00
62	Kecamatan Taopa	-	362.863.641,00	1.555.483.547,00	18.400.000,00	-	-	1.936.747.188,00
63	Kecamatan Moutong	402.576.700,00	550.065.000,00	2.564.513.747,67	13.787.000.000,00	-	-	17.304.155.447,67
64	Kecamatan Bolano	194.716.198,00	429.937.533,00	2.282.375.000,00	-	-	-	2.907.028.731,00
65	Kecamatan Ongka Malino	353.245.463,00	461.924.244,00	2.269.019.000,00	-	-	-	3.084.188.707,00
66	Kecamatan Sidoan	-	569.108.075,00	2.848.074.000,00	-	-	-	3.417.182.075,00
67	Kelurahan Kampal	-	250.932.866,00	616.829.000,00	-	-	-	867.761.866,00
68	Kelurahan Maesa	20.000.000,00	359.160.825,00	707.503.000,00	-	-	-	1.086.663.825,00

NO	Perangkat Daerah	ASET TETAP						TOTAL ASET TETAP
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	
69	Kelurahan Loji	-	341.686.566,00	-	-	50.000.000,00	-	391.686.566,00
70	Kelurahan Bantaya	-	426.769.283,00	676.841.000,00	-	-	-	1.103.610.283,00
71	Kelurahan Masigi	-	473.277.832,00	646.841.000,00	-	-	-	1.120.118.832,00
	JUMLAH	464.781.958.203,43	932.711.982.022,17	1.225.142.386.254,22	1.491.222.380.251,65	16.296.882.785,98	29.849.643.970,70	4.160.005.233.488,15

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINCIAN ASET LAINNYA RUSAK BERAT
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA OPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.517.394.350,00	782.786.802,00	-	-	157.524.542,00	No. 032/1427/DISDIKBUD Tentang reklas AT gedung bangunan ke aset rusak berat berdasarkan surat permohonan koreksi pencatatan nilai aset gedung dan bangunan pada SD Inpres Binangga dan SDN Petapa.
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo	172.260.000,00	-	-	-	-	No 944.45/1158/BPKAD tentang reklasifikasi dan koreksi aset tetap sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang RSUD Raja Tombolotutu tahun 2022
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	105.075.000,00	-	-	249.520.000,00	-	No 032/0516/ Sek.PUPRP Tentang Reklasifikasi Peralatan Mesin ke Aset Lainnya karena berupa 5 unit Sepeda Motor dan 1 unit Kaisar Triseda berdasarkan surat Permohonan Penjualan.
4	Dinas Perhubungan	3.624.246.612,08	1.090.079.000,00	3.201.353.000,00	-	-	No. 944.45/1160/BPKAD tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Perhubungan Tahun 2022.
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	222.174.475,00	-	-	-	-	No 944.45/1159/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD Pada Pengguna Barang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Dinas Koperasi dan UKM	94.396.350,00	-	-	-	-	No. 944.45/1164/BPKAD Tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD Pada Pengguna Barang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022.
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	181.545.000,00	-	-	-	-	No. 944.45/1174/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi AT sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Dinas PMPTSP Tahun 2022
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.094.240.000,00	-	-	-	-	No. 944.45/1189/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi AT sbg tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Dinas TPHP Tahun 2022

NO	NAMA OPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	KETERANGAN
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.002.193.200,00	-	-	-	-	No. 944.45/1183/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi AT sbg tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pd pengguna barang Dinas Perindag Tahun 2022
10	Dinas Lingkungan Hidup	242.023.245,00	-	-	-	-	nomor 944.45/1162/BPKAD tentang reklasifikasi dan koreksi AT sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.666.486,00	-	-	-	-	Berdasarkan Tindak Lanjut Temuan BPK karena tidak dapat ditelusuri.
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.863.900.645,00	-	-	-	-	N0. 944.45/1166BPKAD Tentang Reklasifikasi dan koreksi AT sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.
13	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	32.944.000,00	-	-	-	-	No 944. 45/ 1165/ BPKAD Tentang Reklasifikasi Dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD Pada Pengguna Barang Badan KESBANGPOL Tahun 2022
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	823.350.250,00	-	-	-	-	944.45/1163/BPKAD tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022.
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.067.738.240,00	-	-	-	-	No. 944.45/1188/BPKAD dan No. 944.45/1165/BPKAD tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika.
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	499.329.375,00	-	-	-	-	No. 944.45/1182/BPKAD Tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022.
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	801.141.989,26	-	-	-	-	No. 944.45/1171/BPKAD tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Tahun 2022.
18	Badan Pendapatan Daerah	1.001.778.352,85	-	-	-	-	No. 944.45/1172/BPKAD dan SK No. 944.45/1173/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi aset tetap sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada Pengguna Barang Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

NO	NAMA OPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	KETERANGAN
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	234.500.000,00	-	-	-	-	No. 900/459/2023/Keu-PMD Tentang Reklasifikasi dari alat angkutan darat bermotor ke aset rusak berat berupa mini bus (penumpang 14 org ke bawah) berdasarkan surat pernyataan atas BMD yang akan dihibahkan.
20	Sekretariat DPRD	1.886.357.637,78	-	-	-	-	No. 944.45/1170/BPKAD tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022.
21	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	-	-	-	-	No. 944.45/1169/BPKAD tentang Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 2022.
22	Bagian Hubungan Masyarakat	1.668.383.500,00	-	-	-	-	No. 944.45/1167/BPKAD tentang reklasifikasi dan koreksi aset tetap sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2022
23	Bagian Organisasi	290.076.282,00	-	-	-	-	No. 944.45/1168/BPKAD Tentang Reklasifikasi dan koreksi aset tetap sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada Pengguna Barang Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022.
24	Bagian Umum	1.108.721.428,57	-	-	-	-	No. 000.2.3.2/6768/Bag Umum Tentang Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke rusak berat berupa <i>station wagon</i> dan minibus penumpang 14 orang ke bawah, yang masih dalam proses akan dihibahkan kepada kepolisian resor Parigi Moutong berdasarkan surat pernyataan atas BMD yang akan dihibahkan.
25	Kecamatan Taopa	12.500.000,00	-	-	-	-	No. 944.45/1177/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi AT sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Kecamatan Taopa Tahun 2022.
26	Kecamatan Parigi Barat	13.790.000,00	-	-	-	-	No 944. 45/ 1178/ BPKAD tentang Reklasifikasi Dan Koreksi Aset Tetap Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD Pada Pengguna Barang Kecamatan Parigi Barat Tahun 2022.
27	Kecamatan Toribulu	53.889.625,00	-	-	-	-	No. 944.45/1176/BPKAD tentang reklasifikasi dan koreksi aset tetap sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang kecamatan toribulu tahun 2022.

NO	NAMA OPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	KETERANGAN
28	Kecamatan Tinombo Selatan	115.000.000,00	-	-	-	-	No 900.1.3.5/ 1599/ Subag Umum Kecamatan Tinombo Selatan Reklasifikasi kendaraan Dinas Beroda Empat ke Aset rusak Berat Berupa Station Wagon Toyota Avanza
29	Kecamatan Torue	171.152.840,00	15.000.000,00	-	-	-	No. 944.45/1175/BPKAD dan 944.45/1191/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi AT sbg tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Kecamatan Torue Tahun 2022.
30	Kelurahan Kampal	119.966.800,00	-	-	-	-	No. 944.45/1190/BPKAD tentang Reklasifikasi dan Koreksi aset Tetap sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Kelurahan Kampal tahun 2022.
31	Kelurahan Maesa	104.601.250,00	-	-	-	-	SK Nomor 944.45/1181/BPKAD tentang Reklasifikasi dan koreksi aset tetap sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada pengguna barang Kelurahan Maesa tahun 2022.
	JUMLAH	20.241.936.933,54	1.887.865.802,00	3.201.353.000,00	249.520.000,00	157.524.542,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
REKAP BARANG APBN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam rupiah)

Aset Tetap	SKPD	No. NPH	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai	Mutasi				Jumlah total		Ket
							Tambah		Kurang		Jumlah	Nilai	
							Jumlah	nilai	Jumlah	nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peralatan dan Mesin	BLUD RSUD Anuntaloko				779	58.510.672.060,00					779	58.510.672.060,00	
	Dinas Kesehatan				1782	19.602.348.849,00					1782	19.602.348.849,00	
	Dinas Pemuda Olahraga,Budaya dan pariwisata				8	38.505.000,00					8	38.505.000,00	
	Dinas Sosial				8	287.920.000,00					8	287.920.000,00	
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang dan Pertanahan				12						12		
	Dinas Perhubungan				48	372.739.455,00					48	372.739.455,00	
Gedung dan Bangunan	BLUD RSUD Anuntaloko				2	12.058.741.750,00					2	12.058.741.750,00	
	Dinas Pendidikan				29	17.110.144.000,00					29	17.110.144.000,00	
	Dinas Kesehatan				2	25.906.621.000,00					2	25.906.621.000,00	
	Kecamatan Bolano Lambunu		Gedung Kantor Camat	2005	1	868.000.000,00					1	868.000.000,00	
	Kecamatan Kasimbar		Gedung Kantor Camat	2005	1	623.000.000,00					1	623.000.000,00	
	kecamatan Parigi Tengah		Gedung Kantor Camat	2008	1	868.000.000,00					1	868.000.000,00	
Aset Tetap lainnya	Dinas Pemuda Olahraga,Budaya dan pariwisata				14						14		
JUMLAH						136.246.692.114,00						136.246.692.114,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	URAIAN	NILAI
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN			
1	SD INPRES 1 SULI	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	3.953.000,00
2	SD INPRES 2 BALINGGI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	111.753.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.464.000,00
3	SD INPRES 2 SINEY	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	111.753.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.464.000,00
4	SD INPRES 2 SULI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	111.753.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.464.000,00
5	SMP NEGERI 2 TAOPA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	319.099.500,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	12.764.000,00
6	SMP NEGERI 3 TINOMBO	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	20.920.000,00
TOTAL			705.387.500,00
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE AT BANGUNAN GEDUNG KANTOR			
1	SD INPRES 2 ONGKA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	117.003.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.680.000,00
2	SMP NEGERI 2 TAOPA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	366.438.500,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.656.000,00
TOTAL			502.777.500,00
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM			
1	SD INPRES 1 SULI	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
2	SD INPRES 2 ONGKA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
3	SD INPRES DONGKAS	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
4	SD INPRES TAOPA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
5	SD K KARYA MANDIRI Wilayah Khusus	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
6	SD NEGERI 1 KAYU AGUNG	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
7	SD NEGERI 1 ONGKA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
8	SD NEGERI 1 AMBESIA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
9	SD NEGERI INTI OLAYA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
10	SD NEGERI MALINO	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
11	SD NEGERI SIENDENG	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
12	SMP NEGERI 1 PARIGI SELATAN	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
13	SMP NEGERI 1 PARIGI UTARA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
14	SMP NEGERI 1 TINOMBO	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
15	SMP NEGERI 2 TAOPA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
16	SMP NEGERI 3 MEPANGA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
17	SMP NEGERI 3 PARIGI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	354.660.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.184.000,00
18	SMP NEGERI 3 TINOMBO	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	344.235.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	13.768.000,00
19	SMP SATU ATAP NEGERI 1 MEPANGA	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	23.824.000,00
TOTAL			1.031.619.000,00
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN			
1	SD INPRES 1 DUSUNAN	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	3.954.000,00
2	SD INPRES 1 SULI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
3	SD INPRES 2 BALINGGI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	3.953.000,00
4	SD INPRES 2 ONGKA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	3.953.000,00
5	SD INPRES 2 SULI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	492.012.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	19.680.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	3.953.000,00
6	SD INPRES 3 KASIMBAR	Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
7	SD INPRES DONGKAS	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	738.018.000,00
		Jasa Fasilitasitor Pemeliharaan Bangunan Gedung	29.520.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitasitor Bangunan Gedung	3.953.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	URAIAN	NILAI
8	SD K KARYA MANDIRI Wilayah Khusus	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	9.120.000,00
9	SD KECIL SIWAKARYA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	246.006.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	9.840.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	13.073.000,00
10	SD NEGERI 1 KAYU AGUNG	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
11	SD NEGERI 1 ONGKA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
12	SD NEGERI 1 SIDOAN	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
13	SD NEGERI AMBESIA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.952.000,00
14	SD NEGERI INTI OLAYA	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	9.120.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	246.006.000,00
15	SD NEGERI INTI SIDOLE	Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	9.840.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
16	SD NEGERI MALINO	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	9.120.000,00
17	SD NEGERI PARANGGI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	492.012.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	19.680.000,00
19	SD NEGERI POMBALOWO	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	117.003.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	9.120.000,00
20	SD NEGERI SIENDENG	Jasa Fasilitator Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.680.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	492.012.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	19.680.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
21	SDN INP 5 PALASA	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	9.120.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	369.009.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.760.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.380.000,00
22	SMP NEGERI 1 PARIGI SELATAN	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.953.000,00
23	SMP NEGERI 1 PARIGI UTARA	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.256.000,00
24	SMP NEGERI 1 TINOMBO	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.256.000,00
25	SMP NEGERI 2 TAOPA	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	19.273.000,00
26	SMP NEGERI 3 MEPANGA	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.256.000,00
27	SMP NEGERI 3 PARIGI	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	19.273.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	156.570.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	548.310.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	21.928.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	6.256.000,00
28	SMP NEGERI 3 TINOMBO	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	19.273.000,00
29	SMP NEGERI 6 TOMINI	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.256.000,00
30	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 PARIGI TENGAH	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	19.273.000,00
31	SMP SATU ATAP NEGERI 1 MEPANGA	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.256.000,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.132.352.000,00
		Jasa Fasikikator Pemeliharaan Bangunan Gedung	30.776.000,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	10.256.000,00
32	TK NEGERI 1 BOLANO LAMBUNU	Jasa Fasilitator Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.504.000,00
33	TK NEGERI 1 SINIU	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	9.872.300,00
34	TK NEGERI 2 SAUSU	Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	9.872.150,00
		Jasa Fasilitator Bangunan Gedung	3.684.650,00

NO	NAMA SEKOLAH	URAIAN	NILAI
TOTAL			9.581.097.100,00
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP RUMAH NEGARA GOLONGAN I			
1	SD INPRES 1 DUSUNAN	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	289.329.000,00
2	SD INPRES 1 SULI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	96.443.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.856.000,00
3	SD INPRES 2 BALINGGI	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	96.443.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.856.000,00
4	SD INPRES 2 ONGKA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	192.886.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.712.000,00
5	SD INPRES 2 SULI	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.632.000,00
6	SD INPRES 3 KASIMBAR	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	289.329.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	11.572.000,00
7	SD INPRES DONGKAS	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.632.000,00
8	SD INPRES TAOPA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	289.329.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	11.572.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	11.572.000,00
9	SD KECIL SIWAKARYA	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.632.000,00
10	SD NEGERI 1 KAYU AGUNG	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	192.886.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.712.000,00
11	SD NEGERI 2 BOLANO	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	192.886.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.712.000,00
12	SD NEGERI AMBESIA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	96.443.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.856.000,00
13	SD NEGERI INTI OLAYA	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	289.329.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	11.572.000,00
14	SD NEGERI INTI SIDOLE	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	192.886.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.712.000,00
15	SD NEGERI MALINO	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	192.886.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.712.000,00
16	SD NEGERI PARANGGI	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.632.000,00
17	SD NEGERI POMBALOWO	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	96.443.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.856.000,00
18	SD NEGERI SIENDENG	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.632.000,00
19	SDN INP 5 PALASA	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	7.632.000,00
20	SMP NEGERI 1 PARIGI UTARA	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	9.672.000,00
21	SMP NEGERI 1 TINOMBO	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	9.672.000,00
22	SMP NEGERI 2 TAOPA	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	9.672.000,00
23	SMP NEGERI 3 MEPANGA	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	9.672.000,00
24	SMP NEGERI 3 PARIGI	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	9.672.000,00
25	SMP NEGERI 6 TOMINI	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	9.672.000,00
26	SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 PARIGI TENGAH	Jasa Fasilitas Bangunan Rumah Negara Golongan I	9.672.000,00
TOTAL			2.721.286.000,00
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH			
1	SMP NEGERI 1 TINOMBO	belanja pemeliharaan bangunan gedung	26.160.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.040.000,00
2	SMP NEGERI 2 TAOPA	belanja pemeliharaan bangunan gedung	42.000.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.680.000,00
3	SMP NEGERI 3 TINOMBO	belanja pemeliharaan bangunan gedung	38.780.000,00
		Jasa Fasilitas Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.544.000,00
TOTAL			111.204.000,00
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP BANGUNAN FASILITAS UMUM			
1	TK NEGERI 2 SAUSU	Jasa Fasilitas Bangunan Gedung	6.187.500,00
TOTAL			6.187.500,00
KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP TAMAN			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	belanja pemeliharaan bangunan gedung	199.820.391,00
TOTAL			199.820.391,00
JUMLAH KAPITALISASI BARANG DAN JASA KE ASET TETAP GEDUNG BANGUNAN			14.859.378.991,00

Lampiran 38

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Dinas Pendidikan
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

No.	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Uraian	Nilai Kontrak	Nilai SP2D	Nilai Jasa Pemerencanaan dan Pengawasan	Bobot Pekerjaan %	Nilai Bobot Pekerjaan	Nilai pekerjaan s.d 31 Des 2023 (KDP)
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
KDP GEDUNG BANGUNAN								
1	SD NEGERI PARANGGI	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	745.820.200,00	745.820.200,00	33.833.000,00	87,02%	649.012.738,04	682.845.738,04
2	SD INPRES 3 KASIMBAR	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	217.689.600,00	217.689.600,00	10.380.000,00	82,67%	179.963.992,32	190.343.992,32
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	92.164.800,00	92.164.800,00	3.953.000,00	97,29%	89.667.133,92	93.620.133,92
		Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	210.730.600,00	210.730.600,00	9.120.000,00	87,88%	185.190.051,28	194.310.051,28
3	SD INPRES 2 SINEY	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	369.009.000,00	258.306.300,00	10.332.000,00	68,62%	253.213.975,80	263.545.975,80
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	92.164.800,00	92.164.800,00	3.953.000,00	83,14%	76.625.814,72	80.578.814,72
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	225.235.200,00	225.235.200,00	10.380.000,00	84,57%	190.481.407,82	200.861.407,82
		Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	217.689.600,00	152.382.720,00	7.266.000,00	67,49%	146.918.711,04	154.184.711,04
4	SD NEGERI TANGKELAI	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	172.318.500,00	172.318.500,00	7.632.000,00	78,09%	134.563.516,65	142.195.516,65
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	369.009.000,00	369.009.000,00	14.760.000,00	71,87%	265.206.768,30	279.966.768,30
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	217.689.600,00	217.689.600,00	10.380.000,00	86,15%	187.539.590,40	197.919.590,40
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	92.164.800,00	92.164.800,00	3.953.000,00	85,14%	78.469.110,72	82.422.110,72
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	225.235.200,00	225.235.200,00	10.380.000,00	85,14%	191.765.249,28	202.145.249,28
		Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	210.730.600,00	210.730.600,00	9.120.000,00	85,47%	180.111.443,82	189.231.443,82
		Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	172.318.500,00	172.318.500,00	7.632.000,00	79,38%	136.786.425,30	144.418.425,30
5	SD NEGERI 1 SIDOAN	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	289.329.000,00	289.329.000,00	11.572.000,00	78,69%	227.672.990,10	239.244.990,10
6	SD NEGERI 3 PALASA	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	309.854.400,00	309.854.400,00	14.333.000,00	81,10%	251.291.918,40	265.624.918,40
		Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	96.443.000,00	96.443.000,00	3.856.000,00	81,89%	78.977.172,70	82.833.172,70
		Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	111.753.000,00	111.753.000,00	4.464.000,00	77,24%	86.318.017,20	90.782.017,20
7	SD NEGERI 4 PALASA	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225.235.200,00	225.235.200,00	10.380.000,00	68,55%	154.398.729,60	164.778.729,60
		Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	303.791.700,00	238.484.820,00	10.710.000,00	79,50%	241.514.401,50	252.224.401,50
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	282.906.900,00	172.204.200,00	6.888.000,00	70,11%	198.346.027,59	205.234.027,59
		Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	172.318.500,00	120.622.950,00	5.342.400,00	68,55%	118.124.331,75	123.466.731,75
8	SD NEGERI 2 BOLANO	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225.235.200,00	225.235.200,00	10.380.000,00	78,56%	176.944.773,12	187.324.773,12
		Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	217.689.600,00	217.689.600,00	10.380.000,00	78,56%	171.016.949,76	181.396.949,76
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	92.164.800,00	92.164.800,00	3.953.000,00	78,56%	72.404.666,88	76.357.666,88
		Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	210.730.600,00	210.730.600,00	9.120.000,00	100,00%	210.730.600,00	219.850.600,00
9	SMP NEGERI SATU ATAP 1 PARIGI SELATAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.069.003.850,00	748.302.695,00	30.929.500,00	70,97%	758.672.032,35	789.601.532,35
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen		468.624.000,00	328.036.800,00	16.676.800,00	73,24%	343.220.217,60	359.897.017,60	
Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen		227.971.200,00	159.579.840,00	6.770.400,00	73,82%	168.288.339,84	175.058.739,84	
10	SMP NEGERI SATU ATAP 2 PARIGI BARAT	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	115.000.000,00	80.500.000,00	3.220.000,00	70,22%	80.753.000,00	83.973.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen		792.734.851,00	792.734.851,00	32.097.000,00	82,26%	652.103.688,43	684.200.688,43	
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen		468.624.000,00	328.036.800,00	16.676.800,00	71,14%	333.379.113,60	350.055.913,60	
12	SMP NEGERI SATU ATAP 1 PARIGI TENGAH	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	952.959.000,00	667.071.300,00	32.872.000,00	55,14%	525.461.592,60	558.333.592,60
13	SMP NEGERI SATU ATAP 2 TINOMBO SELATAN	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	484.335.000,00	484.335.000,00	23.136.000,00	70,85%	343.151.347,50	366.287.347,50
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.046.350.350,00	1.046.350.350,00	47.321.000,00	65,76%	688.079.990,16	735.400.990,16
14		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	230.472.000,00	230.472.000,00	10.256.000,00	70,60%	162.713.232,00	172.969.232,00
JUMLAH KDP GEDUNG DAN BANGUNAN			12.023.496.151,00	10.629.126.826,00	474.407.900,00		8.989.079.062,09	9.463.486.962,09
KDP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN								
1	SD INPRES 2 BALINGGI	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	5.424.000,00	76,73%	104.091.918,00	109.515.918,00
2	SD INPRES 3 KASIMBAR	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	5.424.000,00	97,90%	132.811.140,00	138.235.140,00
3	SD INPRES 2 SINEY	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	135.660.000,00	94.962.000,00	3.796.800,00	74,50%	101.066.700,00	104.863.500,00
4	SD NEGERI TANGKELAI	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	5.424.000,00	76,31%	103.522.146,00	108.946.146,00
5	SD NEGERI 3 PALASA	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	5.424.000,00	92,44%	125.404.104,00	130.828.104,00
6	SD NEGERI 4 PALASA	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	135.660.000,00	135.660.000,00	5.424.000,00	69,59%	94.405.794,00	99.829.794,00
7	TK NEGERI 5 SAUSU	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	112.322.000,00	78.625.400,00	-	32,40%	36.392.328,00	36.392.328,00
8	SMP NEGERI SATU ATAP 2 PARIGI BARAT	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	116.950.000,00	116.950.000,00	4.672.000,00	100,00%	116.950.000,00	121.622.000,00
9	SD NEGERI 5 TERPENCIL PALASA	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	50.000.000,00	20.000.000,00	-	18,00%	9.000.000,00	9.000.000,00
JUMLAH KDP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN			1.093.232.000,00	988.837.400,00	35.588.800,00		823.644.130,00	859.232.930,00
JUMLAH KDP 2023			13.116.728.151,00	11.617.964.226,00	509.996.700,00		9.812.723.192,09	10.322.719.892,00

Lampiran 39

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Dinas Pendidikan Yang Telah Selesai
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	URAIAN	NILAI
1	SD KECIL OGOBAGIS	RUANG KELAS BARU	389.775.436,60
		RUANG UKS	79.571.423,10
		LABORATORIUM KOMPUTER	183.897.882,20
2	SD NEGERI 2 KAYU AGUNG	RUMAH DINAS GURU	132.803.492,00
		LABORATORIUM KOMPUTER	156.974.497,40
		PERPUSTAKAAN	153.823.756,00
		RUANG GURU	173.807.176,50
3	SMP NEGERI 1 SINIU	REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH	32.588.617,00
		REHABILITASI RUANG GURU	235.758.867,17
		RUANG TATA USAHA	172.142.190,50
TOTAL			1.711.143.338,47
1	SD INPRES BINANGGA	BANGUNAN TEMPAT PENDIDIKAN LAIN-LAIN	33.193.498,00
2	SDN PETAPA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PERMANEN	124.331.044,00
TOTAL			157.524.542,00
		TOTAL KDP GEDUNG BANGUNAN KELUAR	1.868.667.880,47
1	SD NEGERI 2 KAYU AGUNG	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)	90.273.078,90
TOTAL KDP JIJ KELUAR			90.273.078,90
		TOTAL KDP KELUAR 2023	1.958.940.959,37

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.208.636.460,00	145.821.448.013,00	(4.387.188.447,00)	14.353.514.826,00	15.502.820.797,00	29.856.335.623,00	175.677.783.636,00
		PERALATAN MESIN	75.197.786.683,00	73.680.740.836,00	(1.517.045.847,00)	9.876.901.825,00	10.793.631.315,00	20.670.533.140,00	94.351.273.976,00
		GEDUNG BANGUNAN	74.824.658.802,00	71.900.948.835,00	(2.923.709.967,00)	4.434.284.056,00	4.647.977.119,00	9.082.261.175,00	80.983.210.010,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	186.190.975,00	239.758.342,00	53.567.367,00	42.328.945,00	61.212.363,00	103.541.308,00	343.299.650,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan		104.828.077.331,31	104.263.134.433,31	(564.942.898,00)	11.380.671.204,00	10.714.359.665,00	22.095.030.869,00	126.358.165.302,31
		PERALATAN MESIN	83.144.587.254,31	83.144.586.908,31	(346,00)	9.353.402.877,00	8.683.955.824,00	18.037.358.701,00	101.181.945.609,31
		GEDUNG BANGUNAN	18.115.301.577,00	17.550.359.024,00	(564.942.553,00)	1.570.154.421,00	1.573.410.054,00	3.143.564.475,00	20.693.923.499,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	3.568.188.500,00	3.568.188.501,00	1,00	457.113.906,00	456.993.787,00	914.107.693,00	4.482.296.194,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
3	BLUD RSUD Anuntaloko		205.047.754.219,12	205.427.364.955,12	379.610.736,00	9.566.671.812,00	9.574.065.036,00	19.140.736.848,00	224.568.101.803,12
		PERALATAN MESIN	187.357.427.147,12	187.357.427.116,12	(31,00)	8.177.362.084,00	8.164.006.512,00	16.341.368.596,00	203.698.795.712,12
		GEDUNG BANGUNAN	13.379.542.031,00	13.753.243.845,00	373.701.814,00	1.094.845.779,00	1.065.019.817,00	2.119.865.596,00	15.873.109.441,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	4.310.785.041,00	4.316.693.994,00	5.908.953,00	334.643.949,00	345.038.707,00	679.502.656,00	4.996.196.650,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
4	RSUD Raja Tombolotutu		39.742.087.608,69	39.563.019.622,69	(179.067.986,00)	3.646.937.154,00	3.418.106.415,85	7.065.043.569,85	46.628.063.192,54
		PERALATAN MESIN	35.055.488.729,69	34.886.017.287,69	(169.471.442,00)	3.260.613.603,00	3.030.140.088,85	6.290.753.691,85	41.176.770.979,54
		GEDUNG BANGUNAN	4.112.337.043,00	4.102.740.498,00	(9.596.545,00)	319.530.238,00	321.173.015,00	640.703.253,00	4.743.443.751,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	574.261.836,00	574.261.837,00	1,00	66.793.315,00	66.793.312,00	133.586.625,00	707.898.662,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoa'e Moutong		1.130.561.919,00	1.130.561.919,00	-	404.685.168,00	411.390.511,00	816.075.679,00	1.946.637.598,00
		PERALATAN MESIN	998.097.977,00	998.097.977,00	-	338.453.197,00	345.158.540,00	683.611.737,00	1.681.709.714,00
		GEDUNG BANGUNAN	132.463.942,00	132.463.942,00	-	66.231.971,00	66.231.971,00	132.463.942,00	264.927.884,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		603.483.167.868,83	609.323.385.496,83	5.840.217.628,00	36.092.808.858,00	36.602.195.378,00	72.695.004.236,00	682.018.389.732,83
		PERALATAN MESIN	28.797.437.747,00	28.692.362.747,00	(105.075.000,00)	670.628.983,00	627.083.244,00	1.297.712.227,00	29.990.074.974,00
		GEDUNG BANGUNAN	4.816.133.379,00	4.985.195.589,00	169.062.210,00	446.430.297,00	446.430.297,00	892.860.594,00	5.878.056.183,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	569.869.596.742,83	575.645.827.160,83	5.776.230.418,00	34.975.749.578,00	35.528.681.837,00	70.504.431.415,00	646.150.258.575,83
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.261.118.535,00	3.001.679.645,00	(259.438.890,00)	542.366.636,00	634.223.975,00	1.176.590.611,00	4.178.270.256,00
		PERALATAN MESIN	1.264.894.839,00	1.043.553.696,00	(221.341.141,00)	57.960.901,00	57.998.579,00	115.959.480,00	1.159.513.178,00
		GEDUNG BANGUNAN	676.188.672,00	638.090.923,00	(38.097.749,00)	30.684.641,00	30.684.641,00	61.369.282,00	699.460.205,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	1.320.035.024,00	1.320.035.024,00	-	453.721.094,00	545.540.755,00	999.261.849,00	2.319.296.873,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		2.240.923.942,00	2.207.979.942,00	(32.944.000,00)	42.142.682,00	36.368.809,00	78.511.491,00	2.286.491.433,00
		PERALATAN MESIN	1.976.069.358,00	1.943.125.358,00	(32.944.000,00)	30.476.664,00	24.702.791,00	55.179.455,00	1.998.304.813,00
		GEDUNG BANGUNAN	264.854.584,00	264.854.584,00	-	11.666.018,00	11.666.018,00	23.332.036,00	288.186.620,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
9	Satuan Polisi Pamong Praja		7.456.788.546,00	5.600.946.305,00	(1.855.842.241,00)	75.858.904,00	91.060.281,00	166.919.185,00	5.767.865.490,00
		PERALATAN MESIN	7.167.159.485,00	5.312.913.940,00	(1.854.245.545,00)	57.856.455,00	73.057.832,00	130.914.287,00	5.443.828.227,00
		GEDUNG BANGUNAN	246.078.978,00	244.482.282,00	(1.596.696,00)	16.488.199,00	16.488.199,00	32.976.398,00	277.458.680,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	43.550.083,00	43.550.083,00	-	1.514.250,00	1.514.250,00	3.028.500,00	46.578.583,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		7.671.544.940,00	7.856.327.785,00	184.782.845,00	454.828.643,00	439.998.217,00	894.826.860,00	8.751.154.645,00
		PERALATAN MESIN	3.755.846.806,00	3.755.846.806,00	-	116.309.807,00	94.819.120,00	211.128.927,00	3.966.975.733,00
		GEDUNG BANGUNAN	144.289.011,00	329.071.856,00	184.782.845,00	30.739.782,00	30.739.782,00	61.479.564,00	390.551.420,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	3.771.409.123,00	3.771.409.123,00	-	307.779.054,00	314.439.315,00	622.218.369,00	4.393.627.492,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Sosial		3.625.446.354,00	3.631.409.631,00	5.963.277,00	104.604.140,00	103.273.765,00	207.877.905,00	3.839.287.536,00
		PERALATAN MESIN	2.565.853.396,00	2.565.853.396,00	-	40.541.947,00	39.211.572,00	79.753.519,00	2.645.606.915,00
		GEDUNG BANGUNAN	1.048.196.562,00	1.054.159.839,00	5.963.277,00	63.564.818,00	63.564.818,00	127.129.636,00	1.181.289.475,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	11.396.396,00	11.396.396,00	-	497.375,00	497.375,00	994.750,00	12.391.146,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.626.555.355,00	2.819.478.107,00	(807.077.248,00)	206.784.031,37	204.261.017,37	411.045.048,74	3.230.523.155,74
		PERALATAN MESIN	1.963.399.822,00	1.156.322.573,00	(807.077.249,00)	54.209.095,00	51.686.079,00	105.895.174,00	1.262.217.747,00
		GEDUNG BANGUNAN	88.733.173,00	88.733.173,00	-	12.616.360,00	12.616.360,00	25.232.720,00	113.965.893,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	1.574.422.360,00	1.574.422.361,00	1,00	81.655.610,00	81.655.612,00	163.311.222,00	1.737.733.583,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	58.302.966,37	58.302.966,37	116.605.932,74	116.605.932,74
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9.790.151.254,40	9.787.927.689,40	(2.223.565,00)	460.914.085,00	598.040.226,00	1.058.954.311,00	10.846.882.000,40
		PERALATAN MESIN	8.954.502.230,40	8.954.502.241,40	11,00	387.364.760,00	524.490.301,00	911.855.061,00	9.865.357.302,40
		GEDUNG BANGUNAN	828.607.357,00	826.383.781,00	(2.223.576,00)	73.299.325,00	73.299.325,00	146.598.650,00	975.982.431,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	7.041.667,00	7.041.667,00	-	250.000,00	250.000,00	500.000,00	7.541.667,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketahanan Pangan		1.178.837.823,00	1.178.837.823,00	-	37.996.007,00	36.152.934,00	74.148.941,00	1.252.986.764,00
		PERALATAN MESIN	1.178.837.823,00	1.178.837.823,00	-	37.996.007,00	36.102.934,00	74.098.941,00	1.252.936.764,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Lingkungan Hidup		25.008.051.946,00	24.762.774.171,00	(245.277.775,00)	878.144.043,00	1.327.057.946,00	2.205.201.989,00	26.967.976.160,00
		PERALATAN MESIN	13.423.082.629,00	13.181.969.802,00	(241.112.827,00)	223.513.834,00	672.369.614,00	895.883.448,00	14.077.853.250,00
		GEDUNG BANGUNAN	1.218.294.323,00	1.174.057.388,00	(44.236.935,00)	49.122.305,00	98.302.732,00	147.425.037,00	1.272.360.120,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	10.366.674.994,00	10.406.746.981,00	40.071.987,00	605.507.904,00	605.507.905,00	1.211.015.809,00	11.617.762.790,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.226.171.294,00	6.129.077.773,00	(97.093.521,00)	326.337.941,00	276.879.411,00	603.217.352,00	6.732.295.125,00
		PERALATAN MESIN	6.088.349.739,00	5.986.751.795,00	(101.597.944,00)	319.220.025,00	269.761.496,00	588.981.522,00	6.575.733.317,00
		GEDUNG BANGUNAN	136.000.026,00	140.504.450,00	4.504.424,00	6.938.748,00	6.938.748,00	13.877.496,00	154.381.946,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	1.821.529,00	1.821.528,00	(1,00)	179.167,00	179.167,00	358.334,00	2.179.862,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		6.460.567.345,00	6.217.587.950,00	(242.979.395,00)	127.818.847,00	128.863.957,00	256.682.804,00	6.474.270.754,00
		PERALATAN MESIN	5.537.687.224,00	5.303.187.224,00	(234.500.000,00)	81.338.892,00	82.384.002,00	163.722.894,00	5.466.910.118,00
		GEDUNG BANGUNAN	919.296.788,00	910.817.393,00	(8.479.395,00)	46.229.955,00	46.229.955,00	92.459.910,00	1.003.277.303,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	3.583.333,00	3.583.333,00	-	250.000,00	250.000,00	500.000,00	4.083.333,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pertubuhan		36.712.314.560,00	32.028.061.787,92	(4.684.252.772,08)	1.008.093.921,00	902.711.093,00	1.910.805.014,00	33.938.866.801,92
		PERALATAN MESIN	23.923.106.667,00	20.334.089.328,92	(3.589.017.338,08)	588.062.977,00	484.073.540,00	1.072.136.517,00	21.406.225.845,92
		GEDUNG BANGUNAN	6.850.985.286,00	6.465.283.968,00	(385.701.318,00)	274.172.837,00	274.538.392,00	548.711.229,00	7.013.995.197,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	5.938.222.607,00	5.228.688.491,00	(709.534.116,00)	145.858.107,00	144.099.161,00	289.957.268,00	5.518.645.759,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Komunikasi dan Informatika		3.068.944.865,00	2.035.491.834,00	(1.033.453.031,00)	269.797.903,00	286.887.470,00	556.685.373,00	2.592.177.207,00
		PERALATAN MESIN	2.993.538.427,00	1.960.085.395,00	(1.033.453.032,00)	261.370.839,00	278.460.405,00	539.831.244,00	2.499.916.639,00
		GEDUNG BANGUNAN	75.406.438,00	75.406.439,00	1,00	8.427.064,00	8.427.065,00	16.854.129,00	92.260.568,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		2.239.838.032,00	2.173.512.083,00	(66.325.949,00)	115.092.738,00	146.584.440,00	261.677.178,00	2.435.189.261,00
		PERALATAN MESIN	1.269.485.302,00	1.203.088.953,00	(66.396.349,00)	67.864.204,00	99.355.906,00	167.220.110,00	1.370.309.063,00
		GEDUNG BANGUNAN	966.815.092,00	966.885.492,00	70.400,00	47.082.149,00	94.164.298,00	141.246.447,00	1.061.049.790,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	3.537.638,00	3.537.638,00	-	146.385,00	146.385,00	292.770,00	3.830.408,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu		2.028.526.558,00	1.824.513.759,00	(204.012.799,00)	69.733.805,00	68.545.684,00	138.279.489,00	1.962.793.248,00
		PERALATAN MESIN	1.336.926.021,00	1.155.381.021,00	(181.545.000,00)	56.948.775,00	55.760.654,00	112.709.429,00	1.268.090.450,00
		GEDUNG BANGUNAN	475.973.043,00	453.505.244,00	(22.467.799,00)	12.735.025,00	12.735.025,00	25.470.050,00	478.975.294,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	215.627.494,00	215.627.494,00	-	50.005,00	50.005,00	100.010,00	215.727.504,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.431.358.708,00	2.931.809.026,00	(499.549.682,00)	103.067.560,28	104.900.240,28	207.967.800,56	3.139.776.826,56
		PERALATAN MESIN	3.017.410.118,00	2.518.227.276,00	(499.182.842,00)	76.269.636,00	78.102.317,00	154.371.953,00	2.672.599.229,00
		GEDUNG BANGUNAN	399.860.188,00	399.493.347,00	(366.841,00)	14.010.761,00	14.010.761,00	28.021.522,00	427.514.869,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	14.088.402,00	14.088.403,00	1,00	511.164,00	511.163,00	1.022.327,00	15.110.730,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	12.275.999,28	12.275.999,28	24.551.998,56	24.551.998,56
23	Dinas Kelautan dan Perikanan		23.137.774.398,99	23.163.248.317,99	25.473.819,00	563.196.940,00	567.843.994,00	1.131.040.934,00	24.294.289.151,99
		PERALATAN MESIN	12.979.194.835,99	12.979.194.832,99	(3,00)	205.387.214,00	198.472.353,00	403.859.567,00	13.383.054.399,99
		GEDUNG BANGUNAN	4.822.870.819,00	4.806.228.973,00	(16.641.846,00)	221.851.770,00	221.851.769,00	443.703.539,00	5.249.932.512,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	5.335.708.744,00	5.377.824.412,00	42.115.668,00	135.957.956,00	147.519.872,00	283.477.828,00	5.661.302.240,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		7.702.494.885,00	7.710.705.361,00	8.210.476,00	627.371.074,00	692.664.890,00	1.320.035.964,00	9.030.741.325,00
		PERALATAN MESIN	5.852.071.104,00	5.852.071.096,00	(8,00)	360.592.201,00	394.811.079,00	755.403.280,00	6.607.474.376,00
		GEDUNG BANGUNAN	1.847.093.448,00	1.855.303.932,00	8.210.484,00	256.787.873,00	279.952.478,00	536.740.351,00	2.392.044.283,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	3.330.333,00	3.330.333,00	-	9.991.000,00	17.901.333,00	27.892.333,00	31.222.666,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan		44.150.603.662,95	43.008.459.144,95	(1.142.144.518,00)	703.968.373,98	763.023.042,98	1.466.991.416,96	44.475.450.561,91
		PERALATAN MESIN	12.696.404.224,00	11.602.164.231,00	(1.094.239.993,00)	276.592.332,00	319.297.460,00	595.889.792,00	12.198.054.023,00
		GEDUNG BANGUNAN	5.054.496.608,00	5.006.592.079,00	(47.904.529,00)	247.482.641,00	263.832.180,00	511.314.821,00	5.517.906.900,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	26.399.702.830,95	26.399.702.834,95	4,00	111.912.585,00	111.912.587,00	223.825.172,00	26.623.528.006,95
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	67.980.815,98	135.961.631,96	203.942.447,94	135.961.631,96
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		3.143.348.473,00	3.143.348.473,00	-	66.985.918,00	162.531.309,00	229.517.227,00	3.372.865.700,00
		PERALATAN MESIN	2.876.945.744,00	2.876.945.744,00	-	51.251.025,00	144.820.163,00	196.071.189,00	3.073.016.933,00
		GEDUNG BANGUNAN	266.402.729,00	266.402.729,00	-	15.734.892,00	17.711.146,00	33.446.038,00	299.848.767,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		16.979.718.222,00	15.939.805.236,00	(1.039.912.986,00)	852.489.148,00	858.074.742,00	1.710.563.890,00	17.650.369.126,00
		PERALATAN MESIN	4.862.605.116,00	3.862.119.414,00	(1.000.485.702,00)	166.416.968,00	173.340.063,00	339.757.031,00	4.201.876.445,00
		GEDUNG BANGUNAN	11.990.603.027,00	11.951.175.744,00	(39.427.283,00)	676.681.069,00	676.681.067,00	1.353.362.136,00	13.304.537.880,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	126.510.079,00	126.510.078,00	(1,00)	9.391.111,00	8.053.612,00	17.444.723,00	143.954.801,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
28	Sekretariat Daerah		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
29	Bagian Organisasi		504.479.491,00	214.403.209,00	(290.076.282,00)	12.914.354,00	15.658.020,00	28.572.374,00	242.975.583,00
		PERALATAN MESIN	504.479.491,00	214.403.209,00	(290.076.282,00)	12.914.354,00	15.658.020,00	28.572.374,00	242.975.583,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
30	Bagian ULP		608.719.737,00	602.153.068,00	(6.566.669,00)	74.158.990,00	76.380.682,00	150.539.672,00	752.692.740,00
		PERALATAN MESIN	608.719.737,00	602.153.068,00	(6.566.669,00)	74.158.990,00	76.380.682,00	150.539.672,00	752.692.740,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
31	Bagian Sumber Daya Alam		-	-	-	-	1.551.497,00	1.551.497,00	1.551.497,00
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	1.551.497,00	1.551.497,00	1.551.497,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
32	Bagian Umum		56.388.425.485,28	54.606.834.384,71	(1.781.591.100,57)	1.768.108.059,05	1.500.651.931,04	3.268.759.990,09	57.875.594.374,80
		PERALATAN MESIN	43.557.115.488,28	42.576.003.579,71	(981.111.908,57)	1.266.166.744,00	998.684.396,00	2.264.851.140,00	44.840.854.719,71
		GEDUNG BANGUNAN	11.971.028.647,00	11.170.549.451,00	(800.479.196,00)	388.630.161,00	388.656.380,00	777.286.541,00	11.947.835.992,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	860.281.350,00	860.281.354,00	4,00	43.080.115,00	43.080.116,00	86.160.231,00	946.441.585,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	70.231.039,05	70.231.039,04	140.462.078,09	140.462.078,09
33	Bagian Humas		2.854.497.531,00	1.188.220.698,00	(1.666.276.833,00)	52.832.329,00	40.868.509,00	93.700.838,00	1.281.921.536,00
		PERALATAN MESIN	2.854.497.531,00	1.188.220.698,00	(1.666.276.833,00)	52.832.329,00	40.868.509,00	93.700.838,00	1.281.921.536,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
34	Bagian Pemerintahan Umum		3.372.321.318,65	3.389.117.776,65	16.796.458,00	231.848.579,00	231.659.049,00	463.507.628,00	3.852.625.404,65
		PERALATAN MESIN	3.052.874.748,65	3.052.874.747,65	(1,00)	199.188.971,00	198.999.441,00	398.188.412,00	3.451.063.159,65
		GEDUNG BANGUNAN	274.005.432,00	290.801.890,00	16.796.458,00	23.040.775,00	23.040.775,00	46.081.550,00	336.883.440,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	45.441.139,00	45.441.139,00	1,00	7.368.833,00	7.368.833,00	14.737.666,00	60.178.905,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	0,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35	Bagian Ekonomi		771.207.269,00	771.207.268,00	(1,00)	3.576.642,00	5.156.851,00	8.733.493,00	779.940.761,00
		PERALATAN MESIN	771.207.269,00	771.207.268,00	(1,00)	3.576.642,00	5.156.851,00	8.733.493,00	779.940.761,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
36	Bagian Kumandang		416.964.542,00	416.964.542,00	-	4.668.750,00	3.627.083,00	8.295.833,00	425.260.375,00
		PERALATAN MESIN	416.964.542,00	416.964.542,00	-	4.668.750,00	3.627.083,00	8.295.833,00	425.260.375,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
37	Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA		1.159.238.529,00	1.159.238.529,00	-	39.429.179,00	35.214.596,00	74.643.775,00	1.233.882.304,00
		PERALATAN MESIN	1.159.238.529,00	1.159.238.529,00	-	39.429.179,00	35.214.596,00	74.643.775,00	1.233.882.304,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
38	Bagian Kesra		818.185.322,00	818.185.322,00	-	14.077.458,00	14.984.625,00	29.062.083,00	847.247.405,00
		PERALATAN MESIN	818.185.322,00	818.185.322,00	-	14.077.458,00	14.984.625,00	29.062.083,00	847.247.405,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
39	Sekretariat Dewan		21.553.679.556,12	19.827.780.652,34	(1.725.898.903,78)	726.458.449,00	727.281.932,00	1.453.740.381,00	21.281.521.033,34
		PERALATAN MESIN	13.519.374.814,12	11.868.689.499,34	(1.650.685.314,78)	381.615.496,00	382.438.979,00	764.054.475,00	12.632.743.974,34
		GEDUNG BANGUNAN	7.986.240.432,00	7.911.026.841,00	(75.213.591,00)	341.694.504,00	341.694.504,00	683.389.008,00	8.594.415.849,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	48.064.310,00	48.064.312,00	2,00	3.148.449,00	3.148.449,00	6.296.898,00	54.361.210,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
40	Inspektorat Daerah		2.280.320.098,00	2.273.010.668,00	(7.309.430,00)	137.006.999,00	143.468.796,00	280.475.795,00	2.553.486.463,00
		PERALATAN MESIN	1.911.397.426,00	1.911.397.426,00	-	104.615.071,00	111.076.867,00	215.691.938,00	2.127.089.364,00
		GEDUNG BANGUNAN	357.692.547,00	350.383.117,00	(7.309.430,00)	31.789.078,00	31.789.078,00	63.578.157,00	413.961.274,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	11.230.125,00	11.230.125,00	-	602.850,00	602.850,00	1.205.700,00	12.435.825,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Sausu		5.734.560.664,00	5.731.946.182,00	(2.614.482,00)	142.115.469,00	142.716.511,00	284.831.980,00	6.016.778.162,00
		PERALATAN MESIN	539.346.883,00	539.346.883,00	-	9.491.075,00	10.092.117,00	19.583.192,00	558.930.075,00
		GEDUNG BANGUNAN	712.565.781,00	709.951.299,00	(2.614.482,00)	35.352.394,00	35.352.394,00	70.704.788,00	780.656.087,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	4.482.648.000,00	4.482.648.000,00	-	97.272.000,00	97.272.000,00	194.544.000,00	4.677.192.000,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Torue		1.005.996.379,00	834.931.245,00	(171.065.134,00)	29.678.877,00	34.109.712,00	63.788.589,00	898.719.834,00
		PERALATAN MESIN	477.388.761,00	317.147.032,00	(160.241.729,00)	8.191.366,00	12.622.201,00	20.813.567,00	337.960.599,00
		GEDUNG BANGUNAN	528.607.618,00	517.784.213,00	(10.823.405,00)	21.487.511,00	21.487.511,00	42.975.022,00	560.759.235,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parigi Selatan		861.868.720,00	861.868.720,00	-	32.194.936,00	32.546.784,00	64.741.720,00	926.610.440,00
		PERALATAN MESIN	388.720.539,00	388.720.539,00	-	21.746.491,00	13.098.139,00	25.844.430,00	414.564.969,00
		GEDUNG BANGUNAN	473.148.181,00	473.148.181,00	-	19.448.645,00	19.448.645,00	38.897.290,00	512.045.471,00

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Parigi		5.736.242.539,00	5.736.242.539,00	-	59.537.035,00	56.099.535,00	115.636.570,00	5.851.879.109,00
		PERALATAN MESIN	610.149.517,00	610.149.517,00	-	57.118.905,00	53.681.405,00	110.800.310,00	720.949.827,00
		GEDUNG BANGUNAN	22.960.522,00	22.960.522,00	-	963.130,00	1.926.260,00	2.889.390,00	24.886.782,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	5.103.132.500,00	5.103.132.500,00	-	1.455.000,00	1.455.000,00	2.910.000,00	5.106.042.500,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Ampibabo		968.440.980,00	951.309.345,00	(17.131.635,00)	29.640.142,00	29.079.806,00	58.719.948,00	1.010.029.293,00
		PERALATAN MESIN	469.383.461,00	469.383.461,00	-	9.744.725,00	9.184.389,00	18.929.114,00	488.312.575,00
		GEDUNG BANGUNAN	499.057.519,00	481.925.884,00	(17.131.635,00)	19.895.417,00	19.895.417,00	39.790.834,00	521.716.718,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Kasimbar		807.852.534,00	809.370.324,00	1.517.790,00	44.774.788,00	42.803.537,00	87.578.325,00	896.948.649,00
		PERALATAN MESIN	431.669.851,00	431.669.851,00	-	31.185.313,00	29.214.061,00	60.399.374,00	492.069.225,00
		GEDUNG BANGUNAN	374.185.260,00	375.703.050,00	1.517.790,00	12.667.588,00	12.667.588,00	25.335.176,00	401.038.226,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	1.997.423,00	1.997.423,00	-	921.887,00	921.888,00	1.843.775,00	3.841.198,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
47	Kecamatan Tinombo Selatan		956.694.287,00	834.229.782,00	(122.464.505,00)	34.387.950,00	34.037.949,00	68.425.899,00	902.655.681,00
		PERALATAN MESIN	385.760.806,00	270.760.806,00	(115.000.000,00)	13.496.050,00	13.146.049,00	26.642.099,00	297.402.905,00
		GEDUNG BANGUNAN	570.933.481,00	563.468.976,00	(7.464.505,00)	20.891.900,00	20.891.900,00	41.783.800,00	605.252.776,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
48	Kecamatan Tinombo		1.789.543.355,00	1.785.219.023,00	(4.324.332,00)	59.329.048,00	58.872.799,00	118.201.847,00	1.903.420.870,00
		PERALATAN MESIN	581.205.407,00	581.205.406,00	(1,00)	23.282.796,00	22.826.547,00	46.109.343,00	627.314.749,00
		GEDUNG BANGUNAN	1.208.337.948,00	1.204.013.617,00	(4.324.331,00)	36.046.252,00	36.046.252,00	72.092.504,00	1.276.106.121,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
49	Kecamatan Palasa		3.050.321.541,00	3.050.321.540,00	(1,00)	90.134.189,00	88.210.081,00	178.344.270,00	3.228.665.810,00
		PERALATAN MESIN	470.608.128,00	470.608.127,00	(1,00)	15.490.917,00	13.566.809,00	29.057.726,00	499.665.853,00
		GEDUNG BANGUNAN	2.579.713.413,00	2.579.713.413,00	-	74.643.272,00	74.643.272,00	149.286.544,00	2.728.999.957,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
50	Kecamatan Mepanga		668.123.687,00	651.998.762,00	(16.124.925,00)	39.504.993,00	38.122.183,00	77.627.176,00	729.625.938,00
		PERALATAN MESIN	296.459.425,00	296.459.425,00	-	23.240.603,00	21.857.794,00	45.098.397,00	341.557.822,00
		GEDUNG BANGUNAN	371.664.262,00	355.539.337,00	(16.124.925,00)	16.264.390,00	16.264.390,00	32.528.779,00	388.068.116,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
51	Kecamatan Bolano Lamburu		7.563.781.089,00	7.564.300.997,00	519.908,00	108.921.233,00	108.829.150,00	217.750.383,00	7.782.051.380,00
		PERALATAN MESIN	444.769.216,00	444.769.216,00	-	10.041.825,00	9.949.740,00	19.991.565,00	464.760.781,00
		GEDUNG BANGUNAN	453.542.456,00	454.062.364,00	519.908,00	14.840.908,00	14.840.908,00	29.681.818,00	483.744.182,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	6.665.469.417,00	6.665.469.417,00	-	84.038.500,00	84.038.500,00	168.077.000,00	6.833.546.417,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
52	Kecamatan Moutonga		10.220.892.051,00	10.220.892.050,00	(1,00)	112.343.513,00	111.718.512,00	224.062.025,00	10.444.954.075,00
		PERALATAN MESIN	477.730.636,00	477.730.636,00	-	14.698.375,00	14.073.375,00	28.771.750,00	506.502.386,00
		GEDUNG BANGUNAN	408.161.415,00	408.161.414,00	(1,00)	25.645.138,00	25.645.137,00	51.290.275,00	459.451.689,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	9.335.000.000,00	9.335.000.000,00	-	72.000.000,00	72.000.000,00	144.000.000,00	9.479.000.000,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
53	Kecamatan Toribuku		738.420.056,00	675.570.002,00	(62.850.054,00)	24.262.753,00	23.471.088,00	47.733.841,00	723.303.843,00
		PERALATAN MESIN	328.707.594,00	276.374.825,00	(52.332.679,00)	8.008.926,00	7.217.261,00	15.226.187,00	291.601.012,00
		GEDUNG BANGUNAN	409.712.552,00	399.195.177,00	(10.517.375,00)	16.253.827,00	16.253.827,00	32.507.654,00	431.702.831,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
54	Kecamatan Taopa		555.538.651,00	543.038.651,00	(12.500.000,00)	24.351.327,00	23.353.410,00	47.704.737,00	590.743.388,00
		PERALATAN MESIN	333.280.075,00	320.780.075,00	(12.500.000,00)	8.566.492,00	7.568.575,00	16.135.067,00	336.915.142,00
		GEDUNG BANGUNAN	221.760.243,00	221.760.243,00	-	15.554.835,00	15.554.835,00	31.109.670,00	252.869.913,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	498.333,00	498.333,00	-	230.000,00	230.000,00	460.000,00	958.333,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
55	Kecamatan Tomini		656.080.544,00	656.143.106,00	62.562,00	37.865.824,00	35.765.405,00	73.631.229,00	729.774.335,00
		PERALATAN MESIN	397.648.899,00	397.648.899,00	-	18.430.404,00	16.329.984,00	34.760.388,00	432.409.287,00
		GEDUNG BANGUNAN	258.431.645,00	258.494.207,00	62.562,00	19.435.420,00	19.435.421,00	38.870.841,00	297.365.048,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
56	Kecamatan Parigi Barat		811.425.821,00	799.267.031,00	(12.158.790,00)	30.924.814,00	28.495.229,00	59.420.043,00	858.687.074,00
		PERALATAN MESIN	500.390.821,00	486.600.821,00	(13.790.000,00)	15.066.876,00	12.637.291,00	27.704.167,00	514.304.988,00
		GEDUNG BANGUNAN	311.035.000,00	312.666.210,00	1.631.210,00	15.857.938,00	15.857.938,00	31.715.876,00	344.382.086,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
57	Kecamatan Balinggi		874.729.813,00	858.460.411,00	(16.269.402,00)	31.481.381,00	30.872.052,00	62.353.433,00	920.813.844,00
		PERALATAN MESIN	440.522.608,00	440.522.609,00	1,00	14.598.249,00	13.813.227,00	28.411.476,00	468.934.085,00
		GEDUNG BANGUNAN	434.207.205,00	417.937.802,00	(16.269.403,00)	16.883.132,00	17.058.825,00	33.941.957,00	451.879.759,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
58	Kecamatan Siniu		924.679.121,00	922.885.996,00	(1.793.125,00)	31.927.735,00	30.498.568,00	62.426.303,00	985.312.299,00
		PERALATAN MESIN	385.217.650,00	385.217.650,00	-	6.668.333,00	5.239.165,00	11.907.498,00	397.125.148,00
		GEDUNG BANGUNAN	537.525.013,00	535.731.888,00	(1.793.125,00)	25.190.652,00	25.190.653,00	50.381.305,00	586.113.193,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	1.936.458,00	1.936.458,00	-	68.750,00	137.500,00	2.073.958,00	2.073.958,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
59	Kecamatan Parigi Utara		721.679.816,00	721.679.817,00	1,00	25.599.286,00	24.973.703,00	50.572.989,00	772.252.806,00
		PERALATAN MESIN	445.583.075,00	445.583.075,00	-	5.857.374,00	5.226.791,00	11.079.165,00	456.662.240,00

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
		GEDUNG BANGUNAN	275.085.629,00	275.085.630,00	1,00	19.280.245,00	19.280.245,00	38.560.490,00	313.646.120,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	1.011.112,00	1.011.112,00	-	466.667,00	466.667,00	933.334,00	1.944.446,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
60	Kecamatan Parigi Tengah		849.940.303,00	849.940.303,00	-	38.630.613,00	33.063.363,00	71.693.976,00	921.634.279,00
		PERALATAN MESIN	450.201.550,00	450.201.550,00	-	18.480.491,00	12.913.241,00	31.393.732,00	481.595.282,00
		GEDUNG BANGUNAN	395.376.482,00	395.376.482,00	-	19.918.497,00	19.918.497,00	39.836.994,00	435.213.476,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	4.362.271,00	4.362.271,00	-	231.625,00	231.625,00	463.250,00	4.825.521,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
61	Kecamatan Onga Malino		602.757.819,00	602.757.817,00	(2,00)	39.721.055,00	39.060.760,00	78.781.815,00	681.539.632,00
		PERALATAN MESIN	354.534.693,00	354.534.691,00	(2,00)	17.250.581,00	16.590.286,00	33.840.867,00	388.375.558,00
		GEDUNG BANGUNAN	248.223.126,00	248.223.126,00	-	22.470.474,00	22.470.474,00	44.940.948,00	293.164.074,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
62	Kecamatan Bolano		611.164.852,00	611.164.851,00	(1,00)	30.171.476,00	29.761.357,00	59.932.833,00	671.097.684,00
		PERALATAN MESIN	351.961.007,00	351.961.007,00	-	8.260.817,00	7.850.698,00	16.111.515,00	368.072.522,00
		GEDUNG BANGUNAN	259.203.845,00	259.203.844,00	(1,00)	21.910.659,00	21.910.659,00	43.821.318,00	303.025.162,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
63	Kecamatan Sidoan		707.707.756,00	708.061.897,00	354.141,00	50.303.260,00	51.380.200,00	101.683.460,00	809.745.357,00
		PERALATAN MESIN	433.857.278,00	433.857.279,00	1,00	22.864.788,00	23.941.728,00	46.806.516,00	480.663.795,00
		GEDUNG BANGUNAN	273.850.478,00	274.204.618,00	354.140,00	27.438.472,00	27.438.472,00	54.876.944,00	329.081.562,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
64	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		7.681.983.976,00	7.674.515.211,00	(7.468.765,00)	283.376.998,00	267.199.957,00	550.576.955,00	8.225.092.166,00
		PERALATAN MESIN	6.962.271.093,00	6.962.271.093,00	-	247.296.175,00	231.119.133,00	478.415.308,00	7.440.686.401,00
		GEDUNG BANGUNAN	499.446.799,00	491.978.034,00	(7.468.765,00)	28.725.973,00	28.725.974,00	57.451.947,00	548.429.981,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	220.266.084,00	220.266.084,00	-	7.354.850,00	7.354.850,00	14.709.700,00	234.975.784,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
65	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		6.224.235.673,26	5.429.865.652,00	(794.370.021,26)	121.364.616,00	121.925.914,00	243.290.530,00	5.673.156.182,00
		PERALATAN MESIN	6.224.235.673,26	5.429.865.652,00	(794.370.021,26)	121.364.616,00	121.925.914,00	243.290.530,00	5.673.156.182,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
66	Badan Pendapatan Daerah		10.037.917.850,74	9.039.214.495,89	(998.703.354,85)	149.521.525,00	173.631.723,00	323.153.248,00	9.362.367.743,89
		PERALATAN MESIN	10.009.909.550,74	9.011.206.195,89	(998.703.354,85)	148.569.325,00	172.679.523,00	321.248.848,00	9.332.455.043,89
		GEDUNG BANGUNAN	16.922.050,00	16.922.050,00	-	584.700,00	584.700,00	1.169.400,00	18.091.450,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	11.086.250,00	11.086.250,00	-	367.500,00	367.500,00	735.000,00	11.821.250,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
67	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM		5.242.540.170,00	5.192.085.246,00	(50.454.924,00)	260.861.061,00	270.293.008,00	531.154.069,00	5.723.239.315,00
		PERALATAN MESIN	3.521.292.259,00	3.521.292.259,00	-	189.771.693,00	198.374.223,00	388.145.916,00	3.909.438.175,00
		GEDUNG BANGUNAN	1.699.604.642,00	1.649.149.720,00	(50.454.922,00)	69.699.234,00	70.528.651,00	140.227.885,00	1.789.377.605,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	21.643.269,00	21.643.267,00	(2,00)	1.390.134,00	1.390.134,00	2.780.268,00	24.243.535,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
68	Kel Kampal		322.392.820,00	202.844.936,00	(119.547.884,00)	17.821.054,00	20.221.690,00	38.042.744,00	240.887.680,00
		PERALATAN MESIN	243.233.098,00	123.685.214,00	(119.547.884,00)	11.652.764,00	14.053.400,00	25.706.164,00	149.391.378,00
		GEDUNG BANGUNAN	79.159.722,00	79.159.722,00	-	6.168.290,00	6.168.290,00	12.336.580,00	91.496.302,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
69	Kel Maesa		371.228.054,00	270.062.669,00	(101.165.385,00)	24.534.254,00	25.632.112,00	50.166.366,00	320.229.035,00
		PERALATAN MESIN	310.621.933,00	208.354.016,00	(102.267.917,00)	17.514.750,00	18.612.608,00	36.127.358,00	244.481.374,00
		GEDUNG BANGUNAN	60.606.121,00	61.708.653,00	1.102.532,00	7.019.504,00	7.019.504,00	14.039.008,00	75.747.661,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
70	Kel Loi		217.591.616,00	217.591.616,00	-	19.096.168,56	20.275.429,56	39.371.598,12	256.963.214,12
		PERALATAN MESIN	217.591.616,00	217.591.616,00	-	12.096.168,00	13.275.429,00	25.371.597,00	242.963.213,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
71	Kel Bantaya		361.338.331,00	359.589.164,00	(1.749.167,00)	22.437.129,00	22.804.701,00	45.241.830,00	404.830.994,00
		PERALATAN MESIN	274.700.574,00	274.700.574,00	-	15.835.429,00	16.203.001,00	32.038.430,00	306.739.004,00
		GEDUNG BANGUNAN	86.637.757,00	84.888.590,00	(1.749.167,00)	6.601.700,00	6.601.700,00	13.203.400,00	98.091.990,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
72	Kel Masigi		332.220.073,00	330.548.406,00	(1.671.667,00)	22.022.021,00	25.431.138,00	47.453.159,00	378.001.565,00
		PERALATAN MESIN	249.432.316,00	249.432.316,00	-	19.121.938,00	34.834.759,00	36.127.358,00	284.267.075,00
		GEDUNG BANGUNAN	82.787.757,00	81.116.090,00	(1.671.667,00)	6.309.200,00	6.309.200,00	12.618.400,00	93.734.490,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
73	Pengelola		16.429.624.834,00	16.401.624.832,00	(28.000.002,00)	507.861.583,72	504.288.034,72	1.012.149.618,44	17.413.774.450,44
		PERALATAN MESIN	8.022.003.590,00	7.994.003.588,00	(28.000.002,00)	107.535.234,00	105.711.681,00	213.246.915,00	8.207.250.503,00
		GEDUNG BANGUNAN	495.234.249,00	495.234.249,00	-	17.769.005,00	17.769.005,00	35.538.010,00	530.772.259,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	7.912.386.995,00	7.912.386.995,00	-	370.298.945,00	368.548.949,00	738.847.894,00	8.651.234.889,00
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	12.258.399,72	12.258.399,72	24.516.799,44	24.516.799,44
			1.508.948.919.761,34	1.490.048.554.920,80	(18.900.364.840,54)	88.724.660.257,96	90.028.934.218,80	178.753.594.476,76	1.668.802.149.397,56

**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
REKAPITULASI BARANG EKTRAKOMPTABEL
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam rupiah)

TAHUN	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
2003	1.843.299.689,05	1.831.706.142,00	91.600.000,00	234.900.000,00	0,00	4.001.505.831,05
2004	262.720.403,00	18.279.000,00	7.500.000,00	44.569.440,00	0,00	333.068.843,00
2005	263.462.960,00	8.250.000,00	11.000.000,00	89.160.000,00	0,00	371.872.960,00
2006	1.514.872.353,00	73.731.945,00	44.714.000,00	28.816.180,00	0,00	1.662.134.478,00
2007	906.332.594,00	52.576.750,00	60.007.352,00	281.881.373,00	0,00	1.300.798.069,00
2008	637.399.707	14.925.000,00	15.218.280,00	24.973.750,00	0,00	692.516.737,00
2009	664.492.418,00	29.670.000,00	9.679.400,00	53.978.800,00	0,00	757.820.618,00
2010	432.364.426,00	22.574.400,00	33.460.120,00	29.143.014,00	0,00	517.541.960,00
2011	135.160.724,44	16.756.000,00	39.000.000,00	40.196.200,00	0,00	231.112.924,44
2012	1.127.693.135,99	-	51.204.000,00	51.646.600,00	0,00	1.230.543.735,99
2013	2.436.068.170,18	15.855.000,00	19.883.350,00	130.819.386,00	0,00	2.602.625.906,18
2014	1.271.685.199,34	60.000.000,00	5.268.000,00	66.562.100,00	0,00	1.403.515.299,34
2015	1.302.315.109,00	-	-	1.017.000,00	0,00	1.303.332.109,00
2016	275.675.950,00	3.500.000,00	10.500.000,00	523.684.793,00	0,00	813.360.743,00
2017	4.821.945.095,00	3.064.000,00	5.742.600,00	7.163.544.821,00	0,00	11.994.296.516,00
2018	3.557.713.249,00	4.900.000,00	4.950.000,00	164.604.222,00	0,00	3.732.167.471,00
2019	4.055.304.374,50	44.220.000,00	15.997.400,00	7.460.369.944,00	0,00	11.575.891.718,50
2020	2.325.467.174,00	637.540.000,00	14.400.000,00	4.905.002.790,00	0,00	7.882.409.964,00
2021	1.114.581.442,00	49.844.000,00	9.276.470,00	1.707.417.990,00	0,00	2.881.119.902,00
2022	907.057.818,00	41.600.000,00	1.890.000,00	1.010.062.311,00	0,00	1.960.610.129,00
2023	897.119.463,14	-	4.641.500,00	4.649.440.605,00	9.000.000,00	5.560.201.568,14
JUMLAH	30.752.731.454,64	2.928.992.237,00	455.932.472,00	28.661.791.319,00	9.000.000,00	62.808.447.482,64

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
AKUMULASI PENYUSUTAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA-KERJASAMA PEMANFAATAN
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PERALATAN MESIN	1.347.100.991,66	1.394.581.108,34	47.480.116,68	194.907.700,00	194.907.700,00	389.815.400,00	1.784.396.508,34
		GEDUNG BANGUNAN	1.243.346.144,79	1.243.346.144,79	-	155.948.925,12	155.948.925,12	311.897.850,24	1.555.243.995,03
		JALAN IRIGASI JARINGAN	233.030.912,59	293.087.779,39	60.056.866,80	30.630.326,50	30.630.326,50	61.260.652,99	354.348.432,38
		JUMLH	2.823.478.049,04	2.931.015.032,52	107.536.983,48	381.486.951,62	381.486.951,62	762.973.903,23	3.693.988.935,75

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Software	Hak Cipta	Kajian	Jumlah
1	Bagian Pemerintahan Umum			894.020.000,00	894.020.000,00
2	Bagian Layanan Pengadaan	94.251.000,00			94.251.000,00
3	Bagian Umum	25.000.000,00			25.000.000,00
4	Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA	2.500.000,00			2.500.000,00
5	Bagian Hubungan Masyarakat	15.000.000,00			15.000.000,00
6	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Anuntaloko	2.270.967.700,00			2.270.967.700,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.500.000,00			19.500.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	262.350.500,00			262.350.500,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	326.006.000,00			326.006.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	535.670.505,00			535.670.505,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	137.381.000,00			137.381.000,00
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		25.000.000,00		25.000.000,00
13	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		4.000.000,00		4.000.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			298.428.000,00	298.428.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.500.000,00			47.500.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115.000.000,00			115.000.000,00
17	Sekretariat Dewan	182.787.500,00			182.787.500,00
18	RSUD Tombolotutu	139.305.000,00			139.305.000,00
19	Buluye Napoae	8.325.000,00			8.325.000,00
20	Perhubungan	79.920.000,00			79.920.000,00
	JUMLAH	4.261.464.205,00	29.000.000,00	1.192.448.000,00	5.482.912.205,00

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	Saldo akhir Amortisasi Tahun 2022	Saldo awal Amortisasi Tahun 2023	Koreksi Amortisasi		Amortisasi Semester I	Amortisasi Semester II	Jumlah amortisasi Tahun 2023	Saldo akhir Amortisasi Tahun 2023
					Tambah	Kurang				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.300.000,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.300.000,00
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software			-	-			-	-
		Kajian			-	-			-	-
2	BLUD RSUD Anuntaloko		834.467.962,00	834.467.962,00	-	-	56.774.193,00	56.774.192,00	113.548.385,00	948.016.347,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	834.467.962,00	834.467.962,00	-	-	56.774.193,00	56.774.192,00	113.548.385,00	948.016.347,00
		Kajian			-	-			-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo		1.160.875,00	1.160.875,00	-	-	3.482.625,00	3.482.625,00	6.965.250,00	8.126.125,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	1.160.875,00	1.160.875,00	-	-	3.482.625,00	3.482.625,00	6.965.250,00	8.126.125,00
		Kajian			-	-			-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoa'e Moutong		34.688,00	34.688,00	-	-	208.125,00	208.125,00	416.250,00	450.938,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	34.688,00	34.688,00	-	-	208.125,00	208.125,00	416.250,00	450.938,00
		Kajian			-	-			-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		113.232.550,00	113.232.550,00	-	-	7.460.700,00	7.460.700,00	14.921.400,00	128.153.950,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software			-	-			-	-
		Kajian	113.232.550,00	113.232.550,00	-	-	7.460.700,00	7.460.700,00	14.921.400,00	128.153.950,00
6	Dinas Perhubungan		333.000,00	333.000,00	-	-	1.998.000,00	1.998.000,00	3.996.000,00	4.329.000,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	333.000,00	333.000,00	-	-	1.998.000,00	1.998.000,00	3.996.000,00	4.329.000,00
		Kajian			-	-			-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.343.750,00	5.343.750,00	-	-	1.187.500,00	1.187.500,00	2.375.000,00	7.718.750,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	5.343.750,00	5.343.750,00	-	-	1.187.500,00	1.187.500,00	2.375.000,00	7.718.750,00
		Kajian			-	-			-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		60.425.617,00	60.425.617,00	-	-	3.434.525,00	3.434.525,00	6.869.050,00	67.294.667,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	60.425.617,00	60.425.617,00	-	-	3.434.525,00	3.434.525,00	6.869.050,00	67.294.667,00
		Kajian			-	-			-	-
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olaharaga		7.395.833,00	7.395.833,00	-	-	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	8.645.833,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta	7.395.833,00	7.395.833,00	-	-	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	8.645.833,00
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software			-	-			-	-
		Kajian			-	-			-	-

No	OPD	Uraian	Saldo akhir Amortisasi Tahun 2022	Saldo awal Amortisasi Tahun 2023	Koreksi Amortisasi		Amortisasi Semester I	Amortisasi Semester II	Jumlah amortisasi Tahun 2023	Saldo akhir Amortisasi Tahun 2023
					Tambah	Kurang				
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		9.181.250,00	9.181.250,00	-	-	487.500,00	487.500,00	975.000,00	10.156.250,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	9.181.250,00	9.181.250,00	-	-	487.500,00	487.500,00	975.000,00	10.156.250,00
		Kajian			-	-			-	-
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.958.333,00	2.958.333,00	-	-	2.875.000,00	2.875.000,00	5.750.000,00	8.708.333,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	2.958.333,00	2.958.333,00	-	-	2.875.000,00	2.875.000,00	5.750.000,00	8.708.333,00
		Kajian			-	-			-	-
12	Bagian ULP		16.630.395,00	16.630.395,00	-	-	2.356.275,00	2.356.275,00	4.712.550,00	21.342.945,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	16.630.395,00	16.630.395,00	-	-	2.356.275,00	2.356.275,00	4.712.550,00	21.342.945,00
		Kajian			-	-			-	-
13	Sekwan/DPRD		5.765.886,00	5.765.886,00	-	-	4.569.687,00	4.569.688,00	9.139.375,00	14.905.261,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	5.765.886,00	5.765.886,00	-	-	4.569.687,00	4.569.688,00	9.139.375,00	14.905.261,00
		Kajian			-	-			-	-
14	Bagian Hubungan Masyarakat		812.500,00	812.500,00	-	-	375.000,00	375.000,00	750.000,00	1.562.500,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	812.500,00	812.500,00	-	-	375.000,00	375.000,00	750.000,00	1.562.500,00
		Kajian			-	-			-	-
15	Bagian Umum		3.854.167,00	3.854.167,00	-	-	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	5.104.167,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	3.854.167,00	3.854.167,00	-	-	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	5.104.167,00
		Kajian			-	-			-	-
16	Bagian Pemerintahan Umum		361.333.083,00	361.333.083,00	-	-	22.350.500,00	22.350.500,00	44.701.000,00	406.034.083,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	361.333.083,00	361.333.083,00	-	-	22.350.500,00	22.350.500,00	44.701.000,00	406.034.083,00
		Kajian			-	-			-	-
17	Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA		1.187.500,00	1.187.500,00	-	-	62.500,00	62.500,00	125.000,00	1.312.500,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	1.187.500,00	1.187.500,00	-	-	62.500,00	62.500,00	125.000,00	1.312.500,00
		Kajian			-	-			-	-
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		181.962.625,00	181.962.625,00	-	-	13.391.763,00	13.391.762,00	26.783.525,00	208.746.150,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	181.962.625,00	181.962.625,00	-	-	13.391.763,00	13.391.762,00	26.783.525,00	208.746.150,00
		Kajian			-	-			-	-
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		91.961.059,00	91.961.059,00	-	-	8.150.150,00	8.150.150,00	16.300.300,00	108.261.359,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	91.961.059,00	91.961.059,00	-	-	8.150.150,00	8.150.150,00	16.300.300,00	108.261.359,00
		Kajian			-	-			-	-
20	Badan Pendapatan Daerah		110.450.852,00	110.450.852,00	-	-	6.558.763,00	6.558.762,00	13.117.525,00	123.568.377,00
		Lisensi dan Frenchise			-	-			-	-
		Hak Cipta			-	-			-	-
		Hak Paten			-	-			-	-
		Software	110.450.852,00	110.450.852,00	-	-	6.558.763,00	6.558.762,00	13.117.525,00	123.568.377,00
		Kajian			-	-			-	-
			1.809.591.925,00	1.809.591.925,00	-	-	137.072.806,00	137.072.804,00	274.145.610,00	2.083.737.535,00

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT
TAHUN 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		9.918.445.856,59	11.621.349.951,16	1.702.904.094,57	359.831.006,89	14.749.641,00	374.580.647,89	11.995.930.599,05
		PERALATAN MESIN	4.879.874.706,25	5.043.579.003,16	163.704.296,91	343.740.488,89	0,00	343.740.488,89	5.387.319.492,05
		GEDUNG BANGUNAN	5.038.571.150,34	6.577.770.948,00	1.539.199.797,66	16.090.518,00	14.749.641,00	30.840.159,00	6.608.611.107,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan		27.063.103.954,43	27.063.103.954,62	0,19	69.111.461,51	34.726.598,38	103.838.059,89	27.166.942.014,51
		PERALATAN MESIN	26.957.212.874,48	26.957.212.874,67	0,19	65.975.681,51	31.590.818,38	97.566.499,89	27.054.779.374,56
		GEDUNG BANGUNAN	105.891.079,95	105.891.079,95	-	3.135.780,00	3.135.780,00	6.271.560,00	112.162.639,95
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
3	BLUD RSUD Anuntaloko		8.612.478.770,68	19.090.324.853,67	10.477.846.082,99	419.100,00	116.658,64	535.758,64	19.090.860.612,31
		PERALATAN MESIN	8.612.478.770,68	19.090.324.853,67	10.477.846.082,99	419.100,00	116.658,64	535.758,64	19.090.860.612,31
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
4	RSUD Raja Tombolotutu		-	385.569.374,99	385.569.374,99	1.146.354,17	1.146.354,17	2.292.708,34	387.862.083,33
		PERALATAN MESIN	-	385.569.374,99	385.569.374,99	1.146.354,17	1.146.354,17	2.292.708,34	387.862.083,33
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoa'e Moutong		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		27.674.733.622,59	27.862.987.722,56	188.254.099,97	30.428.160,00	397.677.714,33	428.105.874,33	28.291.093.596,89
		PERALATAN MESIN	13.311.916.818,73	13.416.991.818,72	105.074.999,99	1.455.600,00	0,01	1.455.600,01	13.418.447.418,73
		GEDUNG BANGUNAN	382.382.094,94	382.382.094,94	-	28.972.560,00	28.972.560,00	57.945.120,00	440.327.214,94
		JALAN IRIGASI JARINGAN	13.980.434.708,92	14.063.613.808,90	83.179.099,98	0,00	368.705.154,32	368.705.154,32	14.432.318.963,22
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		-	221.257.808,33	221.257.808,33	-	916.666,67	916.666,67	222.174.475,00
		PERALATAN MESIN	-	221.257.808,33	221.257.808,33	-	916.666,67	916.666,67	222.174.475,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		285.534.999,98	318.478.999,98	32.944.000,00	-	-	-	318.478.999,98
		PERALATAN MESIN	285.534.999,98	318.478.999,98	32.944.000,00	-	-	-	318.478.999,98
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
9	Satuan Polisi Pamong Praja		200.217.000,00	2.054.002.778,30	1.853.785.778,30	5.517.200,00	-	5.517.200,00	2.059.519.978,30
		PERALATAN MESIN	200.217.000,00	2.054.002.778,30	1.853.785.778,30	5.517.200,00	-	5.517.200,00	2.059.519.978,30
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		7.308.583,32	7.308.583,32	-	797.300,00	797.300,00	1.594.600,00	8.903.183,32
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	7.308.583,32	7.308.583,32	-	797.300,00	797.300,00	1.594.600,00	8.903.183,32
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Sosial		190.143.049,98	190.143.049,98	-	3.989.700,00	3.989.700,00	7.979.400,00	198.122.449,98
		PERALATAN MESIN	78.431.450,00	78.431.450,00	-	-	-	-	78.431.450,00
		GEDUNG BANGUNAN	111.711.599,98	111.711.599,98	-	3.989.700,00	3.989.700,00	7.979.400,00	119.690.999,98
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2.780.469.913,13	3.587.093.163,09	806.623.249,96	98.263.789,92	98.263.789,92	196.527.579,84	3.783.620.742,93
		PERALATAN MESIN	147.979.999,98	954.603.249,94	806.623.249,96	2.724.000,00	2.724.000,00	5.448.000,00	960.051.249,94
		GEDUNG BANGUNAN	2.632.489.913,15	2.632.489.913,15	-	95.539.789,92	95.539.789,92	191.079.579,84	2.823.569.492,99
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
		PERALATAN MESIN	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketahanan Pangan		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Lingkungan Hidup		137.552.668,98	375.574.455,64	238.021.786,66	1.001.458,34	-	1.001.458,34	376.575.913,98
		PERALATAN MESIN	137.552.668,98	375.574.455,64	238.021.786,66	1.001.458,34	-	1.001.458,34	376.575.913,98
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		274.149.999,97	375.271.916,11	101.121.916,14	5.712.397,20	-	5.712.397,20	380.984.313,31
		PERALATAN MESIN	274.149.999,97	375.271.916,11	101.121.916,14	5.712.397,20	-	5.712.397,20	380.984.313,31
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		79.152.615,00	313.652.614,99	234.499.999,99	1.245.330,00	1.245.330,00	2.490.660,00	316.143.274,99
		PERALATAN MESIN	59.850.000,00	294.349.999,99	234.499.999,99	-	-	-	294.349.999,99
		GEDUNG BANGUNAN	19.302.615,00	19.302.615,00	-	1.245.330,00	1.245.330,00	2.490.660,00	21.793.275,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perhubungan		96.059.974,97	4.841.285.876,02	4.745.225.901,05	97.777.397,49	63.709.097,47	161.486.494,96	5.002.772.370,98
		PERALATAN MESIN	-	3.586.178.311,79	3.586.178.311,79	34.068.300,00	(0,02)	34.068.299,98	3.620.246.611,77
		GEDUNG BANGUNAN	90.961.016,64	465.997.646,61	375.036.629,97	23.135.935,00	23.135.935,00	46.271.870,00	512.269.516,61
		JALAN IRIGASI JARINGAN	5.098.958,33	789.109.917,62	784.010.959,29	40.573.162,49	40.573.162,49	81.146.324,98	870.256.242,60
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Komunikasi dan Informatika		105.000.000,00	1.137.220.740,00	1.032.220.740,00	-	14.787.499,99	14.787.499,99	1.152.008.239,99
		PERALATAN MESIN	105.000.000,00	1.137.220.740,00	1.032.220.740,00	-	14.787.499,99	14.787.499,99	1.152.008.239,99
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		719.873.700,00	814.270.050,00	94.396.350,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	814.870.050,00
		PERALATAN MESIN	715.023.700,00	809.420.050,00	94.396.350,00	-	-	-	809.420.050,00
		GEDUNG BANGUNAN	4.850.000,00	4.850.000,00	-	300.000,00	300.000,00	600.000,00	5.450.000,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu		141.174.400,00	322.719.400,00	181.545.000,00	-	-	-	322.719.400,00
		PERALATAN MESIN	141.174.400,00	322.719.400,00	181.545.000,00	-	-	-	322.719.400,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		366.049.999,98	865.159.574,97	499.109.574,99	219.800,03	-	219.800,03	865.379.375,00
		PERALATAN MESIN	366.049.999,98	865.159.574,97	499.109.574,99	219.800,03	-	219.800,03	865.379.375,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kelautan dan Perikanan		6.810.999.494,83	6.797.249.494,83	(13.750.000,00)	945.700,00	945.700,00	1.891.400,00	6.799.140.894,83
		PERALATAN MESIN	6.783.719.894,84	6.769.969.894,84	(13.750.000,00)	-	-	-	6.769.969.894,84
		GEDUNG BANGUNAN	27.279.599,99	27.279.599,99	-	945.700,00	945.700,00	1.891.400,00	29.170.999,99
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahragaga		616.141.509,94	615.175.929,94	(965.580,00)	3.893.140,00	3.474.500,00	7.367.640,00	622.543.569,94
		PERALATAN MESIN	533.734.929,95	533.734.929,95	-	418.640,00	-	534.153.569,95	534.153.569,95
		GEDUNG BANGUNAN	82.406.579,99	81.440.999,99	(965.580,00)	3.474.500,00	3.474.500,00	6.949.000,00	88.389.999,99
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan		57.900.000,00	1.152.139.999,97	1.094.239.999,97	-	-	-	1.152.139.999,97
		PERALATAN MESIN	57.900.000,00	1.152.139.999,97	1.094.239.999,97	-	-	-	1.152.139.999,97
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		139.999.999,99	139.999.999,99	-	0,01	-	0,01	140.000.000,00
		PERALATAN MESIN	139.999.999,99	139.999.999,99	-	0,01	-	0,01	140.000.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		361.731.749,94	1.363.087.324,90	1.001.355.574,96	19.563.010,00	19.942.301,67	39.505.311,67	1.402.592.636,57
		PERALATAN MESIN	41.793.999,99	1.043.149.574,95	1.001.355.574,96	500.000,00	879.291,67	1.379.291,67	1.044.528.866,62
		GEDUNG BANGUNAN	319.937.749,95	319.937.749,95	-	19.063.010,00	19.063.010,00	38.126.020,00	358.063.769,95
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
28	Sekretariat Daerah		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
29	Bagian Organisasi		42.810.000,00	332.886.282,00	290.076.282,00	-	-	-	332.886.282,00
		PERALATAN MESIN	42.810.000,00	332.886.282,00	290.076.282,00	-	-	-	332.886.282,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
30	Bagian ULP		-	6.550.000,00	6.550.000,00	-	50.000,00	50.000,00	6.600.000,00
		PERALATAN MESIN	-	6.550.000,00	6.550.000,00	-	50.000,00	50.000,00	6.600.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
31	Bagian Umum		5.978.226.683,86	6.941.526.683,95	963.300.000,09	33.431.428,54	33.431.428,54	66.862.857,08	7.008.389.541,03
		PERALATAN MESIN	5.896.146.683,86	6.859.446.683,95	963.300.000,09	31.271.428,54	31.271.428,54	62.542.857,08	6.921.989.541,03
		GEDUNG BANGUNAN	82.080.000,00	82.080.000,00	-	2.160.000,00	2.160.000,00	4.320.000,00	86.400.000,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
32	Bagian Humas		296.066.000,00	1.961.729.499,98	1.665.663.499,98	-	2.720.000,01	2.720.000,01	1.964.449.499,99
		PERALATAN MESIN	296.066.000,00	1.961.729.499,98	1.665.663.499,98	-	2.720.000,01	2.720.000,01	1.964.449.499,99
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
33	Bagian Pemerintahan Umum		64.967.720,38	64.967.720,38	-	4.905.569,50	4.905.569,50	9.811.139,00	74.778.859,38
		PERALATAN MESIN	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	44.967.720,38	44.967.720,38	-	4.905.569,50	4.905.569,50	9.811.139,00	54.778.859,38
		JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
34	Bagian Ekonomi		40.470.000,00	40.470.000,00	-	-	-	-	40.470.000,00
		PERALATAN MESIN	40.470.000,00	40.470.000,00	-	-	-	-	40.470.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
35	Bagian Kumdang		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
36	Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA		49.031.224,00	49.031.224,00	-	-	-	-	49.031.224,00
		PERALATAN MESIN	49.031.224,00	49.031.224,00	-	-	-	-	49.031.224,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
37	Bagian Kesra		1.538.663.439,88	1.538.558.439,88	(105.000,00)	42.925.500,00	42.925.500,00	85.851.000,00	1.624.409.439,88
		PERALATAN MESIN	196.795.000,00	196.795.000,00	-	-	-	-	196.795.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	1.341.868.439,88	1.341.763.439,88	(105.000,00)	42.925.500,00	42.925.500,00	85.851.000,00	1.427.614.439,88
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
38	Sekretariat Dewan		936.734.198,72	2.577.167.382,84	1.640.433.184,12	112.054.017,51	-	112.054.017,51	2.689.221.400,35
		PERALATAN MESIN	936.734.198,72	2.577.167.382,84	1.640.433.184,12	112.054.017,51	-	112.054.017,51	2.689.221.400,35
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
39	Inspektorat Daerah		4.577.329,16	4.577.329,16	-	499.345,02	499.345,02	998.690,04	5.576.019,20
		PERALATAN MESIN	4.577.329,16	-	(4.577.329,16)	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	4.577.329,16	4.577.329,16	499.345,02	499.345,02	998.690,04	5.576.019,20
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
40	Kecamatan Sausu		1.485.122.666,62	1.489.613.333,27	4.490.666,65	2.245.333,34	2.212.000,00	4.457.333,34	1.494.070.666,61
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	1.485.122.666,62	1.489.613.333,27	4.490.666,65	2.245.333,34	2.212.000,00	4.457.333,34	1.494.070.666,61
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Torue		3.375.000,00	166.595.339,98	163.220.339,98	3.347.083,34	3.347.083,34	6.694.166,68	173.289.506,66
		PERALATAN MESIN	3.375.000,00	162.995.339,98	159.620.339,98	3.197.083,34	3.197.083,34	6.394.166,68	169.389.506,66
		GEDUNG BANGUNAN	-	3.600.000,00	3.600.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	3.900.000,00
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Parigi Selatan		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parigi		68.440.983,32	68.440.983,32	-	216.666,68	216.666,68	433.333,35	68.874.316,67
		PERALATAN MESIN	68.440.983,32	68.440.983,32	-	216.666,68	216.666,68	433.333,35	68.874.316,67
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Ampibabo		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Kasimbar		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Tinombo Selatan		1.099.999,98	116.099.999,98	115.000.000,00	0,02	-	0,02	116.100.000,00
		PERALATAN MESIN	1.099.999,98	116.099.999,98	115.000.000,00	0,02	-	0,02	116.100.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
47	Kecamatan Tinombo		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
48	Kecamatan Palasa		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
49	Kecamatan Mepanga		105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	-	-	105.000.000,00
		PERALATAN MESIN	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	-	-	105.000.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
50	Kecamatan Bolano Lambunu		2.395.065.999,92	2.407.779.999,92	12.714.000,00	6.544.500,00	6.544.500,00	13.089.000,00	2.420.868.999,92
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	2.395.065.999,92	2.407.779.999,92	12.714.000,00	6.544.500,00	6.544.500,00	13.089.000,00	2.420.868.999,92
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
51	Kecamatan Moutong		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
52	Kecamatan Toribulu		-	52.306.291,66	52.306.291,66	158.333,34	158.333,34	316.666,67	52.622.958,33
		PERALATAN MESIN	-	52.306.291,66	52.306.291,66	158.333,34	158.333,34	316.666,67	52.622.958,33
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
53	Kecamatan Taopa		-	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	12.500.000,00
		PERALATAN MESIN	-	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	12.500.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
54	Kecamatan Tomini	PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
55	Kecamatan Parigi Barat		19.833.333,33	33.623.333,32	13.789.999,99	216.666,67	216.666,67	433.333,33	34.056.666,65
		PERALATAN MESIN	19.833.333,33	33.623.333,32	13.789.999,99	216.666,67	216.666,67	433.333,33	34.056.666,65
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
56	Kecamatan Balinggi	PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
57	Kecamatan Siniu	PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
58	Kecamatan Parigi Utara		520.000,00	520.000,00	-	-	-	-	520.000,00
		PERALATAN MESIN	520.000,00	520.000,00	-	-	-	-	520.000,00
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
59	Kecamatan Parigi Tengah	PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
60	Kecamatan Onopa Malino	PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
61	Kecamatan Bolano	PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
62	Kecamatan Sidoan	PERALATAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
63	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		1.201.761.799,96	1.201.761.799,96	-	-	-	-	1.201.761.799,96
		PERALATAN MESIN	1.201.761.799,96	1.201.761.799,96	-	-	-	-	1.201.761.799,96
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
64	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		959.276.749,88	1.753.338.955,74	794.062.205,86	3.693.800,00	-	3.693.800,00	1.757.032.755,74
		PERALATAN MESIN	959.276.749,88	1.753.338.955,74	794.062.205,86	3.693.800,00	-	3.693.800,00	1.757.032.755,74
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA		-	-			-	-
65	Badan Pendapatan Daerah		355.127.399,98	1.342.514.519,34	987.387.119,36	2.300.000,00	250.000,00	2.550.000,00	1.345.064.519,34
		PERALATAN MESIN	351.127.399,99	1.338.014.519,35	986.887.119,36	2.050.000,00	-	2.050.000,00	1.340.064.519,35
		GEDUNG BANGUNAN	3.999.999,99	4.499.999,99	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	4.999.999,99
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
66	Badan Kepegawaian, dan Pemoebangan SDM		658.571.333,31	658.571.333,31	-	47.666,67	(0,00)	47.666,67	658.618.999,98
		PERALATAN MESIN	658.571.333,31	658.571.333,31	-	47.666,67	(0,00)	47.666,67	658.618.999,98
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-

No	OPD	KIB	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Saldo awal Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Semester I	Beban Semester II	Jumlah Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
67	Kel Kampal		-	119.524.033,31	119.524.033,31	143.100,00	143.100,00	286.200,00	119.810.233,31
		PERALATAN MESIN		119.524.033,31	119.524.033,31	143.100,00	143.100,00	286.200,00	119.810.233,31
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
68	Kel Maesa		-	101.892.916,66	101.892.916,66	1.354.166,67	1.354.166,67	2.708.333,34	104.601.250,00
		PERALATAN MESIN		101.892.916,66	101.892.916,66	1.354.166,67	1.354.166,67	2.708.333,34	104.601.250,00
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
69	Kel Loji		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN			-			-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
70	Kel Bantaya		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN			-			-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
71	Kel Masigi		-	-	-	-	-	-	-
		PERALATAN MESIN			-			-	-
		GEDUNG BANGUNAN			-			-	-
		JALAN IRIGASI JARINGAN			-			-	-
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
72	Pengelola		266.803.849,99	282.959.599,99	16.155.750,00	10.469.875,02	10.469.875,02	20.939.750,04	303.899.350,03
		PERALATAN MESIN	10.331.000,00	10.331.000,00	-	-	-	-	10.331.000,00
		GEDUNG BANGUNAN	71.759.999,99	71.759.999,99	-	2.392.000,02	2.392.000,02	4.784.000,04	76.544.000,03
		JALAN IRIGASI JARINGAN	184.712.850,00	200.868.600,00	16.155.750,00	8.077.875,00	8.077.875,00	16.155.750,00	217.024.350,00
		ASET TETAP LAINNYA			-			-	-
			103.110.117.576,59	134.945.284.619,31	31.835.167.042,72	924.715.357,86	766.233.087,01	1.690.948.444,87	136.636.233.064,19

**REKAPITULASI ANGSURAN PINJAMAN LUAR NEGERI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

(dalam rupiah)								
No	BA REKON		PEMBAYARAN					
	No	Tanggal	No SP2D	Tgl SP2D	Pokok	No SP2D	Tgl SP2D	Non Pokok
JUMLAH PENARIKAN PEMDA					27.994.229.001,00			22.846.919.580,66
ANGSURAN PEMDA								
1	35/PB.4.1/BRI/0408	14-Apr-08			0,00	6512	27-Nov-08	635.701.985,75
2	112/PB.4.1/PT BRI/1108	21-22 Nop 08			0,00	2371	03-Jun-09	457.000.000,00
3	130/PB.4.1/I/0309	23-25 Mar 09			0,00	8816	30-Dec-09	720.277.678,00
4	595/PB.4.1/I/1009	07-Okt-09			0,00	188	10-Mar-10	808.989.153,48
5	266/PB.4.1/I/3/2010	17-19 Mar 10			0,00	4912	22-Sep-10	1.117.399.646,44
6	1002/PB.4.1/2010	22-24 Sept 10			0,00	80	17-Feb-11	2.331.519.553,05
TOTAL BAYAR					-			6.070.888.016,72
SISA ANGSURAN PEMDA 2010					27.994.229.001,00			16.776.031.563,94
7	451/PB.4.1/I/2011	17-Mar-11	1287	14-Apr-11	933.140.966,70	1287	14-Apr-11	1.770.566.747,35
8	1206/PB.4.1/9/2011	30-Sep-11	6794	14-Okt-11	933.140.966,70	6794	14-Okt-11	1.219.030.536,10
TOTAL BAYAR					1.866.281.933,40			2.989.597.283,45
SISA ANGSURAN PEMDA 2011					26.127.947.067,60			13.786.434.280,49
9	23/PB.4.1/2/2012	17-Feb-12	1680	13-Apr-12	933.140.966,70	1680	13-Apr-12	1.557.966.165,70
10	423/PB.4.1/9/2012	21-Sep-12	8691	15-Okt-12	933.140.966,70	8692	15-Okt-12	1.061.752.126,70
TOTAL BAYAR					1.866.281.933,40			2.619.718.292,40
SISA ANGSURAN PEMDA 2012					24.261.665.134,20			11.166.715.988,09
11	104/PB.4.1/3/2013	21-Mar-13	1903	09-Apr-13	1.516.666.666,50	1893	09-Apr-13	999.647.997,05
12	436/PB.4.1/2013	27-Agu-13	8344	11-Okt-13	4.550.769.466,70	8343	11-Okt-13	942.306.332,35
TOTAL BAYAR					6.067.436.133,20			1.941.954.329,40
SISA ANGSURAN PEMDA 2013					18.194.229.001,00			9.224.761.658,69
13	451/PB.4.1/2014	27-Mar-14	1866	14-Apr-14	1.400.000.000,00	1864	14-Apr-14	735.031.911,35
14	1133/PB.4.1/2014	27-Agu-14	9281	13-Okt-14	1.400.000.000,00	9280	13-Okt-14	682.111.606,06
TOTAL BAYAR					2.800.000.000,00			1.417.143.517,41
SISA ANGSURAN PEMDA 2014					15.394.229.001,00			7.807.618.141,28
15	149-PRG/PMK/4/2015	13-Apr-15	2118	14-Apr-15	1.283.333.333,50	2117	14-Apr-15	621.832.775,80
16	S-748/WBP.12/K.10/2015	14-Sep-15	11536	13-Okt-15	1.283.333.333,50	11537	13-Okt-15	575.653.988,75
TOTAL BAYAR					2.566.666.667,00			1.197.486.764,55
SISA ANGSURAN PEMDA 2015					12.827.562.334,00			6.610.131.376,73
17	018/WBP.26/BD.03/2016	11-Jan-16	1981	13-Apr-16	1.166.666.666,50	1980	13-Apr-16	534.553.028,15
18	061/WBP.26/BD.03/2016	27-Jul-16	13220	11-Okt-16	1.166.666.666,50	13221	11-Okt-16	503.206.517,70
TOTAL BAYAR 2016					2.333.333.333,00			1.037.759.545,85
SISA ANGSURAN PEMDA 2016					10.494.229.001,00			5.572.371.830,88
19	04/WBP.26/BD.03/2017	09-Jan-17	1265	06-Apr-17	1.050.000.000,00	1264	06-Apr-17	468.488.618,18
20	003/WBP.26/BD.03/2017	19-Jul-17	12748	11-Okt-17	1.050.000.000,00	12748	10-Okt-17	434.017.413,93
TOTAL BAYAR 2017					2.100.000.000,00			902.506.032,11
SISA ANGSURAN PEMDA 2017					8.394.229.001,00			4.669.865.798,77
21	01/WBP.26/BD.03/2018	09-Jan-18	02168/SP2D/LS/4.03.03/2018	13-Apr-18	933.333.333,50	02169/SP2D/LS/4.03.03/2018	12-Apr-18	384.908.043,00
22	011/WBP.26/BD.03/2018	10-Jul-18	13767/SP2D/LS/4.03.03/2018	08-Okt-18	933.333.333,50	13768/SP2D/LS/4.03.03/2018	08-Okt-18	350.817.531,70
TOTAL BAYAR 2018					1.866.666.667,00			735.725.574,70
SISA ANGSURAN PEMDA 2018					6.527.562.334,00			3.934.140.224,07
23	02/WBP.27/BD.03/2019	16-Jan-19	02334/SP2D/LS/4.03.03/2019	11-Apr-19	816.666.666,50	02332/SP2D/LS/4.03.03/2019	11-Apr-19	334.954.608,32
24	026/WBP.27/BD.03/2019	29-Jul-19	14135/SP2D/LS/4.03.03/2019	11-Okt-19	816.666.666,50	14131/SP2D/LS/4.03.03/2019	11-Okt-19	304.528.752,39
TOTAL BAYAR 2019					1.633.333.333,00			639.483.360,71
SISA ANGSURAN PEMDA 2019					4.894.229.001,00			3.294.656.863,36
25	BA-3/WBP.27/BD.02/2020	16-Jan-20	02255/SP2D/LS/4.03.03/2020	13-Apr-20	700.000.000,00	02256/SP2D/LS/4.03.03/2020	13-Apr-20	254.263.353,65
26	BA-3/WBP.27 /2020	29-Jul-20	12776/SP2D/LS/4.03.03/2020	14-Okt-20	700.000.000,00	12778/SP2D/LS/4.03.03/2020	14-Okt-20	203.612.342,04
TOTAL BAYAR 2020					1.400.000.000,00			457.875.695,69
SISA ANGSURAN PEMDA 2020					3.494.229.001,00			2.836.781.167,67
27	BAR-01/WBP.27/2021	18-Jan-21	00678/SP2D/4.04.01.01/2021	14-Apr-21	583.333.333,50	00680/SP2D/4.04.01.01/2021	14-Apr-21	117.827.343,15
28	BAR-3/WBP.27 /2021	14-Jul-21	12024/SP2D/4.04.01.01/2021	11-Okt-21	583.333.333,50	11899/SP2D/4.04.01.01/2021	11-Okt-21	97.808.520,00
TOTAL BAYAR 2021					1.166.666.667,00			215.635.863,15
SISA ANGSURAN PEMDA 2021					2.327.562.334,00			2.621.145.304,52
29	BAR-03/WBP.27/2022	12-Jan-22	02019/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/2022	12-Apr-22	466.666.666,50	02017/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/2022	12-Apr-22	89.228.541,61
30	BAR-36/WBP.27 /2022	13-Jul-21	18905/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/2022	10-Okt-22	466.666.666,50	18906/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/2022	10-Okt-22	78.953.150,93
TOTAL BAYAR 2022					933.333.333,00			168.181.692,54
SISA ANGSURAN PEMDA 2022					1.394.229.001,00			2.452.963.611,98
31	BAR-05/WBP.27/2023	12-Jan-23	18.09/04.0/1/5-02.0-00.0-00.1.000/P/01/04/2023	06-Apr-23	350.000.000,00	18.09/04.0/1/5-02.0-00.0-00.1.000/P/01/04/2023	06-Apr-23	77.313.096,00
32	BAR-22/WBP.27/2023	12-Jul-23	18.09/04.0/1/5-02.0-00.0-00.1.000/P/04/10/2023	06-Okt-23	350.000.000,00	18.09/04.0/1/5-02.0-00.0-00.1.000/P/04/10/2023	06-Okt-23	81.059.993,00
TOTAL BAYAR 2023					700.000.000,00			158.373.089,00
SISA ANGSURAN PEMDA 2023					694.229.001,00			2.294.590.522,98

Pajak Reklame

(dalam rupiah)

Rincian Sumber Pendapatan	Jangka Waktu Sewa	No. Perjanjian/BA/MOU	Waktu sewa dalam bln	Biaya Sewa	Biaya Sewa per Bulan	Bulan telah kadaluarsa s/d 2022	Pendapatan tahun berjalan/ LO - 2023		Pendapatan Diterima Dimuka 2024-202...		Keterangan
							BLN	Nilai	BLN	Nilai	
1	2	3	4	5	6 =5/4	7	8	9=6 x 8	10= 4-7-8	11= 6 x 10	12
PT Mitra Media Sejahtera	01 Feb 2022 s/d 31 Jan 2023	023/SKPD/04/2022	12	2.403.000,00	200.250,00	11	1	200.250,00	0	-	Terima Tahun 2022
CV Agung	27 Juli 2022 s/d 27 Jul 2023	041/SKPD/04/2021	12	11.340.000,00	945.000,00	5	7	6.615.000,00	0	-	Terima Tahun 2022
PT Indomobil Finance Indonesia	1 Okt 2022 s/d 30 Sep 2023	056/SKPD/04/2021	12	1.560.000,00	130.000,00	3	9	1.170.000,00	0	-	Terima Tahun 2022
PT Daya Indah Yasa	16 Agust 2022 s/d 15 Agust 2023	057/SKPD/04/2021	12	5.115.554,55	426.296,21	4	8	3.410.369,70	0	-	Terima Tahun 2022
PT Daya Indah Yasa	16 Agust 2022 s/d 15 Agust 2023	067/SKPD/04/2021	12	413.400,00	34.450,00	4	8	275.600,00	0	-	Terima Tahun 2022
PT Daya Indah Yasa	16 Agust 2022 s/d 15 Agust 2023	066/SKPD/04/2021	12	4.051.353,60	337.612,80	4	8	2.700.902,40	0	-	Terima Tahun 2022
PT Daya Indah Yasa	16 Agust 2022 s/d 15 Agust 2023	086/SKPD/04/2021	12	160.231,50	13.352,63	4	8	106.821,00	0	-	Terima Tahun 2022
PT Daya Indah Yasa	16 Agust 2022 s/d 15 Agust 2023	090/SKPD/04/2021	12	381.466,80	31.788,90	4	8	254.311,20	0	-	Terima Tahun 2022
CV Agra Mitra/Vendor PT Gudang Garam TBK	20 Sep 2022 s/d 19 Sep 2023	096/SKPD/04/2021	12	1.029.600,00	85.800,00	3	9	772.200,00	0	-	Terima Tahun 2022
PT Gajah Tunggal TBK	13 Okt 2022 s/d 12 Okt 2023	096/SKPD/04/2021	12	1.533.168,00	127.764,00	2	10	1.277.640,00	0	-	Terima Tahun 2022
PT Gajah Tunggal TBK	13 Okt 2022 s/d 12 Okt 2023	096/SKPD/04/2021	12	3.912.300,00	326.025,00	2	10	3.260.250,00	0	-	Terima Tahun 2022
CV Smart Media Indonesia	01 Apr 2023 s/d 31 Mar 2024	001476/SSPD/04 2023 dan 000048/SKPD/04/2023	12	9.828.000,00	819.000,00	0	9	7.371.000,00	3	2.457.000,00	Terima Tahun 2023
CV Agung	27 Juli 2023 s/d 27 Jul 2024	002135/SSPD/04 2023 dan 000076/SKPD/04/2023	12	11.340.000,00	945.000,00	0	5	4.725.000,00	7	6.615.000,00	Terima Tahun 2023
PT RMP Percetakan dan Advertesing	15 Mar 2023 s/d 14 Mar 2024	002138/SSPD/04 2023 dan 000086/SKPD/04/2023	12	1.041.300,00	86.775,00	0	9	780.975,00	3	260.325,00	Terima Tahun 2023
CV Kapital Media Perkasa	01 Agust 2023 s/d 31 Juli 2024	002185/SSPD/04 2023 dan 000177/SKPD/04/2023	12	3.390.000,00	282.500,00	0	5	1.412.500,00	7	1.977.500,00	Terima Tahun 2023
PT Indomobil Finance Indonesia	01 Okt 2023 s/d 30 Sep 2023	002198/SSPD/04 2023 dan 000179/SKPD/04/2023	12	1.560.000,00	130.000,00	0	3	390.000,00	9	1.170.000,00	Terima Tahun 2023
CV Bintang Sinar Jaya	24 Okt 2023 s/d 24 Jan 2024	002197/SSPD/04 2023 dan 000210/SKPD/04/2023	3	190.125,00	63.375,00	0	2	126.750,00	1	63.375,00	Terima Tahun 2023
		Jumlah tahun 2023		31.900.074,45				20.043.344,30		12.543.200,00	
		Jumlah s/d tahun 2023						20.043.344,30		12.543.200,00	